

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III 2025

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

ditjenperkeretaapian @ditjenperkeretaapian djka.kemenhub.go.id

KATA PENGANTAR

Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai regulator melaksanakan fungsi pembinaan meliputi pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perkeretaapian serta melaksanakan pembangunan infrastruktur perkeretaapian sesuai prioritas pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Penyelenggaraan perkeretaapian dilaksanakan dengan tujuan mewujudkan transportasi massal perkeretaapian yang handal dan berdaya saing baik pada layanan perkotaan maupun antar kota.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai regulator, ditetapkan Indikator Kinerja Program yang menjadi tolok ukur keberhasilan/kegagalan. Pencapaian Indikator Kinerja Program secara berkala dilakukan pemantauan kinerja dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan pemantauan kinerja dituangkan dalam Laporan Monitoring Kinerja Triwulan yang mencakup informasi realisasi kinerja dalam periode triwulan terhadap target kinerja yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja. Selain informasi kinerja, juga diidentifikasi permasalahan/kendala serta uraian rekomendasi sebagai upaya peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode Triwulan III Tahun 2025.

Jakarta, Oktober 2025

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

ALLAN TANDIONO

NIP 198801182025211023

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Monitoring Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan III Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Monitoring Kinerja menggambarkan pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja Program serta progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan periode Triwulan III Tahun 2025 mengacu pada target Perjanjian Kinerja Tahun 2025. ***Rata-rata capaian kinerja Triwulan III Tahun 2025 diperoleh sebesar 101,458%*** yang secara ringkas disampaikan pada Tabel berikut.

Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan III Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	SP1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	IK1 Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rasio	0,460	0,460	100,000
2	SP2 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IK2 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian per 1.000 Jumlah Keberangkatan KA	%	100,000	99,003	99,003
3	SP3 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	IK3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	3,740	3,772	100,856
		IK4 Persentase *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api	%	96,100	97,945%	101,920
		IK5 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	%	14,785	14,337	96,970
4	SP4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IK6 Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	40,000	79,577	198,943 (Maksimal Capaian 110%)
Rata-rata Capaian Kinerja						**101,458**

Selain itu, dilaporkan pula realisasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Triwulan III Tahun 2025 diperoleh sebesar Rp1.076.285.649.409,- atau 15,77% dari pagu efektif sebesar Rp6.825.888.620.000,-. Realisasi anggaran tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi anggaran periode yang sama pada Tahun 2024 yaitu sebesar 25,43% serta juga lebih rendah dari Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan III Tahun 2025 yaitu sebesar 55,00%, untuk itu diperlukan upaya percepatan pelaksanaan anggaran pada periode berikutnya. Terkait PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dilaporkan realisasi sampai dengan periode Triwulan III Tahun 2025 sebesar Rp1.971.654.157.653,- atau 158,20% dari target Tahun 2025 sebesar Rp1.246.326.325.000,- meliputi pendapatan fungsional maupun non fungsional.

Dengan penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode Triwulan III Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan informasi kinerja dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan untuk menjadi acuan dalam peningkatan kinerja periode selanjutnya termasuk memastikan target pada akhir tahun dapat terpenuhi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
RINGKASAN EKSEKUTIF ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **iv**
DAFTAR TABEL ..... **v**
DAFTAR GAMBAR ..... **vii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **viii**
BAB 1 PENDAHULUAN **1-1**
1.1 LATAR BELAKANG 1-1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN 1-2
1.3 TUGAS DAN FUNGSI 1-2
1.4 STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA 1-3
1.5 PERJANJIAN KINERJA 1-6
1.5.1 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA 1-6
1.5.2 ALOKASI ANGGARAN 1-11
BAB 2 CAPAIAN KINERJA TRIWULAN **2-1**
2.1 TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA 2-1
2.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA 2-4
2.2.1 KONEKTIVITAS JARINGAN PERKERETAAPIAN NASIONAL YANG DIWUJUDKAN DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR 2-4
2.2.2 KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA DAN PRASARANA YANG HANDAL 2-14
2.2.3 MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN 2-25
2.2.4 MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN 2-52
2.3 DUKUNGAN CAPAIAN INDIKATOR RPJMN 2025-2029 2-71
2.4 CAPAIAN KINERJA LAINNYA 2-76
2.5 REALISASI ANGGARAN 2-81
2.5.1 REALISASI ANGGARAN UNIT KERJA 2-81
2.5.2 REALISASI PENDAPATAN UNIT KERJA 2-85
2.5.3 ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA 2-86
BAB 3 PENUTUP **3-1**
3.1 TINDAK LANJUT REKOMENDASI PADA PELAPORAN KINERJA SEBELUMNYA 3-1
3.2 KESIMPULAN 3-9
3.3 REKOMENDASI 3-10
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1- 1 Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 1-7
Tabel 1-2 Target Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2025 1-10
Tabel 1-3 Alokasi Anggaran Per Kegiatan Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 1-11
Tabel 1-4 Alokasi Anggaran Per Indikator Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....1-11
Tabel 2-1 Pengukuran Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2-2
Tabel 2-2 Target dan Realisasi Lokasi PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional/Simpul Transportasi yang Terhubungan Jaringan Jalur Kereta Api pada Tahun 2025 2-5
Tabel 2- 3 Capaian Kinerja Rasio Konektivitas Antar Wilayah Per Triwulan Tahun 2025 2-8
Tabel 2-4 Realisasi Penanganan Risiko IKP Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian s.d Triwulan III 2025.....2-12
Tabel 2-5 Nilai Rasio Konektivitas Antar Wilayah 2-13
Tabel 2- 6 Jumlah Kejadian Kecelakaan per Jenis Kejadian Tahun 2025 2-15
Tabel 2- 7 Jumlah Kejadian Kecelakaan per Wilayah Balai Tahun 2025.....2-16
Tabel 2- 8 Capaian Kinerja Rasio Konektivitas antar Wilayah Per Triwulan Tahun 2025 2-17
Tabel 2- 9 Realisasi Penanganan Risiko IKK Indeks Profesional ASN s.d Triwulan III 2025 2-21
Tabel 2- 10 Kejadian Kecelakaan Perkeretaapian 2-22
Tabel 2-11 Kategori Kinerja Nilai IKM.....2-25
Tabel 2-12 Hasil Survey Nilai IKM Bulan Januari s.d September Tahun 2025 2-26
Tabel 2-13 Capaian Kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2025.....2-26
Tabel 2-14 Realisasi Penanganan Risiko IKP Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian Transportasi Kereta Api s.d Triwulan III 2025 2-30
Tabel 2-15 Perbandingan Nilai IKM.....2-31
Tabel 2-16 Realisasi Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Tepat Waktu Tahun 2025 2-33
Tabel 2-17 Capaian Kinerja Persentase On Time Performance (OTP) Transportasi Kereta Api Per Triwulan Tahun 2025.....2-34
Tabel 2-18 Realisasi Penanganan Risiko IKP On Time Performance (OTP) Transportasi Kereta Api s.d Triwulan III 2025 2-37
Tabel 2-19 Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api Per Triwulan Tahun 2025.....2-44
Tabel 2-20 Realisasi Penanganan Risiko IKP Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api s.d Triwulan III 2025 2-49
Tabel 2-21 Perbandingan Kinerja Angkutan Penumpang Kereta Api 2-49
Tabel 2-22 Perbandingan Kinerja Angkutan Barang Kereta Api 2-50

Tabel 2-23 Uraian Target Triwulanan IKP Persentase Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Per-Komponen Penilaian Tahun 2025 2-52
Tabel 2-24 Perolehan Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian Per-Komponen Penilaian Tahun 2024-2025 2-54
Tabel 2- 25 Realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan III Tahun 2025 2-56
Tabel 2- 26 Monitoring IP ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 2-58
Tabel 2-27 Capaian Kinerja Persentase Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2025 2-59
Tabel 2-28 Realisasi Penanganan Risiko IKP Tingkat Pencapaian Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian s.d Triwulan III 2025 2-66
Tabel 2-29 Perolehan Nilai AKIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2025 2-67
Tabel 2-30 Realisasi NKA Per-Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan Periode Triwulan III 2025 2-68
Tabel 2-31 Realisasi PNBP Per-Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan Periode Triwulan III 2025 2-69
Tabel 2-32 Realisasi Penyelenggaraan Kereta Api Perintis Periode Triwulan III 2025 2-80
Tabel 2- 33 Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Jenis Belanja Tahun 2025 2-83
Tabel 2-34 Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Kegiatan Tahun 2025 2-83
Tabel 2-35 Alokasi Anggaran Per Sasaran dan Indikator Kinerja Program Tahun 2025 2-84
Tabel 2-36 Realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan III Tahun 2025 2-85
Tabel 2-37 Analisis Efisiensi Sumber Daya Anggaran Tahun 2025 2-63
Tabel 3-1 Tindak Lanjut Rekomendasi Pelaporan Kinerja Periode Sebelumnya 3-1
Tabel 3-2 Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan III Tahun 2025 3-10

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 1-5
Gambar 1-2 Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Unit Kerja 1-6
Gambar 2-1 Capaian Kinerja Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2025 2-8
Gambar 2-2 Capaian Kinerja Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian Per Triwulan 2025 2-17
Gambar 2-3 Perbandingan Jumlah Kejadian Kecelakaan KA dengan Beberapa Negara 2-22
Gambar 2-4 Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2025 2-27
Gambar 2-5 Capaian Kinerja Persentase On Time Performance (OTP) Transportasi Kereta Api Per Triwulan Tahun 2025 2-34
Gambar 2-6 Perbandingan On Time Performance (OTP) Transportasi Kereta Api dengan Beberapa Negara 2-38
Gambar 2-7 Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api Per Triwulan Tahun 2025 2-45
Gambar 2-8 Uraian Target IKP Persentase Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Per-Komponen Penilaian dan Per Triwulan Tahun 2025 2-53
Gambar 2-9 Capaian Kinerja Persentase Pencapaian Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2025 2-60
Gambar 2-10 Capaian Jumlah Penumpang Angkutan Kereta Api Periode Triwulan III Tahun 2025 2-72
Gambar 2- 11 Jumlah Penumpang Angkutan Perkotaan di 10 Kota Metropolitan Khusus Berbasis Rel Periode Triwulan III Tahun 2025 2-73
Gambar 2-12 Capaian Jumlah Perjalanan Kereta Api Periode Triwulan III Tahun 2025 2-74
Gambar 2-13 Capaian Panjang Jalur KA yang Beroperasi Periode Triwulan III Tahun 2025 2-74
Gambar 2-14 Jalur KA yang Menggunakan Persinyalaan Elektrik Periode Triwulan III Tahun 2025 2-75
Gambar 2-15 Kondisi jalur KA sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2 Periode Triwulan III Tahun 2025 2-76
Gambar 2-16 Capaian Ketersediaan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel Periode Triwulan III Tahun 2025 2-76
Gambar 2-17 Alokasi dan Realisasi Anggaran PSO Tahun 2025 2-78
Gambar 2-18 Target dan Realisasi Angkutan Penumpang PSO Tahun 2025 2-78

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Lampiran 2. Komitmen Rekomendasi Peningkatan Kinerja

Lampiran 3. Realisasi dan Analisis Efisiensi Anggaran Triwulan III Tahun 2025

Lampiran 4. Monitoring Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025

Lampiran 5. Data Dukung Capaian Kinerja Masing-Masing Indikator Kinerja

Lampiran 6. Dokumentasi Pembahasan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Dokumen Pendukung Lainnya

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), diwajibkan setiap instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan dan menerangkan kinerja serta tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih menuju tercapainya sistem pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dalam rangka penyelenggaraan SAKIP dimaksud, Direktorat Jenderal Perkeretaapian melaksanakan beberapa tahapan sesuai komponen SAKIP meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Salah satu wujud dari komponen pengukuran dan pelaporan kinerja adalah penyusunan laporan monitoring kinerja setiap triwulan untuk mengetahui kemajuan capaian kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam perencanaan/perjanjian kinerja. Laporan monitoring kinerja diperlukan sebagai acuan memastikan pencapaian target kinerja pada akhir periode serta selanjutnya menjadi landasan dalam pengambilan keputusan/tindakan yang diperlukan untuk peningkatan kinerja.

Laporan Monitoring Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode Triwulan III Tahun 2025 pada dasarnya merupakan bentuk pengukuran terhadap capaian kinerja secara periodik dari setiap indikator kinerja program dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan monitoring kinerja memuat informasi dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dengan dilengkapi identifikasi kendala/permasalahan serta upaya–upaya peningkatan kinerja yang diperlukan untuk mencapai sasaran dalam kerangka pemenuhan tujuan unit kerja.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan III Tahun 2025 dilaksanakan dengan maksud:

1. Penyediaan informasi kinerja dan pelaksanaan evaluasi capaian kinerja yang juga mencakup gambaran kemajuan pelaksanaan program/kegiatan pendukung;
2. Identifikasi permasalahan/kendala dalam pencapaian target kinerja;
3. Penyusunan rekomendasi untuk upaya peningkatan kinerja pada periode berikutnya guna memastikan pencapaian target yang ditetapkan pada perencanaan/perjanjian kinerja.

Tujuan penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan III Tahun 2025 adalah sebagai tolok ukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam rangka pertanggungjawaban melalui penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.3 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, tugas Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah sebagai unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan. Direktorat Jenderal Perkeretaapian dipimpin oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian.

Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi dan kewenangan sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
4. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai struktur organisasi terdiri dari:

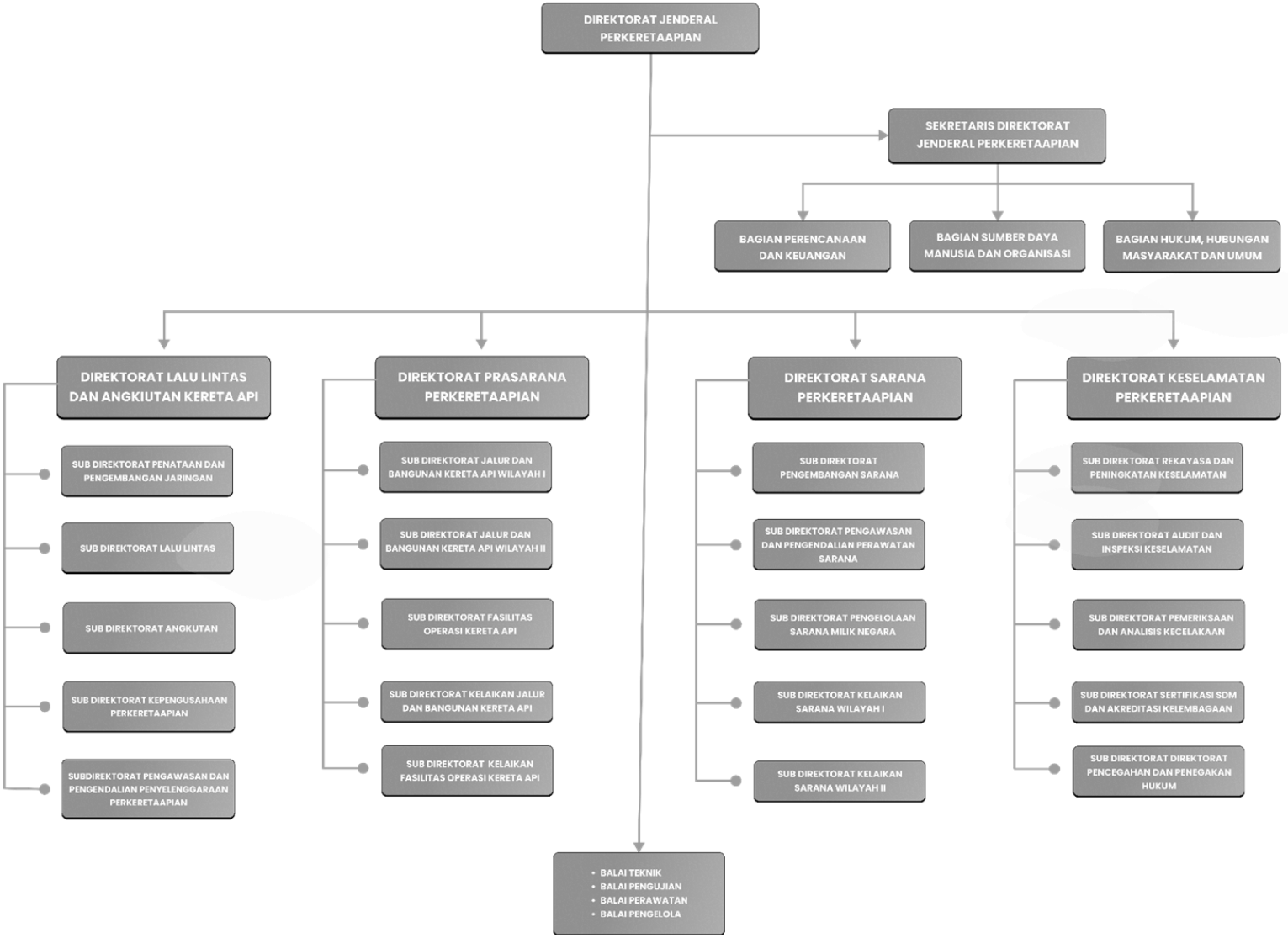
1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Eselon II);
2. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Eselon II);
3. Direktorat Prasarana Perkeretaapian (Eselon II);
4. Direktorat Sarana Perkeretaapian (Eselon II);
5. Direktorat Keselamatan Perkeretaapian (Eselon II);
6. Unit Kerja Mandiri/Unit Pelaksana Teknis setingkat Eselon III, dengan rincian :
    a. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
    b. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
    c. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
    d. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya ;
    e. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
    f. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
    g. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
    h. Balai Pengujian Perkeretaapian (Badan Layanan Umum);

i. Balai Perawatan Perkeretaapian;
j. Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (Badan Layanan Umum);
k. Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.

Untuk organisasi dan tata kerja Balai Teknik Perkeretaapian, Balai Pengujian Perkeretaapian, Balai Perawatan Perkeretaapian serta Balai Pengelola Kereta Api diatur melalui peraturan tersendiri yaitu:

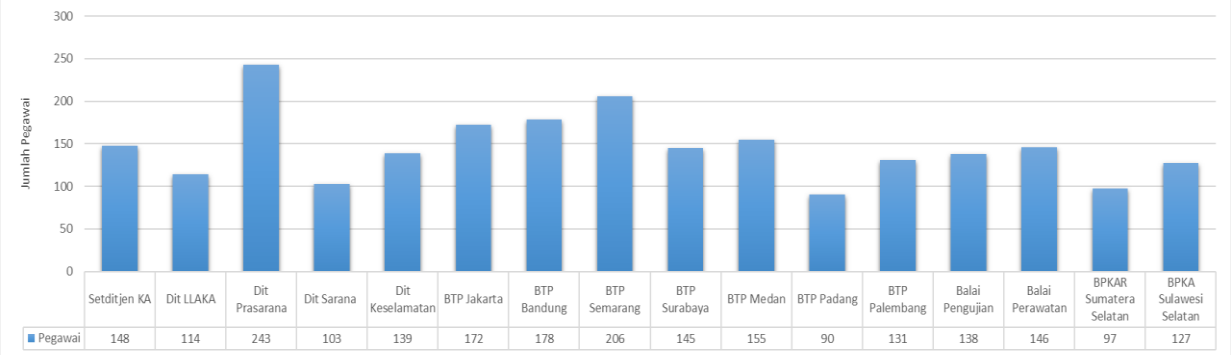
1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perawatan Perkeretaapian;
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik Perkeretaapian;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Perkeretaapian.

Adapun struktur organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara umum dapat dilihat sebagaimana pada Gambar berikut:



Gambar 1-1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Sumber daya manusia pada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode Triwulan III Tahun 2025 berjumlah 2.332 dengan rincian berupa 747 pegawai pada Kantor Pusat (Sekretariat dan 4 Direktorat Teknis) dan 1.585 pegawai tersebar pada 11 Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Jumlah pegawai untuk masing-masing unit kerja diuraikan sebagaimana pada Gambar berikut.



Gambar 1-2 Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Unit Kerja

1.5 PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Direktorat Jenderal Perkeretaapian memiliki 4 Sasaran Program dan 6 Indikator Kinerja Program yang dicapai melalui Program Infrastruktur Konektivitas dan Program Dukungan Manajemen. Berikut disampaikan uraian sasaran, indikator dan target kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dilengkapi informasi dukungan alokasi anggaran.

1.5.1 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound*). Analisa indikator kinerja program diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1- 1 Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	*MEASURABLE (M)*	*ACHIEVABLE (A)*	*RELEVANT (R)*	*TIME-BOUND (T)*
Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Konektivitas wilayah PKN/PKW/Simpul Transportasi/ Kawasan Strategis Nasional terhubung dengan prasarana dan layanan perkeretaapian.	Jumlah wilayah PKN/PKW/Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A), Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Industri yang sudah terhubung jaringan dan layanan KA termasuk integrasi antar moda lainnya s.d tahun berjalan dibandingkan dengan rencana jumlah wilayah PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Industri/Kawasan Strategis Nasional yang terhubung dengan jaringan dan layanan KA sesuai Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS) Tahun 2030 Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian = *Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A)/Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Industri yang terhubung Jaringan dan Layanan KA termasuk integrasi antar moda lainny s.d Tahun Berjalan* / *Rencana Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A)/ Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Industri yang Terhubung dengan Jaringan dan Layanan KA sesuai RIPNAS Tahun 2030*	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan pendukung serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan, selaras dengan RIPNAS 2030 serta Tugas Pokok dan Fungsi termasuk *Core Bussiness* Ditjen Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029
Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian per 1.000 Jumlah Keberangkatan KA	Merupakan parameter untuk mengetahui tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian	Tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian diperoleh dari selisih nilai maksimal tingkat keselamatan (100%) dengan persentase jumlah kejadian kecelakaan kereta api (anjlokan, terguling, tabrakan KA dengan KA dan lain-lain/terbakar) pada tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah keberangkatan kereta api di pada tahun berjalan. Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian Per 1.000 Jumlah Keberangkatan KA = [1 - (Jumlah Kejadian Kecelakaan KA pada Tahun Berjalan / Jumlah Keberangkatan Kereta Api pada Tahun Berjalan) X 1.000] X 100%	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan pendukung serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan, selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta *Core Bussiness*	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan	Merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta	Rata-rata capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan Ditjen Perkeretaapian sesuai Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya dan mengacu pada kegiatan	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan,	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029

<table>
<tr><th rowspan="2">INDIKATOR KINERJA</th><th colspan="5">ANALISIS SMART</th></tr>
<tr><th>SPECIFIC (S)</th><th>MEASURABLE (M)</th><th>ACHIEVABLE (A)</th><th>RELEVANT (R)</th><th>TIME-BOUND (T)</th></tr>
<tr><td>Publik Bidang Perkeretaapian</td><td>pelayanan publik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai regulator perkeretaapian</td><td><table><tr><th>Nilai Persepsi</th><th>Nilai Interval IKM</th><th>Nilai Interval Konversi IKM</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr><tr><td>1</td><td>1.00 – 2.5996</td><td>25.00 – 64.99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr><tr><td>2</td><td>2.60 – 3.064</td><td>65.00 – 76.60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>3.0644 – 3.532</td><td>76.61 – 88.30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>3.5324 – 4.00</td><td>88.31 – 100.00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr></table>Sumber: Peraturan MENPAN-RB No. 14 Tahun 2017</td><td>pendukung serta alokasi anggaran yang tersedia</td><td>selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta Core Bussiness Ditjen Perkeretaapian</td><td></td></tr>
<tr><td>Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Transportasi Kereta Api</td><td>Merupakan salah satu parameter untuk mengukur tingkat pelayanan transportasi kereta api melalui rata-rata ketepatan waktu kedatangan dan keberangkatan KA untuk angkutan penumpang dan barang</td><td>Jumlah kedatangan dan keberangkatan angkutan KA penumpang dan barang yang tepat waktu pada tahun berjalan dibandingkan jumlah keseluruhan kedatangan dan keberangkatan angkutan KA penumpang dan barang.

Persentase On Time Performance (OTP) Transportasi Perkeretaapian = Jumlah Kedatangan dan Keberangkatan KA Penumpang dan Barang tepat waktu pada tahun berjalan / Jumlah Keseluruhan Kedatangan dan Keberangkatan KA Penumpang dan Barang pada tahun berjalan X 100%</td><td>Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan pendukung serta alokasi anggaran yang tersedia</td><td>Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan, selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta Core Bussiness Ditjen Perkeretaapian</td><td>Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029</td></tr>
<tr><td>Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api</td><td>Jumlah angkutan penumpang dan barang merupakan salah satu parameter keberhasilan dalam pemanfaatan sarana dan prasarana perkeretaapian dan diharapkan dengan peningkatan angkutan penumpang dan barang kereta api</td><td>Penjumlahan antara pemenuhan target angkutan kereta api penumpang dan pemenuhan target angkutan kereta api barang periode 2025-2029 sesuai dokumen Rencana Strategis dengan bobot masing-masing 50%.

Persentase Pemenuhan Target Angkutan KA = Persentase Pemenuhan Target Angkutan KA Penumpang + Persentase Pemenuhan Target Angkutan KA Barang

Pemenuhan target angkutan penumpang diperoleh dari jumlah realisasi angkutan penumpang kereta api pada Tahun 2025 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan target angkutan penumpang kereta api periode 2025-2029 sesuai dokumen Rencana Strategis.</td><td>Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan pendukung serta alokasi anggaran yang tersedia</td><td>Merupakan salah satu parameter kemanfaatan dari hasil pembangunan prasarana dan sarana perkeretaapian yang berkorelasi dengan semakin banyaknya jumlah angkutan</td><td>Target ditetapkan secara bertahap pe rtahun s.d Tahun 2029</td></tr>
</table>

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	***MEASURABLE (M)***	***ACHIEVABLE (A)***	***RELEVANT (R)***	***TIME-BOUND (T)***
	dapat mengurangi jumlah kepadatan lalu lintas jalan raya termasuk pengurangan emisi.	$\text{Persentase } \textit{Pemenuhan Target Angkutan Penumpang} = \frac{\textit{Jumlah Realisasi Angkutan Penumpang Kereta Api dari Tahun 2025 s.d Tahun Berjalan}}{\textit{Target Angkutan Penumpang Kereta Api Periode 2025-2029 sesuai Dokumen Renstra}} X\ 50\%$ Pemenuhan target angkutan barang diperoleh dari jumlah realisasi angkutan barang kereta api pada Tahun 2025 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan target angkutan barang kereta api periode 2025-2029 sesuai dokumen Rencana Strategis. $\text{Persentase } \textit{Pemenuhan Target Angkutan Barang} = \frac{\textit{Jumlah Realisasi Angkutan Barang Kereta Api dari Tahun 2025 s.d Tahun Berjalan}}{\textit{Target Angkutan Barang Kereta Periode 2025-2029 sesuai Dokumen Renstra}} X\ 50\%$		penumpang dan barang yang terangkut serta selaras dengan target yang ditetapkan pada Renstra 2025-2029 dan RIPNAS 2030	
Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Merupakan parameter untuk mengukur kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang mencakup Nilai AKIP, Nilai Kinerja Anggaran, Realisasi PNBP Bidang Perkeretaapian dan Indeks Profesional ASN	Persentase Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan rata-rata dari persentase pencapaian kinerja mencakup Nilai Evaluasi AKIP, Nilai Kinerja Anggaran, Realisasi PNBP Bidang Perkeretaapian dan Indeks Profesional ASN. Adapun rumusan sebagai berikut: $AKIP_{DJKA} + NKA_{DJKA} + NKA_{PNBP} + ASN_{DJKA} / 4$ $AKIP_{DJKA}$ = Tingkat pencapaian nilai AKIP DJKA NKA_{DJKA} = Tingkat pencapaian Nilai Kinerja Anggaran DJKA $PNBP_{DJKA}$ = Tingkat pencapaian realisasi PNBP bidang perkeretaapian ASN_{DJKA} = Tingkat pencapaian Indeks Profesional ASN	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya serta kegiatan pendukung pada tahun berjalan	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan,	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029

Target kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diuraikan per periode triwulan sebagai berikut :

Tabel 1-2 Target Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2025

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
SP1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	IK1 Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rasio	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460
SP2 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IK2 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian per 1.000 Jumlah Keberangkatan KA	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
SP3 Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian Yang Terpercaya Dan Sesuai Kebutuhan	IK3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	%	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740
	IK4 Persentase *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api	%	96,100*	96,100	96,100	96,100	96,100
	IK5 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api (%)	%	19,000	4,465	9,125	14,785	14,785
SP4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	100,000	19,035	20,555	40,000	100,000

1.5.2 ALOKASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 yang disampaikan pada Januari 2025 sebesar Rp5.119.295.134000,00 dan posisi pada bulan September 2025 terdapat perubahan menjadi Rp.8.210.325.183.000,- Adapun rincian alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai berikut.

Tabel 1-3 Alokasi Anggaran Per Kegiatan Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran Berdasarkan PK (Rp)	Alokasi Anggaran Posisi 30 September 2025 (Rp)
1.	**Program infrastruktur konektivitas**	**4.424.660.689.000**	**7.464.581.117.000**
	a. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	813.226.191.000	2.085.756.647.000
	b. Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	895.248.757.000	2.612.537.496.000
	c. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	2.670.022.802.000	2.716.205.427.000
	d. Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	46.162.939.000	50.081.547.000
2.	**Program Dukungan Manajemen**	**694.634.445.000**	**745.744.066.000**
	a. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	22.069.026.000	22.064.026.000
	b. Pengelolaan Perencanaan. Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	637.851.276.000	688.495.897.000
	c. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	17.498.737.000	17.498.737.000
	d. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	14.149.348.000	14.619.348.000
	e. Legislasi dan Litigasi Transportasi	3.066.058.000	3.066.058.000
TOTAL		**5.119.295.134.000**	**8.210.325.183.000**

Tabel 1-4 Alokasi Anggaran Per Indikator Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Alokasi Anggaran Berdasarkan PK (Rp)	Alokasi Anggaran Posisi 30 September 2025 (Rp)
SP1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	IKP1 Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	813.226.191.000	2.085.756.647.000
SP2 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKP2 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian per 1.000 Jumlah Keberangkatan KA	2.716.185.741.000 (termasuk penunjang teknis)	2.766.286.974.000 (termasuk penunjang teknis)

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Alokasi Anggaran Berdasarkan PK (Rp)	Alokasi Anggaran Posisi 30 September 2025 (Rp)
SP3 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	IKP3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	895.248.757.000	2.612.537.496.000
	IKP4 Persentase *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api		
	IKP5 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api		
SP4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IKP5 Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	694.634.445.000	745.744.066.000
Jumlah		**5.119.295.134.000**	**8.210.325.183.000**

BAB 2 CAPAIAN KINERJA TRIWULAN

2.1 TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran pencapaian kinerja pada Laporan Kinerja menggunakan formula sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Formula perhitungan persentase capaian kinerja sebagai berikut :

1. Kondisi pertama, apabila makin tinggi realisasi menunjukkan semakin baik pencapaian kinerja, maka formula yang dipergunakan adalah:

$$Capaian\ Kinerja = \left[\frac{Realisasi}{Target}\right] \times 100\%$$

2. Kondisi kedua, apabila makin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka formula yang dipergunakan adalah:

$$Capaian\ Kinerja = \frac{(Target - (Realisasi - Target))}{Target} \times 100\%$$

3. Nilai capaian kinerja minimal adalah 0%.

Tahapan yang dilakukan dalam pengukuran capaian kinerja meliputi:

1. Perbandingan antara target kinerja Tahun 2025 dan Triwulan III dengan realisasi kinerja dalam kurun waktu Triwulan III Tahun 2025.
2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja termasuk *benchmarking* kinerja, informasi *croscutting* serta dukungan penanganan/mitigasi risiko.
3. Rekomendasi atau alternatif solusi sebagai upaya peningkatan kinerja.
4. Realisasi anggaran pada periode Triwulan III Tahun 2025 termasuk analisa efisiensi sumber daya anggaran dan sumber daya manusia.

Tata cara pengukuran capaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perkeretaapian diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2-1 Pengukuran Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perkeretaapian

<table>
<tr><th>No</th><th>Indikator Kinerja Program</th><th>Pengukuran</th></tr>
<tr><td>1</td><td>IKP1 Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian</td><td>Jumlah wilayah PKN/PKW/Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A), Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Industri yang sudah terhubung jaringan dan layanan KA termasuk integrasi antar moda lainnya s.d tahun berjalan dibandingkan dengan rencana jumlah wilayah PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Industri/Kawasan Strategis Nasional yang terhubung dengan jaringan dan layanan KA sesuai Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS) Tahun 2030.

Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian = Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A)/Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Industri yang terhubung Jaringan dan Layanan KA termasuk integrasi antar moda lainny s.d Tahun Berjalan / Rencana Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A)/ Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Industri yang Terhubung dengan Jaringan dan Layanan KA sesuai RIPNAS Tahun 2030</td></tr>
<tr><td>2</td><td>IKP2 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian per 1.000 Jumlah Keberangkatan KA</td><td>Tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian diperoleh dari selisih nilai maksimal tingkat keselamatan (100%) dengan persentase jumlah kejadian kecelakaan kereta api (anjlokan, terguling, tabrakan KA dengan KA dan lain-lain/terbakar) pada tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah keberangkatan kereta api di pada tahun berjalan.

Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian Per 1.000 Jumlah Keberangkatan KA = [1 - (Jumlah Kejadian Kecelakaan KA pada Tahun Berjalan / Jumlah Keberangkatan Kereta Api pada Tahun Berjalan) X 1.000] X 100%</td></tr>
<tr><td>3</td><td>IKP3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian</td><td>Rata-rata capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

<table>
<tr><th>Nilai Persepsi</th><th>Nilai Interval IKM</th><th>Nilai Interval Konversi IKM</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr>
<tr><td>1</td><td>1.00 – 2.5996</td><td>25.00 – 64.99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2.60 – 3.064</td><td>65.00 – 76.60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr>
<tr><td>3</td><td>3.0644 – 3.532</td><td>76.61 – 88.30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr>
<tr><td>4</td><td>3.5324 – 4.00</td><td>88.31 – 100.00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr>
</table>
Sumber: Peraturan MENPAN-RB No. 14 Tahun 2017</td></tr>
<tr><td>4</td><td>IKP4 Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Transportasi Kereta Api</td><td>Jumlah kedatangan dan keberangkatan angkutan KA penumpang dan barang yang tepat waktu pada tahun berjalan dibandingkan jumlah keseluruhan kedatangan dan keberangkatan angkutan KA penumpang dan barang.

Persentase On Time Performance (OTP) Transportasi Perkeretaapian = Jumlah Kedatangan dan Keberangkatan KA Penumpang dan Barang tepat waktu pada tahun berjalan / Jumlah Keseluruhan Kedatangan dan Keberangkatan KA Penumpang dan Barang pada tahun berjalan X 100%</td></tr>
</table>

No	Indikator Kinerja Program	Pengukuran
5	IKP5 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	Penjumlahan antara pemenuhan target angkutan kereta api penumpang dan pemenuhan target angkutan kereta api barang periode 2025-2029 sesuai dokumen Rencana Strategis dengan bobot masing-masing 50%. Persentase *Pemenuhan Target Angkutan KA* = Persentase *Pemenuhan Target Angkutan KA Penumpang* + Persentase *Pemenuhan Target Angkutan KA Barang* Pemenuhan target angkutan penumpang diperoleh dari jumlah realisasi angkutan penumpang kereta api pada Tahun 2025 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan target angkutan penumpang kereta api periode 2025-2029 sesuai dokumen Rencana Strategis. Persentase *Pemenuhan Target Angkutan Penumpang* = (*Jumlah Realisasi Angkutan Penumpang Kereta Api dari Tahun 2025 s.d Tahun Berjalan* / *Target Angkutan Penumpang Kereta Api Periode 2025-2029 sesuai Dokumen Renstra*) X 50% Pemenuhan target angkutan barang diperoleh dari jumlah realisasi angkutan barang kereta api pada Tahun 2025 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan target angkutan barang kereta api periode 2025-2029 sesuai dokumen Rencana Strategis. Persentase *Pemenuhan Target Angkutan Barang* = (*Jumlah Realisasi Angkutan Barang Kereta Api dari Tahun 2025 s.d Tahun Berjalan* / *Target Angkutan Barang Kereta Periode 2025-2029 sesuai Dokumen Renstra*) X 50%
6	IKP6 Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Persentase Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan rata-rata dari persentase pencapaian kinerja mencakup nilai evaluasi AKIP, nilai kinerja anggaran, realisasi PNBP bidang perkeretaapian dan indeks profesional ASN. Adapun rumusan sebagai berikut: $AKIP_{DJKA} + NKA_{DJKA} + PNBP_{DJKA} + ASN_{DJKA} / 4$ $AKIP_{DJKA}$ = Tingkat pencapaian nilai AKIP DJKA NKA_{DJKA} = Tingkat pencapaian nilai kinerja anggaran DJKA $PNBP_{DJKA}$ = Tingkat pencapaian realisasi PNBP bidang perkeretaapian ASN_{DJKA} = Tingkat pencapaian indeks profesional ASN

2.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Direktorat Jenderal Perkeretaapian melaksanakan tugas dan pokok untuk mendukung 4 (empat) Sasaran Program dan 6 (enam) Indikator Kinerja Program melalui Program Infrastruktur Konektivitas dan Program Dukungan Manajemen. Berikut uraian pengukuran capaian kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode Triwulan III Tahun 2025.

2.2.1 KONEKTIVITAS JARINGAN PERKERETAAPIAN NASIONAL YANG DIWUJUDKAN DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN

Rasio konektivitas transportasi perkeretaapian diperoleh dari keterhubungan jaringan dan layanan kereta api dengan wilayah Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) simpul transportasi (pelabuhan, bandara, terminal tipe A) dan Kawasan Strategis Nasional. Lokasi PKN, PKW dan simpul transportasi (pelabuhan, bandara, terminal tipe A) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang telah diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Untuk Kawasan Strategis Nasional mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang diubah terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020. Lokasi-lokasi tersebut disandingkan dengan jaringan kereta api terhubung (*eksisting*) maupun yang akan terhubung dengan jaringan kereta api sesuai dokumen Rencana Induk Perkeretaapian Nasional Tahun 2030 sebagaimana Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 2128 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional yang diubah terakhir melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 296 Tahun 2020.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, ditetapkan target rasio konektivitas antar wilayah transportasi perkeretaapian sebesar 0,460 dimana nilai tersebut masih sama dengan *baseline* periode sebelumnya dikarenakan belum terdapat rencana penambahan pembangunan/perpanjangan prasarana perkeretaapian baru yang selesai dan beroperasi pada Tahun 2025. Rincian

target PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional yang terhubung dengan jaringan kereta api pada Tahun 2025 sebanyak 69 lokasi terdiri dari 52 lokasi PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional, 6 lokasi simpul bandara, 10 lokasi simpul pelabuhan dan 1 lokasi simpul terminal tipe A. Jumlah tersebut dibandingkan dengan target keterhubungan jaringan kereta api berdasarkan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional sebanyak 150 lokasi terdiri dari 104 lokasi PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional, 16 lokasi simpul bandara, 29 lokasi simpul pelabuhan dan 1 lokasi simpul terminal tipe A.

Sehubungan dengan hal tersebut maka pada periode Triwulan III Tahun 2025 realisasi lokasi PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional/simpul transportasi yang terhubung dengan jaringan kereta api masih sama dengan *baseline* periode sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2-2 Target dan Realisasi Lokasi PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional/Simpul Transportasi yang Terhubung Jaringan Jalur Kereta Api pada Tahun 2025

No.	PKN/PKW/Simpul Transportasi/ Kawasan Strategis Nasional	Tahun 2025	
		Target PK	Realisasi
Pusat Kegiatan Nasional / Pusat Kegiatan Wilayah/ Kawasan Strategis Nasional (KSN)			
1	Mebidangro	√	√
2	Perkotaan Padang – Lubuk Agung – Pariaman	√	√
3	Patungraya Agung	√	√
4	Bandar Lampung	√	√
5	Serang	√	√
6	Cilegon	√	√
7	Jabodetabek	√	√
8	Cirebon	√	√
9	Bandung Raya	√	√
10	Kedungsepur	√	√
11	Cilacap	√	√
12	Surakarta	√	√
13	Yogyakarta	√	√
14	Malang	√	√
15	Gebangkertosusila	√	√
16	Rantau Prapat	√	√
17	Pematang Siantar	√	√
18	Tebing Tinggi	√	√

No.	PKN/PKW/Simpul Transportasi/ Kawasan Strategis Nasional	Tahun 2025	
		Target PK	Realisasi
19	Kisaran	√	√
20	Pariaman	√	√
21	Lubuklinggau	√	√
22	Muara enim	√	√
23	Baturaja	√	√
24	Prabumulih	√	√
25	Lahat	√	√
26	Kotabumi	√	√
27	Rangkasbitung	√	√
28	Cikampek	√	√
29	Sukabumi	√	√
30	Indramayu	√	√
31	Tasikmalaya	√	√
32	Cikampek-cikopo	√	√
33	Tegal	√	√
34	Pekalongan	√	√
35	Cepu	√	√
36	Purwokerto	√	√
37	Kebumen	√	√
38	Klaten	√	√
39	Sleman	√	√
40	Bojonegoro	√	√
41	Madiun	√	√
42	Jember	√	√
43	Banyuwangi	√	√
44	Probolinggo	√	√
45	Blitar	√	√
46	Pasuruan	√	√
47	Tulungagung	√	√
48	Kediri	√	√
49	Barru	√	√
50	Pangkajene	√	√
51	Maros/Mamminasata	√	√
52	Muara Satu	√	√
Simpul Transportasi Bandara			

No.	PKN/PKW/Simpul Transportasi/ Kawasan Strategis Nasional	Tahun 2025	
		Target PK	Realisasi
1	Bandar Udara Kualanamu	√	√
2	Bandar Udara Internasional Minangkabau	√	√
3	Bandar Udara Soekarno Hatta	√	√
4	Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II	√	√
5	Bandar Udara Adi Soemarmo	√	√
6	Bandar Udara NYIA	√	√
Simpul Transportasi Pelabuhan			
1	Pelabuhan Tj. Priok	√	√
2	Pelabuhan Kuala Tanjung	√	√
3	Pelabuhan Merak	√	√
4	Pelabuhan Sungai Kertapati	√	√
5	Pelabuhan Teluk Bayur	√	√
6	Pelabuhan Cilacap	√	√
7	Pelabuhan Tarahan	√	√
8	Pelabuhan Garongkong	√	√
9	Pelabuhan Tanjung Mas	√	√
10	Pelabuhan Tanjung Perak	√	√
Simpul Transportasi Terminal Tipe A			
1	Terminal Kampung Rambutan	√	√
TOTAL		**69**	**69**

Berdasarkan Tabel di atas, rasio konektivitas pada Triwulan III Tahun 2025 diperoleh sebesar 0,460 dengan jumlah PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional/simpul transportasi sebanyak 69 lokasi (52 lokasi PKN/PKW/KSN, 6 lokasi simpul bandara, 10 lokasi simpul pelabuhan dan 1 lokasi simpul terminal tipe A) dibandingkan target Rencana Induk Perkeretaapian Nasional sebanyak 150 lokasi (104 lokasi PKN/PKW/KSN, 16 lokasi simpul bandara, 29 lokasi simpul pelabuhan dan 1 lokasi simpul terminal tipe A), dengan uraian perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian} = \frac{\text{69 Lokasi PKN/ PKW/ Simpul Transportasi/ Kawasan Strategis Nasional}}{\text{150 PKN/ PKW/ Simpul Transportasi/ Kawasan Strategis Nasional}}$$

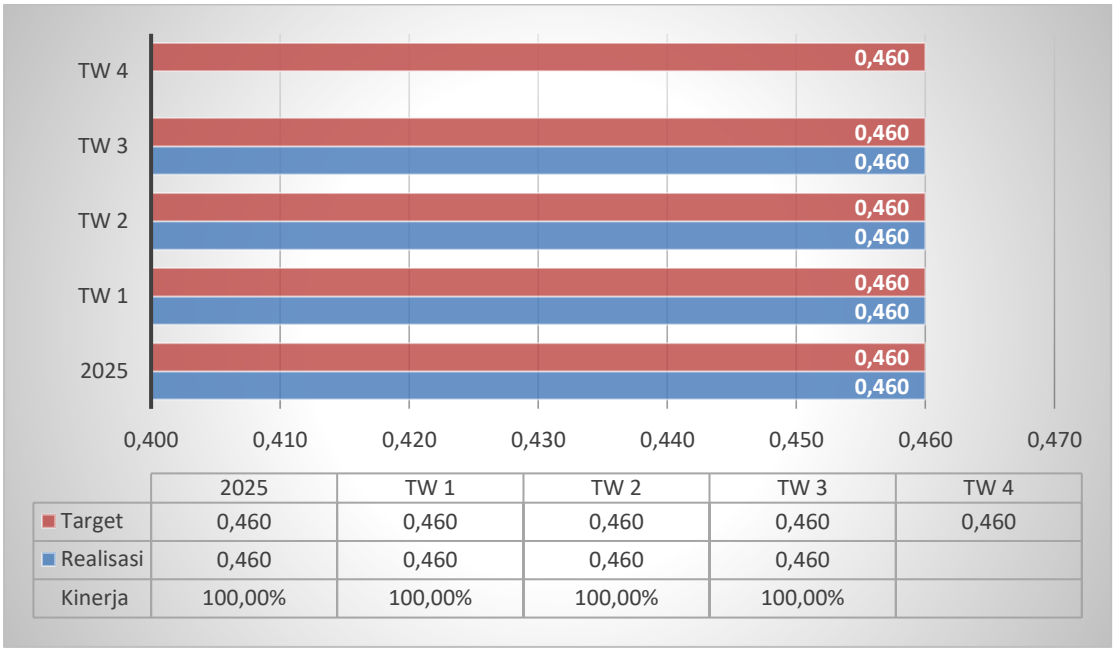
Data dukung capaian dan perhitungan kinerja pada Lampiran 5.

1. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan realisasi rasio konektivitas transportasi perkeretaapian pada Triwulan III Tahun 2025 sebesar 0,460, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 100,00% dari target yang ditetapkan pada Triwulan III maupun Tahun 2025 sebesar 0,460. Pada periode Triwulan III Tahun 2025, realisasi kinerja dapat memenuhi target dikarenakan target dan realisasi sesuai dengan *baseline* periode sebelumnya serta belum terdapat penambahan pembangunan/perpanjangan prasarana perkeretaapian baru yang selesai dan beroperasi pada Tahun 2025. Realisasi kumulatif per triwulan dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2- 3 Capaian Kinerja Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rasio	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	-	100	100	100	-	100



Gambar 2-1 Capaian Kinerja Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2025

2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Pada Tahun 2025 belum ditargetkan penambahan konektivitas dikarenakan belum terdapat rencana penambahan pembangunan/perpanjangan prasarana perkeretaapian baru menghubungkan PKN/PKW/kawasan strategis nasional/simpul transportasi yang selesai dan beroperasi pada Tahun 2025. Selain itu, kegiatan yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2025 mayoritas berupa kegiatan lanjutan yang fokus pada pengembangan kapasitas/kehandalan prasarana perkeretaapian eksisting. Hal tersebut didorong juga dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang membatasi ruang fiskal kegiatan pembangunan prasarana perkeretaapian baru yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Di sisi lain, pembangunan prasarana perkeretaapian baru oleh badan usaha/swasta masih minim dan beberapa masih dalam proses penjajakan investasi serta persiapan dokumen perencanaan teknis.

Pada Triwulan III Tahun 2025, terdapat beberapa kegiatan pendukung konektivitas transportasi perkeretaapian yang berprogres antara lain:

a. Konektivitas PKW Lhokseumawe (Kecamatan Muara Satu) dengan kegiataan pendukung berupa pembangunan jalur kereta api lintas Krueng Geukeuh – Muara Satu telah selesai 100% berupa pembangunan jalur KA sepanjang 8 km’sp dengan lebar spoor 1.435 mm. Posisi Triwulan III Tahun 2025, bahwa telah dilakukan tindak lanjut terhadap hasil temuan pengujian dan berdasarkan Berita Acara (BA) pengujian lanjutan atas hasil tindak lanjut uji pertama fasilitas operasi berupa pintu perlintasan kereta api pada tanggal 19 September 2025 dinyatakan seluruh temuan sudah terselesaikan.
b. Kegiatan lanjutan pembangunan jalur KA Rantauprapat – Pondok S5 – Kotapinang masih dalam tahap persiapan pengoperasian KA perintis segmen Rantauprapat – Pondok S5 (penyelesaian sertifikasi kelaikan prasarana, serta koordinasi kesiapan sarana), namun diperkirakan pengoperasiannya baru bisa terlaksana pada Triwulan I Tahun 2026. Sedangkan untuk segmen lanjutan Pondok S5 – Kota Pinang masih

berprogres pengadaan lahan melalui anggaran LMAN (progress 93,30% yaitu 710 dari 762 bidang telah dibebaskan), dimana terdapat kendala habisnya masa berlaku penetapan lokasi dan tidak tersedia anggaran BOPP Tahun 2025.

c. Kegiatan pembangunan MRT Jakarta *East-West Phase* I untuk mendukung konektivitas di wilayah perkotaan Jabodetabek, posisi saat ini konsultan *tender assistance* telah berkontrak pada 9 Juli 2025 dan selanjutnya dalam proses persiapan pelelangan konsultan supervisi dan paket konstruksi. Pengadaan lahan di wilayah DKI Jakarta dilaksanakan oleh Pemerintah DKI Jakarta dan saat ini masih berproses penetapan lokasi (ditargetkan November 2025). Untuk pengadaan lahan di luar wilayah DKI Jakarta (Bekasi) telah terbit penetapan lokasi dan proses pengadaan lahannya dilaksanakan oleh Ditjen Perkeretaapian dengan pembiayaan LMAN namun masih menunggu pelaksanaan BOPP yang diusulkan di Tahun 2026 (BOPP Tahun 2025 terkendala efisiensi anggaran). Selain itu terdapat isu perubahan stasiun/trase dari Pemerintah Daerah yang terdampak kebutuhan reviu studi kelayakan dan trase (perlu pertimbangan lanjut terhadap potensi risiko).
d. Pengoptimalan konektivitas Pelabuhan Tanjung Emas untuk mendukung intramoda logistik, dimana terdapat kendala berupa banyaknya terjadi vandalisme sehingga diperlukan perbaikan infrastruktur. Untuk melaksanakan perbaikan tersebut, diperlukan penyelesaian skema sewa (s.d Rp0) untuk aset di Pelabuhan Tanjung Mas dengan koordinasi KSOP, Otoritas Pelabuhan dan Pelindo termasuk apabila diperlukan penyiapan MoU antar pihak terkait. Setelah penyelesaian skema sewa aset dan perbaikan infrastruktur, diperlukan beberapa tahapan guna pengoptimalan konektivitas Pelabuhan Tanjung Emas antara lain tindak lanjut hasil uji pertama, *safety assesment*, uji rangkaian dan ijin kelaikan prasarana serta ijin operasi sarana.
e. Kegiatan lanjutan pembangunan prasarana perkeretaapian untuk mendukung pengoperasian KA Makassar - Pare Pare antara Mandai – Palanro yang bersumber dari pembiayaan SBSN dengan progres 96,36%, dimana masih terdapat 1 kegiatan yaitu pembangunan *overpass* Tonasa yang masih belum dapat dilanjutkan karena membutuhkan penetapan

lokasi dari Gubernur Sulawesi Selatan untuk tahapan lanjut penyiapan lahan dan konstruksi.

Berdasarkan hal di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain:

a. Konsolidasi dalam penyelesaian dokumen perencanaan teknis, pelaksanaan pembangunan perkeretaapian sampai tahapan pelaksanaan pengujian dan sertifikasi kelaikan prasarana perkeretaapian, diantaranya dengan koordinasi pihak internal (Direktorat LLAKA, Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Direktorat Keselamatan, Balai Pengujian, dan lainnya) dan pihak eksternal (badan usaha/operator, Pemerintah Daerah, pengelola simpul transportasi moda lain).
b. Konsolidasi dalam penyiapan lahan mendukung pembangunan perkeretaapian dengan melibatkan LMAN/Kementerian Keuangan, Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Daerah dan instansi lainnya.
c. Koordinasi dengan Kemenko Infraswil, Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Investasi dan badan usaha/swasta terkait pembiayaan alternatif pembangunan perkeretaapian mendukung konektivitas wilayah.

Selain itu, dalam mendukung pencapaian target rasio konektivitas transportasi perkeretaapian, juga dilakukan pengelolaan kinerja berbasis risiko melalui pemantauan dan pelaksanaan penanganan risiko terhadap kegiatan pendukung IKP yang dilakukan secara berkala/triwulan. Berdasarkan profil risiko unit kerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025, terdapat 19 risiko yang diidentifikasi dari 4 proses bisnis terkait IKP rasio konektivitas transportasi perkeretaapian. Dari 19 risiko tersebut, terdapat 14 risiko yang penilaiannya di atas selera risiko dan memerlukan penanganan risiko dimana telah direncanakan 19 kegiatan penanganan risiko pada Tahun 2025.

Pada periode sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, penanganan risiko telah terealisasi sebanyak 8 kegiatan atau sebesar 42,11% dari 19 rencana penanganan risiko pada Tahun 2025. Adapun rincian realisasi rencana penanganan risiko yang telah dilakukan s.d Triwulan III sebagai berikut:

a. Pemberian bimbingan teknis pembangunan prasarana perkeretaapian kepada pegawai;
b. Usulan revisi relaksasi anggaran Tahun 2025 dan/atau pengusulan kembali kegiatan dan anggaran penyusunan dokumen perencanaan teknis pada periode berikutnya;
c. Peningkatan pengawasan pembangunan prasarana dilengkapi penyampaian rekomendasi hasil pengawasan;
d. Usulan relaksasi anggaran/usulan anggaran pengadaan tanah;
e. Penyampaian surat rekomendasi hasil pengawasan dengan dilengkapi *deadline* penyelesaian tindak lanjut dan melaporkan kembali hasil tindak lanjut pada surat rekomendasi;
f. Penetapan hasil kajian *single tarif*/peningkatan utilisasi jalur kereta api pelayanan angkutan barang yang terhubung dengan pusat logistik (3 kegiatan penanganan).

Tabel 2-4 Realisasi Penanganan Risiko IKP Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian s.d Triwulan III Tahun 2025

No	Proses Bisnis	Jumlah/ Populasi Risiko (Form 5)	Jumlah Penanganan Risiko (Form 8)		Realisasi Penanganan Risiko (Form 9)				
			Risiko	Kegiatan Penanganan	TW I	TW II	TW III	Kumulatif (s.d TW III)	%
1	Rute Jaringan Perkeretaapian (Prasarana)	10	9	14	0	1	4	5	35,71
2	Rute Jaringan Perkeretaapian (Lalu Lintas dan Angkutan KA)	2	1	1	0	0	0	0	0,00
3	Sistem Jaringan Logistik Perkeretaapian	3	3	3	0	0	3	3	100,00
4	Aksesibilitas Moda Kereta Api	4	1	1	0	0	0	0	0,00
Jumlah		**19**	**14**	**19**	**0**	**1**	**7**	**8**	**42,11**

3. Perbandingan Kinerja di Level Nasional/Internasional

Analisa perbandingan kinerja dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja rasio konektivitas transportasi perkeretaapian dengan rasio konektivitas tingkat Kementerian Perhubungan/Nasional. Nilai rasio konektivitas nasional dihitung berdasarkan bobot rasio konektivitas yang tertuang pada rancangan dokumen Rencana Strategis Kementerian Perhubungan meliputi transportasi perkotaan bobot 5% dan transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara

dan transportasi perkeretaapian dengan masing-masing bobot 23,75%. Perbandingan nilai rasio pada Tahun 2025 diuraikan pada Tabel berikut:

Tabel 2-5 Nilai Rasio Konektivitas Antar Wilayah

No	Level / Moda	Rasio Konektivitas
1	Nasional (seluruh moda)	0,627
2	Perkeretaapian	0,460

Berdasarkan Tabel di atas, diperoleh bawah rasio konektivitas transportasi perkeretaapian masih lebih rendah apabila dibandingkan pada level nasional sehingga perlu peningkatan dengan prioritas pengembangan jaringan dan layanan kereta api baru di wilayah Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan. Terkait perbandingan titik yang terkoneksi, transportasi perkeretaapian memberikan dukungan konektivitas wilayah sebanyak 69 titik dari jumlah 1.039 titik (6,64%) yang terhubung secara nasional (134 titik kawasan strategis nasional, daerah terpencil perbatasan kepulauan dan pusat kegiatan nasional, 603 pelabuhan serta 302 bandar udara).

4. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya peningkatan kinerja terhadap indikator rasio konektivitas antar wilayah pada periode berikutnya diantaranya:

a. Penyesuaian Strategi/Kebijakan:

1) Penyelesaian/finalisasi dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 khususnya substansi kegiatan pendukung konektivitas perkeretaapian mengacu perkembangan kebijakan pada RPJMN dan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan;
2) Koordinasi persiapan pengoperasian hasil pembangunan konektivitas diantaranya usulan penetapan skema perintis Tahun 2026 (Rantauprapat Baru-Pondok S5, Binjai - Besitang dan perpanjangan perintis KA Aceh), pengajuan skema sewa aset dan perbaikan infrastruktur (konektivitas Pelabuhan Tanjung Emas);
3) Pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kegiatan pendukung konektivitas transportasi perkeretaapian, diantaranya terkait penyelesaian pemenuhan lahan pendukung konektivitas melalui

LMAN, koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait penetapan lokasi, serta monitoring tahapan pengadaan barang/jasa (MRT Jakarta *East-West Phase* I).

b. Penyesuaian Aktivitas/Anggaran:

Pengoptimalan sisa anggaran Tahun 2025 secara selektif untuk kegiatan pendukung, serta mempersiapkan dokumen pengusulan pada RKA Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2026 berdasarkan skala prioritas RPJMN dan Rencana Strategis guna pemenuhan *readiness criteria,* penyelesaian pengadaan lahan, dan kegiatan-kegiatan pendukung konektivitas lainnya.

c. Penyesuaian organisasi/penempatan jabatan/pegawai:

Pengoptimalan peran inspektur prasarana dan sarana perkeretaapian untuk pelaksanaan pengawasan/inspeksi secara berkala dalam pembangunan prasarana perkeretaapian mendukung konektivitas.

Adapun pencapaian kinerja Rasio Konektivitas Antar Wilayah dengan penambahan keterhubungan jaringan jalur dan layanan kereta api diharapkan dapat menghasilkan *outcome* diantaranya:

a. Peningkatan mobilitas penduduk berupa kemampuan masyarakat untuk bergerak dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan lebih mudah dan efisien.
b. Pengurangan biaya logistik dengan pengiriman barang yang efisien dan distribusi cepat dengan dukungan integrasi antar moda transportasi.
c. Peningkatan ekonomi wilayah dan kualitas hidup Masyarakat dengan kemudahan mengakses lebih banyak pilihan dan layanan, seperti pendidikan, kesehatan, dan pariwisata.

2.2.2 KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA DAN PRASARANA YANG HANDAL

TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN

Tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian merupakan salah satu ukuran untuk mengkaji kinerja perkeretaapian di Indonesia dengan analisa mengacu pada jumlah kecelakaan kereta api dalam 1.000 keberangkatan kereta api baik penumpang maupun barang pada periode tertentu. Kategori kecelakaan kereta

api meliputi anjlokan, terguling, tabrakan KA dengan KA, dan terbakar. Selain itu, terdapat pengecualian kategori kecelakaan kereta api khususnya yang disebabkan oleh keterjadian/pelanggaran pada perpotongan/perlintasan sebidang yang tidak dihitung sebagai kecelakaan kereta api sebagaimana ketentuan:

1. PP 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Pasal 110 Ayat (3) yaitu “Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang menyebabkan kecelakaan, maka hal ini bukan merupakan kecelakaan perkeretaapian”, dimana:
    a. Ayat (1) yaitu Pada perpotongan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan yang selanjutnya disebut dengan perpotongan sebidang yang digunakan untuk lalu lintas umum atau lalu lintas khusus, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api.
    b. Ayat (2) yaitu Pemakai jalan wajib mematuhi semua rambu-rambu jalan di perpotongan sebidang.
2. PM Nomor 69 Tahun 2018 dimana Kecelakaan KA adalah peristiwa atau kejadian pengoperasian sarana kereta api yang mengakibatkan kerusakan sarana kereta api, korban jiwa, dan/atau kerugian harta benda.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, ditargetkan tidak terjadi kecelakaan kereta api (*zero accident*) termasuk target pada periode triwulan dengan nilai tingkat keselamatan 100,00%. Namun sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 telah terjadi kecelakaan kereta api sebanyak 7 kejadian (1 kejadian pada Triwulan I, 1 kejadian pada Triwulan II, 5 kejadian pada Triwulan III) sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 2- 6 Jumlah Kejadian Kecelakaan per Jenis Kejadian Tahun 2025

No	Jenis Kecelakaan	Jumlah Kejadian
1	Tabrakan KA dengan KA	-
2	Anjlokan	7
3	Terguling	-
4	Lain-lain (Terbakar)	-
Jumlah		**7**

Tabel 2- 7 Jumlah Kejadian Kecelakaan per Wilayah Balai Tahun 2025

Wilayah Balai	DAOP/ DIVRE	Bulan									Jumlah
		Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	
BTP Jakarta	Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	**1**	-	**1**
BTP Bandung	Bandung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
	Cirebon	-	-	-	-	-	-	-	**1**	-	**1**
BTP Semarang	Semarang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
	Purwokerto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
	Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
BTP Surabaya	Madiun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
	Surabaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
	Jember	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Pulau Jawa		-	-	-		-	-	-	2	-	2
BTP Medan	Aceh dan Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
BTP Padang	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BTP Palembang	Sumatera Selatan	-	-	1	-	-	1	**2**	**-**	**-**	**4**
	Lampung	-	-	-	-	-	-	**-**	**1**	**-**	**1**
Pulau Sumatera		**-**	**-**	**1**	**-**	**-**	**1**	**2**	**1**	**-**	**5**
Jumlah (Jawa + Sumatera)		**-**	**-**	**1**	**-**	**-**	**1**	**2**	**3**	**-**	**7**

Dengan jumlah kejadian kecelakaan kereta api kumulatif sebanyak 7 kejadian serta jumlah keberangkatan kereta api sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 sebanyak 802.240 KA, maka diperoleh tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian per 1.000 jumlah keberangkatan KA pada periode Triwulan III Tahun 2025 sebesar 99,127% dengan uraian perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian} = \left[1 - \frac{7}{802.240} \times 1.000\right] \times 100\%$$

Data dukung capaian dan perhitungan kinerja pada Lampiran 5.

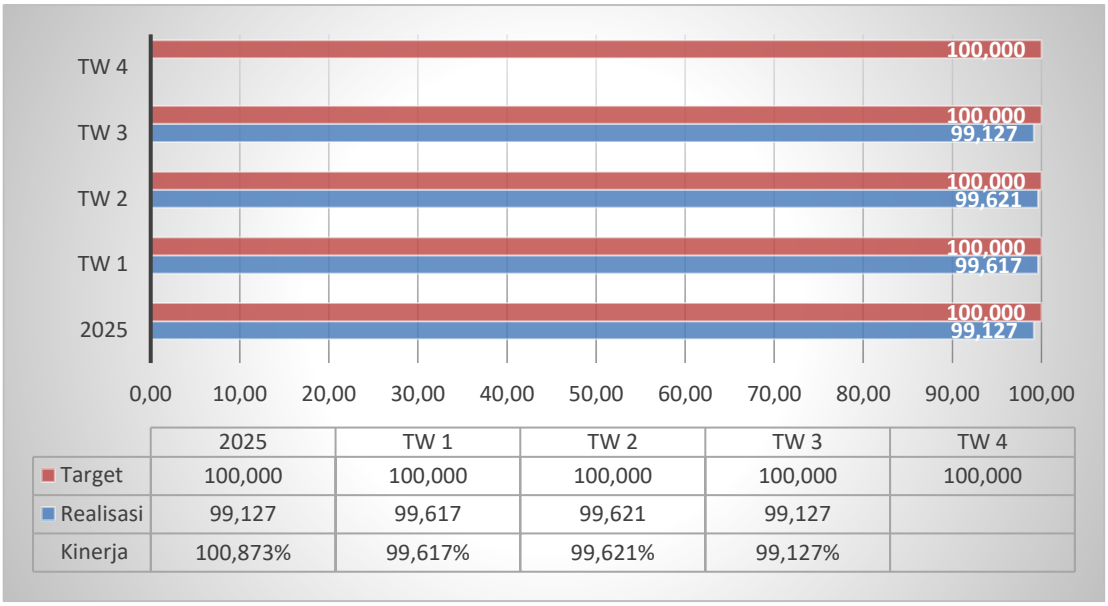
1. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Berdasarkan realisasi tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian per 1.000 jumlah keberangkatan kereta api, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 99,127% dari target yang ditetapkan pada periode Triwulan III dan

Tahun 2025 sebesar 100%. Kejadian kecelakaan kereta api mayoritas terjadi pada lokasi di wilayah Sumatera Bagian Selatan khususnya terhadap kereta api layanan angkutan barang. Realisasi kumulatif per triwulan dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2- 8 Capaian Kinerja Rasio Konektivitas antar Wilayah Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian per 1.000 Jumlah Keberangkatan KA	%	100	100	100	100	100	99,617	99,621	99,127	-	99,617	99,621	99,127	-	99,127



Gambar 2-2 Capaian Kinerja Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian Per Triwulan 2025

2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, terjadi 7 kejadian anjlokan yaitu:

a. Anjlokan KA barang pada emplasemen Stasiun Ujan Mas Sumatera Selatan:

Pada tanggal 15 Maret 2025 pukul 22:30 WIB terjadi kecelakaan anjlokan KA 3100 (Barapati) rangkaian gerbong barang nomor 458905 nomor urut 17 dari lokomotif anjlok 1 As pada pukul 22:30 WIB di KM 381+9/0 jalur II emplasemen Stasiun Ujan Mas (Ujm) wilayah DIVRE III Palembang.

Dampak kejadian kecelakaan KA tidak terdapat korban jiwa, namun terdapat gangguan operasional pada 10 KA dengan andil keterlambatan 21 jam 45 menit. Penyebab kejadian kecelakaan KA masih dalam tahap penelitian.

b. Anjlokan KA barang (Bara Simpang) pada emplasemen Stasiun Banjarsari:

Pada tanggal 23 Juni 2025 pukul 11.10 WIB terjadi anjlokan 4 as pada rangkaian gerbong barang nomor 4212427 nomor urut 1 dari lokomotif. Penyebab kejadian kecelakaan KA masih dalam tahap penelitian.

c. Anjlokan KA Barang (Linggapati):

Pada tanggal 27 Juli 2025 pukul 23:10 WIB KA 3992 terjadi anjlok 5 As pada rangkaian KA barang 3992 Linggapati di KM 389+426 jalur hulu Muaraenim (Me) - Muaragula (Mrl) DIVRE III Palembang.

d. Anjlokan Kereta barang (Barapati) batu bara:

Pada tanggal 29 Juli 2025 pukul 03:40 WIB terjadi anjlok 2 As pada rangkaian KA barang 3106 (Barapati/Isian) di KM 377+821 jalur hulu Ujanmas (Ujm) - Penanggiran (Png) DIVRE III Palembang.

e. Anjlokan Kereta Penumpang (Argo Bromo Anggrek) pada Emplasement Stasiun Pegaden Baru:

Pada tanggal 1 Agustus 2025 pukul 15:47 WIB terjadi anjlok 5 kereta pada rangkaian KA penumpang Argo Bromo Anggrek di emplasemen Stasiun Pegaden Baru DAOP 3 Cirebon.

f. Anjlokan kereta penumpang Commuter Line di emplasemen Stasiun Jakarta Kota:

Pada tanggal 5 Agustus 2025 pukul 07:17 WIB terjadi anjlok 3 As pada rangkaian KA 1189 *Commuter Line* di emplasemen Stasiun Jakarta Kota DAOP 1 Jakarta.

g. Anjlokan Kereta penumpang Kuala Stabas:

Pada tanggal 5 Agustus 2025 pukul 16:29 WIB terjadi anjlok 2 As pada rangkaian kereta penumpang S5 Kuala Stabas di KM 141+2 jalur hilir Negeriagung - Tulungbuyut DIVRE IV Tanjungkarang.

Adapun beberapa upaya yang telah dilakukan guna meningkatkan keselamatan perkeretaapian pada Triwulan III Tahun 2025 diantaranya:

a. Pelaksanaan pengujian dan sertifikasi kelaikan prasarana, sarana dan kompetensi SDM perkeretaapian dengan rincian:
    1) Pengujian prasarana perkeretaapian sebanyak 168 unit dan 319,078 km dengan sertifikasi prasarana perkeretaapian sebanyak 12 sertifikat jalur dan bangunan serta 24 sertifikasi fasilitas operasi;
    2) Pengujian sarana perkeretaapian sebanyak 10.776 unit serta sertifikasi sebanyak 7.232 sertifikat;
    3) Pengujian SDM perkeretaapian sebanyak 6.735 orang dengan sertifikasi sebanyak 5.691 sertifikasi.
b. Pengawasan kondisi prasarana dan sarana perkeretaapian diantaranya melalui inspeksi keselamatan oleh inspektur perkeretaapian termasuk pengawasan oleh Satuan Pelayanan masing-masing wilayah Balai Teknik Perkeretaapian.

Selain itu, juga terdapat beberapa kendala/permasalahan yang perlu penyelesaian diantaranya:

a. Pelaksanaan kegiatan perawatan prasarana (*infrastructure maintenance*/IM) Tahun 2025 belum terlaksana dan sebagian alokasi anggaran yaitu sebesar Rp1.392.084.389.000 akan dilakukan revisi untuk pembayaran *backlog* IMO Tahun 2023 dan sisa alokasi pada masing-masing Balai Teknik Perkeretaapian akan digunakan untuk kegiatan IM yang saat ini masih dalam tahap persiapan dokumen teknis (KAK dan RAB) dikarenakan terdapat penyesuaian terhadap skema pemilihan penyedia;
b. Keterbatasan anggaran akibat efisiensi untuk penanganan daerah rawan kecelakaan dan bencana alam/longsoran/amblesan serta keterbatasan dukungan anggaran pengawasan terhadap kondisi dan perawatan prasarana/sarana perkeretaapian.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain pelaksanaan pengujian, sertifikasi dan inspeksi keselamatan yang memiliki hubungan kerja dengan badan usaha penyelenggara prasarana/sarana/ operator perkeretaapian. Selain itu, juga dilakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait penyelesaian kendala keterbatasan anggaran

akibat kebijakan efisiensi anggaran dengan relaksasi khususnya untuk kegiatan pendukung keselamatan transportasi perkeretaapian.

Selain itu, dalam mendukung pencapaian target kinerja tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian, juga dilakukan pengelolaan kinerja berbasis risiko melalui pemantauan dan pelaksanaan penanganan risiko terhadap kegiatan pendukung IKP yang dilakukan secara berkala/triwulan. Berdasarkan profil risiko unit kerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025, terdapat 16 risiko yang diidentifikasi dari 3 proses bisnis terkait IKP tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian. Dari 16 risiko tersebut, terdapat 11 risiko yang penilaiannya di atas selera risiko dan memerlukan penanganan risiko dimana telah direncanakan 18 kegiatan penanganan risiko pada Tahun 2025.

Pada periode sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, penanganan risiko telah terealisasi sebanyak 8 kegiatan atau sebesar 44,44% dari 18 rencana penanganan risiko pada Tahun 2025. Adapun rincian realisasi rencana penanganan risiko yang telah dilakukan s.d Triwulan III sebagai berikut:

1. Persiapan pembentukan BUPP;
2. Perbaikan tata kelola IMO;
3. Penyampaian surat himbauan terkait dengan kondisi cuaca ekstrim dan daerah rawan bencana (banjir dan longsor);
4. Koordinasi usulan program prioritas perawatan di lokasi yang rawan terjadi kegagalan sistem persinyalan;
5. Bersurat kepada badan usaha, Balai Teknik, dan Balai Pengelola untuk menginventaris prasarana yang belum disertifikasi guna selanjutnya sebagai dasar pengajuan pengujian kelaikan prasarana;
6. Menentukan jadwal/*timeline* pelaksanaan pengujian dam sertifikasi yang disepakati oleh Badan usaha;
7. Pengembangan metode pelaksanaan bimbingan teknis dengan penerapan praktek di lapangan;
8. Koordinasi dengan operator terkait pelaksanaan pengujian dan sertifikasi sarana sesuai jadwal yang telah ditentukan termasuk melalui sistem TIK.

Tabel 2- 9 Realisasi Penanganan Risiko IKK Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian s.d Triwulan III 2025

No	Proses Bisnis	Jumlah/ Populasi Risiko (Form 5)	Jumlah Penanganan Risiko (Form 8)		Realisasi Penanganan Risiko (Form 9)				
			Risiko	Kegiatan Penanganan	TW I	TW II	TW III	Kumulatif (s.d TW III)	%
1	Pengelolaan Keselamatan Perkeretaapian	6	6	10	2	1	1	4	40,00
2	Keselamatan dan Keamanan Bidang Prasarana Perkeretaapian	3	3	6	1	1	1	3	50,00
3	Keselamatan dan Keamanan Bidang Sarana Perkeretaapian	7	2	2	1	0	0	1	50,00
Jumlah		**16**	**11**	**18**	**4**	**2**	**2**	**8**	**44,44**

Pada periode Triwulan III Tahun 2025, terdapat 3 keterjadian peristiwa risiko terkait IKK tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian yaitu risiko jalur kereta api tidak sesuai spesifikasi teknis/rusak/rel aus/putus, kegagalan sistem persinyalan, serta tidak terpenuhi kebutuhan sarana milik negara dalam pelaksanaan pengawasan/inspeksi/lainnya. Risiko tersebut berdampak pada terjadinya kecelakaan kereta api (indikasi penyebab) termasuk tidak optimalnya kegiatan pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian, sehingga memerlukan tindakan preventif dan korektif peningkatan keselamatan pada periode berikutnya.

3. Perbandingan Kinerja di Level Nasional/Internasional

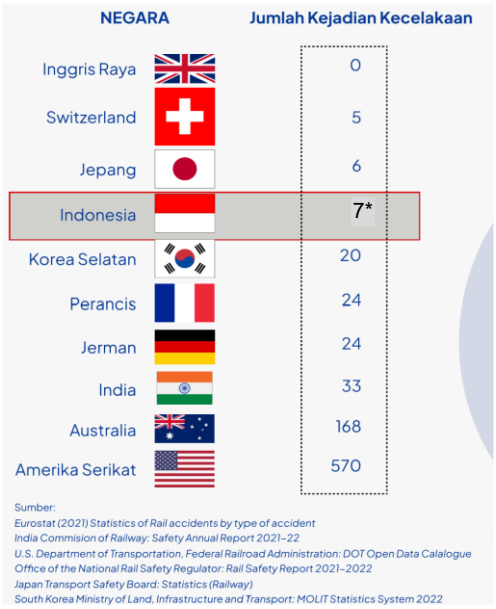
Jumlah kejadian kecelakaan dilakukan perbandingan dengan beberapa negara lain mengacu pada publikasi Pemerintah Amerika Serikat dan Belgia dengan kejadian kecelakaan kereta api yang dihitung berupa *derailment* (anjlokan) dan *collision* (tabrakan). Dikarenakan keterbatasan data *benchmarking*, perbandingan kinerja dilakukan antara data beberapa negara lain periode Tahun 2024 dengan data Indonesia periode Triwulan III Tahun 2025. Berdasarkan data tersebut, diperoleh bahwa kejadian kecelakaan kereta api di Indonesia masih jauh lebih rendah dibandingkan Amerika Serikat namun lebih tinggi dibandingkaan dengan Belgia. Demikian juga apabila mempertimbangkan panjang jalur kereta api, maka kinerja Indonesia masih lebih baik dari Amerika Serikat namun lebih buruk dari Belgia.

Tabel 2- 10 Kejadian Kecelakaan Perkeretaapian

No	Negara	Panjang Jalur KA (Km)	Kejadian Kecelakaan	Jumlah Kecelakaan/ Panjang Jalur KA
1	Amerika Serikat	148.574	498	0,0034
2	Belgia	8.298	1	0,0001
3	Indonesia	6.936	7	0,0010

Sumber No.1 : Website U.S. Department of Transportation
Sumber No.2 : Portal Open Data Infrabel

Mengacu beberapa sumber lain, juga diperoleh perbandingan jumlah kejadian kecelakaan KA dengan beberapa negara sebagaimana Gambar berikut.



*Keterangan: *) kinerja Indonesia Triwulan III 2025 dibandingkan kinerja negara lain 2021-2024*

Gambar 2-3 Perbandingan Jumlah Kejadian Kecelakaan KA dengan Beberapa Negara

Selain itu, juga dilakukan perbandingan kinerja di level nasional dengan sub sektor transportasi lainnya yaitu transportasi laut dan udara pada Triwulan III Tahun 2025. Untuk transportasi laut sampai dengan periode Triwulan III Tahun 202 diperoleh jumlah kejadian kecelakaan sebanyak 80 kejadian dan dibandingkan dengan jumlah Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sebanyak 957.003 keberangkatan sehingga diperoleh tingkat keselamatan sebesar 99,991%. Sedangkan untuk transportasi udara diperoleh nol kejadian kecelakaan (*zero accident*) dan dibandingkan dengan jumlah keberangkatan penerbangan pesawat sebanyak 158.531 keberangkatan sehingga diperoleh tingkat keselamatan sebesar 100,00%.

Berdasarkan data di atas, maka diperoleh kinerja tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian masih lebih rendah dibandingkan transportasi laut dan udara sehingga diperlukan upaya peningkatan keselamatan perkeretaapian yang lebih intensif sesuai dengan faktor penyebab terjadinya kecelakaan kereta api (khususnya anjlokan).

4. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya peningkatan kinerja untuk mendukung tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian pada periode berikutnya antara lain:

a. Penyesuaian strategi/kebijakan:

1) Pelaksanaan inspeksi/*rampcheck* kondisi prasarana dan sarana perkeretaapian sebagai persiapan penyelenggaraan angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 termasuk upaya pencegahan terjadinya risiko jalur kereta api tidak sesuai spesifikasi teknis/rusak/rel aus/putus dan kegagalan sistem persinyalan yang dapat berdampak pada kejadian kecelakaan kereta api;
2) Monitoring dan evaluasi terhadap manajemen tanggap darurat serta tindak lanjut rekomendasi peningkatan keselamatan perkeretaapian khususnya penanganan pasca kejadian kecelakaan kereta api sebagai acuan dalam tindakan preventif dan korektif periode berikutnya;
3) Usulan perbaikan mekanisme pelaporan badan usaha dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi guna mempermudah pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian (prasarana, sarana, lalu lintas, angkutan, keselamatan, SDM, lainnya).

b. Penyesuaian Aktivitas/Anggaran:

1) Percepatan penyiapan dokumen teknis serta pelaksanaan kegiatan perawatan prasarana perkeretaapian milik negara Tahun 2025 sesuai skema pemilihan penyedia berdasarkan ketentuan;

2) Usulan revisi anggaran untuk pemanfaatan sisa kontrak/sisa anggaran yang potensi tidak terserap s.d akhir Tahun 2025 untuk pemenuhan pembayaran *backlog* IMO periode sebelumnya dan/atau penanganan rintang jalan/daerah rawan kecelakaan/bencana alam/longsoran/amblesan.

c. Penyesuaian organisasi/penempatan jabatan/pegawai:

Penyesuaian penugasan inspektur prasarana dan sarana perkeretaapian serta anggota Satuan Pelayanan pada masing-masing wilayah Balai Teknik Perkeretaapian berdasarkan kompetensi dalam pelaksanaan pengawasan/inspeksi keselamatan perkeretaapian.

Kinerja tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian diharapkan dapat semaksimal mungkin menghasilkan *outcome* sebagai berikut:

a. Peningkatan keselamatan perjalanan angkutan penumpang, dimana penumpang dapat merasa lebih aman dan nyaman selama perjalanan dengan meminalkan risiko kecelakaan.
b. Peningkatan kepercayaan publik, dimana masyarakat akan lebih cenderung memilih kereta api sebagai moda transportasi yang handal dan selamat.
c. Peningkatan produktivitas dan efisiensi pelayanan angkutan kereta api, dimana diketahui kejadian kecelakaan akan mengakibatkan jalur kereta api tidak dapat dilalui sehingga menganggu operasional kereta api dan mengakibatkan keterlambatan perjalanan kereta api. Selain itu, juga berbanding lurus dengan minimnya anggaran yang diperlukan guna perbaikan prasarana dan sarana kereta api sehingga terjadi penghematan biaya pemeliharaan dan perbaikan operasional kereta api.

2.2.3 MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN

Sasaran program kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang terpercaya dan sesuai kebutuhan diukur dengan 3 Indikator Kinerja Program (IKP) yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian, Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP) dan Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api.

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Nilai IKM Direktorat Jenderal Perkeretaapian meliputi layanan administrasi Pemerintahan sebagai regulator penyelenggaraan perkeretaapian (perijinan, sertifikasi, pengujian, dan lainnya) serta layanan angkutan kereta api yang diselenggarakan oleh unit kerja termasuk Badan Layanan Umum (BLU) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Nilai IKM Direktorat Jenderal Perkeretaapian diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Direktorat Sarana Perkeretaapian, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, Balai Pengujian Perkeretaapian, Balai Pengelola Kereta Api Ringan (BPKAR) Sumatera Selatan dan Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan. Adapun nilai IKM dibagi menjadi 4 kategori, yaitu:

Tabel 2-11 Kategori Kinerja Nilai IKM

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,000 – 2,599	D	Tidak Baik
2	2,600 – 3,064	C	Kurang Baik
3	3,065 – 3,532	B	Baik
4	3,533 – 4,000	A	Sangat Baik

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, ditetapkan target kinerja nilai IKM Tahun 2025 dan periode Triwulan III sebesar 3,772. Adapun hasil survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 2-12 Hasil Survey Nilai IKM Bulan Januari s.d September Tahun 2025

Unit Kerja	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
Dit LLAKA	3,73	3,94	3,81	3,83	-	3,66	4,00	3,40	3,66
Dit Prasarana	3,75	4,00	3,91	4,00	3,80	3,84	3,87	3,97	3,73
Dit Sarana	4,00	4,00	3,34	4,00	4,00	3,60	3,60	3,77	3,83
Dit Keselamatan	3,64	4,00	3,70	3,40	3,84	4,00	3,87		3,58
BPKAR Sumatera Selatan	3,58	3,58	3,57	3,58	3,57	3,58	3,58	3,59	3,60
BPKAR Sumatera Selatan -PPTB	3,97	3,94	4,00	3,97	-	3,89	3,90	3,95	3,90
Balai Pengujian	3,88	3,88	3,80	3,85	3,83	3,83	3,84	3,83	3,84
BPKA Sulawesi Selatan	3.37	3.28	3.38	3,43	3,46	3,30	3,31	3,48	3,23
Rata-rata per bulan	**3,79**	**3,91**	**3,73**	**3,80**	**3,75**	**3,77**	**3,81**	**3,71**	**3,67**
Rata-rata Triwulan I-III	**3,772**								

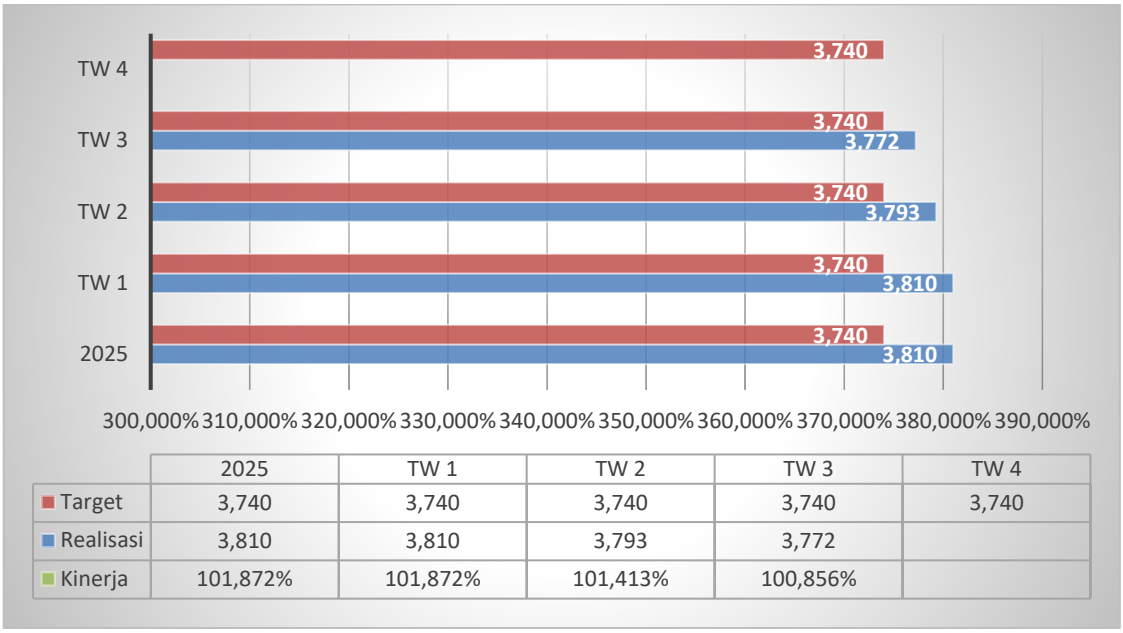
Data dukung capaian dan perhitungan kinerja pada Lampiran 5.

1. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Berdasarkan rata-rata hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik bidang perkeretaapian pada Triwulan III Tahun 2025, diperoleh nilai IKM sebesar 3,772. Nilai tersebut dibandingkan dengan target nilai IKM berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 3,740 baik target tahunan maupun target triwulan, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 100,856%. Nilai IKM tertinggi pada periode bulan Februari 2025, sedangkan nilai IKM terendah pada periode bulan September 2025. Realisasi kumulatif per triwulan sebagaimana dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-13 Capaian Kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,810	3,793	3,772	-	101,872	101,413	100,856	-	100,856



	2025	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Target	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740
Realisasi	3,810	3,810	3,793	3,772	
Kinerja	101,872%	101,872%	101,413%	100,856%	

Gambar 2-4 Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2025

2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Nilai IKM Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan nilai rata-rata IKM setiap bulan dari masing-masing unit kerja selama periode Triwulan I-III Tahun 2025 sehingga diperoleh nilai 3,772 atau dapat diintrepretasikan bahwa kinerja unit pelayanan telah sangat baik. Pelayanan publik bidang perkeretaapian meliputi layanan administrasi Pemerintahan sebagai regulator (perijinan, sertifikasi, pengujian, dan lainnya) serta layanan angkutan kereta api yang diselenggarakan oleh unit kerja termasuk badan layanan umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Pada Triwulan III Tahun 2025, pelaksanaan survey IKM dilaksanakan secara parsial menggunakan aplikasi 3A IPK yang dikelola oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan serta dilengkapi dengan penggunaan *google form* pada beberapa unit kerja seperti Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan dan Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan. Adapun beberapa faktor keberhasilan dalam pencapaian kinerja diantaranya:

a. Pelayanan sertifikasi kelaikan/kompetensi sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 telah dilaksanakan yaitu:
    1) Pelayanan sertifikasi kelaikan prasarana perkeretaapian sebanyak 36 sertifikat terdiri dari 12 penetapan sertifikat jalur dan bangunan serta 24 sertifikat fasilitas operasi;
    2) Pelayanan sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian sebanyak 7.232 sertifikat;
    3) Pelayanan sertifikasi kompetensi SDM Perkeretaapian sebanyak 5.691 sertifikat.
b. Pelayanan izin usaha/operasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 sebanyak 15 perizinan serta izin perpotongan dan/atau persinggungan jalur kereta api dengan bangunan lain sebanyak 34 perizinan.
c. Peningkatan pelayanan penumpang kereta api khususnya yang dikelola Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan dan Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan, dengan beberapa upaya diantaranya:
    1) Tindak lanjut terhadap aduan yang disampaikan pada beberapa kanal (*chat centre*, surel, SP4N, Media Sosial, Survei Kepuasan);
    2) Penyesuaian harga khusus pada momen-momen tertentu seperti Kemerdekaan Republik Indonesia;
    3) Kehandalan SDM dalam memberikan layanan serta pemenuhan kualitas dan tahapan pelayanan sesuai proses bisnis/SOP yang telah ditetapkan, diantaranya pelatihan bahasa isyarat di BPKAR Sumatera Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 9 s.d. 11 Juli 2025;
    4) Pemberlakukan sistem pemesanan tiket *online* mulai H-7 sebelum keberangkatan pada BPKA Sulawesi Selatan;
    5) Melakukan sosialisasi tiket *infant* pada sistem penjualan tiket KA Makassar-Parepare.
d. Pelaksanaan sosialisasi layanan dan survei IKM kepada *stakeholder*, termasuk upaya penambahan jumlah responden dengan perluasan pelaksanaan survei melalui *google form* untuk mempermudah pengisian responden.
e. Pemanfaatan sistem informasi diantaranya pada layanan pengujian, sertifikasi kelaikan sarana serta sertifikasi kompetensi SDM perkeretaapian, sehingga penyelesaian layanan dapat tepat waktu serta

menjaga kualitas pelayanan sesuai prosedur dan alur yang telah ditetapkan. Adapun beberapa upaya pengembangan sistem informasi yang sedang dilaksanakan antara lain:

1) Pengembangan fitur perizinan *online* pada Portal Layanan dan Data Ditjen Perkeretaapian dengan progres pada Triwulan III Tahun 2025 adalah pembahasan laporan kemajuan/antara;
2) Penyempurnaan fitur perizinan *crossing* pada Portal Layanan dan Data Ditjen Perkeretaapian untuk persiapan ujicoba penggunaan termasuk telah dilakukan sinkronisasi penggunaan SSO Hubnet.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan layanan dan pelaksanaan survei IKM diantaranya:

a. Kendala pada saat pelaksanaan survey Indeks Kepuasan Masyarakat diantaranya kurangnya responden survey dan kesulitan beberapa responden dalam mengakses *link* survei dikarenakan alat/media komunikasi responden yang kurang mendukung;
b. Gangguan/*error* sistem informasi yang menyebabkan tertundanya persetujuan dan penerbitan sertifikat diantaranya sertifikat kompetensi SDM perkeretaapiaan.

Dalam penyelenggaraan penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) juga telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain hubungan kerja dengan badan usaha/operator perkeretaapian/Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan layanan regulator bidang perkeretaapian serta melibatkan masyarakat/publik sebagai pengguna kereta api dan sektor terkait lainnya seperti sektor industri perkeretaapian.

Selain itu, dalam mendukung pencapaian target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik bidang perkeretaapian, juga dilakukan pengelolaan kinerja berbasis risiko melalui pemantauan dan pelaksanaan penanganan risiko terhadap kegiatan pendukung IKP yang dilakukan secara berkala/triwulan. Berdasarkan profil risiko unit kerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025, terdapat 7 risiko yang diidentifikasi dari 2 proses bisnis terkait IKP Indeks Kepuasan Masyarakat. Dari 7 risiko tersebut, terdapat 3 risiko yang penilaiannya di atas selera risiko dan memerlukan penanganan

risiko dimana telah direncanakan 3 kegiatan penanganan risiko pada Tahun 2025.

Pada periode sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, penanganan risiko telah terealisasi sebanyak 1 kegiatan atau sebesar 33,33% dari 3 rencana penanganan risiko pada Tahun 2025. Realisasi rencana penanganan risiko yang telah dilakukan s.d Triwulan III adalah pengoptimalan anggaran yang tersedia/pemanfaatan pembiayaan PNBP.

Tabel 2-14 Realisasi Penanganan Risiko IKP Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian Transportasi Kereta Api s.d Triwulan III 2025

No	Proses Bisnis	Jumlah/ Populasi Risiko (Form 5)	Jumlah Penanganan Risiko (Form 8)		Realisasi Penanganan Risiko (Form 9)				
			Risiko	Kegiatan Penanganan	TW I	TW II	TW III	Kumulatif (s.d TW III)	%
1	Pelayanan Transportasi Sarana Perkeretaapian	2	2	2	0	0	0	0	0,00
2	Pelayanan Transportasi Keselamatan Perkeretaapian	5	1	1	0	1	0	1	100,00
Jumlah		**7**	**3**	**3**	**0**	**1**	**0**	**1**	**33,33**

Pada periode Triwulan III Tahun 2025, terdapat 1 keterjadian peristiwa risiko terkait IKK Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu layanan sistem informasi sertifikasi SDM Perkeretaapian tidak berfungsi optimal/terhambat. Risiko tersebut berpotensi berdampak pada tingkat kepuasan pengguna layanan sertifikasi sehingga perlu upaya pemeliharaan dan *update* sistem untuk peningkatan keamanan guna mencegah serangan siber/*hacker*.

3. Perbandingan Kinerja di Level Nasional/Internasional

Terkait analisa perbandingan dilakukan terhadap capaian kinerja IKM dibandingkan dengan level Kementerian Perhubungan/Nasional selama Triwulan III Tahun 2025 dengan uraian sebagaimana pada Tabel berikut:

Tabel 2-15 Perbandingan Nilai IKM

No	Unit Kerja	Nilai IKM
1	Kementerian Perhubungan	3,828
2	Ditjen Perkeretaapian	3,772

Catatan: Nilai IKM dihitung kumulatif pada Triwulan II Tahun 2025

Berdasarkan data di atas, diperoleh bahwa nilai IKM Direktorat Jenderal Perkeretaapian masih lebih rendah dari Nilai IKM Kementerian Perhubungan sehingga perlu peningkatan kinerja untuk memenuhi capaian di level Kementerian Perhubungan.

4. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada periode mendatang meliputi beberapa langkah antara lain:

a. Penyesuaian strategi/kebijakan:

1) Peningkatan keamanan sistem terkait layanan regulator perkeretaapian (perizinan, sertifikasi, pengujian, lainnya) untuk mencegah terjadinya gangguan pada layanan serta lanjutan pengembangan fitur Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai *superapps* yang terpadu dan terintegrasi;
2) Memfasilitasi serta menindaklanjuti layanan pengaduan pelayanan angkutan penumpang khususnya pada layanan kereta api yang dikelola oleh BPKAR Sumatera Selatan dan BPKA Sulawesi Selatan diantaranya melalui *barcode* pada *area boarding* dan sosial media;
3) Berpartisipasi dalam monitoring dan evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan Kementerian Perhubungan serta dukungan pelaksanaan penilaian kepatuhan pelayanan publik Tahun 2025 oleh Ombudsman.

b. Penyesuaian aktivitas dan anggaran:

Pengoptimalan sisa anggaran Tahun 2025 secara selektif untuk kegiatan pendukung termasuk memastikan pemenuhan anggaran angkutan perintis sampai akhir Tahun 2025, serta mempersiapkan dokumen pengusulan pada RKA Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2026 berdasarkan skala prioritas layanan regulator dan angkutan perintis perkeretaapian.

c. Penyesuaian organisasi/penempatan jabatan/pegawai:

Pelaksanaan layanan sertifikasi/pengujian didukung dengan penyesuaian penugasan pegawai fungsional tertentu perkeretaapian sesuai bidang tugas dan kompetensinya (penguji, asisten penguji, lainnya).

Pencapaian target kinerja untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik bidang perkeretaapian diharapkan menghasilkan *outcome* berupa peningkatan kepercayaan publik yang menggambarkan bahwa masyarakat merasa puas terhadap layanan penyelenggaraan perkeretaapian.

PERSENTASE CAPAIAN *ON TIME PERFORMANCE* (OTP)

On Time Performance (OTP) adalah ukuran kinerja ketepatan waktu dalam menjalankan jadwal yang telah ditentukan dengan mengukur seberapa sering kereta api tiba/berangkat di stasiun sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Target *On Time Performance* (OTP) transportasi kereta api yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 96,100% baik untuk angkutan kereta api penumpang dan barang serta juga mencakup keberangkatan dan kedatangan perjalanan kereta api.

Pada Triwulan III Tahun 2025, diperoleh jumlah realisasi perjalanan kereta api penumpang dan barang (kedatangan dan keberangkatan) yang tepat waktu sesuai jadwal sebanyak 785.753 KA dibandingkan dengan total perjalanan kereta api baik kedatangan dan keberangkatan sebanyak 802.240 KA. Secara rinci realisasi perjalanan kereta api sebagaimana pada Tabel berikut.

Tabel 2-16 Realisasi Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Tepat Waktu Tahun 2025

Bulan	Realisasi Perjalanan		Realisasi KA Datang Tepat Waktu		Realisasi KA Berangkat Tepat Waktu		Rata-Rata		Persentase Capaian	
	Bulanan	Akumulatif	Bulanan	Akumulatif	Bulanan	Akumulatif	Bulanan	Akumulatif	Bulanan	Akumulatif
Jan	88.400	88.400	84.977	84.977	87.471	87.471	86.224	86.224	97,538%	97,538%
Feb	82.048	170.448	78.216	163.193	80.941	168.412	79.579	165.803	96,990%	97,275%
Mar	90.720	261.168	87.414	250.607	89.785	258.197	88.600	254.402	97,663%	97,409%
Apr	88.057	349.225	85.441	336.048	87.236	345.433	86.339	340.741	98,048%	97,570%
Mei	90.758	439.983	88.663	424.711	90.174	435.607	89.419	430.159	98,524%	97,767%
Jun	87.946	527.929	86.072	510.783	87.404	523.011	86.738	516.897	98,626%	97,910%
Jul	92.548	620.477	90.269	601.052	91.770	614.781	91.020	607.917	98,348%	97,976%
Agu	92.295	712.772	88.957	690.009	91.000	705.781	89.979	697.895	97,490%	97,913%
Sep	**89.468**	**802.240**	**86.976**	**776.985**	**88.740**	**794.521**	**87.858**	**785.753**	**98,200%**	**97,945%**

Dengan realisasi perjalanan kereta api tepat waktu sebanyak 785.753 KA dibandingkan jumlah keseluruhan perjalanan kereta api pada periode Triwulan III Tahun 2025 sebanyak 802.240 KA, maka diperoleh realisasi persentase *On Time Performance* (OTP) sebesar 97,945%, dengan uraian perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase } \textit{On Time Performance} \text{ (OTP) Transportasi Perkeretaapian} = \frac{785.753 \text{ KA}}{802.240 \text{ KA}} \times 100\%$$

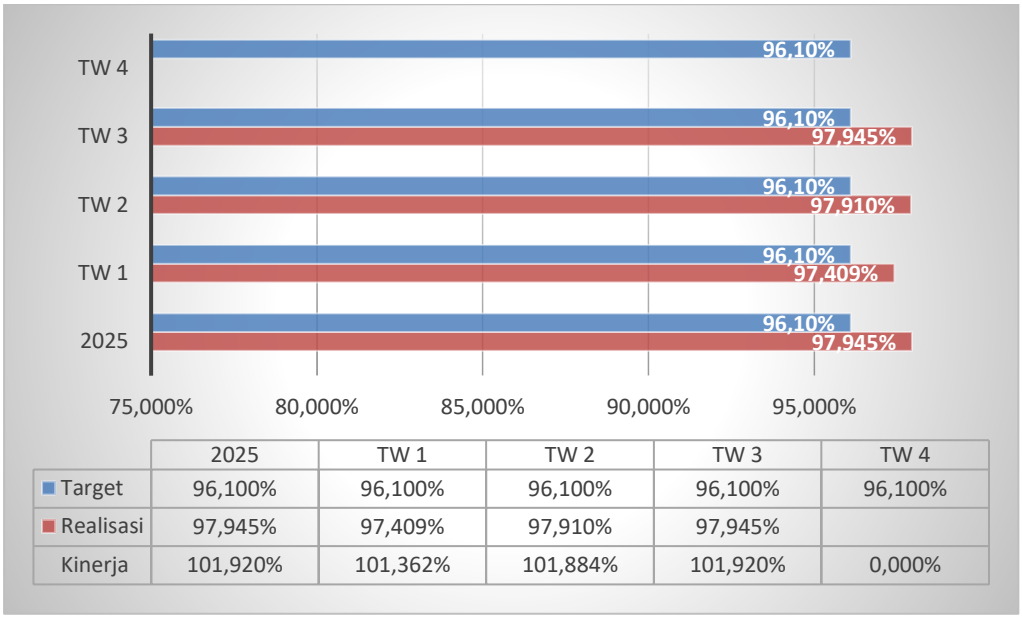
Data dukung capaian dan perhitungan kinerja pada Lampiran 5.

1. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan realisasi OTP sebesar 97,945%, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 101,920% dibandingkan dengan target Triwulan III dan target Tahun 2025 sebesar 96,100%. Secara umum realisasi kinerja pada Triwulan III terdapat peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Realisasi kumulatif per triwulan dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-17 Capaian Kinerja Persentase *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api	%	96,100	96,100	96,100	96,100	96,100	97,409	97,910	97,945	-	101,362	101,884	101,920	-	101,920



Gambar 2-5 Capaian Kinerja Persentase *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api Per Triwulan Tahun 2025

2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Beberapa faktor tercapainya target kinerja pada periode Triwulan III Tahun 2025 diantaranya:

a. Terpenuhinya target *on time performance* pada beberapa jenis pelayanan kereta api khususnya angkutan KA perkotaan seperti MRT Jakarta (99,98%), LRT Jakarta (99,98%), LRT Sumatera Selatan (99,82%), dan LRT Jabodebek (99,55%);

b. Telah dilaksanakan evaluasi kinerja operasi pada jaringan jalur kereta api nasional pada kereta api ringan terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi, serta kereta api kecepatan tinggi Jakarta - Bandung pada tanggal 22 Agustus 2025;

c. Koordinasi secara aktif dengan Badan Usaha Penyelenggara Prasarana dan Balai Teknik Perkeretaapian terhadap penyebab dan penanganan kejadian kelambatan perjalanan kereta api serta mengantisipasi potensi adanya rintang jalan. Sebagai contoh, pada masa angkutan Lebaran Idul Fitri dan masa libur Idul Adha Tahun 2025 telah dilaksanakan koordinasi teknis dengan *stakeholders* (PT. KAI, PT. MRT, PT. KCI, PT. KCIC) yang mencakup rencana operasi, kesiapan sarana, prasarana dan SDM termasuk identifikasi daerah rawan dan upaya preventif dan mitigasinya;
d. Secara rutin melaksanakan evaluasi berkala (triwulan) terhadap realisasi perjalanan kereta api sesuai GAPEKA yang berlaku sehingga perjalanan KA dapat sesuai jadwal dan keterlambatan dapat diminimalisir.

Selain itu, dalam pencapaian kinerja *On Time Performance* (OTP) transportasi kereta api selama periode Triwulan III juga mengalami beberapa kendala/hambatan akibat berbagai kendala operasional yang terjadi di sejumlah wilayah operasi dengan beberapa peristiwa menonjol antara lain:

a. Insiden anjloknya KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Pegadenbaru, Subang, pada Agustus 2025 yang menyebabkan gangguan signifikan pada jalur utama lintas utara serta berdampak sistemik terhadap jadwal perjalanan kereta jarak jauh;
b. Kejadian ganggguan keamanan di perlintasan sebidang yang masih menjadi penyumbang terbesar terhadap keterlambatan perjalanan KA, terutama akibat tabrakan dengan kendaraan berukuran besar yang menimbulkan kerusakan sarana maupun prasarana serta memerlukan waktu penanganan yang cukup lama;
c. Gangguan teknis pada sarana perkeretaapian, seperti permasalahan pada kereta pembangkit, juga turut menyebabkan keterlambatan dan penurunan efisiensi jadwal operasi;
d. Kondisi cuaca ekstrem yang mengakibatkan genangan air pada beberapa titik jalur KA;
e. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan penyesuaian pola operasi juga turut memengaruhi ketepatan waktu perjalanan KA.

Secara keseluruhan, berbagai gangguan perjalanan KA tersebut menunjukkan bahwa capaian OTP masih dipengaruhi oleh kombinasi faktor eksternal dan internal termasuk aspek keselamatan dan keamanan, kesiapan sarana dan prasarana, serta kondisi cuaca. Oleh karena itu, diperlukan langkah perbaikan berkelanjutan untuk menjaga stabilitas ketepatan waktu perjalanan kereta api pada periode berikutnya diantaranya peningkatan pengamanan perlintasan sebidang, optimalisasi pemeliharaan sarana dan prasarana, serta penguatan sistem manajemen operasi.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) melalui berbagai bentuk koordinasi lintas sektor dan sinergi antar-pemangku kepentingan di bidang perkeretaapian. Koordinasi teknis dilakukan secara intensif antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan badan usaha penyelenggara sarana dan prasarana (PT. KAI, PT. KCI, PT. MRT Jakarta, PT. KCIC, dan lainnya). Bentuk kerja sama tersebut meliputi pembahasan dan pemantauan kinerja operasi harian jaringan kereta api nasional, termasuk kereta api ringan terintegrasi Jabodetabek dan kereta cepat Jakarta–Bandung yang telah dievaluasi secara langsung. Koordinasi lainnya juga dilakukan untuk mengantisipasi dan menanggulangi potensi gangguan perjalanan khususnya terkait kejadian anjlokan, gangguan keamanan di perlintasan sebidang, serta gangguan teknis sarana dan prasarana.

Selain itu, koordinasi lintas bidang juga dilaksanakan dalam pengelolaan dan evaluasi GAPEKA secara berkala dengan memperhatikan masukan dari badan usaha/operator perkeretaapian, Pemerintah Daerah, serta masyarakat pengguna jasa transportasi. Pelaksanaan berbagai bentuk koordinasi lintas bidang tersebut berkontribusi positif terhadap pencapaian target OTP, khususnya pada layanan kereta perkotaan yang berhasil mempertahankan tingkat ketepatan waktu di atas 99%.

Dalam mendukung pencapaian target *On Time Performance*, juga dilakukan pengelolaan kinerja berbasis risiko melalui pemantauan dan pelaksanaan penanganan risiko terhadap kegiatan pendukung IKP yang dilakukan secara berkala/triwulan. Berdasarkan profil risiko unit kerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025, terdapat 8 risiko yang diidentifikasi dari 1 proses

bisnis terkait IKP persentase *On Time Performance*. Dari 8 risiko tersebut, penilaian seluruhnya di atas selera risiko dan memerlukan penanganan risiko dimana telah direncanakan 14 kegiatan penanganan risiko pada Tahun 2025.

Pada periode sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, penanganan risiko telah terealisasi sebanyak 7 kegiatan atau sebesar 50,00% dari 14 rencana penanganan risiko pada Tahun 2025. Adapun rincian realisasi rencana penanganan risiko yang telah dilakukan s.d Triwulan III sebagai berikut:

a. Memastikan kesiapan *readiness criteria* sesuai ketentuan sebelum diprogramkan/dianggarkan (perencanaan teknis, perizinan, kesiapan lahan);
b. Sosialiasi anti gratifikasi melalui media sosial;
c. Penyusunan SOP Mikro terkait perizinan pemanfaatan prasarana;
d. Pengawasan pembangunan prasarana perkeretaapian umum/khusus yang dibangun oleh Badan Usaha;
e. Inventarisasi data pemanfaatan prasarana/lokasi utilitas di sepanjang jalur KA yang tidak memiliki izin;
f. Surat pemberitahuan/teguran untuk pemanfaatan prasarana/lokasi sudah terbangun namun belum memiliki izin;
g. Sinkronisasi data izin pemanfaatan prasarana perkeretaapian.

Tabel 2-18 Realisasi Penanganan Risiko IKP On Time Performance (OTP) Transportasi Kereta Api s.d Triwulan III 2025

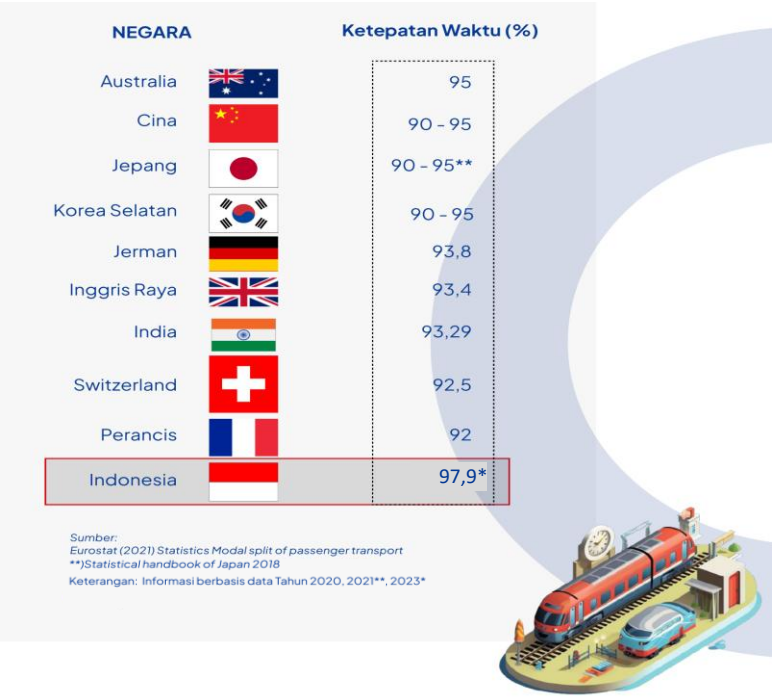
No	Proses Bisnis	Jumlah/ Populasi Risiko (Form 5)	Jumlah Penanganan Risiko (Form 8)		Realisasi Penanganan Risiko (Form 9)				
			Risiko	Kegiatan Penanganan	TW I	TW II	TW III	Kumulatif (s.d TW III)	%
1	Pelayanan Transportasi Prasarana Perkeretaapian	8	8	14	1	3	3	7	50,00
Jumlah		**8**	**8**	**14**	**1**	**3**	**3**	**7**	**50,00**

Pada periode Triwulan III Tahun 2025, terdapat beberapa keterjadian peristiwa risiko terkait persentase *On Time Performance* diantaranya risiko gangguan operasional perjalanan KA akibat gangguan teknis sarana dan prasarana perkeretaapian serta faktor eksternal (vandalisme), serta risiko gangguan keamanan di perlintasan sebidang jalur kereta api akibat faktor eksternal

(kelalaian pengguna jalan, kendaraan mogok/muatan berlebihan, dan lain-lain). Risiko tersebut berdampak pada terjadinya keterlambatan perjalanan kereta api sehingga memerlukan tindakan preventif dan korektif peningkatan kelancaran perjalanan kereta api pada periode berikutnya.

3. Perbandingan Kinerja di Level Nasional/Internasional

Perbandingan capaian kinerja *On Time Performance* (OTP) dilakukan dengan membandingkan OTP di beberapa negara lain diantaranya mengacu pada publikasi *Eurostat* (*Statistics Modal Split of Passenger Transport*) dan *Statistical Handbook of Japan*. Berdasarkan data tersebut, diperoleh bahwa kinerja OTP perjalanan kereta api di Indonesia cukup baik dan setara apabila dibandingkan dengan OTP layanan perkeretaapian di negara-negara Eropa, Jepang, Cina, Korea Selatan, India dan Australia yang mencapai kinerja 90-95%. Data kinerja OTP di beberapa negara disampaikan sebagaimana pada Gambar berikut.



*Keterangan: *) kinerja Indonesia Triwulan III 2025 dibandingkan kinerja negara lain 2021-2024*

Gambar 2-6 Perbandingan *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api dengan Beberapa Negara

Selain itu, juga dilakukan perbandingan kinerja dengan sub sektor transportasi lainnya di Indonesia yaitu OTP penerbangan/perhubungan udara yang dipantau berkala sebagai capaian RPJMN Tahun 2025-2029. Berdasarkan

data capaian Triwulan III Tahun 2025, diperoleh realisasi OTP penerbangan sebesar 74,97% dimana nilai tersebut masih lebih rendah dibandingkan realisasi OTP transportasi kereta api di Indonesia sehingga dapat lebih kompetitif pada beberapa layanan jarak jauh/menengah. Secara umum faktor penyebab keterlambatan penerbangan didominasi oleh faktor NTO (*Non Technical Operation*) yaitu faktor yang disebabkan oleh manajemen *airlines* meliputi ketidaksiapan/kerusakan pesawat udara, keterlambatan penanganan di darat, menunggu penumpang *check-in*, pindah pesawat (*transfer*) atau penerbangan lanjutan (*connecting flight*). Sedangkan faktor TO (*Technical Operation*) yaitu faktor yang disebabkan oleh kondisi bandar udara pada proses keberangkatan dan kedatangan yang meliputi bandar udara keberangkatan dan tujuan tidak dapat digunakan untuk operasional pesawat udara, lingkungan menuju bandar udara atau landasan terganggu fungsinya, terjadinya antrean pesawat udara (*take off/landing*) atau alokasi waktu keberangkatan (*departure slot time* di bandar udara) dan keterlambatan pengisian bahan bakar. Namun terdapat pula faktor penyebab di luar kontrol seperti cuaca yang mempengaruhi operasional penerbangan terutama di wilayah timur Indonesia.

Dengan capaian OTP Indonesia yang cukup tinggi yaitu sebesar 97,945% pada Triwulan III Tahun 2025, menempatkan transportasi kereta api Indonesia pada posisi yang sangat kompetitif secara global. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas operasional, pengelolaan infrastruktur, dan manajemen layanan yang diterapkan oleh badan usaha/operator perkeretaapian dengan pembinaan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai regulator. Untuk mempertahankan capaian kinerja tersebut, sangat penting untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan serta mengadopsi praktik terbaik dari negara lain dengan *performance* OTP yang tinggi.

4. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya mempertahankan dan meningkatan kinerja pada periode berikutnya diantaranya:

a. Penyesuaian strategi/kebijakan:

1. Melakukan evaluasi pelaksanaan GAPEKA termasuk verifikasi dan validasi data capaian harian kinerja operasi pada jaringan jalur kereta api nasional sebagai acuan penetapan GAPEKA Tahun 2026 serta upaya peningkatan OTP perjalanan kereta api;
2. Melakukan inspeksi/pemantauan berkala terhadap perjalanan kereta api pada lokasi rawan bencana/banjir/longsoran/amblesan/lokasi taspat dan rawan gangguan keamanan di perlintasan sebidang serta memastikan peralatan penanganan kecelakaan/rintang jalan tersedia dan ditempatkan sesuai kebutuhan;
3. Lanjutan pembangunan jalur ganda kereta api (jalur ganda KA *elevated* Medan – Binjai, Solo-Semarang, lainnya) dan peningkatan jalur/jembatan/fasilitas operasi kereta api (Jember – Kalisat, Jabodetabek, lainnya) untuk meningkatkan kapasitas lintas dan kecepatan operasional kereta api serta memudahkan pengaturan operasional kereta api agar tepat waktu.

b. Penyesuaian aktivitas dan anggaran:

Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan pendukung yang telah direlaksasi dengan pemanfaatan sisa waktu hingga akhir tahun serta mengusulkan perpanjangan kontrak tahun jamak untuk kegiatan pembangunan jalur ganda/peningkatan jalur/jembatan/fasilitas operasi yang terkendala dan tidak dapat selesai pada akhir Tahun 2025 dilengkapi data dukung dan justifikasi yang memadai

c. Penyesuaian organisasi/penempatan jabatan/pegawai:

Penyesuaian penugasan inspektur prasarana dan sarana perkeretaapian serta anggota Satuan Pelayanan pada masing-masing wilayah Balai Teknik Perkeretaapian berdasarkan kompetensi dalam pelaksanaan pengawasan perjalanan kereta api.

Adapun pencapaian target *On Time Performance* (OTP) diharapkan dapat menghasilkan *outcome* sebagai berikut:

a. Peningkatan kepercayaan publik, dimana dengan layanan dan perjalanan kereta api yang tepat waktu maka dapat meningkatkan kepercayaan penumpang terhadap perkeretaapian serta meningkatkan daya saing dengan moda transportasi lain.
b. Mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi umum massal kereta api sehingga dapat menurunkan kemacetan lalu lintas dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Ketepatan waktu perjalanan merupakan salah satu aspek yang menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih moda transportasi untuk mobilitas keseharian.

PERSENTASE PEMENUHAN TARGET ANGKUTAN KERETA API

Persentase pemenuhan target angkutan kereta api diukur melalui perbandingan antara realisasi jumlah angkutan kereta api penumpang dan barang dibandingkan dengan jumlah angkutan kereta api penumpang dan barang yang ditargetkan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 termasuk mempertimbangkan target pada Rencana Induk Perkeretaapian Nasional. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, ditetapkan persentase pemenuhan target angkutan kereta api baik penumpang dan barang untuk Tahun 2025 sebesar 19,00% dan sebesar 14,785% untuk target pada periode Triwulan III Tahun 2025.

Untuk jumlah penumpang terangkut dengan kereta api sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, diperoleh sebanyak 403.746.013 penumpang dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah penumpang kereta api komersial yang meliputi KA jarak Jauh eksekutif, bisnis, *priority*, ekonomi non PSO dan KA lokal eksekutif (Yogya Ekspres dan Srilelawangsa), KA Wisata Ambarawa serta KA Bandara Soekarno Hatta sebanyak 30.144.170 penumpang;
2. Jumlah penumpang kereta api ekonomi/PSO (non KRL Jabodetabek) sebanyak 53.441.368 penumpang;
3. Jumlah penumpang KRL Jabodetabek sebanyak 255.520.949 penumpang;

4. Jumlah penumpang kereta api perintis sebanyak 3.855.524 penumpang;
5. Jumlah penumpang MRT Jakarta sebanyak 33.390.687 penumpang;
6. Jumlah penumpang LRT Jakarta sebanyak 966.568 penumpang;
7. Jumlah penumpang kereta api *Railink* (kereta api Bandara Kualanamu, Yogyakarta Ekspres dan KA Srilelawangsa) sebanyak 1.132.742 penumpang;
8. Jumlah penumpang LRT Jabodebek sebanyak 20.769.914 penumpang;
9. Jumlah penumpang Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebanyak 4.524.091 penumpang.

Dengan realisasi angkutan penumpang kereta api sebanyak 403.746.013 penumpang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 dibandingkan target angkutan penumpang kereta api berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029 sebanyak 2.798.554.050 penumpang, maka diperoleh nilai sebesar 7,213% (pembobotan 50%). Adapun rincian perhitungan diuraikan sebagai berikut:

$$\text{Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api} = \frac{\text{Jumlah angkutan penumpang s. d TW II 2025}}{\text{Target angkutan penumpang 2025} - \text{2029}} \times 50\%$$

$$\text{Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api} = \frac{403.746.013}{2.798.554.050} \times 50\% = 7{,}213\ \%$$

Data dukung capaian dan perhitungan kinerja pada Lampiran 5.

Untuk jumlah barang terangkut dengan kereta api sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, diperoleh realisasi angkutan barang kereta api sebesar **51.137.220 ton** dengan uraian realisasi per wilayah sebagai berikut:

a. Angkutan barang kereta api di pulau Jawa sebanyak **6.012.884** ton, dengan rincian per komoditi sebagai berikut:
    1) BBM sebanyak 1.309.546 ton;
    2) Pupuk sebanyak 16.110 ton;
    3) Semen sebanyak 790.840 ton;
    4) Batu bara (belum ada realisasi);
    5) Peti kemas sebanyak 3.483.179 ton;

6) Retail (ONS parcel, BHP) sebanyak 150.988 ton;
7) Limbah B3 sebanyak 10.607 ton;
8) Lainnya (Bank Indonesia, Bea KLB, angkutan dinas, angkutan Satuan Kerja, Motis, Bea langsir) sebanyak 251.614 ton.

b. Angkutan barang kereta api di pulau Sumatera sebanyak **45.124.336** ton, dengan rincian per komoditi sebagai berikut:
1) BBM sebanyak 670.387 ton;
2) Semen sebanyak 1.073.901 ton;
3) Batu bara sebanyak 42.348.442 ton;
4) Hasil perkebunan (CPO, pulp, kayu, latex) sebanyak 413.171 ton;
5) Peti kemas sebanyak 234.524 ton;
6) Karet dan klinker sebanyak 312.825 ton;
7) Retail (ONS Parcel, BHP) sebanyak 3.842 ton;
8) Limbah B3 sebanyak 751 ton;
9) Lainnya (Bank Indonesia, Bea KLB, angkutan dinas, angkutan Satuan Kerja, Motis, Bea langsir) sebanyak 66.493 ton;

Dengan realisasi angkutan barang kereta api sebanyak 51.137.220 ton pada Triwulan III Tahun 2025 dibandingkan target angkutan barang kereta api berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029 sebanyak 358.912.917 ton, maka diperoleh nilai sebesar 7,124% (pembobotan 50%). Rincian perhitungan diuraikan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api} = \frac{\text{Jumlah angkutan barang s. d TW 2 2025}}{\text{Target angkutan barang 2025} - \text{2029}} \times 50\%$$

$$\text{Persentase Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api} = \frac{51.137.220}{358.912.917} \times 50\% = 7{,}124\%$$

Data dukung capaian dan perhitungan kinerja pada Lampiran 5.

Dengan pemenuhan target angkutan kereta api penumpang sebesar 7,213% dan angkutan kereta api barang sebesar 7,124%, maka diperoleh ***Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api secara total sebesar 14,337%*** dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	=	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Penumpang KA + Persentase Pemenuhan Target Angkutan Barang KA

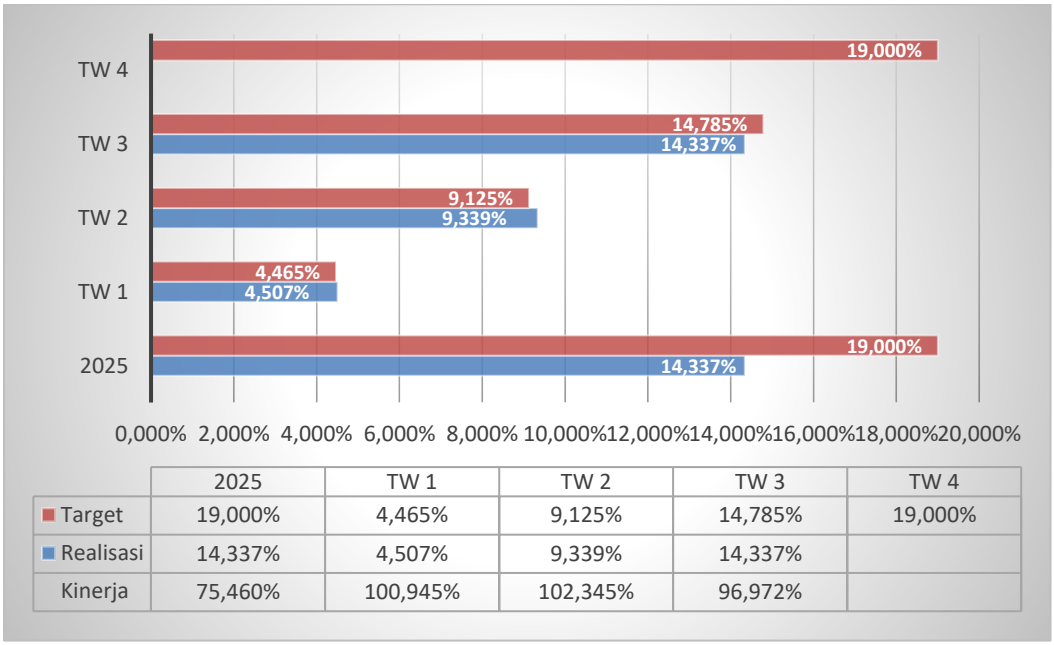
Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	=	7,213 % + 7,124%= 14,337%

1. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan realisasi persentase pemenuhan target angkutan kereta api sebesar 14,337%, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 96,972% terhadap target Triwulan III sebesar 14,785% dan capaian kinerja sebesar 49,153% terhadap target Tahun 2025 sebesar 19,000%. Secara umum capaian kinerja pada Triwulan III terdapat penurunan dibandingkan capaian kinerja triwulan sebelumnya, namun masih masuk kategori *on the right track* (capaian 90-110%). Realisasi kumulatif per triwulan dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-19 Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	%	19,000	4,465	9,125	14,785	19,000	4,515	9,339	14,337	-	101,120	102,345	96,972	-	75,460



	2025	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Target	19,000%	4,465%	9,125%	14,785%	19,000%
Realisasi	14,337%	4,507%	9,339%	14,337%	
Kinerja	75,460%	100,945%	102,345%	96,972%	

Gambar 2-7 Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api Per Triwulan Tahun 2025

2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan pencapaian target kinerja diantaranya:

Angkutan Penumpang:

a. Realisasi angkutan penumpang setiap bulan mengalami penurunan pada periode Triwulan III dengan rincian:

1) Realisasi angkutan penumpang KRL Jabodetabek pada bulan Juli sebanyak 35.775.810 penumpang turun sebanyak 2.972.963 penumpang (-8,31%) pada bulan berikutnya dan turun sebanyak 3.194.619 penumpang (-8,93) pada bulan September 2025 atau rata-rata penurunan pada Triwulan III sebesar -8,62% dari jumlah penumpang di bulan Juli 2025;

2) Realisasi angkutan penumpang MRT Jakarta pada bulan Juli sebanyak 4.419.821 penumpang turun sebanyak 418.180 penumpang (-9,46%) pada bulan berikutnya dan turun sebanyak 503.841 penumpang (-10,43) pada bulan September 2025 atau rata-rata penurunan pada Triwulan III sebesar -8,62% dari jumlah penumpang di bulan Juli 2025;

3) Realisasi angkutan penumpang LRT Jabodebek pada bulan Juli sebanyak 2.732.235 penumpang turun sebanyak 184.263 penumpang (-4,17%) pada bulan berikutnya dan turun sebanyak 282.931 penumpang (-6,40) pada bulan September 2025 atau rata-rata penurunan pada Triwulan III sebesar -5,29% dari jumlah penumpang di bulan Juli 2025;
4) Realisasi kereta api komersial pada bulan Juli sebanyak 4.126.713 penumpang turun sebanyak 787.688 penumpang (-19,09%) pada bulan berikutnya dan turun sebanyak 861.596 penumpang (-20,88) pada bulan September 2025 atau rata-rata penurunan pada Triwulan III sebesar -19,98% dari jumlah penumpang di bulan Juli 2025.

Penurunan jumlah penumpang pada bulan Agustus dan September 2025 dikarenakan pada periode tersebut mobilitas masyarakat berkurang seiring berakhirnya masa libur dan kembalinya aktivitas rutin masyarakat termasuk preferensi masyarakat yang sebagian lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi daring dengan pertimbangan waktu dan fleksibilitas.

b. Layanan *Public Service Obligation* (PSO) dan angkutan perintis belum sepenuhnya optimal mendorong peningkatan *ridership* moda kereta api. Selain itu, khusus layanan perintis di wilayah Sumatera masih terdapat kendala terkait ketersediaan sarana cadangan sehingga apabila terjadi kerusakan atau gangguan sarana mengakibatkan layanan dapat terhenti.

Terdapat beberapa kegiatan pendukung diantaranya berupa kegiatan peningkatan stasiun kereta api yang dilaksanakan pada Tahun 2025 dengan tujuan mendukung peningkatan layanan angkutan penumpang kereta api, diantaranya:

a. Peningkatan Stasiun Rangkasbitung dengan progres 91,42%;
b. Peningkatan Stasiun Tanah Abang Tahap I dengan progres 100,00% atau telah selesai dan telah dioperasikan pada tanggal 29 Juni 2025.

Angkutan Barang:

Faktor yang mendukung keberhasilan antara lain sebagai berikut:

a. Realisasi angkutan barang pada Triwulan III Tahun 2025 sebesar 51.137.220 ton mengalami peningkatan apabila dibandingkan program/target pada Triwulan III Tahun 2025 sebesar 50.877.407 ton. Realisasi secara bulanan pada Triwulan III 2025 juga mengalami peningkatan dimana realisasi angkutan pada bulan Juli 2025 sebesar 5.896.217 ton mengalami peningkatan sebanyak 105.484 ton atau +1,79% pada bulan Agustus 2025 dan pada bulan September 2025 meningkat sebanyak 21.382 ton atau +0,363% dari realisasi bulan Juli 2025;
b. Sosialisasi pada media sosial dengan memberikan informasi kelebihan angkutan barang dengan moda kereta api untuk meningkatkan pengguna transportasi angkutan barang dengan moda kereta api;
c. Koordinasi terkait upaya peningkatan angkutan barang dengan kereta api dengan badan usaha, diantaranya koordinasi terkait permohonan Stasiun Kalimas sebagai Stasiun Muat Angkutan Limbah B3 dan Stasiun Nambo sebagai Stasiun Bongkar Angkutan Limbah B3 pada tanggal 11 September 2025;
d. Berpartisipasi dalam penyusunan rancangan Peraturan Presiden terkait Penguatan Logistik Nasional, diantaranya pada rapat harmonisasi rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Logistik Nasional pada tanggal 12 September 2025 bersama Kementerian Hukum.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain penyelenggaraan PSO dan subsidi perintis termasuk penetapan kebijakan tarif dengan koordinasi Kementerian Keuangan dan badan usaha/operator perkeretaapian. Selain itu, dalam pengelolaan frekuensi perjalanan kereta api dan pemenuhan standar pelayanan minimum juga dilakukan konsolidasi dengan melibatkan badan usaha/operator perkeretaapian, masyarakat/pengguna kereta api penumpang serta hubungan kerja dengan badan usaha/pengguna angkutan kereta api barang.

Selain itu, dalam mendukung pencapaian target persentase pemenuhan target angkutan kereta api, juga dilakukan pengelolaan kinerja berbasis risiko melalui pemantauan dan pelaksanaan penanganan risiko terhadap kegiatan pendukung IKP yang dilakukan secara berkala/triwulan. Berdasarkan profil risiko unit kerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025, terdapat 22 risiko yang diidentifikasi dari 3 proses bisnis terkait IKP persentase pemenuhan target angkutan kereta api. Dari 22 risiko tersebut, terdapat 13 risiko yang penilaiannya di atas selera risiko dan memerlukan penanganan risiko dimana telah direncanakan 18 kegiatan penanganan risiko pada Tahun 2025.

Pada periode sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, penanganan risiko telah terealisasi sebanyak 7 kegiatan atau sebesar 38,89% dari target 18 rencana penanganan risiko pada Tahun 2025. Adapun rincian realisasi rencana penanganan risiko yang telah dilakukan s.d Triwulan III sebagai berikut:

a. Koordinasi badan usaha/operator untuk peningkatan pemeriksaan/perawatan sarana dan prasarana yang handal termasuk menggunakan *Predictive Maintenance System*;
b. Pemenuhan ketersediaan sarana pengganti sesuai spesifikasi teknis;
c. Penyebutan dalam klausul kontrak agar penerima penugasan harus menyediakan sarana pengganti dan jika memang tidak tersedia, penerima penugasan harus menyediakan angkutan moda darat lainnya dengan pelayanan kelas yang sama dan tidak melebihi biaya pengoperasian;
d. Usulan relaksasi/revisi anggaran untuk mendukung pengadaan tanah kegiatan pendukung pelayanan transportasi perkeretaapian;
e. Pelaksanaan sosialisasi keselamatan di lokasi perlintasan sebidang untuk meminimalkan gangguan perjalanan kereta api;
f. Melakukan rapat koordinasi dengan penyedia dan pihak pabrikasi sarana perkeretaapian;
g. Pemeriksaan bersama sebelum penggunaan Sarana Milik Negara (SMN)/peralatan khusus.

Tabel 2-20 Realisasi Penanganan Risiko IKP Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api s.d Triwulan III 2025

No	Proses Bisnis	Jumlah/ Populasi Risiko (Form 5)	Jumlah Penanganan Risiko (Form 8)		Realisasi Penanganan Risiko (Form 9)				
			Risiko	Kegiatan Penanganan	TW I	TW II	TW III	Kumulatif (s.d TW III)	%
1	Pelayanan Transportasi Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	14	10	15	0	2	3	5	33,33
2	Pengelolaan Prasarana Transportasi Perkeretaapian	4	1	1	0	0	0	0	0,00
3	Pengelolaan Sarana Transportasi Perkeretaapian	4	2	2	1	1	0	2	100,00
Jumlah		**22**	**13**	**18**	**1**	**3**	**3**	**7**	**38,89**

3. Perbandingan Kinerja di Level Nasional/Internasional

Analisa kinerja angkutan penumpang dan barang di Indonesia dilakukan perbandingan dengan Malaysia, Singapura dan Britania Raya sesuai referensi pada Tahun 2024-2025. Perbandingan jumlah angkutan penumpang dan barang diuraikan pada Tabel berikut:

Tabel 2-21 Perbandingan Kinerja Angkutan Penumpang Kereta Api

No	Negara	Panjang Jalur KA (Km)	Rata-Rata Jumlah Penumpang per Bulan (orang)	Rata-Rata Jumlah Penumpang/ Panjang Jalur KA per Bulan
1	Britania Raya	31.258	145.833.333	4.665
2	Malaysia	1.799	27.271.786	15.156
3	Singapura	271	15.789.000	58.198
4	Indonesia	6.936	44.860.668*	6.467

Sumber No.1 : Office of Rail and Road Publication (diolah, rata-rata per bulan)
Sumber No.2 : Portal Prasarana Malaysia Berhad (diolah, rata-rata per bulan)
Sumber No.3 : Website Departement of Statistics Singapore (diolah, rata-rata per bulan)
**) Rata-rata jumlah penumpang per bulan pada Triwulan I-III Tahun 2025*

Berdasarkan data di atas, diperoleh bahwa jumlah angkutan penumpang kereta api rata-rata per bulan di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan Britania Raya namun lebih tinggi dari Singapura dan Malaysia. Apabila jumlah angkutan penumpang dibandingkan dengan panjang jalur kereta api masing-masing negara, terlihat bahwa kinerja angkutan kereta api penumpang di Indonesia masih lebih tinggi dari dari Britania Raya namun lebih rendah dari Singapura

dan Malaysia. Hal tersebut menunjukkan tingkat utilitas/penggunaan jalur kereta api di Indonesia masih rendah berbeda dengan Singapura dan Malaysia yang sangat optimal mengangkut jumlah penumpang.

Analisa kinerja angkutan barang kereta api dibandingkan dengan kinerja negara lain yaitu Britania Raya mengacu pada jurnal publikasi *Office of Rail and Road*. Perbandingan jumlah angkutan barang menggunakan kereta api diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2-22 Perbandingan Kinerja Angkutan Barang Kereta Api

No	Negara	Panjang Jalur KA (Km)	Jumlah Angkutan Barang per Bulan(Ton)	Rata-Rata Jumlah Angkutan Barang Per Bulan/ Panjang Jalur KA per Bulan
1	Britania Raya	31.258	5.988.889	192
2	Indonesia	6.936	5.681.913*	819

Sumber No. 1 : Office of Rail and Road Publication (diolah, rata-rata per bulan)
**) Rata-rata jumlah barang per bulan pada Triwulan I-III Tahun 2025*

Berdasarkan data di atas, diperoleh bahwa rata-rata produksi angkutan barang kereta api di Indonesia per bulan lebih rendah apabila dibandingkan dengan Britania Raya. Namun apabila dibandingkan dengan panjang jalur KA yang beroperasi, kinerja angkutan kereta api barang di Indonesia lebih baik dibandingkan Britania Raya dengan rata-rata mencapai 819 Ton/Km per bulan. Hal tersebut menunjukkan tingkat utilitas/penggunaan jalur kereta api di Indonesia untuk angkutan barang cukup optimal dan juga didukung kekayaan sumber daya alam (terutama angkutan batubara di Sumatera Bagian Selatan) yang sudah secara masif menggunakan kereta api baik angkutan logistik/batubara keperluan dalam negeri maupun keperluan luar negeri/ekspor.

4. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya meningkatkan capaian kinerja pada periode mendatang diantaranya:

a. Penyesuaian strategi/kebijakan:

1) Koordinasi dan penyiapan rencana operasi penyelenggaran angkutan kereta api pada periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 termasuk mendukung penyelenggaraan angkutan motor gratis menggunakan kereta api;

2) Penyusunan rancangan peraturan terkait penetapan tarif angkutan barang dengan kereta api;
3) Integrasi data dan pelaporan angkutan kereta api yang *update* dan valid untuk peningkatan pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian dalam sistem yang terintegrasi (Strategi Kementerian Perhubungan, Portal Layanan Ditjen Perkeretaapian);
4) Penyelesaian kegiatan peningkatan stasiun kereta api Rangkasbitung dalam upaya peningkatan layanan angkutan penumpang.

b. Penyesuaian aktivitas dan anggaran:

Pengoptimalan sisa anggaran Tahun 2025 secara selektif untuk kegiatan pendukung diantaranya pemenuhan anggaran angkutan perintis sampai akhir Tahun 2025, serta kebutuhan pelaksanaan *rampcheck* pemenuhan standar pelayanan minimum untuk persiapan penyelenggaran angkutan kereta api pada periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

c. Penyesuaian organisasi/penempatan jabatan/pegawai:

Pengoptimalan Satuan Pelayanan didukung peningkatan kompetensi SDM di masing-masing wilayah Balai Teknik Perkeretaapian untuk pengawasan penyelenggaraan angkutan penumpang dan barang sesuai standar pelayanan minimum.

Adapun pencapaian persentase pemenuhan target angkutan kereta api diharapkan menghasilkan *outcome* sebagai berikut:

a. Reduksi kemacetan jalan raya dan pengurangan emisi gas rumah kaca dengan meningkatnya penggunaan kereta api yang mengindikasikan minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum dibandingkan dengan kendaraan pribadi sehingga dapat membantu mengurangi kepadatan lalu lintas yang berbanding lurus dengan penurunan emisi gas rumah kaca.
b. Peningkatan investasi infrastruktur, dimana dengan tingginya permintaan transportasi kereta api dapat mendorong investasi dalam infrastruktur kereta api, termasuk pengembangan dan peningkatan jalur, stasiun, dan fasilitas terkait lainnya.

2.2.4 MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

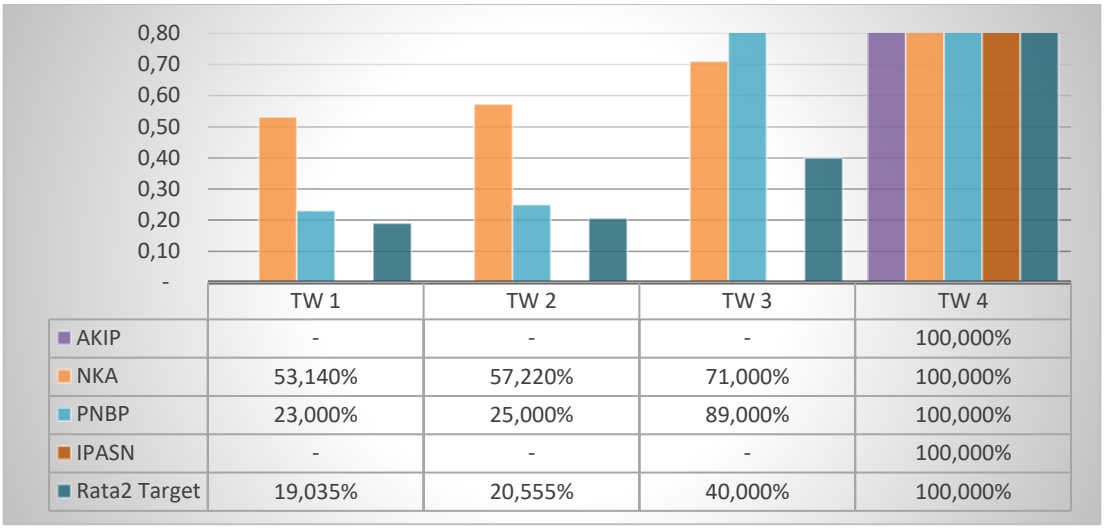
PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Persentase pencapaian kinerja tata kelola pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu instansi pemerintah telah mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam aspek tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pencapaian indikator kinerja ini dapat digunakan untuk mengevaluasi akuntabilitas, efektivitas serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Persentase pencapaian kinerja tata kelola pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian diperoleh dari rata-rata persentase tingkat pencapaian kinerja yang mencakup Nilai Evaluasi AKIP, Nilai Kinerja Anggaran, Realisasi PNBP Bidang Perkeretaapian dan Indeks Profesional ASN. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, persentase pencapaian kinerja tata kelola pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian ditargetkan sebesar 100,000% pada Tahun 2025 dan sebesar 40,000% pada periode Triwulan III. Adapun target diuraikan sebagaimana Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-23 Uraian Target Triwulanan IKP Persentase Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Per-Komponen Penilaian Tahun 2025

No	Komponen Penilaian	Target							
		TW 1		TW 2		TW 3		TW 4	
		Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
1	Nilai AKIP	-	-	-	-	-	-	83,000	100
2	Nilai Kinerja Anggaran	43,043	53,140	46,348	57,220	57,510	71,000	81,000	100
3	Perolehan PNBP	286,655M	23,000	311,582M	25,000	1.109,230M	89,000	1.246,326M	100
4	Indeks Profesional ASN	-	-	-	-	-	-	89,000	100
Rata-Rata Target		19,035%		20,555%		40,000%		100,000%	



	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
AKIP	-	-	-	100,000%
NKA	53,140%	57,220%	71,000%	100,000%
PNBP	23,000%	25,000%	89,000%	100,000%
IPASN	-	-	-	100,000%
Rata2 Target	19,035%	20,555%	40,000%	100,000%

Gambar 2-8 Uraian Target IKP Persentase Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Per-Komponen Penilaian dan Per Triwulan Tahun 2025

Tingkat Pencapaian Nilai AKIP

Evaluasi AKIP dilakukan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 74 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Penilaian dituangkan dalam bentuk nilai dari 0 s.d 100 dengan variabel dalam LKE sebagai berikut:

1. ***Komponen*** terdiri dari Perencanaan Kinerja (bobot 30), Pengukuran Kinerja (bobot 30), Pelaporan Kinerja (bobot 15), dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (bobot 25).
2. ***Sub-komponen*** dibagi dengan gradasi Keberadaan, Kualitas, dan Pemanfaatan pada setiap komponen.
3. ***Kriteria*** merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap subkomponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah atau belum dicapai dan dapat digambarkan atau tidak.

Pada Tahun 2025 ditetapkan target Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar 83,000 dan pada Triwulan III Tahun 2025 (Juli-Agustus 2025) telah dilakukan evaluasi atas implementasi AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian oleh Tim Evaluasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan yang juga mencakup rapat pembahasan bersama yang dilaksanakan pada tanggal 15 s.d 18 Juli 2025. Evaluasi dilaksanakan dengan

menggabungkan nilai LKE Instansi (Eselon I) dengan LKE Unit Utama dimana untuk LKE Unit Utama mengambil *sampling* pada 5 unit kerja yaitu Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya dan Balai Pengujian Perkeretaapian.

Berdasarkan surat Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan nomor PS.302/5/4/ITJEN/2025 tanggal 20 Agustus 2025 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian, diperoleh bahwa hasil penilaian AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar 83,720 (Kategori A) dengan rincian hasil penilaian per komponen sebagai berikut:

Tabel 2-24 Perolehan Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian Per-Komponen Penilaian Tahun 2024-2025

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2024	2025
1	Perencanaan Kinerja	30,00	23,61	24,90
2	Pengukuran Kinerja	30,00	25,83	25,53
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,50	12,41
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	21,00	20,88
	Nilai Hasil Evaluasi		**82,95**	**83,72**
	Predikat		**A**	**A**

Dengan realisasi sebesar 83,720, maka diperoleh tingkat pencapaian kinerja Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan III Tahun 2025 sebesar 100,000% dikarenakan pada periode Triwulan III Tahun 2025 belum terdapat penetapan target ***(Tingkat Pencapaian = 100,000%).***

Tingkat Pencapaian Nilai Kinerja Anggaran

Nilai Kinerja Anggaran (skala 0-100) mengacu pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 dengan perhitungannya merupakan penjumlahan dari 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran, yang nilainya dapat diperoleh pada *Dashboard* Aplikasi Monev Kementerian Keuangan. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) dikelompokkan pada kategori:

1. Lebih dari 90: Kategori Sangat Baik;
2. 80 - 90: Kategori Baik;
3. 60 - 80: Kategori Cukup;
4. 50 - 60: Kategori Kurang;
5. Kurang dari 50: Kategori Sangat Kurang.

Target Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 sebesar 81,000 dan pada Triwulan III Tahun 2025 ditargetkan sebesar 57,510 (71,000% dari target Tahun 2025). Adapun realisasi Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Triwulan III Tahun 2025 sebesar 48,690 yang diperoleh melalui aplikasi Monev Kementerian Keuangan dengan rincian:

1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: 12,610;
2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran: 84,770.

Dengan realisasi sebesar 48,690, maka diperoleh tingkat pencapaian kinerja Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan III Tahun 2025 sebesar 60,111% dari target Tahun 2025 sebesar 81,000 ***(Tingkat Pencapaian = 60,111%).***

Tingkat Pencapaian Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Tingkat pencapaian realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah indikator yang menunjukkan seberapa besar realisasi penerimaan PNBP dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada dokumen anggaran dan perencanaan kinerja. Target PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 sebesar Rp1.246.326.325.000,00 dan pada Triwulan III Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp1.109.230.429.250,00 atau sebesar 89,000%. Berdasarkan data pada aplikasi SPAN dan SIMPONI Kementerian Keuangan, diperoleh realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Triwulan III Tahun 2025 sebesar Rp1.971.654.157.653,00.

Adapun rincian realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode Triwulan III Tahun 2025 berdasarkan jenis pendapatannya sebagaimana pada Tabel berikut.

Tabel 2- 25 Realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan III Tahun 2025

No	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	**Pendapatan Fungsional (Sesuai PP No.15 Tahun 2016)**	**1.028.700.863.000**	**1.525.532.010.378**	**148,297**
	a. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	1.528.160.000	561.272.732	36,729
	b. Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi Bidang Perhubungan	2.789.250.000	2.576.750.000	92,381
	c. Pendapatan Penggunaan Prasarana Perkeretaapian/*Track Access Charge*	1.023.132.453.000	1.518.785.667.646	148,445
	d. Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	1.251.000.000	3.608.320.000	288,435
2	**Pendapatan BLU**	**89.826.325.000**	**62.896.964.150**	**70,021**
	a. Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	79.097.734.000	60.555.348.435	76,558
	b. Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	9.546.423.000	915.149.547	9,586
	c. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	-	1.089.491.424	-
	d. Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	1.182.168.000	224.550.000	18,995
	e. Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	-	600.000	-
	f. Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	-	2.075.037	-
	g. Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	-	1.578.799	-
	h. Pendapatan Lain-Lain BLU	-	108.170.908	-
3	**Pendapatan Non Fungsional**	**127.799.137.000**	**383.225.183.125**	**299,865**
	a. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	150.000.000	836.938.500	557,959
	b. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	3.065.000.000	21.880.470.500	713,882
	c. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	98.335.137.000	84.936.598.505	86,375
	d. Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	26.249.000.000	26.630.675.737	101,454
	e. Pendapatan dari KSP Peralatan dan Mesin	-	-	-
	f. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	3.881.988.567	-
	g. Pendapatan Denda Lainnya	-	90.321.173.452	-
	h. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	53.964	-
	i. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	97.950.083.864	-
	j. Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	54.212.460.036	-
	k. Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	2.574.740.000	-
Jumlah		**1.246.326.325.000**	**1.971.654.157.653**	**158,197**

Dengan realisasi sebesar Rp1.971.654.157.653,00, maka diperoleh tingkat pencapaian kinerja PNBP Triwulan III Tahun 2025 sebesar 158,197% dari target Tahun 2025 sebesar Rp1.246.326.325.000,00 ***(Tingkat Pencapaian = 158,197%)***.

Tingkat pencapaian Indeks Profesional ASN

Indeks Profesional ASN merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar birokrasi yang ideal seperti kompetensi, integritas, netralitas, dan akuntabilitas. Pengukuran Indeks Profesional ASN akan menghasilkan gambaran tentang tingkat profesionalitas ASN yang menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas yaitu kesesuaian kualifikasi, kompetensi, tingkat kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Indeks Profesional ASN selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar pemetaan pengembangan kompetensi ASN yang diharapkan mampu meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi. Tata cara perhitungan mengacu pada Peraturan MENPANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesional ASN. Indeks Profesional ASN dikelompokkan pada kategori:

1. 91 – 100: Kategori Sangat Tinggi;
2. 81 – 90: Kategori Tinggi;
3. 71 – 80: Kategori Sedang;
4. 61 – 70: Kategori Rendah;
5. 60 ke bawah: Kategori Sangat Rendah.

Penilaian Indeks Profesional ASN diukur dengan 4 kriteria/dimensi yaitu:

1. ***Kualifikasi (Bobot 25)***, berupa data/informasi riwayat jenjang pendidikan formal;
2. ***Kompetensi (Bobot 40),*** berupa data/informasi riwayat pengembangan kompetensi;

3. ***Kinerja (Bobot 30),*** berupa data/informasi riwayat penilaian kinerja;
4. ***Disiplin (Bobot 5),*** berupa data/informasi riwayat hukuman disiplin.

Pada Tahun 2025 ditargetkan Indeks Profesional ASN sebesar 89,000 dan pada periode Triwulan III Tahun 2025 belum ditetapkan target karena menyesuaikan periode finalisasi penilaian dengan target ditetapkan pemenuhannya pada periode Triwulan IV Tahun 2025. Adapun pada periode Triwulan III Tahun 2025 masih dilakukan upaya-upaya peningkatan nilai Indeks Profesional ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian diantaranya dengan pemenuhan kebutuhan data secara mandiri oleh masing-masing pegawai untuk komponen kompetensi dan kinerja melalui aplikasi SIK serta pemutakhiran data pada aplikasi SIASN BKN oleh admin masing-masing unit kerja. Secara pararel juga dilakukan upaya peningkatan kompetensi pegawai melalui pendidikan/pelatihan/*workshop* baik yang dilaksanakan mandiri oleh Setditjen/Direktorat teknis maupun lembaga lain, serta peningkatan disiplin dan kinerja pegawai secara berkala oleh pimpinan.

Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh Biro SDM dan Organisasi Setjen Kementerian Perhubungan pada tanggal 23 September 2025, diperoleh nilai sementara indeks profesional ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar 85,180 dari 100,000 atau kategori ”Tinggi”. Nilai tersebut mengalami peningkatan signifikan dari perolehan periode sebelumnya yakni sebesar 64,36 pada Triwulan I dan 82,09 pada Triwulan II. Adapun rincian perubahan/peningkatan nilai sementara indeks profesional ASN pada Triwulan I s.d Triwulan III Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2-26 Monitoring Indeks Profesional ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

No	Kriteria	Bobot	Triwulan I (7 Maret 2025)	Triwulan II (26 Juni 2025)	Triwulan III (23 September 2025)
1	Kualifikasi	25,00	23,73	23,47	23,50
2	Kompetensi	40,00	18,74	28,93	30,38
3	Kinerja	30,00	17,48	25,16	26,30
4	Disiplin	5,00	4,99	4,99	5,00
Nilai Indeks Profesional ASN			**64,36**	**82,09**	**85,18**

Dengan demikian, pada Triwulan III Tahun 2025 belum terdapat penetapan hasil pengukuran terhadap Tingkat Pencapaian Indeks Profesional ASN ***(Tingkat Pencapaian = 0,000%)***.

Mengacu pada perolehan tingkat pencapaian kinerja dari masing-masing komponen penilaian di atas (AKIP, NKA, PNBP, Indeks Profesional ASN), maka diperoleh realisasi persentase pencapaian tata kelola pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Triwulan III Tahun 2025 sebesar 79,577% yang diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

% Pencapaian Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	=	$(TP\ AKIPDJKA + TP\ NKADJKA + TP\ PNBP + TP\ ASNDJKA) / 4$ *(100,000% + 60,111% + 158,197% + 0,000%) / 4*

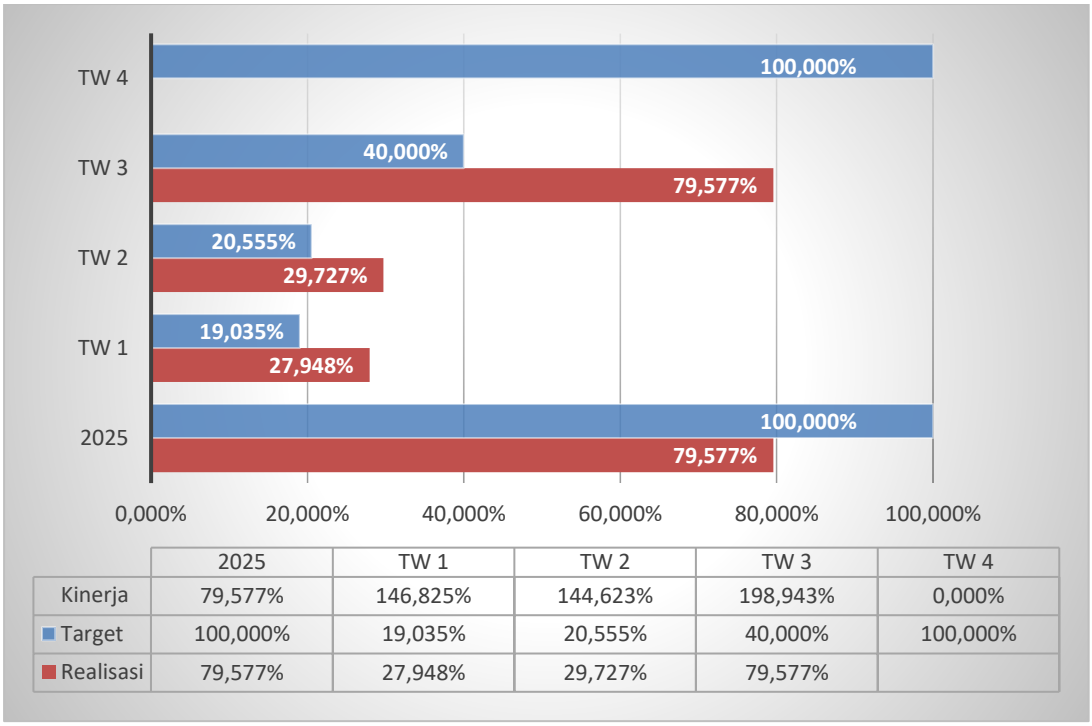
Data dukung capaian dan perhitungan kinerja pada Lampiran 5.

1. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan realisasi persentase pencapaian kinerja tata kelola pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar 79, 577%, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 198,943% terhadap target Triwulan III dan capaian kinerja sebesar 79,577% terhadap target Tahun 2025. Capaian kinerja pada Triwulan III tidak memenuhi kriteria *on the right track* (90-110%) diantaranya karena peningkatan signifikan pada pencapaian kinerja PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Untuk itu diperlukan peninjauan dan revisi perjanjian kinerja termasuk rencana aksi per triwulan. Realisasi kumulatif per triwulan sebagaimana dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-27 Capaian Kinerja Persentase Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Persentase Pencapaian Tata Kelola Pemerintahan	%	100,000	19,035	20,555	40,000	100,000	27,948	29,727	79,577	-	146,825	144,622	198,943	-	79,577



	2025	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Kinerja	79,577%	146,825%	144,623%	198,943%	0,000%
Target	100,000%	19,035%	20,555%	40,000%	100,000%
Realisasi	79,577%	27,948%	29,727%	79,577%	

Gambar 2-9 Capaian Kinerja Persentase Pencapaian Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2025

2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan merupakan bagian strategi memperkuat prinsip-prinsip *good governance* di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, efisien, dan profesional melalui pembenahan menyeluruh terhadap sistem manajemen kinerja, pengelolaan anggaran, pelayanan publik, serta kompetensi dan integritas aparatur sipil negara.

Pada Triwulan III Tahun 2025, Direktorat Jenderal Perkeretaapian menunjukkan capaian yang sangat positif dalam pelaksanaan program peningkatan tata kelola pemerintahan. Terlepas dari belum dilakukannya pengukuran terhadap Indeks Profesional ASN, pencapaian signifikan pada realisasi PNBP serta nilai AKIP telah mampu mendorong capaian IKP di atas target triwulan. Hal ini mengindikasikan juga bahwa Direktorat Jenderal Perkeretaapian berada pada jalur yang tepat dalam memperkuat tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional, serta perlu mempertahankan capaian dengan optimalisasi dua komponen lainnya (Nilai Kinerja Anggaran dan Indeks Profesional ASN) pada periode berikutnya.

Pemutakhiran data, peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kinerja dan anggaran, serta penguatan kompetensi ASN terus menjadi fokus prioritas untuk memastikan pencapaian target tahunan secara menyeluruh. Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian target kinerja diantaranya:

a. Penyelenggaraan SAKIP:
    1) Perencanaan dan penetapan target kinerja termasuk revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah disusun dengan memperhatikan realisasi kinerja Tahun 2024, arah kebijakan 2025-2029, analisa mendalam diantaranya ketersediaan sumber daya (anggaran, SDM) termasuk telah dilakukan sinkronisasi target kinerja sub unit kerja (Bagian) dan unit kerja lainnya (Direktorat, Balai);
    2) Publikasi/*updating*/pembaharuan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja melalui e-SAKIP Reviu dan *website* Ditjen Perkeretaapian (*official*), diantaranya Laporan Monitoring Kinerja Triwulan serta *update* rancangan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 – 2029;
    3) Pada Laporan Monitoring Kinerja Triwulan II Tahun 2025, telah tercantum seluruh informasi capaian kinerja mencakup tata cara perhitungan capaian kinerja, analisa keberhasilan/kegagalan, analisa penyesuaian kebijakan/strategi/kegiatan maupun anggaran, analisa hubungan kerja/*crosscutting* termasuk perbandingan di level nasional/internasional, perubahan budaya kinerja, analisa dukungan terhadap pencapaian target RPJMN 2025-2029, serta penjelasan sumber data dukung capaian kinerja pada lampiran laporan;
    4) Perencanaan kinerja unit kerja telah menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Berjenjang dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) masing-masing pegawai melalui aplikasi e-Kinerja yang selanjutnya diacu dalam pelaporan kinerja pegawai setiap bulan serta dilakukan *update*/revisi dengan adanya penyesuaian struktur organisasi;
    5) Koordinasi internal berkala yang mengikutsertakan seluruh unit kerja terkait (Direktorat, Balai dan Bagian) dalam pengukuran dan pelaporan kinerja serta evaluasi internal yang efektif dan sinergis;

6) Pelaksanaan evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2025 secara berjenjang, meliputi penilaian mandiri pada masing-masing unit kerja (Setditjen, Direktorat, Balai) yang dilanjutkan dengan evaluasi tingkat Eselon I serta evaluasi tingkat Kementerian Perhubungan oleh Inspektorat Jenderal. Untuk hasil evaluasi oleh Inspektorat Jenderal telah disampaikan melalui surat Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan nomor PS.302/5/4/ITJEN/2025 tanggal 20 Agustus 2025 dengan nilai 83,72 (predikat A) dimana terdapat peningkatan dari Tahun sebelumnya;
7) Konsolidasi evaluasi lanjutan implementasi SAKIP khususnya untuk unit kerja *non-sampel* melalui rapat penyamaan persepsi penilaian guna menyeragamkan pemahaman dan memastikan tindak lanjut hasil penilaian Inspektorat Jenderal telah dikoordinasikan kepada seluruh unit kerja;
8) Pembahasan terkait penyesuaian *manual* dan cascading beberapa indikator kinerja kegiatan pada beberapa unit kerja Direktorat/Balai dengan memperhatikan keselarasan dengan amanah RPJMN Tahun 2025–2029 serta menindaklanjuti hasil evaluasi/audit kinerja dari Inspektorat Jenderal.

b. Perencanaan dan pelaksanaan anggaran:
1) Pelaksanaan relaksasi/buka blokir anggaran sebesar Rp165,30 miliar untuk mendukung kegiatan prioritas keselamatan dan Rp48,71 miliar untuk pemenuhan belanja pegawai sebagai bentuk upaya menjaga kesinambungan program strategis keselamatan dan pelayanan penyelenggaraan perkeretaapian serta dukungan manajemen;
2) Pelaksanaan *tagging*/penandaan pada Rincian *Output* (RO) Tahun 2025 yang termasuk dalam kategori SBKU sebagaimana diatur pada PMK Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2025. Sebagai tindak lanjut hal tersebut, telah dilakukan *tagging* terhadap 52 RO yang tersebar di seluruh Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

3) Efektivitas dan ketepatan pelaksanaan anggaran melalui penyusunan dan revisi DIPA, penyesuaian RPD, dan pelaporan *output* rutin/berkala dan tepat waktu;
4) Kemampuan adaptasi terhadap efisiensi fiskal menunjukkan bahwa organisasi fleksibel dan tetap menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai ketentuan.

c. Optimalisasi PNBP:
1) Secara bertahap telah dilakukan perbaikan tata kelola pelaksanaan PNBP TAC dan hal tersebut dapat dilihat dengan perolehan realisasi PNBP yang signifikan dari pembayaran TAC periode Tahun 2024 serta pembayaran TAC Tahun 2025 sebanyak 2 Badan Usaha (PT Railink dan PT KCI). Adapun terhadap pembayaran TAC Tahun 2025 dari PT. KAI saat ini masih menunggu penyelesaian pencairan dana dari kegiatan IMO;
2) Perolehan realisasi PNBP dari pembayaran sewa atas pemanfaatan aset/BMN termasuk adanya persetujuan dari instansi Kementerian Keuangan dalam pemanfaatan aset/BMN turut mempengaruhi realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025.

d. Faktor manajerial SDM:
1) Pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan mengikuti pendidikan/pelatihan/*workshop* berkoordinasi dengan BPSDMP, Setjen Kemenhub (Biro SDMO), serta lembaga pelaksana pendidikan/pelatihan lainnya baik teknis perkeretaapian maupun manajerial;
2) Himbauan kepada seluruh pimpinan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk dapat melakukan pengawasan dan pembinaan disiplin pegawai di masing-masing unit kerja melalui surat Sesditjen Perkeretaapian nomor KP.405/1/12/K1/DJKA/2025 tanggal 29 Juli 2025 perihal Peningkatan Kinerja dan Disiplin;

3) Himbauan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk melakukan penyelesaian disparitas data ASN di masing-masing unit kerja guna peningkatan kualitas layanan manajemen ASN melalui surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian nomor KP.001/1/13/K1/DJKA/2025 tanggal 13 Agustus 2025 perihal Penyelesaian Disparitas Data ASN;
4) Himbauan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk melakukan pemutakhiran data pegawai secara berkala pada aplikasi SIK Kemenhub melalui surat Sesditjen Perkeretaapian nomor KP.001/1/3/SKJ/2025 tanggal 29 Agustus 2025 perihal Pemutakhiran Data Pegawai pada aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIK) Kementerian Perhubungan;
5) Penyampaian hasil monitoring penilaian indeks profesional ASN kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara berkala.

e. Faktor tata laksana termasuk pemanfaatan teknologi informasi:
1) Ketepatan dan ketertiban pelaporan melalui aplikasi seperti e-SAKIP Reviu, SAKTI, e-Monitoring, e-*Performance*, e-Kinerja, Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan lainnya menunjukkan bahwa sistem pelaporan yang terintegrasi dan disiplin administratif turut mempengaruhi pencapaian kinerja pada beberapa komponen penilaian;
2) Saat ini dalam proses pengembangan portal layanan Direktorat Jenderal Perkeretaaapian sebagai *superapps* untuk mendukung integrasi data dan transformasi digital beberapa layanan strategis bidang perkeretaapian;
3) Kapasitas SDM dalam pengelolaan aplikasi/sistem informasi dimana minimnya pemahaman atau keterlambatan *input* oleh *admin* berdampak pada rendahnya nilai kinerja ASN dan pelaporan keuangan, sehingga dibutuhkan pendampingan/pelatihan berkala.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) baik secara internal maupun eksternal. Pada lingkup internal, hal ini tercermin dalam sinergi antara

Direktorat, Bagian dan Balai dalam proses perencanaan, pelaporan kinerja, serta pelaksanaan kegiatan strategis yang membutuhkan koordinasi lintas unit termasuk konsolidasi dengan unit di lingkungan Kementerian Perhubungan diantaranya Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Pada lingkup eksternal, sangat intensif dilakukan kerja sama dan hubungan koordinasi dengan instansi seperti Kementerian Keuangan, Kementerian PANRB, Bappenas, Badan Kepegawaian Nasional, Kementerian ATR/BPN, badan usaha dan lembaga terkait lainnya menjadi faktor krusial dalam mendukung keberhasilan kinerja diantaranya dalam pensertifikatan aset, optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN), integrasi dan sinkronisasi data kepegawaian, pelaporan anggaran serta pelaporan kinerja organisasi. Kolaborasi ini menunjukkan pentingnya pendekatan lintas sektor dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang berkualitas, efisien dan akuntabel.

Selain itu, dalam mendukung pencapaian target Tingkat Pencapaian Tata Kelola Pemerintahan, juga dilakukan pengelolaan kinerja berbasis risiko melalui pemantauan dan pelaksanaan penanganan risiko terhadap kegiatan pendukung IKP yang dilakukan secara berkala/triwulan. Berdasarkan profil risiko unit kerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025, terdapat 14 risiko yang diidentifikasi dari 4 proses bisnis terkait IKP Tingkat Pencapaian Tata Kelola Pemerintahan. Dari 14 risiko tersebut, terdapat 7 risiko yang penilaiannya di atas selera risiko dan memerlukan penanganan risiko dimana telah direncanakan 11 kegiatan penanganan risiko pada Tahun 2025

Pada periode sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, penanganan risiko telah terealisasi sebanyak 9 penanganan risiko atau sebesar 81,82% dari target 11 rencana penanganan risiko pada Tahun 2025. Adapun rincian realisasi rencana penanganan risiko yang telah dilakukan s.d Triwulan III sebagai berikut:

a. Percepatan/akselerasi proses pengadaan barang dan jasa pada awal tahun anggaran agar kegiatan prioritas dapat diselesaikan tepat waktu dengan *output* maksimal;
b. Melakukan percepatan proses revisi anggaran luncuran SBSN Tahun 2024 ke Tahun 2025 pada 11 kegiatan dengan dilengkapi data dukung sesuai PMK 107 Tahun 2024;

c. Percepatan/akselerasi proses pengadaan barang dan jasa pada awal tahun anggaran agar kegiatan prioritas dapat diselesaikan tepat waktu dengan output maksimal;
d. Melakukan percepatan proses revisi anggaran luncuran SBSN Tahun 2024 ke Tahun 2025 dengan dilengkapi data dukung sesuai PMK 107 Tahun 2024;
e. Rapat pembahasan khusus mengenai sinkronisasi/penyelarasan kebijakan, strategi, sasaran dan indikator antara Renstra Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Rensta unit kerja di atasnya (Renstra K/L dan RPJMN);
f. Melakukan koordinasi/asistensi intensif dengan Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan/Bappenas/Kementerian PANRB/Tim SAKIP;
g. Usulan penetapan rencana strategis/indikator kinerja yang memenuhi kriteria SMART;
h. Koordinasi identifikasi potensi penambahan perolehan PNBP termasuk dari pengoptimalan aset;
i. Percepatan penyesuaian/*update* regulasi terkait PNBP TAC.

Tabel 2-28 Realisasi Penanganan Risiko IKP Tingkat Pencapaian Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian s.d Triwulan III 2025

No	Proses Bisnis	Jumlah/ Populasi Risiko (Form 5)	Jumlah Penanganan Risiko (Form 8)		Realisasi Penanganan Risiko (Form 9)				
			Risiko	Kegiatan Penanganan	TW I	TW II	TW III	Kumulatif (s.d TW III)	%
1	Pelaksanaan Anggaran	3	3	6	0	4	0	4	66,67
2	Pengelolaan Kinerja Organisasi	5	2	3	0	0	3	3	100,00
3	Pengelolaan PNBP dan BLU	4	2	2	1	1	0	2	100,00
4	Pengembangan SDM	2	0	0					
Jumlah		**14**	**7**	**11**	**1**	**5**	**3**	**9**	**81,82**

Pada periode Triwulan III Tahun 2025, terdapat 1 keterjadian peristiwa risiko terkait Tingkat Pencapaian Tata Kelola Pemerintahan yaitu rendahnya/tidak tercapainya Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Risiko tersebut memerlukan upaya lanjutan peningkatan komponen nilai perencanaan (pengoptimalan SBKU/SBKK, capaian *output*) dan nilai pelaksanaan anggaran

(penyerapan anggaran, konsistensi RDP, dan lainnya) pada periode berikutnya.

3. Perbandingan Kinerja di Level Nasional/Internasional

Terkait analisa perbandingan dilakukan terhadap capaian dari 3 komponen penilaian yaitu Nilai AKIP, Nilai Kinerja Anggaran dan perolehan PNBP. Untuk komponen Indeks Profesional ASN pada Triwulan III Tahun 2025 belum terdapat realisasi kinerja sehingga tidak dilakukan perbandingan kinerja.

Untuk komponen Nilai AKIP, perbandingan kinerja dilakukan terhadap realisasi antar unit eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan mengacu pada surat Inspektur Jendeal Kementerian Perhubungan Nomor KP.904/5/22/ITJEN/2025 tanggal 24 September 2025 perihal Ikhtisar Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 di lingkungan Kementerian Perhubungan. Adapun rincian perbandinganya sebagai berikut:

Tabel 2-29 Perolehan Nilai AKIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2025

No	Unit Kerja	Capaian Kinerja per Komponen Tahun 2025				Penilaian Kinerja	
		Perencanaan Kinerja (30%)	Pengukuran Kinerja (30%)	Pelaporan Kinerja (15%)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)	2025	2024
1	Sekretariat Jenderal	23,61	24,90	11,85	20,50	80,87	80,15
2	Inspektorat Jenderal	25,20	25,20	12,60	19,50	82,50	82,30
3	Ditjen Perhubungan Darat	25,47	24,87	12,93	19,88	83,16	82,69
4	Ditjen Perhubungan Laut	23,05	25,05	12,29	22,25	82,79	80,82
5	Ditjen Perhubungan Udara	23,07	24,60	13,01	20,13	80,80	80,79
6	**Ditjen Perkeretaapian**	**24,90**	**25,53**	**12,41**	**20,88**	**83,72**	**82,95**
7	Badan Kebijakan Transportasi	22,20	25,35	12,45	20,00	80,01	79,14
8	BPSDM Perhubungan	23,82	24,60	11,25	20,38	80,06	77,90

No	Unit Kerja	Capaian Kinerja per Komponen Tahun 2025				Penilaian Kinerja	
		Perencanaan Kinerja (30%)	Pengukuran Kinerja (30%)	Pelaporan Kinerja (15%)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)	2025	2024
9	Ditjen Integrasi Transportasi dan Multimoda	25,13	23,70	11,83	19,38	80,04	77,50

Mengacu Tabel di atas, diperoleh bahwa perolehan nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian menduduki peringkat ke-1 dari 9 unit eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan perolehan nilai sebesar 83,720. Oleh karena itu, pencapaian perlu untuk dipertahankan dengan tetap melakukan perbaikan berkelanjutan pada periode berikutnya.

Untuk perbandingan kinerja pada komponen Nilai Kinerja Anggaran dan perolehan PNBP, juga dilakukan perbandingan terhadap realisasi antar unit eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan yang diperoleh dari aplikasi Monev Kemenkeu (terkait NKA) dan OMSPAN (terkait PNBP) sebagai berikut:

Tabel 2-30 Realisasi NKA Per-Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan Periode Triwulan III 2025

No	Unit Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	Sekretariat Jenderal	11,73	98,77	55,25
2	Inspektorat Jenderal	33,74	100,00	66,87
3	Ditjen Perhubungan Darat	10,52	93,22	51,87
4	Ditjen Perhubungan Laut	12,92	94,86	53,89
5	Ditjen Perhubungan Udara	13,61	98,51	56,06
6	**Ditjen Perkeretaapian**	**12,61**	**84,77**	**48,69**
7	Badan Kebijakan Transportasi	13,96	98,42	56,19
8	BPSDM Perhubungan	26,08	95,38	60,73
9	Ditjen Integrasi Transportasi dan Multimoda/BPTJ	0,00	96,60	48,30

Tabel 2-31 Realisasi PNBP Per-Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan Periode Triwulan III 2025

No	Unit Kerja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Sekretariat Jenderal	3.510.000.000	3.141.956.537	89,51%
2	Inspektorat Jenderal	0	82.387.455	-
3	Ditjen Perhubungan Darat	1.403.602.549.000	948.963.977.393	67,61%
4	Ditjen Perhubungan Laut	5.339.533.710.000	4.949.917.767.242	92,70%
5	Ditjen Perhubungan Udara	1.834.852.348.000	1.609.440.143.676	87,71%
6	**Ditjen Perkeretaapian**	**1.246.326.325.000**	**1.971.654.157.653**	**158,20%**
7	Badan Kebijakan Transportasi	0	202.086.499	-
8	BPSDM Perhubungan	1.409.618.929.000	1.414.462.794.801	100,34%
9	Ditjen Integrasi Transportasi dan Multimoda/BPTJ	13.770.000.000	5.332.001.064	38,72%

Untuk capaian nilai kinerja anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian per-Triwulan III 2025 masih sangat rendah dengan menduduki peringkat ke-8 dari 9 unit kerja eselon I dengan realisasi sebesar 48,690. Untuk itu, diperlukan upaya peningkatan penilaian komponen perencanaan dan pelaksanaan anggaran termasuk percepatan penyerapan anggaran dan pencapaian *output* khususnya pada RO dengan kategori SBK baik SBKU maupun SBKK.

Sedangkan terkait perolehan PNBP antar unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan, diperoleh bahwa perolehan PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian menduduki peringkat ke-1 dari 9 unit kerja eselon I dengan persentase capaian sebesar 158,200% (realisasi sebesar Rp1.971.654.157.653,00 dari target Tahun 2025). Hal tersebut didorong dengan telah selesainya seluruh pembayaran TAC Tahun 2024 dari seuruh badan usaha/operator perkeretaapian yang terbayarkan pada Triwulan I-III Tahun 2025 serta pembayaran TAC Tahun 2025 dari 2 badan usaha/operator (PT KCI dan PT Railink). Selanjutnya pencapaian ini perlu dipertahankan dan tetap dilakukan upaya peningkatan perolehan PNBP lainnya diantaranya optimalisasi pemanfaatan aset/BMN perkeretaapian.

4. Upaya Peningkatan Kinerja

Beberapa upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada periode mendatang diantaranya:

a. Penyesuaian strategi/kebijakan:

1) Finalisasi penilaian terkait evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2025 untuk unit kerja *non sample* di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta menyampaikan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP Tahun 2025 kepada Inspektorat Jenderal;
2) Pelaksanaan forum pembahasan untuk finalisasi Rencana Strategis Ditjen Perkeretaapian Tahun 2025-2029 termasuk sinkronisasi RPJMN Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis tingkat Kementerian Perhubungan serta seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
3) Penyusunan revisi Perjanjian Kinerja 2025 sesuai hasil monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan capaian kinerja dapat memenuhi kategori *on the right track* (capaian 90-110%).

b. Penyesuaian aktivitas dan anggaran:

1) Percepatan penyerapan anggaran Tahun 2025 serta pemantauan pelaksanaan anggaran unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, termasuk dukungan revisi anggaran apabila diperlukan untuk pemenuhan *backlog*/selisih anggaran penyelenggaraan IMO periode sebelumnya;
2) Pelaksanaan *tagging*/penandaan Rincian *Output* SBKU/SBKK pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2026 sebagaimana diatur pada PMK Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2025;
3) Koordinasi dengan KPKNL untuk percepatan persetujuan pemanfaatan aset/BMN guna mendukung perolehan PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

c. Penyesuaian organisasi/penempatan jabatan/pegawai:

1) Lanjutan pembinaan ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk peningkatan kompetensi dan pengelolaan jenjang karir jabatan fungsional tertentu mencakup

sosialisasi/bimbingan teknis/pendidikan/pelatihan/uji kompetensi terkait kepegawaian, manajerial dan teknis bidang perkeretaapian;

2) Pembahasan usulan penyelarasan dan penyederhanaan jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta koordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi Kementerian Perhubungan.

Adapun pencapaian target tata kelola pemerintahan diharapkan dapat menghasilkan *outcome* sebagai berikut:

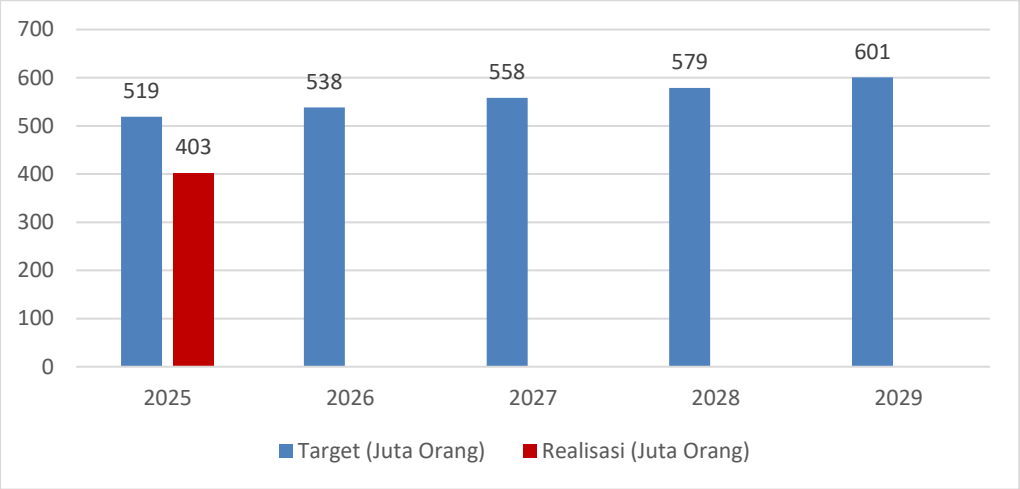
a. Peningkatan efektivitas organisasi, efisiensi penggunaan sumber daya, dan akuntabilitas pelayanan publik di sektor perkeretaapian;
b. Penguatan sistem manajemen kinerja dan pelaksanaan prinsip *good governance* melalui penyelenggaraan SAKIP yang semakin terintegrasi dan berkualitas;
c. Optimalisasi pengelolaan anggaran, penerimaan PNBP, serta pelaksanaan kegiatan prioritas yang mendukung peningkatan keselamatan dan layanan perkeretaapian;
d. Peningkatan profesionalisme, kompetensi, dan integritas ASN dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan berorientasi hasil.

2.3 DUKUNGAN CAPAIAN INDIKATOR RPJMN 2025-2029

A. Jumlah Penumpang Angkutan Kereta Api

Dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa pengguna transportasi perkeretaapian, Kementerian Perhubungan terus berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan diantaranya melalui peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan KA penumpang antar kota dan pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, jumlah penumpang angkutan kereta api telah mencapai 403,746 juta orang. Hal tersebut sekitar 77,79% dari target Tahun 2025 pada RPJMN sebesar 519 Juta penumpang. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat

semakin mempercayai kereta api sebagai moda transportasi utama yang aman dan nyaman. Namun terdapat beberapa dukungan Pemerintah diantaranya dalam hal pemenuhan sarana perkeretaapian khususnya pada angkutan perintis (cadangan) dan *Public Service Obligation* (perkotaan), dimana sarana perkeretaapian yang ada saat ini masih belum mencukupi sehingga belum memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat



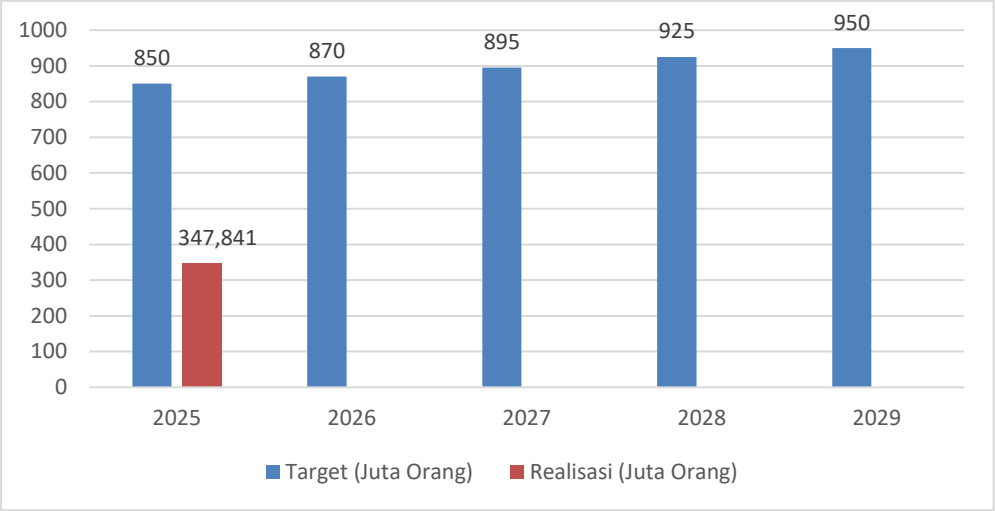
Gambar 2-10 Capaian Jumlah Penumpang Angkutan Kereta Api Periode Triwulan III Tahun 2025

B. Jumlah Penumpang Angkutan Perkotaan di 10 Kota Metropolitan Berbasis Rel dan Darat

Target dan capaian penumpang angkutan perkotaan pada RPJMN Tahun 2025 – 2029 merupakan gabungan dari angkutan perkotaan berbasis rel dan angkutan darat dengan target Tahun 2025 sebesar 850 juta penumpang. Adapun realisasi jumlah penumpang angkutan perkotaan berbasis rel di 10 kota metropolitan mencapai 347,841 juta penumpang atau 40,923% khusus untuk angkutan rel dari target keseluruhan (angkutan rel dan darat). Dengan rincian realisasi jumlah penumpang kereta/angkutan rel perkotaan s.d Triwulan III Tahaun 2025 sebagai berikut:

1. Kereta perkotaan Jakarta sebanyak 315.620.207 penumpang;
2. Kereta perkotaan Bandung sebanyak 13.811.777 penumpang;
3. Kereta perkotaan Medan sebanyak 3.086.805 penumpang;
4. Kereta perkotaan Surabaya sebanyak 11.801.133 penumpang;
5. Kereta perkotaan Palembang sebanyak 3.386.351 penumpang;
6. Kereta perkotaan Semarang sebanyak 135.454 penumpang.

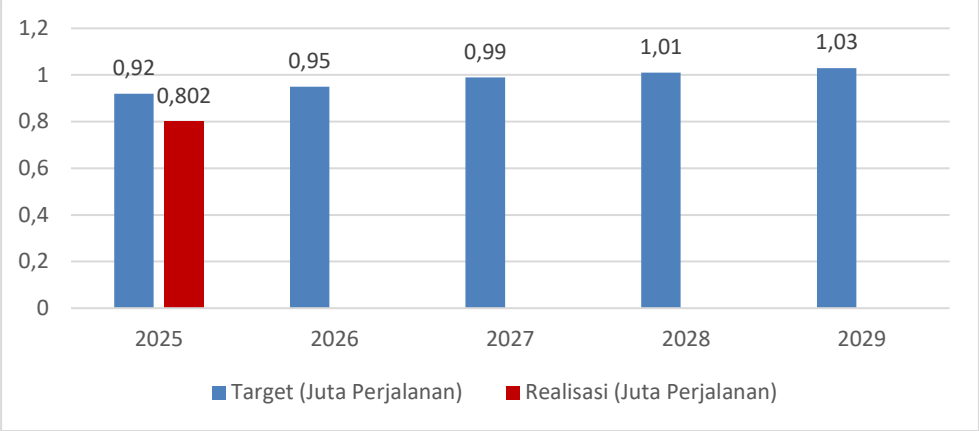
Hal tersebut menggambarkan cukup tingginya preferensi masyarakat perkotaan terhadap transportasi massal berbasis rel khususnya di wilayah perkotaan yang terus perlu diperkuat dari sisi layanan, frekuensi, dan integrasi. Direktorat Jenderal Perkeretaapian terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menyediakan fasilitas angkutan perkotaan yang memadai termasuk integrasi antar moda, penyelenggaraan subsidi keperintisan, penyediaan *Public Service Obligation* (PSO) serta kegiatan pembangunan/peningkatan prasarana perkeretaapian di wilayah Jawa, Sumatera dan Sulawesi.



Gambar 2- 11 Jumlah Penumpang Angkutan Perkotaan di 10 Kota Metropolitan Khusus Berbasis Rel Periode Triwulan III Tahun 2025

C. Jumlah Perjalanan Kereta Api

Dalam rangka memenuhi kebutuhan mobilisasi masyarakat, telah ditetapkan grafik perjalanan kereta api yang menjadi acuan penjadwalan perjalanan kereta api sesuai kapasitas prasarana dan ketersediaan sarana untuk layanan kereta api. Pada periode Triwulan III Tahun 2025, perjalanan kereta api telah terealisasi sebanyak 0,802 juta perjalanan atau sebesar 87,17%, dari target Tahun 2025 sebanyak 0,92 juta perjalanan. Upaya peningkatan pejalanan kereta api dilaksanakan antara lain dengan pengoptimalan kapasitas lintas dan optimalisasi pemanfaatan sarana perkeretaapian guna dapat mendukung pencapaian target pada akhir Tahun 2025.



Gambar 2-12 Capaian Jumlah Perjalanan Kereta Api Periode Triwulan III Tahun 2025

D. Panjang Jalur KA yang Beroperasi

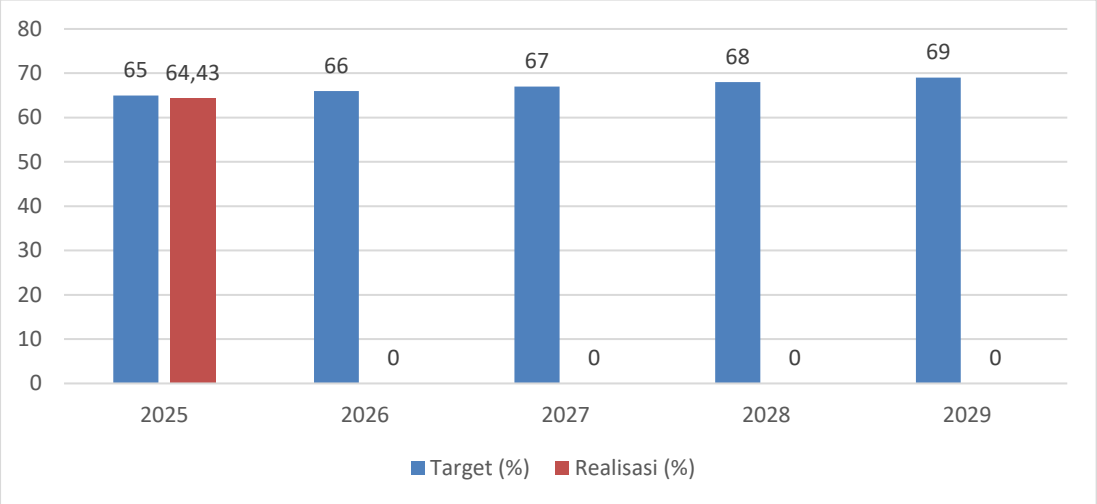
Dalam rangka mendukung sasaran pembangunan konektivitas nasional sebagai salah satu sektor unggulan dalam RPJMN Tahun 2025-2029, Direktorat Jenderal Perkeretaapian memprioritaskan pembangunan infrastruktur perkeretaapian sebagai moda transportasi andalan baik wilayah perkotaan maupun antar kota. Berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029, telah terealisasi panjang jalur kereta api yang terbangun sepanjang 6.936 Km'sp di berbagai wilayah Indonesia dari target 6.928 Km'sp pada Tahun 2025 atau capaian sebesar 100,12%. Terobosan untuk mendorong peningkatan jumlah panjang jalur kereta api diantaranya melalui pengoptimalan pembiayaan SBSN serta koordinasi intensif dengan Pemeritah Daerah dan Lembaga Manageman Aset Negara (LMAN) terkait penyediaan lahan khususnya untuk Proyek Strategis Nasional.



Gambar 2- 13 Capaian Panjang Jalur KA yang Beroperasi Periode Triwulan III Tahun 2025

E. Jalur KA yang Menggunakan Persinyalan Elektrik

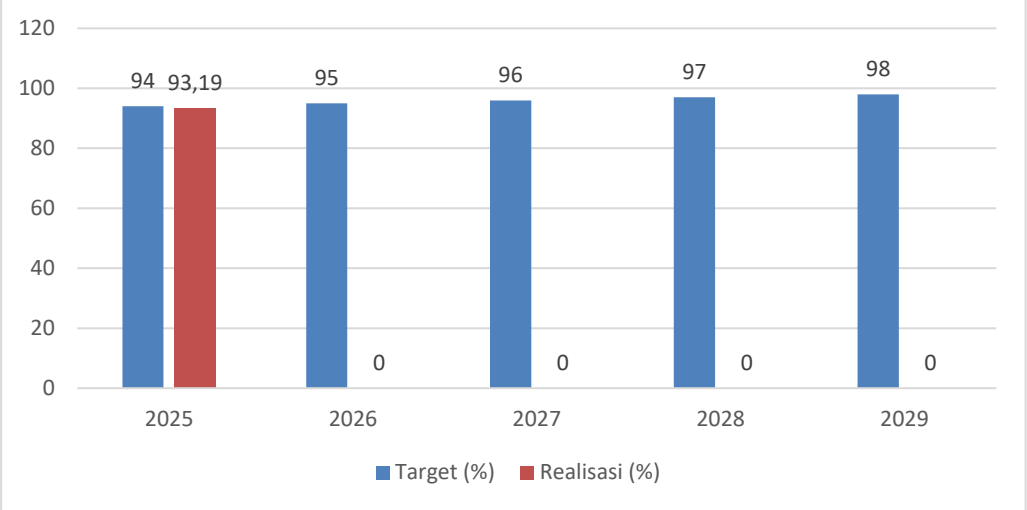
Direktorat Jenderal Perkeretaapian berkomitmen mendukung program peningkatan kehandalan perjalanan kereta api diantaranya dengan peningkatan sistem persinyalan elektrik pada jalur kereta api dengan tujuan menciptakan kehandalan transportasi massal yang efektif dan efisien. Kegiatan yang dilakukan berupa peningkatan sistem persinyalan mekanik ke elektrik dengan tujuan meningkatkan kehandalan dan keselamatan perjalanan kereta api serta mendukung peningkatan waktu tempuh sehingga dapat meningkatkan minat masyarakat untuk beralih kendaraan dari angkutan pribadi menggunakan angkutan kereta api. Pada Tahun 2025, jalur kereta api yang menggunakan sistem persinyalan elektrik sebanyak 64,43% dari jumlah keseluruhan sistem persinyalan dengan target Tahun 2025 pada dokumen RPJMN sebesar 65,00%.



Gambar 2- 14 Jalur KA yang Menggunakan Persinyalaan Elektrik Periode Triwulan III Tahun 2025

F. Kondisi Jalur KA sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2

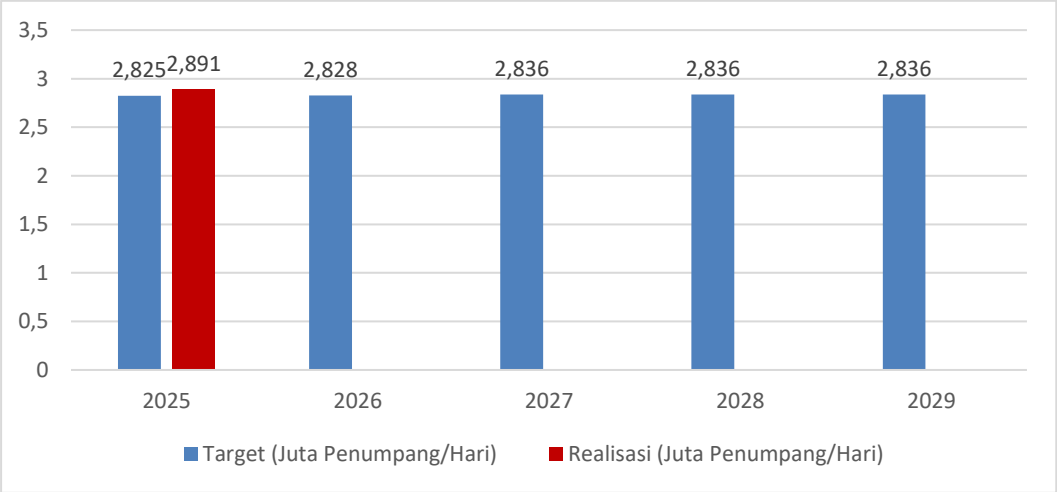
Dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan kelancaran perjalanan kereta api diperlukan kegiatan perawatan dan peningkatan jalur kereta api. Kondisi jalur kereta api digambarkan dengan menggunakan ukuran *Track* Quality *Index* (TQI) dalam menentukan titik petak atau koridor jalan rel yang diprioritaskan untuk ditingkatkan dan dirawat. Capaian kondisi jalur kereta api sesuai dengan TQI Kategori 1 dan 2 pada periode Triwulan III Tahun 2025 sebesar 93,19% dari target Tahun 2025 sebesar 94,00% pada dokumen RPJMN.



Gambar 2- 15 Kondisi jalur KA sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2 Periode Triwulan III Tahun 2025

G. Ketersediaan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel

Ketersediaan angkutan umum massal perkotaan berbasis rel sampai dengan periode Triwulan III Tahun 2025 telah terealisasi dengan kapasitas sebanyak 2,857 juta penumpang/hari dari target Tahun 2025 pada dokumen RPJMN sebesar 2,825 penumpang/hari atau capaian sebesar 101,13%.



Gambar 2- 16 Capaian Ketersediaan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel Periode Triwulan III Tahun 2025

2.4 CAPAIAN KINERJA LAINNYA

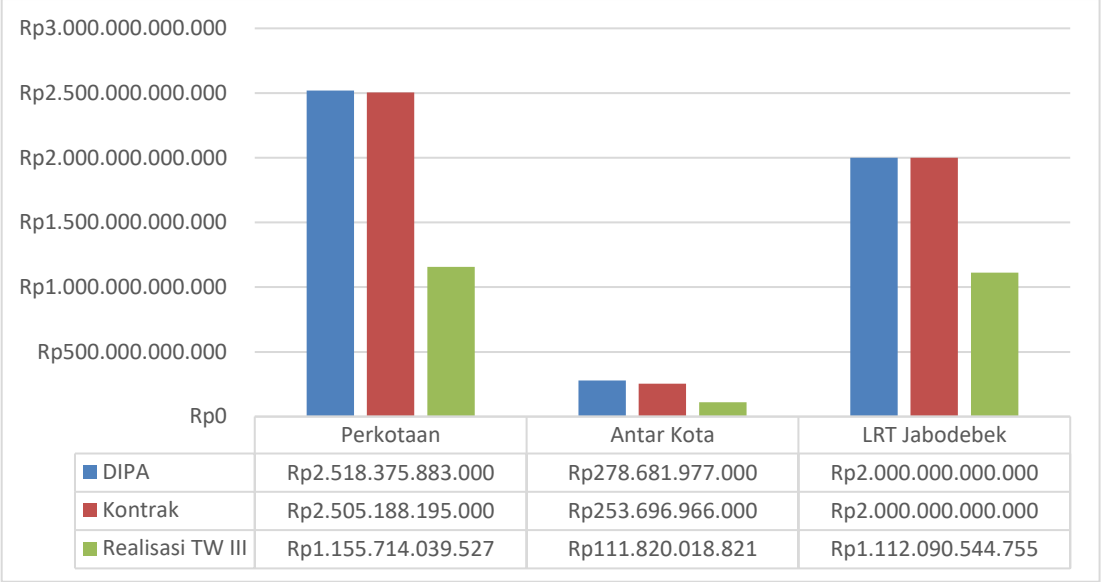
Pada periode Triwulan III Tahun 2025, Direktorat Jenderal Perkeretaapian memperoleh beberapa capaian kinerja lainnya diantaranya:

A. Penyelenggaraan *Public Service Obligations* (PSO) Tahun 2025

Penyelenggaraan *Public Service Obligations* (PSO) Tahun 2025 memiliki pagu DIPA sebesar Rp4.797.057.860.000 dengan penetapan nilai kontrak sebesar Rp4.758.885.161.000 dan target penumpang sebanyak 421.391.250 orang. Pada periode sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, realisasi anggaran mencapai Rp2.379.624.603.103 atau 50,00% dari nilai kontrak, sedangkan realisasi jumlah penumpang mencapai 304.904.709 orang atau 41,96% dari target kontrak.

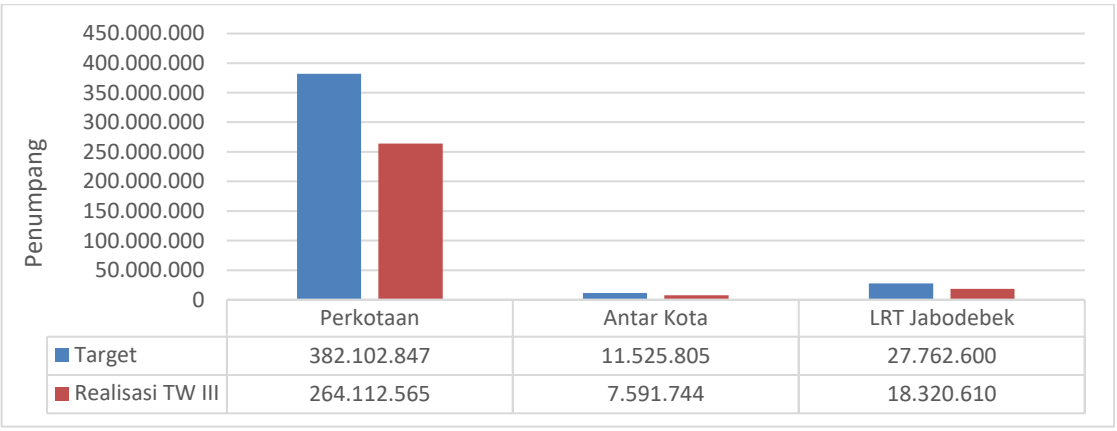
Pada angkutan KA antar kota, nilai kontrak Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp253.696.966.000 dari pagu DIPA Rp278.681.977.000 serta ditargetkan jumlah penumpang sebanyak 11.525.805 orang. Realisasi nilai anggaran pada periode Triwulan III Tahun 2025 sebesar Rp111.820.018.821 (44,08% dari kontrak) dengan realisasi jumlah penumpang sebanyak 7.591.744 orang (65,87% dari kontrak). Sedangkan angkutan KA perkotaan memiliki nilai kontrak Tahun 2025 sebesar Rp2.505.188.195.000 dari pagu DIPA sebesar Rp2.518.375.883.000 dan ditargetkan jumlah penumpang sebanyak 382.102.847 orang. Realisasi nilai anggaran pada periode Triwulan III Tahun 2025 sebesar Rp1.155.714.039.527 (46,13% dari kontrak) dengan realisasi jumlah penumpang sebanyak 264.112.565 orang (69,12% dari kontrak).

Untuk angkutan LRT Jabodebek, nilai kontrak ditetapkan sebesar Rp2.000.000.000.000 dengan target jumlah penumpang sebanyak 27.762.600 orang. Realisasi nilai anggaran pada periode Triwulan III Tahun 2025 mencapai Rp1.112.090.544.755 (55,60% dari kontrak) dengan realisasi jumlah penumpang mencapai 18.320.610 orang (65,99% dari kontrak). Adapun rincian realisasi subsidi sarana LRT Jabodebek sebesar Rp242.985.805.786 dari kontrak Rp519.394.447.000 (46,78%) dan realisasi subsidi prasarana mencapai Rp869.104.738.969 dari kontrak Rp1.480.605.553.000 (58,70%).



	Perkotaan	Antar Kota	LRT Jabodebek
DIPA	Rp2.518.375.883.000	Rp278.681.977.000	Rp2.000.000.000.000
Kontrak	Rp2.505.188.195.000	Rp253.696.966.000	Rp2.000.000.000.000
Realisasi TW III	Rp1.155.714.039.527	Rp111.820.018.821	Rp1.112.090.544.755

Gambar 2-17 Alokasi dan Realisasi Anggaran PSO Tahun 2025



	Perkotaan	Antar Kota	LRT Jabodebek
Target	382.102.847	11.525.805	27.762.600
Realisasi TW III	264.112.565	7.591.744	18.320.610

Gambar 2- 18 Target dan Realisasi Angkutan Penumpang PSO Tahun 2025

Secara keseluruhan, realisasi anggaran PSO perlu dioptimalkan untuk memaksimalkan jumlah angkutan penumpang yang dilayani di seluruh wilayah dengan tarif angkutan kereta api yang terjangkau dan layanan sesuai standar pelayanan minimal. Untuk itu diperlukan pengawasan berkala yang memadai agar realisasi PSO dapat tepat sasaran, efektif dan efisien dalam mewujudkan pelayanan publik yang handal.

B. Penyelenggaraan Kereta Api Perintis Tahun 2025

Terdapat 5 layanan kereta api perintis Tahun 2025 yang tersebar di wilayah Sumatera, Jawa dan Sulawesi. Realisasi angkutan penumpang kereta api perintis dari bulan Januari s.d September 2025 sebesar 3.855.524 penumpang dengan uraian per layanan sebagai berikut:

1. Kereta Api LRT Sumatera Selatan (Bandara - DJKA):

   Jumlah penumpang LRT Sumatera Selatan periode Januari s.d September 2025 sebanyak 3.386.351 penumpang. Jumlah penumpang mengalami lonjakan signifikan pada bulan Juli yaitu sebanyak 400.951 penumpang dikarenakan faktor liburan nasional dan menurun kembali pada bulan Agustus sebanyak 373.463 penumpang serta kembali meningkat pada bulan September sebanyak 384.793 penumpang.

2. Kereta Api Cut Meutia (Kutablang - Muara Satu):

   Jumlah penumpang KA Cut Meutia periode Januari s.d September 2025 sebanyak 30.949 penumpang. Jumlah penumpang mengalami peningkatan pada bulan Juli yaitu sebanyak 1.980 penumpang dan menurun pada bulan Agustus sebanyak 1.155 penumpang termasuk pada bulan September menurun menjadi 885 penumpang.

3. Kereta Api Lembah Anai (Bandara Intl Minangkabau - Kayu Tanam):

   Jumlah penumpang KA Lembah Anai periode Januari s.d September 2025 sebanyak 73.902 penumpang. Jumlah penumpang mengalami peningkatan pada Juli yaitu sebanyak 8.248 penumpang. Pada bulan Agustus jumlah penumpang cenderung menurun menjadi sebanyak 6.987 penumpang namun kembali meningkat pada September sebanyak 7.551 penumpang.

4. Kereta Api Bathara Kresna (Purwosari-Wonogiri):

   Jumlah penumpang KA Bathara Kresna periode Januari s.d September 2025 sebanyak 135.454 penumpang. Jumlah penumpang mengalami penurunan pada Juli yaitu sebanyak 16.010 penumpang. Kemudian pada Agustus kembali menurun menjadi sebanyak 12.645 penumpang dan pada September mengalami sedikit peningkatan menjadi sebanyak 12.896 penumpang.

5. Kereta Api Makassar - Parepare (Mandai-Garongkong/Mangilu-Garongkong):

   Jumlah penumpang KA Makassar – Parepare periode Januari s.d September 2025 sebanyak 228.868 penumpang.Jumlah penumpang mengalami peningkatan drastis pada Juli mencapai 32.862 penumpang, dan mengalami penurunan yang cukup signifikan pada Agustus menjadi

22.980 penumpang. Pada bulan September mengalami sedikit kenaikan menjadi sebanyak 23.993 penumpang.

Tabel 2-32 Realisasi Penyelenggaraan Kereta Api Perintis Periode Triwulan III 2025

Kereta	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Jumlah
LRT Sumsel (Bandara-DJKA)	392.423	328.361	288.953	452.566	369.690	395.151	400.951	373.463	384.793	**3.386.351**
Cut Meutia (Kutablang-Muara Satu)	5.018	8.291	299	5.630	4.911	2.780	1.980	1.155	885	**30.949**
Lembah Anai (Bandara Intl Minangkabau-Kayu Tanam)	9.932	7.270	6.363	10.783	8.293	8.475	8.248	6.987	7.551	**73.902**
Bathara Kresna (Purwosari-Wonogiri)	12.497	17.931	12.408	17.214	16.963	16.890	16.010	12.645	12.896	**135.454**
Makassar-Parepare (Mandai-Garongkong/ Mangilu-Garongkong)	17.943	17.935	9.453	34.289	36.545	32.868	32.862	22.980	23.993	**228.868**
Total	**437.813**	**379.788**	**317.476**	**520.482**	**436.402**	**456.164**	**460.051**	**417.230**	**430.118**	**3.855.524**

C. Capaian Penilaian Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun

Berdasarkan surat Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP.904/5/22/ITJEN/2025 tanggal 24 September 2025 perihal Ikhtisar Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 di lingkungan Kementerian Perhubungan, diperoleh bahwa perolehan nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian menduduki peringkat ke-1 dari 9 unit eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan perolehan nilai sebesar 83,72. Rincian hasil penilaian unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagai berikut:

Tabel 2-33 Perolehan Nilai AKIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2025

No	Unit Kerja	Capaian Kinerja per Komponen Tahun 2025				Penilaian Kinerja	
		Perencanaan Kinerja (30%)	Pengukuran Kinerja (30%)	Pelaporan Kinerja (15%)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)	2025	2024
1	Sekretariat Jenderal	23,61	24,90	11,85	20,50	80,87	80,15
2	Inspektorat Jenderal	25,20	25,20	12,60	19,50	82,50	82,30
3	Ditjen Perhubungan Darat	25,47	24,87	12,93	19,88	83,16	82,69

No	Unit Kerja	Capaian Kinerja per Komponen Tahun 2025				Penilaian Kinerja	
		Perencanaan Kinerja (30%)	Pengukuran Kinerja (30%)	Pelaporan Kinerja (15%)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)	2025	2024
4	Ditjen Perhubungan Laut	23,05	25,05	12,29	22,25	82,79	80,82
5	Ditjen Perhubungan Udara	23,07	24,60	13,01	20,13	80,80	80,79
6	**Ditjen Perkeretaapian**	**24,90**	**25,53**	**12,41**	**20,88**	**83,72**	**82,95**
7	Badan Kebijakan Transportasi	22,20	25,35	12,45	20,00	80,01	79,14
8	BPSDM Perhubungan	23,82	24,60	11,25	20,38	80,06	77,90
9	Ditjen Integrasi Transportasi dan Multimoda	25,13	23,70	11,83	19,38	80,04	77,50

2.5 REALISASI ANGGARAN

2.5.1 REALISASI ANGGARAN UNIT KERJA

Alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar Rp5.119.295.134000,00, sedangkan untuk posisi akhir Triwulan III Tahun 2025 terdapat perubahan alokasi anggaran menjadi sebesar Rp 8.210.325.183.000,00 dengan uraian sebagai berikut:

1. Revisi lanjutan/luncuran pelaksanaan kegiatan/proyek SBSN tahun sebelumnya (TA. 2024) yang dilanjutkan ke TA. 2025 di 4 Satuan Kerja sebesar Rp36.199.983.000,00 pada tanggal 20 Februari 2025;
2. Revisi anggaran TA. 2025 lingkup Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam rangka memenuhi kewajiban efisiensi belanja Kementerian Perhubungan berupa pencantuman catatan halaman IVA DIPA/blokir sebesar Rp3.807.993.637.000,00 pada tanggal 21 Februari 2025 (tidak merubah pagu);

3. Revisi anggaran TA. 2025 lingkup Direktorat Jenderal Perkeretaapian berupa revisi administrasi ralat kode blokir sebesar Rp6.300.340.000,00 pada tanggal 16 Maret 2025 (tidak merubah pagu);
4. Revisi anggaran TA. 2025 lingkup Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tanggal 24 Maret 2025 berupa buka blokir catatan halaman IVA DIPA dalam rangka relaksasi blokir efisiensi anggaran untuk pemenuhan anggaran kegiatan prioritas (tidak merubah pagu) sebagai berikut:
    a. Subsidi Perintis sebesar Rp96.186.766.000,00;
    b. Mudik Gratis, Angkutan Lebaran, dan Nataru sebesar Rp10.548.315.000,00;
    c. Kebutuhan IMO sebesar Rp2.130.635.381.000,00.
5. Revisi anggaran berupa revisi lanjutan/luncuran pelaksanaan kegiatan/proyek bersumber dana SBSN Tahun Anggaran sebelumnya (TA. 2024) yang dilanjutkan ke TA. 2025 tersebar di 6 Satuan Kerja sebesar Rp2.951.685.352.000,00.
6. Penambahan pagu DIPA Petikan BLU dalam penggunaan saldo awal kas sebesar Rp11.337.699.000,00;
7. Penambahan pagu DIPA Petikan BLU dalam penggunaan saldo awal kas sebesar Rp 3.545.738.000,00;
8. Revisi anggaran TA. 2025 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan berupa:
    a. Revisi anggaran pembukaan blokir pada catatan halaman IVA DIPA dalam rangka relaksasi blokir efisiensi sebesar Rp186.186.612.000,- yang digunakan untuk pemenuhan belanja pegawai sebesar Rp48.713.863.000,- dan kegiatan prioritas dukungan keselamatan transportasi sebesar Rp137.472.749.000,00;
    b. Revisi pergeseran anggaran belanja pegawai dari Satuan Kerja Balai Pengujian Perkeretaapian dan Satuan Kerja Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan ke Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar Rp2.358.995.000,00;
    c. Revisi anggaran pembukaan blokir kode 2 pada catatan halaman IVA DIPA pada Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api sebesar Rp444.780.000,00.

Adapun untuk realisasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode Triwulan III Tahun 2025 diperoleh sebesar Rp1.076.285.649.409,00,- (13.11% dari pagu total atau 15,77% dari pagu efektif), dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 2- 34 Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Jenis Belanja Tahun 2025

No	Jenis Belanja / Pembiayaan	Pagu (Rp)			Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran Terhadap Pagu Efektif	
		Pagu Awal	Pagu Triwulan III	Pagu Efektif	Nilai (Rp)	% Thd Pagu Efektif	Nilai (Rp)	% Thd Pagu Efektif
1	Belanja Pegawai	203.084.303.000	256.511.803.000	256.511.803.000	183.688.480.772	71,61	72.823.322.228	28,39
2	Belanja Barang	3.612.244.204.000	3.620.597.025.000	2.997.520.084.000	452.609.842.536	15,10	3.167.987.182.464	84,90
3	Belanja Modal	1.303.966.627.000	4.333.216.355.000	3.571.856.733.000	439.987.326.101	12,32	3.893.229.028.899	87,68
Total		**5.119.295.134.000**	**8.210.325.183.000**	**6.825.888.620.000**	**1.076.285.649.409**	**15,77**	**7.134.039.533.591**	**84,23**

Tabel 2-35 Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Kegiatan Tahun 2025

No	Kegiatan	Pagu (Rp)			Realisasi Anggaran	
		Pagu Awal	Pagu Saat Ini	Pagu Efektif	Nilai (Rp)	% Thd Pagu Efektif
1.	**Program infrastruktur konektivitas**	**4.424.660.689.000**	**7.464.581.117.000**	**6.395.043.045.000**	**780.472.556.283**	**12,20%**
	a. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	813.226.191.000	2.085.756.647.000	1.645.917.442.000	224.614.611.183	13,65%
	b. Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	895.248.757.000	2.612.537.496.000	2.322.597.960.000	426.723.687.293	18,37%
	c. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	2.670.022.802.000	2.716.205.427.000	2.404.584.283.000	119.742.248.081	4,98%
	d. Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	46.162.939.000	50.081.547.000	21.943.360.000	9.392.009.726	42,80%
2.	**Program Dukungan Manajemen**	**694.634.445.000**	**39.749.432.000**	**430.845.575.000**	**322.521.003.090**	**68,66%**
	a. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	22.069.026.000	22.064.026.000	4.037.234.000	2.682.063.655	66,43%

No	Kegiatan	Pagu (Rp)			Realisasi Anggaran	
		Pagu Awal	Pagu Saat Ini	Pagu Efektif	Nilai (Rp)	% Thd Pagu Efektif
	b. Pengelolaan Perencanaan. Keuangan. BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	637.851.276.000	688,495,897,000	417.866.092.000	287.423.203.037	68,78%
	c. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	17.498.737.000	17,498.737.000	6.528.613.000	17.498.737.000	67,45%
	d. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	14.149.348.000	14.619.348.000	1.762.986.000	14.619.348.000	57,10%
	e. Legislasi dan Litigasi Transportasi	3.066.058.000	3.066.058.000	650.650.000	297.651.398	45,75%
TOTAL		**5.119.295.134.000**	**8.210.325.183.000**	**6.825.888.620.000**	**1.076.285.649.409**	**15,77%**

Tabel 2-36 Alokasi Anggaran Per Sasaran dan Indikator Kinerja Program Tahun 2025

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Pagu (Rp)			Realisasi Anggaran	
		Pagu Awal	Pagu Triwulan III	Pagu Efektif	Nilai (Rp)	% Thd Pagu Efektif
SP1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	IKP1 Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	813.226.191.000	2.051.708.470.000	1.645.917.442.000	224.614.611.183	10,77%
SP2 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKP2 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian per 1.000 Jumlah Keberangkatan KA	2.716.185.741.000 (termasuk penunjang teknis)	2.758.206.477.000 (termasuk penunjang teknis)	2.426.527.643.000	129.134.257.807	4,67%
SP3 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	IKP3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	895.248.757.000	2.617.514.514.000	2.322.597.960.000	426.723.687.293	16,33%

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Pagu (Rp)			Realisasi Anggaran	
		Pagu Awal	Pagu Triwulan III	Pagu Efektif	Nilai (Rp)	% Thd Pagu Efektif
	IKP4 Persentase *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api					
	IKP5 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api					
SP4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IKP5 Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	694.634.445.000	694.634.445.000,00	430.845.575.000	295.813.093.126	39,67%
Jumlah		**5.119.295.134.000**	**8.122.063.906.000**	**6.825.888.620.000**	**1.076.285.649.409**	**15,77%**

2.5.2 REALISASI PENDAPATAN UNIT KERJA

Berdasarkan data pada aplikasi SPAN Kementerian Keuangan, diperoleh realisasi PNBP pada Triwulan III Tahun 2025 sebesar Rp1.971.654.157.653,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.246.326.325.000,00 sehingga diperoleh capaian persentase realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar 158,20%. Rincian realisasi PNBP periode Triwulan III Tahun 2025 berdasarkan jenis pendapatannya sebagaimana pada Tabel berikut.

Tabel 2-37 Realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan III Tahun 2025

No	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	**Pendapatan Fungsional (Sesuai PP No.15 Tahun 2016)**	**1.028.700.863.000**	**1.525.532.010.378**	**148,30**
	a. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	1.528.160.000	561.272.732	36,73
	b. Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi Bidang Perhubungan	2.789.250.000	2.576.750.000	92,38
	c. Pendapatan Penggunaan Prasarana Perkeretaapian/*Track Access Charge*	1.023.132.453.000	1.518.785.667.646	148,44
	d. Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	1.251.000.000	3.608.320.000	288,43

No	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2	**Pendapatan BLU**	**89.826.325.000**	**62.896.964.150**	**70,02**
	a. Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	79.097.734.000	60.555.348.435	76,56
	b. Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	9.546.423.000	915.149.547	9,59
	c. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	-	1.089.491.424	
	d. Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	1.182.168.000	2.075.037	0,18
	e. Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran Yang Lalu		1.578.799	
	f. Pendapatan Lain-lain BLU		108.170.908	
	g. Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan		224.550.000	
	h. Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin		600.000	
3	**Pendapatan Non Fungsional**	**127.799.137.000**	**383.225.183.125**	**299,87**
	a. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	150.000.000	836.938.500	557,96
	b. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	3.065.000.000	21.880.470.500	713,88
	c. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	98.335.137.000	84.936.598.505	86,37
	d. Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	26.249.000.000	26.630.675.737	101,45
	e. Pendapatan dari KSP Peralatan dan Mesin	-	-	
	f. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	3.881.988.567	
	g. Pendapatan Denda Lainnya	-	90.321.173.452	
	h. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	53.964	
	i. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	97.950.083.864	
	j. Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	54.212.460.036	
	k. Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	2.574.740.000	
Jumlah		**1.246.326.325.000**	**1.971.654.157.653**	**158,20**

2.5.3 ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

Pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Perkeretaapian membutuhkan dukungan dari berbagai sumber daya agar sistem dapat berjalan dengan baik. Pemanfaatan sumber daya mencakup sumber daya manusia dan sumber daya anggaran diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada setiap unit di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

A. Analisis Efisiensi Sumber Daya Manusia

Ketersediaan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan hal penting dalam pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja unit kerja sehingga perlu untuk dipenuhi sesuai kebutuhan dan didukung dengan kompetensi/keahlian yang memadai. Pada Triwulan III Tahun 2025, jumlah pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebanyak 2.332 dengan rincian berupa 747 pegawai pada Kantor Pusat (Sekretariat dan 4 Direktorat Teknis) dan 1.585 pegawai tersebar pada 11 Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Kebutuhan pegawai berdasarkan Analisa Kebutuhan Kerja (ABK) Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 s.d 2029 sebanyak 4.024 pegawai sehingga masih terdapat gap yang cukup signifikan dari jumlah ketersediaan SDM saat ini. Perhitungan analisis efisiensi SDM diuraikan sebagai berikut :

$$\textbf{Efisiensi SDM} = \left(\frac{\text{SDM Tersedia}}{\text{Kebutuhan SDM sesuai ABK}} x \frac{Ouput\ \text{Aktu}al}{\text{Target Output}}\right) x\ 100\%$$

Efisiensi SDM = $\frac{2.332}{4.024}$ x 0,4441* x 100%

Efisiensi SDM = 0,5795 x 0,4441* x 100% = 25,74%

**) Perhitungan Output Aktual dibagi Target Output (Rasio Output) diperoleh dari aplikasi Monev Kemenkeu*

Selain itu, sebagai tindak lanjut atas hasil pengukuran kinerja periode sebelumnya (Triwulan II Tahun 2025) terdapat beberapa upaya penyesuaian penempatan/penghapusan jabatan struktural dan/atau fungsional pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang telah dilaksanakan pada periode Triwulan III Tahun 2025 antara lain:

1. Pelaksanaan mutasi pegawai sebanyak 28 orang baik internal maupun eksternal Direktorat Jenderal Perkeretaapian (keluar atau masuk) untuk memenuhi kebutuhan pegawai dan/atau penyegaran organisasi yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil pengukuran kinerja serta kompetensi pegawai yang bersangkutan;
2. Pelaksanaan pemberhentian jabatan fungsional sebanyak 6 pegawai karena menduduki jabatan struktural di internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian maupun karena peralihan ke jabatan fungsional lainnya;

3. Pelaksanaan pelantikan dan pengangkatan jabatan fungsional analis SDM aparatur sebanyak 3 orang dan arsiparis sebanyak 2 orang;
4. Pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional bidang perkeretaapian tanggal 18-19 September 2025 yang dilakukan dalam rangka program alih jenjang dan pengembangan karir SDM di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
5. Penataan ulang terhadap 847 formasi jabatan fungsional bidang perkeretaapian berdasarkan analisis beban kerja pada masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagaimana surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi serta Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi Kementerian Perhubungan nomor KP.107/1/12/K1/DJKA/2025 tanggal 17 September 2025 tentang Penyampaian Hasil Penataan Ulang Formasi Jabatan Fungsional Bidang Perkeretaapian.

B. Analisis Efisiensi Sumber Daya Anggaran

Dari sisi penggunaan sumber daya anggaran, Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah melakukan efisiensi anggaran dimana beberapa target Indikator Kinerja Program dapat tercapai dengan capaian lebih dari 100%. Terdapat 2 pendekatan perhitungan analisis efisiensi anggaran, yang pertama pendekatan perbandingan antara capaian indikator kinerja program dengan sisa realisasi anggaran mengacu Rencana Penyerapan Dana (RPD) pada Triwulan III Tahun 2025. Pendekatan yang kedua mengacu perhitungan pada PMK No. 22/PMK.02/2021.

Realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan III Tahun 2025 diperoleh sebesar Rp1.076.285.649.409 dengan persentase 13,11% dari pagu Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau 15,77% dari pagu efektif. Adapun efisiensi anggaran periode Triwulan III Tahun 2025 terhadap sasaran/indikator kinerja yang tercapai sebagaimana pendekatan pertama diperoleh sebesar 22,96% dengan uraian pada Tabel berikut.

Tabel 2-38 Analisis Efisiensi Sumber Daya Anggaran Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Triwulan III			Keuangan Triwulan III				Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	RPD Triwulan III 2025	Realisasi	Penye-rapan Angga ran	Sisa Anggaran/ Efisiensi Pada Indikator yang Tercapai (Rp)	
Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	0,460	0,460	100,000%	1.147.166.155.850	224.614.611.183	10,77%	922.551.544.667	Pada Sasaran Konektivitas Transportasi Perkeretaapian diperoleh realisasi kinerja tercapai 100% dengan sisa anggaran/efisiensi sebesar Rp922,56M.
Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian per 1.000 Jumlah Keberangkatan KA	Rasio	100	99,003	99,003%	1.521.457.835.700	129.134.257.807	4,67%	-	Pada Sasaran Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian Konektivitas, target kinerja tidak tercapai sehingga tidak terdapat efisiensi sumber daya
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	3,740	3,772	100,856%	1.436.895.622.800	426.723.687.293	16,33%	-	Pada Sasaran Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian Yang Terpercaya dan Sesuai Kebutuhan, terdapat satu realisasi kinerja yang capaiannya dibawah 100% sehingga tidak terdapat efisiensi sumber daya.
Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api	%	96,10%	97,945%	101,920%					
Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	%	14,785	14,337	96,970%					

Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Triwulan III			Keuangan Triwulan III				Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	RPD Triwulan III 2025	Realisasi	Penye-rapan Angga ran	Sisa Anggaran/ Efisiensi Pada Indikator yang Tercapai (Rp)	
Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	40,000	79,794	199,485%	410.159.236.300	295.813.093.126	39,67%	114.346.143.174	Pada Sasaran Kinerja Tata Kelola Pemerintahan realisasi kinerja tercapai diatas 100% dengan sisa anggaran/efisiensi sebesar Rp114,35M.
Jumlah Sisa Anggaran atau Efisiensi (% Efisiensi Anggaran)								**1.036.897.687.841 (22,96%)**	

Untuk pendekatan kedua dilakukan analisis efisiensi anggaran berdasarkan PMK No. 22/PMK.02/2021 dengan menggunakan perhitungan Capaian Rincian *Output* (CRO) dan realisasi anggaran periode Triwulan III Tahun 2025 dari kompilasi masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan perhitungan;

$$\textbf{Efisiensi } \boldsymbol{RO} \textbf{ Satker} = \frac{\sum(Alokasi\ Anggaran\ RO\ x\ Capaian\ RO) - Realisasi\ Anggaran\ RO)}{\sum(\text{Alokasi Anggaran RO})} \times 100\%$$

Adapun dari hasil analisis diperoleh efisiensi sumber daya anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Triwulan III Tahun 2025 sebesar 11,72% atau Rp962.567.998.711,00. Rincian perhitungan secara lengkap disampaikan pada Lampiran 3.

BAB 3 PENUTUP

3.1 TINDAK LANJUT REKOMENDASI PADA PELAPORAN KINERJA SEBELUMNYA

Tindak lanjut terhadap rekomendasi pada pelaporan kinerja periode sebelumnya (Laporan Monitoring Kinerja Triwulan II Tahun 2025) sebagai berikut:

Tabel 3-1 Tindak Lanjut Rekomendasi Pelaporan Kinerja Periode Sebelumnya

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
IKP1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah	▪ Penyelesaian sertifikasi kelaikan prasarana perkeretaapian termasuk koordinasi ketersediaan/kesiapan sarana kereta api mendukung pengoperasian hasil pembangunan konektivitas, diantaranya jalur KA Rantau Prapat Baru-Pondok S5 dan perpanjangan perintis KA Aceh menuju Muara Satu. ▪ Lanjutan pembangunan prasarana mendukung pengoperasian KA Makassar - Pare Pare dan persiapan pembangunan MRT Jakarta *East – West*, serta penyelesaian pemenuhan kebutuhan lahan pendukung konektivitas melalui LMAN. ▪ Pengusulan relaksasi anggaran Tahun 2025 untuk mendukung pemenuhan *readiness criteria,* penyelesaian pengadaan lahan, dan kegiatan-kegiatan pendukung konektivitas lainnya. ▪ Peninjauan kembali terhadap titik-titik konektivitas perkeretaapian yang memungkinkan penambahan keterhubungan dengan kawasan/simpul transportasi lainnya (seperti terminal tipe A, lainnya) termasuk apabila dibutuhkan reviu terhadap rumusan perhitungan rasio konektivitas.	▪ Percepatan penyelesaian sertifikasi kelaikan prasarana hasil pembangunan dengan progress sebagai berikut: o Pengoperasian Rantauprapat – Pondok S5: progres penetapan perencanaan teknis sebagai dokumen pendukung penyelesaian sertifikasi kelaikan; o Perpanjangan layanan KA Krueng Geukeuh – Muara Satu: telah dilaksanakan pengujian lanjutan atas hasil tindaklanjut uji pertama fasilitas operasi berupa pintu perlintasan pada tanggal 19 September 2025 dengan hasil telah sesuai/dinyatakan *closed.* ▪ Monitoring berkala progres kegiatan pendukung konektivitas perkeretaapian telah dilaksanakan dengan pembahasan masing-masing topik diantaranya: o Kegiatan Makassar-Parepare antara Mandai-Palanro sebesar 96,36%; o Persiapan pembangunan MRT Jakarta *East – West Phase I* dengan progres konsultan tender assistance telah berkontrak pada 9 Juli 2025 dan selanjutnya dalam proses persiapan pelelangan konsultan supervisi dan paket konstruksi. Pengadaan lahan juga masih berproses Pemda DKI. ▪ Telah terbit persetujuan relaksasi blokir efisiensi untuk kebutuhan belanja pegawai dan kegiatan prioritas di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2025 melalui Surat Menteri Keuangan No. S-171/MK/AG/2025 tanggal 28 Juli 2025,

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
		adapun nilai relaksasi usulan buka blokir Ditjen Perkeretaapian yang disetujui sebesar Rp186.186.162.000,00 dan telah ditindaklanjuti dengan mengusulkan relaksasi blokir efisiensi anggaran melalui surat Dirjen Perkeretaapian kepada Setjen Kementerian Perhubungan nomor KU.001/3/3/DJKA/2025 tanggal 1 Agustus 2025 dengan usulan diantaranya: o **Penyelesaian Infrastruktur Perkeretaapian sebesar Rp74.165.664.000,00** (termasuk biaya operasional dan biaya pendukung (BOBP), penertiban lahan dan lanjutan pendukung konektivitas (*sky bridge* Stasiun Bandung) o Pengujian Bidang Perkeretaapian sebesar Rp6.159.530.000,00; o Dukungan Keberlanjutan Pelayanan/ Operasional Stasiun dan Gudang sebesar Rp6.780.647.000,00. ▪ Telah dilaksanakan pembahasan terkait reviu rumusan perhitungan rasio konektivitas pada 11 September 2025 untuk menyelaraskan indikator kinerja dengan amanah RPJMN 2025–2029 serta menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi/reviu kinerja dari Inspektorat Jenderal dengan memperhitungkan konektivitas simpul dan konektivitas layanan/perjalanan KA.
IKP2 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian per 1.000 Jumlah Keberangkatan KA	▪ Percepatan pelaksanaan kegiatan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian Tahun 2025. ▪ Koordinasi dengan KNKT, PT KAI (Divre III Palembang) dan *stakeholder* terkait lainnya guna mengumpulkan data dan melakukan analisa untuk mengetahui penyebab anjlokan KA yang terjadi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025. ▪ Peningkatan pengawasan dan pelaksanaan penanganan daerah rawan khususnya di wilayah Sumatera Selatan dengan koordinasi Badan Usaha Penyelenggara Prasarana (BUPP). ▪ Usulan relaksasi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan anggaran terkait peningkatan keselamatan transportasi perkeretaapian (perbaikan kerusakan prasarana yang tidak termasuk dalam	▪ Pelaksanaan kegiatan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian (IMO) Tahun 2025 dengan progress : o Kegiatan IO telah berkontrak dengan PT KAI sebesar Rp.599.778.261.550,- o Kegiatan IM masih dalam proses finalisasi dokumen teknis dan pemilihan penyedia. ▪ Telah dilaksanakan rapat pembahasan *hazard* bersama KNKT bertempat di Ruang Kerja Ketua KNKT dan dihadiri oleh Dirjen Perkeretaapian, Direktur Keselamatan Perkeretaapian, serta perwakilan Dit. Keselamatan lainnya. Salah satu point pembahasan dalam rapat tersebut mengenai permasalahan rel, KNKT menemukan banyak cacat pada rel luar lengkung setelah diterapkannya kebijakan peningkatan kecepatan operasional kereta api menjadi

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	komponen IMO, dukungan pengawasan dan pengendalian sebagai regulator, lainnya). ▪ Pemutakhiran dan sinkronisasi data kondisi jalur dan jembatan KA termasuk data perlintasan sebidang dengan mengoptimalkan penggunaan sistem informasi untuk mempermudah pengawasan dan pengendalian guna mendukung peningkatan keselamatan dan keamanan penyelenggaraan perkeretaapian.	120 km/jam dan kerusakan pada lengkung dalam terutama di DIVRE 3 dan 4, dimana hal ini merupakan dampak dari pertinggian yang kurang sesuai untuk kereta kecepatan rendah. ▪ Dalam rangka peningkatan pengawasan dan pelaksanaan penanganan daerah rawan bencana atau rawan kecelakaan, telah dilaksanakan kegiatan inspeksi keselamatan dalam rangka libur nasional dan cuti bersama bulan Juni – Juli 2025. Kegiatan inspeksi dilaksanakan di semua wilayah BTP dan BPKA. Inspeksi keselamatan dilaksanakan dalam rangka pengawasan dan mitigasi risiko keselamatan untuk mendukung operasional perjalanan kereta api pada periode libur nasional dan cuti bersama. ▪ Telah terbit persetujuan relaksasi blokir efisiensi untuk kebutuhan belanja pegawai dan kegiatan prioritas di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2025 melalui Surat Menteri Keuangan No. S-171/MK/AG/2025 tanggal 28 Juli 2025, adapun nilai relaksasi usulan buka blokir Ditjen Perkeretaapian yang disetujui sebesar Rp186.186.162.000,00 dan telah ditindaklanjuti dengan mengusulkan relaksasi blokir efisiensi anggaran melalui surat Dirjen Perkeretaapian kepada Setjen Kementerian Perhubungan nomor KU.001/3/3/DJKA/2025 tanggal 1 Agustus 2025 dengan usulan diantaranya: o Perbaikan/Perawatan Prasarana sebesar Rp40.034.622.000,00 (mencakup kegiatan penanganan rintang jalan dan pengadaan tanah untuk penanganan longsor) o Pengujian Bidang Perkeretaapian sebesar Rp6.159.530.000,00; o Perawatan/Perbaikan Sarana sebesar Rp10.332.286.000,00, dan o Dukungan Keberlanjutan Pelayanan/Operasional Stasiun dan Gudang sebesar Rp6.780.647.000,00. ▪ Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah menyelenggarakan rapat koordinasi dengan BTP dan BPKA untuk pemutakhiran dan sinkronisasi data kondisi jalur dan jembatan KA serta kegiatan *roadshow* e-Perlintasan

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
		yang bertujuan untuk memutakhirkan dan menyelaraskan data perlintasan sebidang beserta data pendukungnya dalam aplikasi e-Perlintasan serta mendorong kesamaan pemahaman dan koordinasi dalam pengelolaan data guna mendukung keselamatan perkeretaapian yang berkelanjutan.
IKP3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	▪ Lanjutan pengembangan sistem informasi (perizinan *online*, sistem persetujuan terpusat/sertifikasi, lainnya) untuk mengakomodir layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai regulator perkeretaapian yang terpadu dan terintegrasi melalui Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai superapps. ▪ Penyiapan laporan berkala/triwulan kepada PPTB Setjen Kementerian Perhubungan untuk mempermudah koordinasi pengelolaan survei kepuasan masyarakat. ▪ Penyiapan alternatif pembiayaan untuk pelaksanaan kajian survei IKM pada Balai Perawatan Perkeretaapian dikarenakan alokasi anggaran untuk kajian terdampak efisiensi anggaran (diusulkan pelaksanaan secara swakelola). ▪ Pelaksanaan pelatihan kepada SDM yang memberikan layanan diantaranya penggunaan bahasa isyarat untuk petugas *customer service*, petugas piket, petugas keamanan dan lainnya untuk mendukung layanan angkutan khususnya yang dioperasikan oleh Balai Pengelola Kereta Api.	▪ Hingga triwulan III 2025 pengembangan Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Perizinan *Online* telah berprogres pembahasan laporan kemajuan/antara. ▪ Telah disampaikan surat Kepala Balai Pengujian nomor PT.105/1/2/BP-UJI/2025 tanggal 1 Juli 2025 perihal Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Periode April - Juni 2025 dan surat Plt. Direktur Prasarana Perkeretaapian nomor UM.006/240/K3/DJKA/2025 tanggal 14 Oktober 2025 perihal Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). ▪ Balai perawatan perkeretaapian saat ini masih menyusun kajian/ rencana kegiatan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat secara swakelola. ▪ Telah dilakukan pelatihan penggunaan bahasa isyarat untuk *customer service* petugas tiket, petugas keamanan dan petugas kebersihan LRT Sumatera Selatan pada 9 s.d. 11 Juli 2025.
IKP4 Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api	▪ Lanjutan pembangunan jalur ganda kereta api (jalur ganda KA elevated Medan – Binjai, Solo – Semarang, lainnya) dan peningkatan jalur/jembatan/fasilitas operasi kereta api (Jember – Kalisat, Jabodetabek, lainnya) untuk meningkatkan kapasitas lintas dan kecepatan operasional kereta api serta memudahkan pengaturan operasional kereta api agar tepat waktu;	▪ Lanjutan pembangunan jalur ganda KA dengan progres: o Segmen Solo Balapan-Kalioso sebesar 95,94%; o Segmen Medan-Binjai sebesar 70,21%; o Lanjutan kegiatan peningkatan jalur dan jembatan KA Segmen Jember-Kalisat sebesar 84,59%. ▪ Telah diterbitkan penetapan perjalanan kereta api di luar GAPEKA lebih dari 30 hari berturut-turut pada tanggal 27 Agustus 2025

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	▪ Pelaksanaan evaluasi dan penerbitan persetujuan perjalanan kereta api di luar GAPEKA melalui Peraturan/Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian. ▪ Mengusulkan relaksasi kegiatan pendukung (dukungan penyiapan lahan dan lainnya) untuk memastikan kelanjutan kegiatan pembangunan jalur ganda dan peningkatan jalur/jembatan/fasilitas operasi pada Tahun 2025. ▪ Penyesuaian program perjalanan KA pada jaringan jalur KA nasional kereta api ringan/LRT terintegrasi di wilayah Jabodebek dan LRT Sumatera Selatan.	▪ Telah terbit persetujuan relaksasi blokir efisiensi untuk kebutuhan belanja pegawai dan kegiatan prioritas di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2025 melalui Surat Menteri Keuangan No. S-171/MK/AG/2025 tanggal 28 Juli 2025, adapun nilai relaksasi usulan buka blokir Ditjen Perkeretaapian yang disetujui sebesar Rp186.186.162.000,00 dan telah ditindaklanjuti dengan mengusulkan relaksasi blokir efisiensi anggaran melalui surat Dirjen Perkeretaapian kepada Setjen Kementerian Perhubungan nomor KU.001/3/3/DJKA/2025 tanggal 1 Agustus 2025 dengan usulan diantaranya: o Penyelesaian infrastruktur sebesar Rp74.165.664.000,00 (termasuk biaya operasional dan biaya pendukung, penertiban lahan dan lanjutan pendukung konektivitas (*Sky Bridge* Stasiun Bandung); o Dukungan keberlanjutan pelayanan/ operasional stasiun dan gudang sebesar Rp6.780.647.000,00. ▪ Telah dilakukan pemeriksaan dokumen rancangan GAPEKA pada jaringan jalur kereta api nasional kereta api ringan terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi yang akan ditindaklanjuti pada penetapan GAPEKA 2026. Penyesuaian program perjalanan KA pada jaringan jalur nasional di wilayah LRT Sumatera Selatan masih dalam proses pemeriksaan.
IKP5 Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	▪ Percepatan penyelesaian kegiatan peningkatan stasiun kereta api Rangkasbitung dalam upaya peningkatan layanan angkutan penumpang, serta monitoring pemanfaatan Stasiun Tanah Abang yang telah beroperasi; ▪ Lanjutan pelaksanaan pengujian dan sertifikasi terhadap hasil pengadaan sarana KRL baru oleh badan usaha untuk mendukung peningkatan kapasitas layanan kereta api penumpang khususnya di Jabodetabek; ▪ Koordinasi intensif untuk penyelesaian pengujian dan sertifikasi terhadap kegiatan peningkatan prasarana yang	▪ Peningkatan stasiun Tanah Abang telah selesai 100%/beroperasi tanggal 29 Juni 2025 dan berkala dilakukan monitoring pasca pengoperasian stasiun baru. Untuk progres Stasiun Rangkasbitung 91,42%. ▪ Pengawasan dan koordinasi terkait rencana penambahan sarana KRL baru oleh badan usaha telah dilaksanakan untuk 4 Trainset (TS 8 s.d 11) sebagai berikut : o Pengajuan permohonan; o Selesai verifikasi dokumen permohonan; o *Endurance test;* o Uji pertama statis dan dinamis; o Penerbitan sertifikat. ▪ Telah dilaksanakan inventarisasi terhadap jalur kereta api yang akan memasuki periode

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	dilaksanakan badan usaha (fasilitas operasi, jalur dan bangunan) khususnya di wilayah Sumatera Bagian Selatan dalam rangka mendukung peningkatan kehandalan dan kapasitas perjalanan kereta api barang. ▪ Usulan relaksasi anggaran untuk mendukung kelanjutan layanan kereta api yang dikelola Balai Pengelola Kereta Api (diantaranya di wilayah BPKA Sulawesi Selatan berupa perawatan 14 Stasiun, OCC dan Gudang Pekkae)	uji berkala dalam rangka sertifikasi berkala milik PT. KAI dan akan disampaikan surat pemeritahuan kepada PT.KAI pada bulan Oktober 2025, dengan hasil inventarisasi: o Jalan ganda kereta api antara Stasiun Blambangan Umpu – Stasiun Giham dengan nomor sertifikat KA.405/SK.6/22/DJKA/I/SUMBAGSEL/604/20; o Jembatan kereta api BH.289 Km. 164+640 antara Stasiun Blambangan Umpu – Stasiun Giham dengan nomor sertifikat KA.405/SK.30/102/PT.KAI/207/20; o Jembatan kereta api BH.297 Km. 167+383 antara Stasiun Blambangan Umpu – Stasiun Giham dengan nomor sertifikat KA.405/SK.30/103/PT.KAI/207/20; o Jembatan kereta api BH.303 Km. 172+147 antara Stasiun Blambangan Umpu – Stasiun Giham dengan nomor sertifikat KA.405/SK.30/104/PT.KAI/207/20; o Jembatan kereta api BH.309 Km. 167+383 antara Stasiun Blambangan Umpu –Giham dengan nomor sertifikat KA.405/SK.32/105/DJKA/PT.KAI/207/20; ▪ Telah terbit persetujuan relaksasi blokir efisiensi untuk kebutuhan belanja pegawai dan kegiatan prioritas di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2025 melalui Surat Menteri Keuangan No. S-171/MK/AG/2025 tanggal 28 Juli 2025, adapun nilai relaksasi usulan buka blokir Ditjen Perkeretaapian yang disetujui sebesar Rp186.186.162.000,00 dan telah ditindaklanjuti dengan mengusulkan relaksasi blokir efisiensi anggaran melalui surat Dirjen Perkeretaapian kepada Setjen Kementerian Perhubungan nomor KU.001/3/3/DJKA/2025 tanggal 1 Agustus 2025 dengan usulan diantaranya: o Penyelesaian Infrastruktur Perkeretaapian sebesar Rp74.165.664.000,00 (termasuk Biaya Operasional dan Biaya Pendukung, Penertiban lahan dan pekerjaan lanjutan pendukung konektivitas (Sky Bridge Stasiun Bandung);

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
		○ Dukungan keberlanjutan pelayanan/ operasional stasiun dan gudang sebesar Rp6.780.647.000,00 dengan detail kegiatan Operasional 14 stasiun, DEPO, OCC dan gedung prasarana Pekkae.
IK6 Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	▪ Lanjutan evaluasi implementasi SAKIP tingkat Kementerian Perhubungan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan untuk kemudian menjadi acuan dalam finalisasi penilaian pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian; ▪ Meningkatkan penyerapan anggaran unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan percepatan penyelesaian kegiatan/output yang telah diprogramkan pada Tahun 2025 serta pemenuhan readiness criteria sesuai ketentuan; ▪ Koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk penerapan Standar Biaya Keluaran pada Tahun 2025 serta pengusulan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026 (SBKU dan SBKK) sebagaimana diatur pada PMK Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2025; ▪ Lanjutan penyelesaian Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk koordinasi dengan KPKNL setempat untuk menindaklanjuti usulan sewa aset; ▪ Lanjutan pembinaan ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian mencakup sosialisasi/workshop/bimbingan teknis terkait peningkatan disiplin dan kinerja kepegawaian termasuk implementasi penilaian kinerja pegawai dan organisasi sesuai kebijakan Kementerian PANRB terbaru.	▪ Telah dilaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP Unit Kerja Eselon I Ditjen Perkeretaapian Tahun 2025 dengan Inspektorat Jenderal yang berlokasi di Balai Pengujian Perkeretaapian pada 15 s.d. 18 Juli 2025 dan diperoleh nilai Ditjen Perkeretaapian sebesar 83,72. Sebagai tindak lanjut hal tersebut, telah dilakukan rapat penyamaan persepsi penilaian Evaluasi SAKIP unit kerja *non sample* Ditjen Perkreetaapian sesuai hasil penilaian evaluasi Inspektorat Jenderal pada tanggal 11 September 2025; ▪ Telah dilaksanakan rapat evaluasi pelaksanaan anggaran Tahun 2025 yang dilaksanakan secara rutin dan berkala setiap bulan (15 Agustus, 1 September, 25-26 September) guna percepatan penyerapan anggaran termasuk identifikasi kendala/langkah lanjut dan proyeksi penyerapan anggaran hingga akhir Tahun 2025; ▪ Telah dilaksanakan *tagging*/penandaan pada Rincian *Output* (RO) Tahun 2025 yang termasuk dalam kategori SBKU sebagaimana diatur PMK Nomor 92 Tahun 2024. Sebagai tindak lanjut hal tersebut, telah dilakukan *tagging* terhadap 52 RO SBKU yang tersebar di Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian; ▪ Telah dilakukan koordinasi lanjutan dengan KPKNL Tangerang pada tanggal 14 Juli 2025 guna penyelesaian Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN di wilayah Kota Tangerang; ▪ Telah dilaksanakan pemantauan dan dilakukan penataan ulang formasi jabatan fungsional bidang perkeretaapian guna sinkronisasi dengan 847 formasi yang ditetapkan oleh Kementerian PAN RB. Selain itu, telah dilaksanakan uji kompetensi jabatan fungsional bidang perkeretaapian pada tanggal 18-19 September 2025.

Selain itu juga dilaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mendorong perbaikan budaya kinerja organisasi diantaranya:

Tabel 3-1 Perubahan Budaya Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

No.	Substansi/ Aspek	Semula	Menjadi	Dampak/Manfaat
1	Orientasi Kerja	Berorientasi pada pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran tanpa melihat dampak/hasil	Berorientasi pada hasil dan manfaat bagi masyarakat (*outcome–impact*) sesuai fokus dalam peningkatan konektivitas, keselamatan dan pelayanan transportasi perkeretaapian	Peningkatan kualitas layanan publik transportasi perkeretaapian
2	Kepemimpinan dan Akuntabilitas Kinerja	Arahan pimpinan masih bersifat umum dan administrasi, belum menekankan aspek akuntabilitas individu terhadap hasil kerja	Pimpinan memberikan arahan langsung dan konsisten dengan rapat staf berkala untuk peningkatan akuntabilitas, disiplin, dan integritas pegawai. Kepedulian pimpinan terhadap penyelenggaran manajemen kinerja dan manajemen risiko juga menjadi komitmen pimpinan.	• Meningkatkan komitmen pimpinan dan pegawai terhadap capaian kinerja organisasi; • Memperkuat budaya integritas dan profesionalisme.
3	Inovasi/Transformasi Digital dan Tata Kelola Data	Pemanfaatan sistem informasi dan layanan digital masih terpisah-pisah antar unit kerja	• Pengembangan Portal Layanan dan Data Ditjen Perkeretaapian sebagai *superapps* yang terintegrasi antar layanan termasuk dalam tata kelola data; • Penggunaan aplikasi umum yaitu SRIKANDI untuk mendukung transformasi digital tata kelola administrasi.	• Meningkatkan efisiensi kerja, transparansi, dan kemudahan akses data serta layanan; • Mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan digital.
4	Efisiensi dan Produktivitas Kerja	Pelaksanaan rapat dan koordinasi masih didominasi pertemuan tatap muka yang membutuhkan biaya besar dan waktu lama	• Pemanfaatan rapat daring / secara *online* (*Zoom, MS Teams*, dan lainnya) sebagai bentuk adaptasi kebijakan efisiensi anggaran; • Peningkatan produktivitas dengan mendorong inovasi pegawai dan kolaborasi lintas *stakeholder (crosscutting)*.	• Efisiensi anggaran perjalanan dinas; • Proses pengambilan keputusan lebih cepat; • Produktivitas dan komunikasi antar unit kerja internal dan eksternal tetap terjaga.

No.	Substansi/ Aspek	Semula	Menjadi	Dampak/Manfaat
5	Perbaikan Berkelanjutan Manajemen Kinerja	• Belum terintegrasi optimal antara manajemen kinerja dengan manajemen penganggaran dan manajemen risiko; • Pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja organisasi tidak selaras dengan pengukuran kinerja individu; • Evaluasi SAKIP dilaksanakan secara *manual* melalui *excel* atau *spreadsheet*.	• Perbaikan berkelanjutan terus dilakukan dengan sinkronisasi kegiatan dan anggaran yang selaras mendukung pencapaian target kinerja pada Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja, serta juga dilakukan pengendalian berkala melalui pengendalian/ penanganan risiko setiap triwulan; • Pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja di tingkat pimpinan unit kerja telah disusun terstruktur dan berbasis *cascading* dari level unit kerja tertinggi hingga individu yang tertuang dalam SKP; • Evaluasi SAKIP dilaksanakan secara berjenjang dengan dukungan sistem informasi melalui fitur pada Portal Layanan Ditjen Perkeretaapian	• Peningkatan capaian kinerja unit kerja; • Efisiensi kegiatan dan anggaran yang memberikan dampak terhadap kinerja unit kerja dan berorientasi hasil (*outcome*); • Pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja efektif dan menjadi dasar dalam *reward and punishment* serta perbaikan tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan; • Efektifitas pelaksanaan kegiatan evaluasi akuntabilitas kinerja secara terpadu.

3.2 KESIMPULAN

Laporan Monitoring Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan III Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Monitoring Kinerja tersebut menggambarkan pencapaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program serta kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2025 mengacu pada target Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Rata-rata capaian kinerja Triwulan III Tahun 2025 sebesar 101,458% yang secara ringkas disampaikan pada Tabel berikut.

Tabel 3-2 Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan III Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	SP1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	IK1 Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rasio	0,460	0,460	100,000
2	SP2 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IK2 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian per 1.000 Jumlah Keberangkatan KA	%	100	99,003	99,003
3	SP3 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	IK3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	3,740	3,772	100,856
		IK4 Persentase *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api	%	96,10%	97,945%	101,920
		IK5 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	%	14,785	14,337	96,970
4	SP4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IK6 Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	40,000	79,577	198,943 (Maksimal Capaian 110%)
Rata-rata Capaian Kinerja						**101,458**

3.3 REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Triwulan III 2025, diperlukan upaya peningkatan kinerja guna memastikan target dapat terpenuhi pada periode berikutnya. Untuk itu, berikut disampaikan beberapa rekomendasi untuk masing-masing Indikator Kinerja Program:

1. **IKP1 Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian:**
   a. Penyelesaian/finalisasi dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 khususnya substansi kegiatan pendukung konektivitas perkeretaapian mengacu perkembangan kebijakan pada RPJMN dan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan;

b. Koordinasi persiapan pengoperasian hasil pembangunan konektivitas diantaranya usulan penetapan skema perintis Tahun 2026 (Rantauprapat Baru-Pondok S5, Binjai - Besitang dan perpanjangan perintis KA Aceh), pengajuan skema sewa aset dan perbaikan infrastruktur (konektivitas Pelabuhan Tanjung Emas);
c. Pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kegiatan pendukung konektivitas transportasi perkeretaapian, diantaranya terkait penyelesaian pemenuhan lahan pendukung konektivitas melalui LMAN, koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait penetapan lokasi, serta monitoring tahapan pengadaan barang/jasa;
d. Pengoptimalan sisa anggaran Tahun 2025 secara selektif untuk kegiatan pendukung, serta mempersiapkan dokumen pengusulan pada RKA Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2026 berdasarkan skala prioritas RPJMN dan Rencana Strategis guna pemenuhan *readiness criteria*, penyelesaian pengadaan lahan, dan kegiatan-kegiatan pendukung konektivitas lainnya;
e. Pengoptimalan peran inspektur prasarana dan sarana perkeretaapian untuk pelaksanaan pengawasan/inspeksi secara berkala dalam pembangunan prasarana perkeretaapian mendukung konektivitas.

2. IKP2 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian:

a. Pelaksanaan inspeksi/*rampcheck* kondisi prasarana dan sarana perkeretaapian sebagai persiapan penyelenggaraan angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 termasuk upaya pencegahan terjadinya risiko jalur kereta api tidak sesuai spesifikasi teknis/rusak/rel aus/putus dan kegagalan sistem persinyalan yang dapat berdampak pada kejadian kecelakaan kereta api;
b. Monitoring dan evaluasi terhadap manajemen tanggap darurat serta tindak lanjut rekomendasi peningkatan keselamatan perkeretaapian khususnya penanganan pasca kejadian kecelakaan kereta api sebagai acuan dalam tindakan preventif dan korektif periode berikutnya;
c. Usulan perbaikan mekanisme pelaporan badan usaha dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi guna mempermudah pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian.

d. Percepatan penyiapan dokumen teknis serta pelaksanaan kegiatan perawatan prasarana perkeretaapian milik negara Tahun 2025 sesuai skema pemilihan penyedia berdasarkan ketentuan;

e. Usulan revisi anggaran untuk pemanfaatan sisa kontrak/sisa anggaran yang potensi tidak terserap s.d akhir Tahun 2025 untuk pemenuhan pembayaran *backlog* IMO periode sebelumnya dan/atau penanganan rintang jalan/daerah rawan kecelakaan/bencana alam/longsoran/ amblesan;

f. Penyesuaian penugasan inspektur prasarana dan sarana perkeretaapian serta anggota Satuan Pelayanan pada masing-masing wilayah Balai Teknik Perkeretaapian berdasarkan kompetensi dalam pelaksanaan pengawasan/inspeksi keselamatan perkeretaapian.

3. IKP3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian

a. Peningkatan keamanan sistem terkait layanan regulator perkeretaapian (perizinan, sertifikasi, pengujian, lainnya) untuk mencegah terjadinya gangguan pada layanan serta lanjutan pengembangan fitur Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai *superapps* yang terpadu dan terintegrasi;

b. Memfasilitasi serta menindaklanjuti layanan pengaduan pelayanan angkutan penumpang khususnya pada layanan kereta api yang dikelola oleh BPKAR Sumatera Selatan dan BPKA Sulawesi Selatan diantaranya melalui *barcode* pada area *boarding* dan sosial media;

c. Berpartisipasi dalam monitoring dan evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan Kementerian Perhubungan serta dukungan pelaksanaan penilaian kepatuhan pelayanan publik Tahun 2025 oleh Ombudsman;

d. Pengoptimalan sisa anggaran Tahun 2025 secara selektif untuk kegiatan pendukung termasuk memastikan pemenuhan anggaran angkutan perintis sampai akhir Tahun 2025, serta mempersiapkan dokumen pengusulan pada RKA Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2026 berdasarkan skala prioritas layanan regulator dan angkutan perintis perkeretaapian;

e. Pelaksanaan layanan sertifikasi/pengujian didukung dengan penyesuaian penugasan pegawai fungsional tertentu perkeretaapian sesuai bidang tugas dan kompetensinya (penguji, asisten penguji, lainnya).

4. IKP4 Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api:

a. Melakukan evaluasi pelaksanaan GAPEKA termasuk verifikasi dan validasi data capaian harian kinerja operasi pada jaringan jalur kereta api nasional sebagai acuan penetapan GAPEKA Tahun 2026 serta upaya peningkatan OTP perjalanan kereta api;

b. Melakukan inspeksi/pemantauan berkala terhadap perjalanan kereta api pada lokasi rawan bencana/banjir/longsoran/amblesan/lokasi taspat dan rawan gangguan keamanan di perlintasan sebidang serta memastikan peralatan penanganan kecelakaan/rintang jalan tersedia dan ditempatkan sesuai kebutuhan;

c. Lanjutan pembangunan jalur ganda kereta api (jalur ganda KA elevated Medan – Binjai, Solo-Semarang, lainnya) dan peningkatan jalur/jembatan/fasilitas operasi kereta api (Jember – Kalisat, Jabodetabek, lainnya) untuk meningkatkan kapasitas lintas dan kecepatan operasional kereta api serta memudahkan pengaturan operasional kereta api agar tepat waktu.

d. Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan pendukung yang telah direlaksasi dengan pemanfaatan sisa waktu hingga akhir tahun serta mengusulkan perpanjangan kontrak tahun jamak untuk kegiatan pembangunan jalur ganda/peningkatan jalur/jembatan/fasilitas operasi yang terkendala dan tidak dapat selesai pada akhir Tahun 2025 dilengkapi data dukung dan justifikasi yang memadai;

e. Penyesuaian penugasan inspektur prasarana dan sarana perkeretaapian serta anggota Satuan Pelayanan pada masing-masing wilayah Balai Teknik Perkeretaapian berdasarkan kompetensi dalam pelaksanaan pengawasan perjalanan kereta api.

5. IKP4 Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api:

a. Koordinasi dan penyiapan rencana operasi penyelenggaran angkutan kereta api pada periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 termasuk mendukung penyelenggaraan angkutan motor gratis menggunakan kereta api;

b. Penyusunan rancangan peraturan terkait penetapan tarif angkutan barang dengan kereta api;

c. Integrasi data dan pelaporan angkutan kereta api yang *update* dan valid untuk peningkatan pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian dalam sistem yang terintegrasi (Strategi Kementerian Perhubungan, Portal Layanan Ditjen Perkeretaapian);

d. Penyelesaian kegiatan peningkatan stasiun kereta api Rangkasbitung dalam upaya peningkatan layanan angkutan penumpang.

e. Pengoptimalan sisa anggaran Tahun 2025 secara selektif untuk kegiatan pendukung diantaranya pemenuhan anggaran angkutan perintis sampai akhir Tahun 2025, serta kebutuhan pelaksanaan *rampcheck* pemenuhan standar pelayanan minimum untuk persiapan penyelenggaran angkutan kereta api pada periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

f. Pengoptimalan Satuan Pelayanan didukung peningkatan kompetensi SDM di masing-masing wilayah Balai Teknik Perkeretaapian untuk pengawasan penyelenggaraan angkutan penumpang dan barang sesuai standar pelayanan minimum.

6. Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

a. Finalisasi penilaian terkait evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2025 untuk unit kerja *non sample* di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta menyampaikan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP Tahun 2025 kepada Inspektorat Jenderal;

b. Pelaksanaan forum pembahasan untuk finalisasi Rencana Strategis Ditjen Perkeretaapian Tahun 2025-2029 termasuk sinkronisasi RPJMN Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis tingkat Kementerian Perhubungan serta seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

c. Penyusunan revisi Perjanjian Kinerja 2025 sesuai hasil monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan capaian kinerja dapat memenuhi kategori *on the right track* (capaian 90-110%).
d. Percepatan penyerapan anggaran Tahun 2025 serta pemantauan pelaksanaan anggaran unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, termasuk dukungan revisi anggaran apabila diperlukan untuk pemenuhan *backlog*/selisih anggaran penyelenggaraan IMO periode sebelumnya;
e. Pelaksanaan *tagging*/penandaan Rincian *Output* SBKU/SBKK pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2026 sebagaimana diatur pada PMK Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2025;
f. Koordinasi dengan KPKNL untuk percepatan persetujuan pemanfaatan aset/BMN guna mendukung perolehan PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
g. Lanjutan pembinaan ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk peningkatan kompetensi dan pengelolaan jenjang karir jabatan fungsional tertentu mencakup sosialisasi/bimbingan teknis/pendidikan/pelatihan/uji kompetensi terkait kepegawaian, manajerial dan teknis bidang perkeretaapian;
h. Pembahasan usulan penyelarasan dan penyederhanaan jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta koordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi Kementerian Perhubungan.

Selanjutnya dengan disusunnya Laporan Monitoring Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan III Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan informasi kinerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk menjadi acuan dalam peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

LAMPIRAN

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA
TRIWULAN III 2025
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

LAMPIRAN I

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Mohamad Risal Wasal
Jabatan	:	Direktur Jenderal Perkeretaapian

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	:	Dudy Purwagandhi
Jabatan	:	Menteri Perhubungan

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

Pihak Kedua, Menteri Perhubungan	Pihak Pertama, Direktur Jenderal Perkeretaapian
DUDY PURWAGANDHI	MOHAMAD RISAL WASAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
SP1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	IKP1	Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rasio	0,460
SP2	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKP2	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian per 1.000 Jumlah Keberangkatan KA	%	100,000
SP3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	IKP3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	3,740
		IKP4	Persentase *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api	%	96,100
		IKP5	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	%	19,000
SP4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IKP6	Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	100,000

Kegiatan			Anggaran
1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rp	813.226.191.000
2.	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	Rp	895.248.757.000
3.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	Rp	2.670.022.802.000
4.	Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	Rp	46.162.939.000
5.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	Rp	22.069.026.000
6.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	Rp	637.851.276.000
7.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	Rp	17.498.737.000
8.	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	Rp	14.149.348.000
9.	Legislasi dan Litigasi Transportasi	Rp	3.066.058.000

Disetujui
Menteri Perhubungan

DUDY PURWAGANDHI

Jakarta, Januari 2025
Direktur Jenderal Perkeretaapian

MOHAMAD RISAL WASAL

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Tahun: 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
					Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12		
MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	Rasio	0,460	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,460	813.226.191.000	Dit. Prasarana Perkeretaapian, Dit. Lalu Lintas dan Angkutan KA, Dit Sarana Perkeretaapian dan Balai Teknik di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
				Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Jaringan Jalur KA dan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian)	-	-	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	11,53	11,53	11,53	23	-	Dit Lalu Lintas dan Angkutan KA
				Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (Persentase Penyelesaian Kerjasama Pengembangan Infrastruktur Perkeretaapian)	-	-	4	4	4	8	8	8	12	12	12	20	-	Dit Lalu Lintas dan Angkutan KA
				Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana)	61,430	61,430	61,430	61,430	61,430	61,430	61,430	62,140	63,570	63,570	63,570	64,54	-	Dit Prasarana Perkeretaapian
				Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian)	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	-	Dit Sarana Perkeretaapian

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
					Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12		
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (pengujian dan sertifikasi kelaikan sarana, prasarana dan kompetensi SDM, perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara, pembinaan dan pengaturan/pengendalian/pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2.716.185.741.000	Dit. Keselamatan Perkeretaapian, Dit. Prasarana Perkeretaapian, Dit. Sarana Perkeretaapian, Balai Pengujian Perkeretaapian dan Balai Teknik di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
				Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian)	47,670	47,670	47,670	47,670	47,670	47,670	47,670	47,670	47,670	47,670	47,670	50,34	-	Dit Prasarana Perkeretaapian
				Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian)	0,00	0,380	0,385	6,150	10,00	16,150	21,150	26,920	32,690	44,230	51,920	73,840	-	Dit Sarana Perkeretaapian
				Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Presentase Sarana Perkeretaapian yang Telah ditindaklanjuti sesuai hasil Rampcheck)	-	-	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	-	Dit Sarana Perkeretaapian
				Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator dan Operator Perkeretaapian)	0,700	1,420	2,120	2,840	7,510	10,710	15,630	16,520	17,760	18,490	19,270	19,440	-	Dit Keselamatan Perkeretaapian
				Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Hasil Audit Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan)	1,390	2,780	4,160	5,550	6,940	8,330	9,720	11,110	12,490	13,880	15,270	16,660	-	Dit Keselamatan Perkeretaapian
				Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian)	0,369	1,568	2,355	3,707	5,493	7,583	9,773	12,007	14,201	16,259	18,038	19,480	-	Balai Pengujian Perkeretaapian
				Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian)	0,177	1,567	2,322	3,315	4,308	6,294	8,281	10,267	11,260	12,849	15,216	17,440	-	Balai Pengujian Perkeretaapian
				Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian)	0,922	2,436	3,539	4,643	6,385	8,128	9,870	11,612	13,355	15,097	16,840	17,970	-	Balai Pengujian Perkeretaapian

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
					Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12		
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	3,740	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (subsidi perintis dan monitoring PSO, penetapan, pemantauan dan evaluasi GAPEKA, pembangunan jalur ganda kereta api dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian baik jalur kereta api dan fasilitas operasi dan lainnya)	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	895.248.757.000	Dit. LLAKA, Dit. Prasarana Perkeretaapian,Dit. Sarana Perkeretaapian, BTP, BPKA
				Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA)	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	-	Dit Lalu Lintas dan Angkutan KA
				Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) lerhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian)	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	-	Dit Sarana Perkeretaapian
				Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) lerhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian)	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	-	Dit Prasarana Perkeretaapian
				Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktur Keselamatan Perkeretaapian)	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	-	Dit Keselamatan Perkeretaapian
				Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian)	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	-	Balai Pengujian Perkeretaapian
				Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakal (IKM) Terhadap Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan)	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	-	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan
				Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan)	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	-	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan
	PERSENTASE ON TIME PERFORMANCE (OTP) TRANSPORTASI KERETA API	%	96,200	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	-	
				Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Realisasi Perjalanan KA berdasarkan GAPEKA)	95,42	95,42	95,42	95,42	95,42	95,42	95,42	95,42	95,42	95,42	95,42	95,42	-	Dit Lalu Lintas dan Angkutan KA
				Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kalegori I dan II)	95,020	95,020	95,020	95,020	95,020	95,020	95,020	95,020	95,020	95,020	95,020	95,020	-	Dit Prasarana Perkeretaapian dan Balai Teknik Perkeretaapian
				Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Fasilitas Operas! Kereta Api dengan Teknologi Handai)	62,670	62,670	63,40	63,40	63,40	63,40	63,40	63,57	63,40	63,92	63,92	65,27	-	Dit Prasarana Perkeretaapian dan Balai Teknik Perkeretaapian
	PERSENTASE PEMENUHAN TARGET ANGKUTAN KERETA API	%	19,000	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	1,540	2,955	4,465	5,995	7,575	9,125	11,580	13,170	14,785	16,340	17,905	19,000	-	Dit Lalu Lintas dan Angkutan KA

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
					Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12		
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	%	100,000	Program Dukungan Manajemen (Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian, Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian, Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian, Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian & Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian)	5,060	6,325	19,035	19,368	19,578	20,555	34,630	35,505	40,000	40,960	42,820	100	694.634.445.000	
				Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pencapaian Target Regulasi/Legislasi (Jumlah Rancangan Dan Peraturan Perundangan) Di Bidang Perkeretaapian)	-	-	5	5	5	10	10	10	15	15	15	20	-	Setditjen Perkeretaapian
				Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian (Indeks Profesional ASN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	-	Setditjen Perkeretaapian
				Tersedianya Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal (Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	Setditjen Perkeretaapian
				Terwujudnya Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian (Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perkeretaapian)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	Setditjen Perkeretaapian
				Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian (Tingkat Pencapaian Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian)	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	-	Seluruh Unit Kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
				Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian (Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ditjen Perkeretaapian)	23	54	55	56	57	60	65	70	75	80	90	100	-	Setditjen Perkeretaapian
				Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian (Tingkat Pencapaian Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Perkeretaapian)	19,240	22,300	53,140	54,470	55,310	57,220	59,250	62,020	71,000	73,840	79,280	100	-	Seluruh Unit Kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian

Jakarta, Januari 2025
DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196706081990031005

USULAN REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Allan Tandiono
Jabatan	:	Direktur Jenderal Perkeretaapian

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	:	Dudy Purwagandhi
Jabatan	:	Menteri Perhubungan

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juni 2025

Pihak Kedua, Menteri Perhubungan	Pihak Pertama, Direktur Jenderal Perkeretaapian
DUDY PURWAGANDHI	ALLAN TANDIONO

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
SP1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	IKP1	Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rasio	0,460
SP2	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKP2	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian per 1.000 Jumlah Keberangkatan KA	%	100,000
SP3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	IKP3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	3,740
		IKP4	Persentase *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api	%	96,200
		IKP5	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	%	19,000
SP4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IKP6	Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	100,000

Kegiatan			Anggaran Efektif
1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rp	1.505.062.251.000
2.	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	Rp	2.250.259.374.000
3.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	Rp	2.331.113.312.000
4.	Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	Rp	18.024.752.000
5.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	Rp	4.072.234.000
6.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	Rp	363.966.942.000
7.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	Rp	6.528.613.000
8.	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	Rp	1.292.986.000
9.	Legislasi dan Litigasi Transportasi	Rp	650.650.000

Disetujui
Menteri Perhubungan

DUDY PURWAGANDHI

Jakarta, Juni 2025
Direktur Jenderal Perkeretaapian

ALLAN TANDIONO

INDIKATOR KINERJA PROGRAM
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
TAHUN 2025

Sasaran Program		Indikator Kinerja Program	
SP1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	IKP1	Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian
SP2	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKP2	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian per 1.000 Jumlah Keberangkatan KA
SP3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	IKP3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian
		IKP4	Persentase *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api
		IKP5	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api (%)
SP4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IKP6	Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Jakarta, Juni 2025
DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN



ALLAN TANDIONO

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Tahun: 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
					Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12		
MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	Rasio	0,460	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,460	813.226.191.000	Dit. Prasarana Perkeretaapian, Dit. Lalu Lintas dan Angkutan KA, Dit Sarana Perkeretaapian dan Balai Teknik di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
				Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Jaringan Jalur KA dan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian)	-	-	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	11,53	11,53	11,53	23	-	Dit Lalu Lintas dan Angkutan KA
				Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (Persentase Penyelesaian Kerjasama Pengembangan Infrastruktur Perkeretaapian)	-	-	4	4	4	8	8	8	12	12	12	20	-	Dit Lalu Lintas dan Angkutan KA
				Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana)	61,430	61,430	61,430	61,430	61,430	61,430	61,430	62,140	63,570	63,570	63,570	64,54	-	Dit Prasarana Perkeretaapian
				Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian)	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	-	Dit Sarana Perkeretaapian

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
					Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12		
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (pengujian dan sertifikasi kelaikan sarana, prasarana dan kompetensi SDM, perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara, pembinaan dan pengaturan/pengendalian/pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2.716.185.741.000	Dit. Keselamatan Perkeretaapian, Dit. Prasarana Perkeretaapian, Dit. Sarana Perkeretaapian, Balai Pengujian Perkeretaapian dan Balai Teknik di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
				Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian)	47,670	47,670	47,670	47,670	47,670	47,670	47,670	47,670	47,670	47,670	47,670	50,34	-	Dit Prasarana Perkeretaapian
				Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian)	0,00	0,380	0,385	6,150	10,00	16,150	21,150	26,920	32,690	44,230	51,920	73,840	-	Dit Sarana Perkeretaapian
				Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Presentase Sarana Perkeretaapian yang Telah ditindaklanjuti sesuai hasil Rampcheck)	-	-	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	-	Dit Sarana Perkeretaapian
				Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator dan Operator Perkeretaapian)	0,700	1,420	2,120	2,840	7,510	10,710	15,630	16,520	17,760	18,490	19,270	19,440	-	Dit Keselamatan Perkeretaapian
				Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Hasil Audit Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan)	1,390	2,780	4,160	5,550	6,940	8,330	9,720	11,110	12,490	13,880	15,270	16,660	-	Dit Keselamatan Perkeretaapian
				Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian)	0,369	1,568	2,355	3,707	5,493	7,583	9,773	12,007	14,201	16,259	18,038	19,480	-	Balai Pengujian Perkeretaapian
				Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian)	0,177	1,567	2,322	3,315	4,308	6,294	8,281	10,267	11,260	12,849	15,216	17,440	-	Balai Pengujian Perkeretaapian
				Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian)	0,922	2,436	3,539	4,643	6,385	8,128	9,870	11,612	13,355	15,097	16,840	17,970	-	Balai Pengujian Perkeretaapian

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
					Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12		
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	3,740	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (subsidi perintis dan monitoring PSO, penetapan, pemantauan dan evaluasi GAPEKA, pembangunan jalur ganda kereta api dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian baik jalur kereta api dan fasilitas operasi dan lainnya)	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	895.248.757.000	Dit. LLAKA, Dit. Prasarana Perkeretaapian,Dit. Sarana Perkeretaapian, BTP, BPKA
				Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA)	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	-	Dit Lalu Lintas dan Angkutan KA
				Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) lerhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian)	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	-	Dit Sarana Perkeretaapian
				Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) lerhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian)	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	-	Dit Prasarana Perkeretaapian
				Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktur Keselamatan Perkeretaapian)	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	-	Dit Keselamatan Perkeretaapian
				Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian)	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	-	Balai Pengujian Perkeretaapian
				Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakal (IKM) Terhadap Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan)	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	-	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan
				Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan)	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	-	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan
	PERSENTASE ON TIME PERFORMANCE (OTP) TRANSPORTASI KERETA API	%	96,200	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	-	
				Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Realisasi Perjalanan KA berdasarkan GAPEKA)	95,42	95,42	95,42	95,42	95,42	95,42	95,42	95,42	95,42	95,42	95,42	95,42	-	Dit Lalu Lintas dan Angkutan KA
				Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kalegori I dan II)	95,020	95,020	95,020	95,020	95,020	95,020	95,020	95,020	95,020	95,020	95,020	95,020	-	Dit Prasarana Perkeretaapian dan Balai Teknik Perkeretaapian
				Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Fasilitas Operas! Kereta Api dengan Teknologi Handai)	62,670	62,670	63,40	63,40	63,40	63,40	63,40	63,57	63,40	63,92	63,92	65,27	-	Dit Prasarana Perkeretaapian dan Balai Teknik Perkeretaapian
	PERSENTASE PEMENUHAN TARGET ANGKUTAN KERETA API	%	19,000	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	1,540	2,955	4,465	5,995	7,575	9,125	11,580	13,170	14,785	16,340	17,905	19,000	-	Dit Lalu Lintas dan Angkutan KA

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
					Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12		
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	%	100,000	Program Dukungan Manajemen (Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian, Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian, Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian, Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian & Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian)	5,060	6,325	19,035	19,368	19,578	20,555	34,630	35,505	40,000	40,960	42,820	100	694.634.445.000	
				Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pencapaian Target Regulasi/Legislasi (Jumlah Rancangan Dan Peraturan Perundangan) Di Bidang Perkeretaapian)	-	-	5	5	5	10	10	10	15	15	15	20	-	Setditjen Perkeretaapian
				Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian (Indeks Profesional ASN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	-	Setditjen Perkeretaapian
				Tersedianya Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal (Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	Setditjen Perkeretaapian
				Terwujudnya Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian (Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perkeretaapian)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	Setditjen Perkeretaapian
				Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian (Tingkat Pencapaian Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian)	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	-	Seluruh Unit Kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
				Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian (Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ditjen Perkeretaapian)	23	54	55	56	57	60	65	70	75	80	90	100	-	Setditjen Perkeretaapian
				Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian (Tingkat Pencapaian Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Perkeretaapian)	19,240	22,300	53,140	54,470	55,310	57,220	59,250	62,020	71,000	73,840	79,280	100	-	Seluruh Unit Kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian

Jakarta, Juni 2025

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

ALLAN TANDIONO

Penjelasan Target Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	*Baseline* 2024	Capaian Triwulan I 2025	Target Rancangan Renstra 2025	Target PK 2025	Target Revisi PK 2025	Keterangan
SP1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	IKP1 Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rasio	0,460	0,460	0,460	**0,460**	**0,460**	• *Baseline* pada 2024: Jumlah lokasi yang terkoneksi dengan jaringan jalur dan layanan perkeretaapian sebanyak 69 lokasi (PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional 52 lokasi, simpul bandara 6 lokasi, simpul pelabuhan 10 lokasi, simpul Terminal Tipe A 1 lokasi) dibandingkan target RIPNAS sebanyak 150 lokasi. • Pada Tahun 2025 tidak terdapat kegiatan pembangunan jalur KA baru yang direncanakan selesai sehingga belum terdapat penambahan jumlah PKN/PKW/KSN dan simpul transportasi yang terhubung dengan jaringan jalur dan layanan perkeretaapian. • Kegiatan pendukung mayoritas berupa penyiapan perencanaan teknis dan pengadaan lahan untuk mendukung rencana pembangunan jalur kereta api baru/reaktivasi menuju PKN/PKW/KSN/simpul transportasi. • ***Target tetap*** (sesuai *baseline*).
SP2 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKP2 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian per 1.000 Jumlah Keberangkatan KA	%	99,410	99,617	100,000	**100,000**	**100,000**	• Pengukuran indikator kinerja berbeda dengan periode Renstra Tahun 2020-2024 (angka *baseline* dihitung dengan metode baru). • Pada Tahun 2024 terdapat 5 kejadian kecelakaan kereta api, sedangkan pada Tahun 2025 ditargetkan tidak ada kejadian kecelakaan kereta api, namun pada periode Triwulan I 2025 telah terjadi 1 kecelakaan kereta api. • ***Target tetap*** (target mandatori berupa *zero accident*).

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	*Baseline* 2024	Capaian Triwulan I 2025	Target Rancangan Renstra 2025	Target PK 2025	Target Revisi PK 2025	Keterangan
SP3 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	IKP3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	3,730	3,810	3,740	**3,740**	**3,740**	• Merupakan nilai rata-rata capaian dari survei kepuasan masyarakat terhadap layanan regulator bidang perkeretaapian berupa perizinan, sertifikasi, pengujian, dan lainnya (Direktorat LLAKA, Direktorat Prasarana, Direktorat Sarana, Direktorat Keselamatan) serta layanan kereta api yang dilaksanakan oleh Balai Pengelola Kereta Api (BPKA Ringan Sumatera Selatan dan BPKA Sulawesi Selatan). • Survei dilaksanakan baik menggunakan aplikasi maupun secara *manual* dengan survei langsung ke masyarakat/*stakeholder* terkait dengan penilaian dari perhitungan rata-rata hasil survei per bulan (skala 1-4). • ***Target tetap*** (ditargetkan lebih tinggi dari *baseline* 2024).
	IKP4 Persentase *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api	%	96,190	97,415	96,100	**96,100**	**96,200**	• Rata-rata kedatangan dan keberangkatan KA penumpang dan barang tepat waktu dari keseluruhan kedatangan dan keberangkatan KA penumpang dan barang. • ***Target berubah/ditingkatkan*** (ditargetkan lebih tinggi dari *baseline* 2024/*update* menyesuaikan *baseline* 2024 guna memenuhi kriteria penetapan target).
	IKP5 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	%	-	4,515	19,000	**19,000**	**19,000**	• Pengukuran indikator kinerja berbeda dengan periode Renstra Tahun 2020-2024. • Pemenuhan angkutan penumpang dan angkutan barang masing-masing ditargetkan 19,00% dari target angkutan KA periode Tahun 2025-2029 baik angkutan KA penumpang maupun KA barang. • ***Target tetap*** (monitoring Triwulan I masih *on the right track*).

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	*Baseline* 2024	Capaian Triwulan I 2025	Target Rancangan Renstra 2025	Target PK 2025	Target Revisi PK 2025	Keterangan
SP4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IKP6 Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	-	27,948	100,000	**100,000**	**100,000**	• Pengukuran indikator kinerja tidak ada pada periode Renstra Tahun 2020-2024. • Target Tahun 2025 mencakup pemenuhan kinerja sebagai berikut: o Nilai AKIP: 83,00 o Nilai NKA: 84,00 (*update* menyesuaikan *baseline* 2024) o Target PNBP: 100,00% (Rp1.246.326.325.000,00) o Indeks Profesional ASN: 89,00 • ***Target tetap*** (monitoring Triwulan I masih *on the right track*).

LAMPIRAN II

REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA

KOMITMEN REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA
BERDASARKAN LAPORAN MONITORING KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
TRIWULAN III TAHUN 2025

NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
A	**SASARAN : Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkeretaapian** **INDIKATOR KINERJA: Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian**		
1	Penyelesaian/finalisasi dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 khususnya substansi kegiatan pendukung konektivitas perkeretaapian mengacu perkembangan kebijakan pada RPJMN dan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan;	Triwulan IV Tahun 2025	• Setditjen Perkeretaapian • Direktorat teknis • Balai terkait
2	Koordinasi persiapan pengoperasian hasil pembangunan konektivitas diantaranya usulan penetapan skema perintis Tahun 2026 (Rantauprapat Baru-Pondok S5, Binjai - Besitang dan perpanjangan perintis KA Aceh), pengajuan skema sewa aset dan perbaikan infrastruktur (konektivitas Pelabuhan Tanjung Emas);	Triwulan IV Tahun 2025	• Direktorat LLAKA • Direktorat Prasarana • Balai terkait
3	Pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kegiatan pendukung konektivitas transportasi perkeretaapian, diantaranya terkait penyelesaian pemenuhan lahan pendukung konektivitas melalui LMAN, koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait penetapan lokasi, serta monitoring tahapan pengadaan barang/jasa;	Triwulan IV Tahun 2025	• Setditjen Perkeretaapian • Direktorat Prasarana • Balai terkait
4	Pengoptimalan sisa anggaran Tahun 2025 secara selektif untuk kegiatan pendukung, serta mempersiapkan dokumen pengusulan pada RKA Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2026 berdasarkan skala prioritas RPJMN dan Rencana Strategis guna pemenuhan *readiness criteria*, penyelesaian pengadaan lahan, dan kegiatan-kegiatan pendukung konektivitas lainnya;	Triwulan IV Tahun 2025	• Setditjen Perkeretaapian • Direktorat teknis • Balai terkait
5	Pengoptimalan peran inspektur prasarana dan sarana perkeretaapian untuk pelaksanaan pengawasan/inspeksi secara berkala dalam pembangunan prasarana perkeretaapian mendukung konektivitas.	Triwulan IV Tahun 2025	• Direktorat Prasarana • Direktorat Sarana • Direktorat Keselamatan • Balai terkait
B.	**SASARAN : Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian** **INDIKATOR KINERJA: Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian per 1.000 Jumlah Keberangkatan KA**		
1	Pelaksanaan inspeksi/*rampcheck* kondisi prasarana dan sarana perkeretaapian sebagai persiapan penyelenggaraan angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 termasuk upaya pencegahan terjadinya risiko jalur kereta api tidak sesuai spesifikasi teknis/rusak/rel aus/putus dan kegagalan sistem persinyalan yang dapat berdampak pada kejadian kecelakaan kereta api;	Triwulan IV Tahun 2025	• Direktorat Prasarana • Direktorat Sarana • Direktorat Keselamatan • Balai terkait

NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
2	Monitoring dan evaluasi terhadap manajemen tanggap darurat serta tindak lanjut rekomendasi peningkatan keselamatan perkeretaapian khususnya penanganan pasca kejadian kecelakaan kereta api sebagai acuan dalam tindakan preventif dan korektif periode berikutnya;	Triwulan IV Tahun 2025	• Direktorat Keselamatan • Balai terkait
3	Usulan perbaikan mekanisme pelaporan badan usaha dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi guna mempermudah pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian.	Triwulan IV Tahun 2025	• Setditjen Perkeretaapian • Direktorat teknis
4	Percepatan penyiapan dokumen teknis serta pelaksanaan kegiatan perawatan prasarana perkeretaapian milik negara Tahun 2025 sesuai skema pemilihan penyedia berdasarkan ketentuan;	Triwulan IV Tahun 2025	• Direktorat Prasarana • Balai terkait
5	Usulan revisi anggaran untuk pemanfaatan sisa kontrak/sisa anggaran yang potensi tidak terserap s.d akhir Tahun 2025 untuk pemenuhan pembayaran *backlog* IMO periode sebelumnya dan/atau penanganan rintang jalan/daerah rawan kecelakaan/bencana alam/longsoran/ amblesan;	Triwulan IV Tahun 2025	• Setditjen Perkeretaapian • Direktorat Prasarana
6	Penyesuaian penugasan inspektur prasarana dan sarana perkeretaapian serta anggota Satuan Pelayanan pada masing-masing wilayah Balai Teknik Perkeretaapian berdasarkan kompetensi dalam pelaksanaan pengawasan/inspeksi keselamatan perkeretaapian.	Triwulan IV Tahun 2025	• Direktorat Prasarana • Direktorat Sarana • Direktorat Keselamatan • Balai terkait
C	**SASARAN : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian** **INDIKATOR KINERJA: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian**		
1	Peningkatan keamanan sistem terkait layanan regulator perkeretaapian (perizinan, sertifikasi, pengujian, lainnya) untuk mencegah terjadinya gangguan pada layanan serta lanjutan pengembangan fitur Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai *superapps* yang terpadu dan terintegrasi;	Triwulan IV Tahun 2025	• Setditjen Perkeretaapian
2	Memfasilitasi serta menindaklanjuti layanan pengaduan pelayanan angkutan penumpang khususnya pada layanan kereta api yang dikelola oleh BPKAR Sumatera Selatan dan BPKA Sulawesi Selatan diantaranya melalui *barcode* pada area *boarding* dan sosial media;	Triwulan IV Tahun 2025	• BPKAR Sumsel • BPKA Sulsel
3	Berpartisipasi dalam monitoring dan evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan Kementerian Perhubungan serta dukungan pelaksanaan penilaian kepatuhan pelayanan publik Tahun 2025 oleh Ombudsman;	Triwulan IV Tahun 2025	• Setditjen Perkeretaapian • Direktorat teknis • Balai terkait
4	Pengoptimalan sisa anggaran Tahun 2025 secara selektif untuk kegiatan pendukung termasuk memastikan pemenuhan anggaran angkutan perintis sampai akhir Tahun 2025, serta mempersiapkan dokumen pengusulan pada RKA Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2026 berdasarkan skala prioritas layanan regulator dan angkutan perintis perkeretaapian;	Triwulan IV Tahun 2025	• Setditjen Perkeretaapian • Direktorat teknis • Balai terkait

NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
5	Pelaksanaan layanan sertifikasi/pengujian didukung dengan penyesuaian penugasan pegawai fungsional tertentu perkeretaapian sesuai bidang tugas dan kompetensinya (penguji, asisten penguji, lainnya).	Triwulan IV Tahun 2025	• Direktorat Prasarana • Direktorat Sarana • Direktorat Keselamatan • Balai Pengujian
D.	**SASARAN : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian** **INDIKATOR KINERJA: Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api**		
1	Melakukan evaluasi pelaksanaan GAPEKA termasuk verifikasi dan validasi data capaian harian kinerja operasi pada jaringan jalur kereta api nasional sebagai acuan penetapan GAPEKA Tahun 2026 serta upaya peningkatan OTP perjalanan kereta api;	Triwulan IV Tahun 2025	• Direktorat LLAKA • Balai terkait
2	Melakukan inspeksi/pemantauan berkala terhadap perjalanan kereta api pada lokasi rawan bencana/banjir/longsoran/amblesan/lokasi taspat dan rawan gangguan keamanan di perlintasan sebidang serta memastikan peralatan penanganan kecelakaan/rintang jalan tersedia dan ditempatkan sesuai kebutuhan;	Triwulan IV Tahun 2025	• Direktorat Prasarana • Direktorat Keselamatan • Balai terkait
3	Lanjutan pembangunan jalur ganda kereta api (jalur ganda KA elevated Medan – Binjai, Solo-Semarang, lainnya) dan peningkatan jalur/jembatan/fasilitas operasi kereta api (Jember – Kalisat, Jabodetabek, lainnya) untuk meningkatkan kapasitas lintas dan kecepatan operasional kereta api serta memudahkan pengaturan operasional kereta api agar tepat waktu.	Triwulan IV Tahun 2025	• Direktorat Prasarana • Balai terkait
4	Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan pendukung yang telah direlaksasi dengan pemanfaatan sisa waktu hingga akhir tahun serta mengusulkan perpanjangan kontrak tahun jamak untuk kegiatan pembangunan jalur ganda/peningkatan jalur/jembatan/fasilitas operasi yang terkendala dan tidak dapat selesai pada akhir Tahun 2025 dilengkapi data dukung dan justifikasi yang memadai;	Triwulan IV Tahun 2025	• Setditjen Perkeretaapian • Direktorat teknis • Balai terkait
5	Penyesuaian penugasan inspektur prasarana dan sarana perkeretaapian serta anggota Satuan Pelayanan pada masing-masing wilayah Balai Teknik Perkeretaapian berdasarkan kompetensi dalam pelaksanaan pengawasan perjalanan kereta api.	Triwulan IV Tahun 2025	• Direktorat Prasarana • Direktorat Sarana • Direktorat Keselamatan • Balai terkait
E.	**SASARAN : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian** **INDIKATOR KINERJA: Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api**		
1	Koordinasi dan penyiapan rencana operasi penyelenggaran angkutan kereta api pada periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 termasuk mendukung penyelenggaraan angkutan motor gratis menggunakan kereta api;	Triwulan IV Tahun 2025	• Direktorat LLAKA • Balai terkait

NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
2	Penyusunan rancangan peraturan terkait penetapan tarif angkutan barang dengan kereta api;	Triwulan IV Tahun 2025	• Direktorat LLAKA • Setditjen Perkeretaapian
3	Integrasi data dan pelaporan angkutan kereta api yang *update* dan valid untuk peningkatan pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian dalam sistem yang terintegrasi (Strategi Kementerian Perhubungan, Portal Layanan Ditjen Perkeretaapian);	Triwulan IV Tahun 2025	• Setditjen Perkeretaapian • Direktorat teknis
4	Penyelesaian kegiatan peningkatan stasiun kereta api Rangkasbitung dalam upaya peningkatan layanan angkutan penumpang.	Triwulan IV Tahun 2025	• Direktorat Prasarana • BTP Jakarta
5	Pengoptimalan sisa anggaran Tahun 2025 secara selektif untuk kegiatan pendukung diantaranya pemenuhan anggaran angkutan perintis sampai akhir Tahun 2025, serta kebutuhan pelaksanaan *rampcheck* pemenuhan standar pelayanan minimum untuk persiapan penyelenggaran angkutan kereta api pada periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.	Triwulan IV Tahun 2025	• Setditjen Perkeretaapian • Direktorat teknis • Balai terkait
6	Pengoptimalan Satuan Pelayanan didukung peningkatan kompetensi SDM di masing-masing wilayah Balai Teknik Perkeretaapian untuk pengawasan penyelenggaraan angkutan penumpang dan barang sesuai standar pelayanan minimum.	Triwulan IV Tahun 2025	• Direktorat Keselamatan • Balai terkait
F.	**SASARAN : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian** **INDIKATOR KINERJA: Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian**		
1	Finalisasi penilaian terkait evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2025 untuk unit kerja *non sample* di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta menyampaikan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP Tahun 2025 kepada Inspektorat Jenderal;	Triwulan IV Tahun 2025	• Setditjen Perkeretaapian • Seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
2	Pelaksanaan forum pembahasan untuk finalisasi Rencana Strategis Ditjen Perkeretaapian Tahun 2025-2029 termasuk sinkronisasi RPJMN Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis tingkat Kementerian Perhubungan serta seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;	Triwulan IV Tahun 2025	• Setditjen Perkeretaapian • Seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
3	Penyusunan revisi Perjanjian Kinerja 2025 sesuai hasil monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan capaian kinerja dapat memenuhi kategori *on the right track* (capaian 90-110%).	Triwulan IV Tahun 2025	• Setditjen Perkeretaapian • Seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
4	Percepatan penyerapan anggaran Tahun 2025 serta pemantauan pelaksanaan anggaran unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, termasuk dukungan revisi anggaran apabila diperlukan untuk pemenuhan *backlog*/selisih anggaran penyelenggaraan IMO periode sebelumnya;	Triwulan IV Tahun 2025	• Setditjen Perkeretaapian • Direktorat teknis • Balai terkait

NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
5	Pelaksanaan *tagging*/penandaan Rincian *Output* SBKU/SBKK pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2026 sebagaimana diatur pada PMK Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2025;	Triwulan IV Tahun 2025	• Setditjen Perkeretaapian • Direktorat teknis • Balai terkait
6	Koordinasi dengan KPKNL untuk percepatan persetujuan pemanfaatan aset/BMN guna mendukung perolehan PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	Triwulan IV Tahun 2025	• Setditjen Perkeretaapian
7	Lanjutan pembinaan ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk peningkatan kompetensi dan pengelolaan jenjang karir jabatan fungsional tertentu mencakup sosialisasi/bimbingan teknis/pendidikan/pelatihan/uji kompetensi terkait kepegawaian, manajerial dan teknis bidang perkeretaapian;	Triwulan IV Tahun 2025	• Setditjen Perkeretaapian • Direktorat teknis
8	Pembahasan usulan penyelarasan dan penyederhanaan jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta koordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi Kementerian Perhubungan.	Triwulan IV Tahun 2025	• Setditjen Perkeretaapian • Direktorat Keselamatan

Jakarta, Oktober 2025

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,

ALLAN TANDIONO

NIP 198801182025211023

LAMPIRAN III

REALISASI DAN ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN TRIWULAN III TAHUN 2025

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

Bulan : 01 s.d. 09

NO	Kode | Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	445572 | PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN FASILITAS KESELAMATAN PERKERETAAPIAN	PAGU	0	48,093,030,000	0	0	0	0	0	0	0	48,093,030,000
		REALISASI	0.00%	5,776,428,238 (12.01%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5,776,428,238 (12.01%)
		SISA	0	42,316,601,762	0	0	0	0	0	0	0	42,316,601,762
2	467005 | BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	PAGU	7,350,340,000	338,301,112,000	24,453,540,000	0	0	0	0	0	0	370,104,992,000
		REALISASI	5,856,472,269 (79.68%)	120,100,808,712 (35.50%)	117,757,630 (0.48%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	126,075,038,611 (34.06%)
		SISA	1,493,867,731	218,200,303,288	24,335,782,370	0	0	0	0	0	0	244,029,953,389
3	467006 | BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	PAGU	15,099,567,000	377,785,088,000	99,066,347,000	0	0	0	0	0	0	491,951,002,000
		REALISASI	10,589,940,357 (70.13%)	167,707,465,005 (44.39%)	26,114,947,075 (26.36%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	204,412,352,437 (41.55%)
		SISA	4,509,626,643	210,077,622,995	72,951,399,925	0	0	0	0	0	0	287,538,649,563
4	467309 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA	PAGU	16,496,951,000	408,629,012,000	1,241,021,399,000	0	0	0	0	0	0	1,666,147,362,000
		REALISASI	11,856,924,393 (71.87%)	14,660,218,762 (3.59%)	200,518,706,946 (16.16%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	227,035,850,101 (13.63%)
		SISA	4,640,026,607	393,968,793,238	1,040,502,692,054	0	0	0	0	0	0	1,439,111,511,899
5	467321 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG	PAGU	20,538,115,000	703,158,968,000	1,362,542,824,000	0	0	0	0	0	0	2,086,239,907,000
		REALISASI	15,033,449,683 (73.20%)	12,011,839,877 (1.71%)	47,972,405,092 (3.52%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	75,017,694,652 (3.60%)
		SISA	5,504,665,317	691,147,128,123	1,314,570,418,908	0	0	0	0	0	0	2,011,222,212,348
6	467337 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SURABAYA	PAGU	15,541,045,000	195,376,810,000	282,746,645,000	0	0	0	0	0	0	493,664,500,000
		REALISASI	10,593,894,559 (68.17%)	9,735,127,083 (4.98%)	69,415,925,673 (24.55%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	89,744,947,315 (18.18%)
		SISA	4,947,150,441	185,641,682,917	213,330,719,327	0	0	0	0	0	0	403,919,552,685
7	467345 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN	PAGU	17,028,649,000	145,459,553,000	683,917,433,000	0	0	0	0	0	0	846,405,635,000
		REALISASI	11,094,036,512 (65.15%)	12,609,751,702 (8.67%)	91,180,751,974 (13.33%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	114,884,540,188 (13.57%)
		SISA	5,934,612,488	132,849,801,298	592,736,681,026	0	0	0	0	0	0	731,521,094,812

tanggal cetak : 03-10-25 10:39:59 oleh : E02208

8	467352 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG	PAGU	8,982,713,000	97,867,520,000	2,647,000,000	0	0	0	0	0	0	109,497,233,000
		REALISASI	6,671,404,815 (74.27%)	11,056,396,658 (11.30%)	(0.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	17,727,801,473 (16.19%)
		SISA	2,311,308,185	86,811,123,342	2,647,000,000	0	0	0	0	0	0	91,769,431,527
9	467364 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG	PAGU	12,916,335,000	255,576,774,000	29,154,208,000	0	0	0	0	0	0	297,647,317,000
		REALISASI	9,818,130,462 (76.01%)	4,070,489,664 (1.59%)	23,860,000 (0.08%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	13,912,480,126 (4.67%)
		SISA	3,098,204,538	251,506,284,336	29,130,348,000	0	0	0	0	0	0	283,734,836,874
10	467373 | BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN	PAGU	15,757,103,000	62,045,387,000	1,998,085,000	0	0	0	0	0	0	79,800,575,000
		REALISASI	10,269,806,023 (65.18%)	9,542,512,941 (15.38%)	(0.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19,812,318,964 (24.83%)
		SISA	5,487,296,977	52,502,874,059	1,998,085,000	0	0	0	0	0	0	59,988,256,036
11	467385 | BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN	PAGU	15,277,528,000	81,851,036,000	26,874,629,000	0	0	0	0	0	0	124,003,193,000
		REALISASI	10,444,928,922 (68.37%)	19,488,224,694 (23.81%)	1,517,863,699 (5.65%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	31,451,017,315 (25.36%)
		SISA	4,832,599,078	62,362,811,306	25,356,765,301	0	0	0	0	0	0	92,552,175,685
12	467462 | PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API	PAGU	0	140,328,922,000	0	0	0	0	0	0	0	140,328,922,000
		REALISASI	0.00%	16,063,761,240 (11.45%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	16,063,761,240 (11.45%)
		SISA	0	124,265,160,760	0	0	0	0	0	0	0	124,265,160,760
13	467478 | PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN	PAGU	0	61,100,370,000	243,000,000	0	0	0	0	0	0	61,343,370,000
		REALISASI	0.00%	10,202,474,986 (16.70%)	(0.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10,202,474,986 (16.63%)
		SISA	0	50,897,895,014	243,000,000	0	0	0	0	0	0	51,140,895,014
14	467484 | PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN	PAGU	0	43,006,820,000	415,728,953,000	0	0	0	0	0	0	458,735,773,000
		REALISASI	0.00%	9,981,440,837 (23.21%)	(0.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9,981,440,837 (2.18%)
		SISA	0	33,025,379,163	415,728,953,000	0	0	0	0	0	0	448,754,332,163
15	467504 | KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PAGU	92,585,048,000	110,460,669,000	13,119,553,000	0	0	0	0	0	0	216,165,270,000
		REALISASI	68,014,109,456 (73.46%)	21,028,391,928 (19.04%)	1,396,550,000 (10.64%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	90,439,051,384 (41.84%)
		SISA	24,570,938,544	89,432,277,072	11,723,003,000	0	0	0	0	0	0	125,726,218,616

16	467515 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANDUNG	PAGU REALISASI	18,733,059,000 13,445,383,321 (71.77%)	546,249,970,000 8,574,510,209 (1.57%)	66,952,796,000 1,728,558,012 (2.58%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	631,935,825,000 23,748,451,542 (3.76%)
		SISA	5,287,675,679	537,675,459,791	65,224,237,988	0	0	0	0	0	0	608,187,373,458
GRAND TOTAL		**PAGU REALISASI**	**256,306,453,000 183,688,480,772 (71.67%)**	**3,615,291,041,000 452,609,842,536 (12.52%)**	**4,250,466,412,000 439,987,326,101 (10.35%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**8,122,063,906,000 1,076,285,649,409 (13.25%)**
		SISA	**72,617,972,228**	**3,162,681,198,464**	**3,810,479,085,899**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7,045,778,256,591**

REALISASI PENDAPATAN PER SATKER

NO	Kode| Nama Satker	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi
	02208 | Ditjen Perkeretaapian	1,246,326,325,000	1,971,751,191,705	158.21%
1	02208-445572 | PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN FASILITAS KESELAMATAN PERKERETAAPIAN	1,300,000,000	949,107,865	73.01%
2	02208-467005 | BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	29,495,626,000	22,219,866,092	75.33%
3	02208-467006 | BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	581,100,000	2,333,613,191	401.59%
4	02208-467309 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA	2,334,137,000	21,158,123,987	906.46%
5	02208-467321 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG	0	33,326,893,367	0.00%
6	02208-467337 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SURABAYA	150,000,000	32,334,834,649	21,556.56%
7	02208-467345 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN	0	19,028,014,321	0.00%
8	02208-467352 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG	3,182,000,000	20,315,352,655	638.45%
9	02208-467364 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG	0	28,461,932,030	0.00%
10	02208-467373 | BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN	105,580,060,000	107,142,348,675	101.48%
11	02208-467385 | BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN	60,330,699,000	46,350,487,391	76.83%
12	02208-467462 | PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API	1,023,542,453,000	1,611,208,273,668	157.41%
13	02208-467478 | PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN	1,422,000,000	15,781,748,165	1,109.83%
14	02208-467484 | PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN	908,250,000	2,764,673,287	304.40%
15	02208-467504 | KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	17,500,000,000	948,726,626	5.42%
16	02208-467515 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANDUNG	0	7,427,195,736	0.00%
GRAND TOTAL		**1,246,326,325,000**	**1,971,751,191,705**	**158.21%**

PERHITUNGAN EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA ANGGARAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
Periode Triwulan III Tahun 2025

No.	Unit Kerja	Program	Kegiatan	KRO	RO	TVRO	RVRO	Persentase Capaian Per RO	Alokasi Anggaran RO (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = (10) x (9)	(13) = (12) - (11)
1	Setditjen Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4600 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	001 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal.	1,00	0,00	75,65%	2.173.934.000	260.846.237	1.644.581.071	1.383.734.834
2	Setditjen Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4600 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	EBC Layanan Manajemen SDM Internal	001 Layanan SDM	1045,00	0,00	75,00%	8.004.969.000	341.458.571	6.003.726.750	5.662.268.179
3	Setditjen Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	001 Kebijakan Perencanaan	1,00	0,00	75,00%	6.050.000.000	502.830.000	4.537.500.000	4.034.670.000
4	Setditjen Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	957 Layanan Hukum	1,00	0,00	75,65%	1.837.415.000	423.045.555	1.390.004.448	966.958.893
5	Setditjen Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,00	0,00	75,65%	10.198.304.000	918.122.008	7.715.016.976	6.796.894.968
6	Setditjen Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 Layanan Perkantoran	1,00	0,00	80,31%	121.827.859.000	78.490.083.260	97.839.953.563	19.349.870.303
7	Setditjen Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 Layanan Sarana Internal	23,00	0,00	75,22%	9.310.274.000	1.280.000.000	7.003.188.103	5.723.188.103
8	Setditjen Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	971 Layanan Prasarana Internal	1,00	0,00	75,09%	5.809.279.000	116.550.000	4.362.187.601	4.245.637.601
9	Setditjen Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1,00	0,00	75,00%	5.333.621.000	755.054.520	4.000.215.750	3.245.161.230
10	Setditjen Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1,00	0,00	75,15%	10.751.204.000	961.405.562	8.079.529.806	7.118.124.244
11	Setditjen Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	955 Layanan Manajemen Keuangan	1,00	0,00	75,64%	10.197.152.000	3.673.629.421	7.713.125.773	4.039.496.352
12	Setditjen Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4602 Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	005 Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,00	0,00	75,02%	298.000.000	-	223.559.600	223.559.600
13	Setditjen Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4602 Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	963 Layanan Data dan Informasi	1,00	0,00	75,05%	2.723.109.000	82.992.395	2.043.693.305	1.960.700.910
14	Setditjen Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4602 Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	FAB Sistem Informasi Pemerintahan	001 Sistem Informasi	1,00	0,00	75,02%	6.061.529.000	1.416.296.175	4.547.359.056	3.131.062.881

No.	Unit Kerja	Program	Kegiatan	KRO	RO	TVRO	RVRO	Persentase Capaian Per RO	Alokasi Anggaran RO (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
15	Setditjen Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4603 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1,00	0,00	75,05%	13.422.563.000	918.817.767	10.073.633.532	9.154.815.765
16	Setditjen Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4604 Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	957 Layanan Hukum	1,00	0,00	75,05%	2.166.058.000	297.651.398	1.625.626.529	1.327.975.131
17	Dit. LLAKA	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	001 Studi Perencanaan Teknis Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	3,00	0,00	2,05%	31.107.318.000	633.707.325	637.700.019	3.992.694
18	Dit. LLAKA	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	BAH Pelayanan Publik Lainnya	001 Perintis Perkeretaapian	1,00	0,00	0,60%	57.170.936.000	-	343.025.616	343.025.616
19	Dit. LLAKA	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	BAH Pelayanan Publik Lainnya	002 Angkutan Sepeda Motor Melalui Kereta Api	1,00	0,00	37,28%	18.776.442.000	6.978.701.424	6.999.857.578	21.156.154
20	Dit. LLAKA	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	PBF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	008 Studi Penyusunan Dokumen Identifikasi Untuk Jalur Kereta Api Perkotaan Yang Menghubungkan Wilayah Perencanaan KIPP - IKN Barat - IKN Timur 1 - IKN Timur 2 - IKN Utara dan yang Menghubungkan Wilayah Perencanaan IKN Barat - IKN Timur 2	1,00	0,00	0,60%	1.521.195.000	-	9.127.170	9.127.170
21	Dit. LLAKA	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian	003 Operasi Prasarana Perkeretaapian	1,00	0,00	0,60%	1.245.252.000	-	7.471.512	7.471.512
22	Dit. LLAKA	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4644 Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2,00	0,00	45,10%	2.700.000.000	1.217.324.900	1.217.700.000	375.100
23	Dit. LLAKA	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,00	0,00	32,09%	1.735.998.000	556.833.592	557.081.758	248.166
24	Dit. LLAKA	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 Layanan Perkantoran	1,00	0,00	83,71%	4.615.584.000	2.231.846.771	3.863.705.366	1.631.858.595
25	Dit. LLAKA	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1,00	0,00	19,37%	137.357.000	25.840.373	26.606.051	765.678
26	Dit. LLAKA	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1,00	0,00	10,66%	14.529.888.000	1.547.755.230	1.548.886.061	1.130.831
27	Dit. LLAKA	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	955 Layanan Manajemen Keuangan	1,00	0,00	10,50%	212.743.000	22.313.000	22.338.015	25.015
28	Dit. LLAKA	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	961 Layanan Reformasi Kinerja	1,00	0,00	38,73%	140.524.000	54.406.625	54.424.945	18.320
29	Dit. LLAKA	WA Program Dukungan Manajemen	4602 Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	BMA Data dan Informasi Publik	001 Pengelolaan Data dan Informasi	1,00	0,00	0,50%	561.459.000	-	2.807.295	2.807.295
30	Dit. LLAKA	WA Program Dukungan Manajemen	4602 Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	CDS OM Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	001 OM Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,00	0,00	61,78%	4.532.238.000	2.795.032.000	2.800.016.636	4.984.636
31	Dit. LLAKA	WA Program Dukungan Manajemen	4602 Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	FAB Sistem Informasi Pemerintahan	001 Sistem Informasi	1,00	0,00	0,60%	441.988.000	-	2.651.928	2.651.928
32	Dit. LLAKA	WA Program Dukungan Manajemen	4604 Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian	AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 Pedoman Teknis	1,00	0,00	0,60%	900.000.000	-	5.400.000	5.400.000
33	Dit. Prasarana Perkeretaapian	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	RBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian	035 Jabodetabek Railway Capacity Enhancement Phase I	1,00	0,00	9,00%	93.279.566.000	-	8.395.160.940	8.395.160.940

No.	Unit Kerja	Program	Kegiatan	KRO	RO	TVRO	RVRO	Persentase Capaian Per RO	Alokasi Anggaran RO (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
34	Dit. Prasarana Perkeretaapian	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian	001 Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	1,50	0,00	26,00%	2.430.411.000	-	631.906.860	631.906.860
35	Dit. Prasarana Perkeretaapian	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4643 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	007 Rancangan Rinci (Detailed Design/Engineering Design)	1,00	0,00	2,00%	16.679.031.000	-	333.580.620	333.580.620
36	Dit. Prasarana Perkeretaapian	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4643 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	CBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian	001 Jalur Kereta Api	1,00	0,00	2,00%	246.293.515.000	-	4.925.870.300	4.925.870.300
37	Dit. Prasarana Perkeretaapian	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4643 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	CBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian	008 Infrastruktur Perkeretaapian	1,00	1,00	98,89%	1.473.175.000	1.456.860.000	1.456.822.758	(37.243)
38	Dit. Prasarana Perkeretaapian	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4643 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	PBF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	001 Engineering Services For Jakarta Mass Rapid Transit East-West Line Project Phase I Stage I	1,00	0,00	12,00%	100.000.000	-	12.000.000	12.000.000
39	Dit. Prasarana Perkeretaapian	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4643 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	RBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian	019 Surabaya Regional Railway Line (Phase I)	1,00	0,00	9,00%	60.376.841.000	-	5.433.915.690	5.433.915.690
40	Dit. Prasarana Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,00	0,00	74,97%	12.405.200.000	759.253.221	9.300.178.440	8.540.925.219
41	Dit. Prasarana Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 Layanan Perkantoran	1,00	0,00	74,97%	16.725.733.000	7.118.044.467	12.539.282.030	5.421.237.563
42	Dit. Prasarana Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1,00	0,00	35,00%	2.705.814.000	-	947.034.900	947.034.900
43	Dit. Prasarana Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1,00	0,00	35,00%	5.349.095.000	631.387.769	1.872.183.250	1.240.795.481
44	Dit. Prasarana Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	955 Layanan Manajemen Keuangan	1,00	0,00	24,00%	917.392.000	15.895.380	220.174.080	204.278.700
45	Dit. Sarana Perkeretaapian	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4643 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	002 Pedoman Teknis Bidang Sarana Perkeretaapian	1,00	0,00	17,10%	7.028.476.000	-	1.201.869.396	1.201.869.396
46	Dit. Sarana Perkeretaapian	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4643 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	CCK OM Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian	001 Operasi Sarana Perkeretaapian	15,00	0,00	15,00%	4.483.435.000	511.385.413	672.515.250	161.129.837
47	Dit. Sarana Perkeretaapian	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4643 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	CCK OM Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian	004 Perawatan Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian	29,00	0,00	18,00%	33.172.324.000	5.654.684.831	5.971.018.320	316.333.489
48	Dit. Sarana Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 Layanan Perkantoran	1,00	0,00	74,99%	3.414.103.000	1.674.332.727	2.560.235.840	885.903.113
49	Dit. Sarana Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1,00	0,00	12,00%	41.537.000	-	4.984.440	4.984.440
50	Dit. Sarana Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1,00	0,00	27,10%	12.741.780.000	2.279.579.015	3.453.022.380	1.173.443.365
51	Dit. Sarana Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	955 Layanan Manajemen Keuangan	1,00	0,00	46,77%	200.715.000	82.493.000	93.874.406	11.381.406
52	Dit. Sarana Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4602 Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	001 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1,00	0,00	5,00%	243.000.000	-	12.150.000	12.150.000

No.	Unit Kerja	Program	Kegiatan	KRO	RO	TVRO	RVRO	Persentase Capaian Per RO	Alokasi Anggaran RO (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
53	Dit. Sarana Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4602 Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	005 Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,00	0,00	5,00%	18.000.000	-	900.000	900.000
54	Dit. Keselamatan Perkeretaapian	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 Studi Pedoman Teknis Bidang Keselamatan dan Keamanan Perkeretaapian	1,00	0,00	1,00%	2.807.457.000	-	28.074.570	28.074.570
55	Dit. Keselamatan Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,00	0,00	74,97%	1.322.736.000	480.359.724	991.655.179	511.295.455
56	Dit. Keselamatan Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 Layanan Perkantoran	1,00	0,00	74,97%	4.931.517.000	2.610.061.299	3.697.158.295	1.087.096.996
57	Dit. Keselamatan Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1,00	0,00	7,00%	38.560.534.000	2.636.647.155	2.699.237.380	62.590.225
58	Dit. Keselamatan Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	955 Layanan Manajemen Keuangan	1,00	0,00	74,97%	470.786.000	49.360.060	352.948.264	303.588.204
59	BTP Jakarta	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	008 Studi Evaluasi Hasil/Manfaat Proyek	1,00	0,00	0,10%	250.000.000	-	250.000	250.000
60	BTP Jakarta	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	CBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian	008 Infrastruktur Perkeretaapian	1,00	0,00	0,86%	850.000.000	7.315.760	7.310.000	(5.760)
61	BTP Jakarta	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	RBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian	078 Peningkatan Stasiun Tanah Abang Tahap I	1,00	0,00	91,85%	116.621.825.000	65.093.770.256	107.117.146.263	42.023.376.007
62	BTP Jakarta	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian	001 Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	25,00	0,00	52,92%	39.846.296.000	3.515.995.054	21.086.659.843	17.570.664.789
63	BTP Jakarta	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	RDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian	001 Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	1,00	0,00	0,09%	334.991.403.000	-	301.492.263	301.492.263
64	BTP Jakarta	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4643 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	007 Rancangan Rinci (Detailed Design/Engineering Design)	2,00	0,00	99,66%	5.049.580.000	2.499.577.100	5.032.411.428	2.532.834.328
65	BTP Jakarta	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4643 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	008 Studi Evaluasi Hasil/Manfaat Proyek	1,00	0,00	0,10%	2.000.000.000	-	2.000.000	2.000.000
66	BTP Jakarta	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4643 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	CBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian	008 Infrastruktur Perkeretaapian	1,00	0,00	0,10%	112.837.420.000	-	112.837.420	112.837.420
67	BTP Jakarta	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	RBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian	037 Peningkatan Stasiun Rangkasbitung	1,00	0,00	87,15%	111.467.239.000	53.596.968.779	97.143.698.789	43.546.730.010
68	BTP Jakarta	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	RBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian	046 Peningkatan Sistem Elektrifikasi Perkeretaapian di Jabodetabek	1,00	0,00	77,66%	200.936.955.000	77.377.470.261	156.047.639.253	78.670.168.992
69	BTP Jakarta	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4643 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	RBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian	030 Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Manggarai - Jatinegara (Paket A Tahap III)	1,00	0,00	1,53%	683.000.457.000	1.919.946.000	10.449.906.992	8.529.960.992
70	BTP Jakarta	WA Program Dukungan Manajemen	4600 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,00	0,00	74,97%	801.504.000	36.370.000	600.887.549	564.517.549
71	BTP Jakarta	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	16,00	0,00	74,97%	4.340.836.000	592.720.702	3.254.324.749	2.661.604.047
72	BTP Jakarta	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 Layanan Perkantoran	1,00	0,00	74,97%	36.891.075.000	22.099.937.896	27.657.238.928	5.557.301.032

No.	Unit Kerja	Program	Kegiatan	KRO	RO	TVRO	RVRO	Persentase Capaian Per RO	Alokasi Anggaran RO (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
73	BTP Jakarta	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 Layanan Sarana Internal	1,00	0,00	35,20%	729.000.000	30.974.550	256.608.000	225.633.450
74	BTP Jakarta	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	971 Layanan Prasarana Internal	1,00	0,00	0,10%	10.378.923.000	-	10.378.923	10.378.923
75	BTP Jakarta	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2,00	0,00	74,97%	310.195.000	1.015.900	232.553.192	231.537.292
76	BTP Jakarta	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	6,00	0,00	74,97%	3.724.573.000	249.745.759	2.792.312.378	2.542.566.619
77	BTP Jakarta	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	955 Layanan Manajemen Keuangan	2,00	0,00	74,97%	585.096.000	10.235.000	438.646.471	428.411.471
78	BTP Jakarta	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	961 Layanan Reformasi Kinerja	1,00	0,00	16,76%	393.000.000	3.810.000	65.866.800	62.056.800
79	BTP Jakarta	WA Program Dukungan Manajemen	4602 Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	BMA Data dan Informasi Publik	001 Pengelolaan Data dan Informasi	1,00	0,00	8,43%	141.985.000	-	11.969.336	11.969.336
80	BTP Bandung	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	CBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian	002 Jembatan Kereta Api	1,00	0,00	29,49%	18.219.860.000	1.728.558.012	5.373.036.714	3.644.478.702
81	BTP Bandung	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	CBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian	008 Infrastruktur Perkeretaapian	1,00	0,00	20,00%	870.474.000	-	174.094.800	174.094.800
82	BTP Bandung	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian	001 Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	2,00	0,00	37,16%	2.821.566.000	484.176.673	1.048.493.926	564.317.253
83	BTP Bandung	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian	003 Operasi Prasarana Perkeretaapian	1,00	0,00	20,00%	697.252.000	-	139.450.400	139.450.400
84	BTP Bandung	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	RDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian	001 Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	1,00	0,00	5,00%	518.841.225.000	-	25.942.061.250	25.942.061.250
85	BTP Bandung	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4643 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	007 Rancangan Rinci (Detailed Design/Engineering Design)	1,00	0,00	20,00%	2.379.279.000	-	475.855.800	475.855.800
86	BTP Bandung	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	RBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian	080 Pembangunan Prasarana Perkeretaapian pada Jalur Ganda KA Segmen Padalarang - Bandung Lintas Bogor - Yogyakarta Tahap II	1,00	0,00	5,00%	46.019.683.000	-	2.300.984.150	2.300.984.150
87	BTP Bandung	WA Program Dukungan Manajemen	4600 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,00	0,00	43,75%	1.012.499.000	240.424.116	442.968.313	202.544.197
88	BTP Bandung	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	001 Kebijakan Perencanaan	1,00	0,00	20,00%	275.000.000	-	55.000.000	55.000.000
89	BTP Bandung	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	6,00	0,00	45,84%	2.856.180.000	738.056.829	1.309.272.912	571.216.083
90	BTP Bandung	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 Layanan Perkantoran	1,00	0,00	85,09%	32.188.996.000	19.694.063.933	27.389.616.696	7.695.552.763

No.	Unit Kerja	Program	Kegiatan	KRO	RO	TVRO	RVRO	Persentase Capaian Per RO	Alokasi Anggaran RO (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
91	BTP Bandung	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 Layanan Sarana Internal	1,00	0,00	20,00%	313.500.000	-	62.700.000	62.700.000
92	BTP Bandung	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2,00	1,00	37,13%	91.401.000	15.654.000	33.937.191	18.283.191
93	BTP Bandung	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	9,00	1,00	36,71%	4.336.349.000	732.913.600	1.591.873.718	858.960.118
94	BTP Bandung	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	955 Layanan Manajemen Keuangan	6,00	1,00	38,01%	335.932.000	60.525.900	127.687.753	67.161.853
95	BTP Bandung	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	961 Layanan Reformasi Kinerja	2,00	0,00	27,30%	532.224.000	38.858.779	145.297.152	106.438.373
96	BTP Bandung	WA Program Dukungan Manajemen	4603 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	2,00	0,00	30,53%	144.405.000	15.219.700	44.086.847	28.867.147
97	BTP Semarang	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	001 Studi Perencanaan Teknis Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	1,00	0,00	1,05%	11.500.000.000	-	120.750.000	120.750.000
98	BTP Semarang	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	CBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian	008 Infrastruktur Perkeretaapian	0,10	0,00	2,13%	6.750.000.000	143.830.281	143.775.000	(55.281)
99	BTP Semarang	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	QAH Pelayanan Publik Lainnya	009 Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis lintas Purwosari - Wonogiri	2,50	1,00	30,74%	11.302.949.000	3.472.209.738	3.474.526.523	2.316.785
100	BTP Semarang	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	RBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian	025 Pembangunan Jalur KA Elevated antara Solo Balapan - Kadipiro	1,00	0,00	0,06%	23.136.967.000	-	13.882.180	13.882.180
101	BTP Semarang	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	RBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian	088 Penggantian Bangunan Jembatan BH 1109 Km.303+680 dan BH 1164 Km.314+769 Lintas Cirebon - Kroya	1,00	0,00	0,06%	85.287.299.000	-	51.172.379	51.172.379
102	BTP Semarang	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	RBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian	089 Penggantian Jembatan Pada BH 46 Km 21+918 dan BH 59 Km 27+920 Antara Brumbung - Gubug	1,00	0,00	0,06%	161.445.338.000	-	96.867.203	96.867.203
103	BTP Semarang	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian	001 Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	3,00	0,00	12,36%	3.951.395.000	488.011.144	488.392.422	381.278
104	BTP Semarang	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian	003 Operasi Prasarana Perkeretaapian	1,00	0,00	17,64%	450.446.000	79.478.800	79.458.674	(20.126)
105	BTP Semarang	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	RDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian	001 Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	1,00	0,00	0,06%	652.555.032.000	-	391.533.019	391.533.019
106	BTP Semarang	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	RDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian	003 Penanganan Rintang Jalan KM 299 + 900 Antara Prupuk - Linggapura Lintas Cirebon - Kroya	1,00	0,00	0,39%	37.034.622.000	145.819.200	144.435.026	(1.384.174)
107	BTP Semarang	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	RDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian	007 Penanganan Amblesan / Longsoran Badan Jalan KA Kawungaten - Kroya Lintas Banjar - Kroya	1,00	0,00	0,06%	109.876.487.000	-	65.925.892	65.925.892
108	BTP Semarang	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	RDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian	006 Penanganan Rintang Jalan Segmen Kawunganten-Jeruklegi lintas Banjar-Kroya dan Peningkatan 2 Unit Jembatan KA Segmen Prupuk-Linggapura Lintas Prupuk-Purwokerto	1,00	1,00	100,00%	5.172.189.000	5.172.185.724	5.172.189.000	3.276
109	BTP Semarang	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	RBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian	008 Pembangunan Jalur Ganda KA antara Solo - Semarang Tahap I Segmen Solo Balapan - Kalioso	2,00	0,00	30,41%	139.648.336.000	42.472.559.052	42.467.058.978	(5.500.074)
110	BTP Semarang	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	RBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian	042 Peningkatan Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Lintas Cirebon - Kroya segmen Prupuk - Purwokerto	56,60	0,00	0,05%	314.489.609.000	-	157.244.805	157.244.805
111	BTP Semarang	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	RBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian	044 Peningkatan Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Lintas Cirebon - Semarang segmen Tegal - Pekalongan	60,06	0,00	0,06%	468.841.977.000	-	281.305.186	281.305.186

No.	Unit Kerja	Program	Kegiatan	KRO	RO	TVRO	RVRO	Persentase Capaian Per RO	Alokasi Anggaran RO (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
112	BTP Semarang	WA Program Dukungan Manajemen	4600 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,00	0,00	74,97%	2.709.956.000	346.069.664	2.031.654.013	1.685.584.349
113	BTP Semarang	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	957 Layanan Hukum	1,00	0,00	74,97%	1.044.721.000	18.522.437	783.227.334	764.704.897
114	BTP Semarang	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,00	0,00	74,97%	4.873.343.000	919.606.636	3.653.545.247	2.733.938.611
115	BTP Semarang	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 Layanan Perkantoran	1,00	0,00	74,97%	39.543.002.000	21.022.112.470	29.645.388.599	8.623.276.129
116	BTP Semarang	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1,00	0,00	74,97%	321.103.000	33.582.946	240.730.919	207.147.973
117	BTP Semarang	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1,00	0,00	74,97%	3.859.993.000	505.313.445	2.893.836.752	2.388.523.307
118	BTP Semarang	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	955 Layanan Manajemen Keuangan	1,00	0,00	74,97%	1.253.504.000	63.366.064	939.751.949	876.385.885
119	BTP Semarang	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	961 Layanan Reformasi Kinerja	1,00	0,00	74,97%	981.639.000	26.768.575	735.934.758	709.166.183
120	BTP Semarang	WA Program Dukungan Manajemen	4602 Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	001 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	40,00	21,00	52,03%	210.000.000	109.254.999	109.263.000	8.001
121	BTP Surabaya	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	CBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian	002 Jembatan Kereta Api	1,00	0,00	5,00%	27.215.570.000	-	1.360.778.500	1.360.778.500
122	BTP Surabaya	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	CBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian	008 Infrastruktur Perkeretaapian	1,00	0,00	10,00%	5.850.000.000	88.541.918	585.000.000	496.458.082
123	BTP Surabaya	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CCK OM Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian	004 Perawatan Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian	1,00	1,00	100,00%	200.000.000	30.000.000	200.000.000	170.000.000
124	BTP Surabaya	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian	001 Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	3,00	1,00	15,00%	3.754.611.000	98.270.800	563.191.650	464.920.850
125	BTP Surabaya	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	RDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian	001 Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	1,00	0,00	15,00%	170.581.436.000	96.086.929	25.587.215.400	25.491.128.471
126	BTP Surabaya	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4643 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	005 Studi Lingkungan	1,00	0,00	5,00%	1.000.000.000	-	50.000.000	50.000.000
127	BTP Surabaya	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4643 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	007 Rancangan Rinci (Detailed Design/Engineering Design)	1,00	0,00	5,00%	1.500.000.000	-	75.000.000	75.000.000
128	BTP Surabaya	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4644 Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 Layanan Sarana Internal	2,00	0,00	5,00%	444.934.000	-	22.246.700	22.246.700
129	BTP Surabaya	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	RBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian	084 Peningkatan 2 Unit Jembatan KA Segmen Kras-Ngadiluwih dan Segmen Temuguruh-Singojuruh	1,00	1,00	100,00%	6.825.962.000	6.825.961.725	6.825.962.000	275
130	BTP Surabaya	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	RBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian	038 Peningkatan Jalur KA lintas Surabaya - Banyuwangi Segmen Jember - Kalisat	17,00	12,00	70,00%	240.610.179.000	62.583.622.030	168.427.125.300	105.843.503.270
131	BTP Surabaya	WA Program Dukungan Manajemen	4600 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,00	0,00	74,97%	1.452.382.000	491.864.000	1.088.850.785	596.986.785

No.	Unit Kerja	Program	Kegiatan	KRO	RO	TVRO	RVRO	Persentase Capaian Per RO	Alokasi Anggaran RO (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
132	BTP Surabaya	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,00	0,00	74,97%	3.090.686.000	1.478.535.341	2.317.087.294	838.551.953
133	BTP Surabaya	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 Layanan Perkantoran	1,00	0,00	74,97%	26.115.620.000	17.841.564.661	19.578.880.314	1.737.315.653
134	BTP Surabaya	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1,00	0,00	74,97%	211.960.000	23.199.800	158.906.412	135.706.612
135	BTP Surabaya	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1,00	1,00	100,00%	3.811.761.000	132.217.025	3.811.761.000	3.679.543.975
136	BTP Surabaya	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	955 Layanan Manajemen Keuangan	1,00	1,00	100,00%	505.428.000	43.605.000	505.428.000	461.823.000
137	BTP Surabaya	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	961 Layanan Reformasi Kinerja	1,00	1,00	100,00%	343.971.000	11.480.000	343.971.000	332.491.000
138	BTP Surabaya	WA Program Dukungan Manajemen	4602 Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	001 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	10,00	0,00	5,00%	150.000.000	-	7.500.000	7.500.000
139	BTP Medan	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	CBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian	001 Jalur Kereta Api	1,00	0,00	3,01%	53.788.784.000	-	1.619.042.398	1.619.042.398
140	BTP Medan	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	CBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian	008 Infrastruktur Perkeretaapian	1,00	0,00	1,25%	63.484.489.000	786.791.338	793.556.113	6.764.775
141	BTP Medan	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	QAH Pelayanan Publik Lainnya	001 Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis lintas Muara Satu-Kutablang	3,34	0,00	22,20%	23.000.000.000	4.797.193.649	5.106.000.000	308.806.351
142	BTP Medan	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	QAH Pelayanan Publik Lainnya	003 Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis lintas Binjai - Besitang - Sei Liput	2,50	0,00	4,00%	28.667.589.000	-	1.146.703.560	1.146.703.560
143	BTP Medan	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	QAH Pelayanan Publik Lainnya	010 Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis antara Rantauprapat - Pondok S5	2,50	0,00	4,00%	16.500.000.000	-	660.000.000	660.000.000
144	BTP Medan	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian	001 Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	2,34	0,00	11,01%	3.737.397.000	-	411.487.410	411.487.410
145	BTP Medan	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian	002 Perawatan Prasarana Perkeretaapian	2,00	0,00	4,00%	1.900.000.000	-	76.000.000	76.000.000
146	BTP Medan	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	RDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian	001 Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	1,00	0,00	6,05%	53.471.054.000	-	3.234.998.767	3.234.998.767
147	BTP Medan	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4643 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	005 Studi Lingkungan	4,00	0,00	4,00%	8.600.000.000	-	344.000.000	344.000.000
148	BTP Medan	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4643 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	CCK OM Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian	002 Perawatan Sarana Perkeretaapian	2,00	0,00	59,16%	100.000.000	58.603.153	59.160.000	556.847
149	BTP Medan	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4644 Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 Layanan Sarana Internal	3,00	0,00	2,60%	480.280.000	-	12.487.280	12.487.280
150	BTP Medan	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	RBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian	076 Peningkatan Jambatan BH 343 Segmen Kisaran - Tanjung Balai	1,00	0,00	95,20%	2.169.133.000	-	2.065.014.616	2.065.014.616
151	BTP Medan	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4643 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	RBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian	012 Pembangunan Jalur KA Antara Medan-Binjai	6,80	0,00	16,31%	555.581.822.000	90.602.543.974	90.615.395.168	12.851.194

No.	Unit Kerja	Program	Kegiatan	KRO	RO	TVRO	RVRO	Persentase Capaian Per RO	Alokasi Anggaran RO (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
152	BTP Medan	WA Program Dukungan Manajemen	4600 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,00	0,00	30,23%	1.204.046.000	363.935.181	363.983.106	47.925
153	BTP Medan	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,00	0,00	33,78%	2.688.362.000	907.611.342	908.128.684	517.342
154	BTP Medan	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 Layanan Perkantoran	1,00	0,00	63,03%	25.216.866.000	15.889.480.595	15.894.190.640	4.710.045
155	BTP Medan	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1,00	0,00	30,87%	305.743.000	94.382.146	94.382.864	718
156	BTP Medan	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1,00	0,00	24,77%	4.339.380.000	1.074.998.458	1.074.864.426	(134.032)
157	BTP Medan	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	955 Layanan Manajemen Keuangan	1,00	0,00	26,11%	430.895.000	112.506.710	112.506.685	(26)
158	BTP Medan	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	961 Layanan Reformasi Kinerja	1,00	0,00	34,06%	576.870.000	196.493.642	196.481.922	(11.720)
159	BTP Medan	WA Program Dukungan Manajemen	4602 Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	001 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	27,00	0,00	3,50%	162.925.000	-	5.702.375	5.702.375
160	BTP Padang	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	CBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian	008 Infrastruktur Perkeretaapian	1,00	0,00	50,00%	850.000.000	-	425.000.000	425.000.000
161	BTP Padang	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	QAH Pelayanan Publik Lainnya	004 Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis lintas Lubuk Alung - Kayu Tanam	3,00	2,00	66,66%	12.418.740.000	4.159.345.202	8.278.332.084	4.118.986.882
162	BTP Padang	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian	001 Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	8,50	0,00	4,63%	1.808.603.000	83.651.000	83.738.319	87.319
163	BTP Padang	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian	002 Perawatan Prasarana Perkeretaapian	127,00	84,00	70,00%	45.858.460.000	129.311.525	32.100.922.000	31.971.610.475
164	BTP Padang	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian	003 Operasi Prasarana Perkeretaapian	1,00	0,00	72,72%	8.681.260.000	2.768.991.613	6.313.012.272	3.544.020.659
165	BTP Padang	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	RDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian	001 Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	1,00	0,00	62,50%	16.372.377.000	-	10.232.735.625	10.232.735.625
166	BTP Padang	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4643 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	005 Studi Lingkungan	1,00	0,00	0,00%	1.890.000.000	-	-	-
167	BTP Padang	WA Program Dukungan Manajemen	4600 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,00	0,00	74,97%	781.563.000	203.438.785	585.937.781	382.498.996
168	BTP Padang	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,00	1,00	67,78%	2.083.011.000	507.412.949	1.411.864.856	904.451.907
169	BTP Padang	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 Layanan Perkantoran	1,00	0,00	74,97%	13.490.034.000	8.993.008.076	10.113.478.490	1.120.470.414

No.	Unit Kerja	Program	Kegiatan	KRO	RO	TVRO	RVRO	Persentase Capaian Per RO	Alokasi Anggaran RO (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
170	BTP Padang	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1,00	0,00	72,72%	365.547.000	86.840.378	265.825.778	178.985.400
171	BTP Padang	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1,00	0,00	72,72%	2.622.592.000	501.322.019	1.907.148.902	1.405.826.883
172	BTP Padang	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	955 Layanan Manajemen Keuangan	1,00	0,00	74,97%	1.136.737.000	219.647.805	852.211.729	632.563.924
173	BTP Padang	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	961 Layanan Reformasi Kinerja	1,00	0,00	72,72%	382.309.000	74.832.121	278.015.105	203.182.984
174	BTP Padang	WA Program Dukungan Manajemen	4602 Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	001 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	5,00	0,00	0,00%	756.000.000	-	-	-
175	BTP Palembang	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	CBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian	008 Infrastruktur Perkeretaapian	1,00	0,30	30,00%	850.000.000	109.911.000	255.000.000	145.089.000
176	BTP Palembang	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian	001 Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	4,21	0,00	1,00%	6.857.045.000	-	68.570.450	68.570.450
177	BTP Palembang	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian	002 Perawatan Prasarana Perkeretaapian	7,00	0,00	0,10%	6.475.429.000	-	6.475.429	6.475.429
178	BTP Palembang	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	RDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian	001 Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	1,00	0,00	20,00%	232.254.740.000	-	46.450.948.000	46.450.948.000
179	BTP Palembang	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4643 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	CCK OM Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian	002 Perawatan Sarana Perkeretaapian	2,00	0,00	0,10%	100.000.000	-	100.000	100.000
180	BTP Palembang	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4644 Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 Layanan Sarana Internal	1,00	0,00	0,10%	450.080.000	-	450.080	450.080
181	BTP Palembang	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	RDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian	005 Peningkatan Jalur KA, Penanganan Rintang Jalan, dan Peningkatan 2 unit Jembatan KA lintas Tarahan - Tanjung Enim	1,00	1,00	100,00%	22.032.699.000	-	22.032.699.000	22.032.699.000
182	BTP Palembang	WA Program Dukungan Manajemen	4600 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,00	0,00	14,21%	866.673.000	123.136.169	123.154.233	18.064
183	BTP Palembang	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	7,00	4,00	22,86%	1.501.693.000	343.279.081	343.287.020	7.939
184	BTP Palembang	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 Layanan Perkantoran	2,00	1,00	63,22%	19.487.688.000	12.320.625.411	12.320.116.354	(509.057)
185	BTP Palembang	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1,00	0,00	15,94%	352.553.000	53.870.508	56.196.948	2.326.440
186	BTP Palembang	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1,00	0,00	14,00%	5.041.194.000	716.469.300	705.767.160	(10.702.140)
187	BTP Palembang	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	955 Layanan Manajemen Keuangan	1,00	0,00	21,51%	743.487.000	155.138.031	159.924.054	4.786.023

No.	Unit Kerja	Program	Kegiatan	KRO	RO	TVRO	RVRO	Persentase Capaian Per RO	Alokasi Anggaran RO (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
188	BTP Palembang	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	961 Layanan Reformasi Kinerja	1,00	0,00	21,28%	464.036.000	90.050.626	98.746.861	8.696.235
189	BTP Palembang	WA Program Dukungan Manajemen	4602 Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	001 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	4,00	0,00	0,10%	170.000.000	-	170.000	170.000
190	Balai Pengujian Perkeretaapian	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	ADC Sertifikasi Produk	001 Sertifikasi Sarana Perkeretaapian	1,00	0,00	21,70%	22.453.716.000	4.418.448.595	4.872.456.372	454.007.777
191	Balai Pengujian Perkeretaapian	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	ADC Sertifikasi Produk	002 Sertifikat Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	3,00	0,00	23,05%	21.640.048.000	4.545.859.933	4.988.031.064	442.171.131
192	Balai Pengujian Perkeretaapian	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	ADI Sertifikasi Profesi dan SDM	001 Sertifikat Kompetensi SDM Perkeretaapian	1,00	0,00	25,55%	21.200.070.000	5.037.556.490	5.416.617.885	379.061.395
193	Balai Pengujian Perkeretaapian	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CCK OM Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian	004 Perawatan Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian	14,00	4,00	9,75%	18.173.660.000	1.745.069.000	1.771.931.850	26.862.850
194	Balai Pengujian Perkeretaapian	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4644 Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	001 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1,00	0,00	4,00%	666.000.000	-	26.640.000	26.640.000
195	Balai Pengujian Perkeretaapian	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4644 Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	5,00	2,00	16,72%	13.187.469.000	1.974.028.900	2.204.944.817	230.915.917
196	Balai Pengujian Perkeretaapian	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4644 Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 Layanan Sarana Internal	1,00	0,00	4,00%	867.616.000	-	34.704.640	34.704.640
197	Balai Pengujian Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	7,00	4,00	32,13%	1.064.732.000	342.067.995	342.098.392	30.397
198	Balai Pengujian Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 Layanan Perkantoran	1,00	0,00	74,97%	27.891.882.000	12.913.396.728	20.910.543.935	7.997.147.207
199	Balai Pengujian Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1,00	0,00	22,37%	174.007.000	38.928.298	38.925.366	(2.932)
200	Balai Pengujian Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1,00	0,00	17,23%	625.314.000	107.733.334	107.741.602	8.268
201	Balai Pengujian Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	955 Layanan Manajemen Keuangan	1,00	0,00	19,50%	1.241.336.000	236.157.742	242.060.520	5.902.778
202	Balai Pengujian Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	961 Layanan Reformasi Kinerja	1,00	0,00	23,52%	81.656.000	19.208.300	19.205.491	(2.809)
203	Balai Pengujian Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4603 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1,00	0,00	30,89%	234.924.000	72.562.000	72.568.024	6.024
204	Balai Perawatan Perkeretaapian	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CCK OM Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian	003 Operasi Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian	3,00	0,00	60,50%	35.604.992.000	1.694.273.267	21.541.020.160	19.846.746.893
205	Balai Perawatan Perkeretaapian	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CCK OM Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian	004 Perawatan Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian	21,00	0,00	85,06%	3.723.799.000	1.589.071.737	3.167.463.429	1.578.391.692
206	Balai Perawatan Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4600 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,00	1,00	100,00%	987.145.000	-	987.145.000	987.145.000

No.	Unit Kerja	Program	Kegiatan	KRO	RO	TVRO	RVRO	Persentase Capaian Per RO	Alokasi Anggaran RO (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
207	Balai Perawatan Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,00	0,00	99,96%	3.646.631.000	578.043.871	3.645.172.348	3.067.128.477
208	Balai Perawatan Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 Layanan Perkantoran	2,00	0,00	89,50%	30.727.015.000	15.467.673.692	27.500.678.425	12.033.004.733
209	Balai Perawatan Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 Layanan Sarana Internal	1,00	1,00	100,00%	1.209.581.000	-	1.209.581.000	1.209.581.000
210	Balai Perawatan Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1,00	1,00	100,00%	130.093.000	8.633.100	130.093.000	121.459.900
211	Balai Perawatan Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1,00	0,00	99,96%	2.249.808.000	442.043.314	2.248.908.077	1.806.864.763
212	Balai Perawatan Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	955 Layanan Manajemen Keuangan	1,00	0,00	99,96%	326.606.000	32.580.240	326.475.358	293.895.118
213	Balai Perawatan Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	961 Layanan Reformasi Kinerja	5,00	5,00	100,00%	331.401.000	-	331.401.000	331.401.000
214	Balai Perawatan Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4602 Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	001 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1,00	1,00	100,00%	788.504.000	-	788.504.000	788.504.000
215	Balai Perawatan Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4602 Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	963 Layanan Data dan Informasi	1,00	1,00	100,00%	75.000.000	-	75.000.000	75.000.000
216	Balai Pengelola KA Ringan Sumatera Selatan	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	QAH Pelayanan Publik Lainnya	007 Penyelenggaraan Layanan Perintis LRT Sumatera Selatan	2,50	0,00	52,08%	99.311.986.000	49.628.221.142	51.721.682.309	2.093.461.167
217	Balai Pengelola KA Ringan Sumatera Selatan	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CCK OM Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian	004 Perawatan Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian	1,11	0,00	0,01%	1.500.000.000	-	150.000	150.000
218	Balai Pengelola KA Ringan Sumatera Selatan	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian	001 Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	65,91	0,00	2,40%	107.500.000.000	-	2.580.000.000	2.580.000.000
219	Balai Pengelola KA Ringan Sumatera Selatan	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian	002 Perawatan Prasarana Perkeretaapian	50,00	10,00	26,91%	26.195.208.000	1.587.297.114	7.049.130.473	5.461.833.359
220	Balai Pengelola KA Ringan Sumatera Selatan	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian	003 Operasi Prasarana Perkeretaapian	8,15	5,00	68,43%	89.295.913.000	61.102.842.084	61.105.193.266	2.351.182
221	Balai Pengelola KA Ringan Sumatera Selatan	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4644 Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1,00	0,00	36,49%	30.788.358.000	6.200.655.926	11.234.671.834	5.034.015.908
222	Balai Pengelola KA Ringan Sumatera Selatan	WA Program Dukungan Manajemen	4600 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	001 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal.	1,00	0,00	92,07%	1.527.925.000	262.077.812	1.406.760.548	1.144.682.736
223	Balai Pengelola KA Ringan Sumatera Selatan	WA Program Dukungan Manajemen	4600 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	EBC Layanan Manajemen SDM Internal	001 Layanan SDM	239,00	239,00	100,00%	310.430.000	12.443.120	310.430.000	297.986.880
224	Balai Pengelola KA Ringan Sumatera Selatan	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	001 Kebijakan Perencanaan	2,00	0,00	90,70%	638.087.000	9.000.000	578.744.909	569.744.909

No.	Unit Kerja	Program	Kegiatan	KRO	RO	TVRO	RVRO	Persentase Capaian Per RO	Alokasi Anggaran RO (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
225	Balai Pengelola KA Ringan Sumatera Selatan	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,00	0,00	0,01%	85.536.000	-	8.554	8.554
226	Balai Pengelola KA Ringan Sumatera Selatan	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 Layanan Perkantoran	1,00	0,00	83,92%	9.461.691.000	7.070.151.018	7.940.251.087	870.100.069
227	Balai Pengelola KA Ringan Sumatera Selatan	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1,00	1,00	100,00%	384.761.000	9.109.000	384.761.000	375.652.000
228	Balai Pengelola KA Ringan Sumatera Selatan	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4,00	4,00	100,00%	1.678.657.000	152.193.923	1.678.657.000	1.526.463.077
229	Balai Pengelola KA Ringan Sumatera Selatan	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	955 Layanan Manajemen Keuangan	2,00	0,00	86,56%	608.984.000	41.047.472	527.136.550	486.089.078
230	Balai Pengelola KA Ringan Sumatera Selatan	WA Program Dukungan Manajemen	4603 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	3,00	0,00	0,01%	817.456.000	-	81.746	81.746
231	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	CBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian	008 Infrastruktur Perkeretaapian	1,00	0,00	74,70%	850.000.000	189.096.580	634.950.000	445.853.420
232	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	QAH Pelayanan Publik Lainnya	008 Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis lintas Makassar - Parepare	2,50	0,00	74,70%	33.733.346.000	20.153.592.576	25.198.809.462	5.045.216.886
233	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 Studi Pedoman Teknis Bidang Keselamatan dan Keamanan Perkeretaapian	1,00	0,00	74,70%	1.000.000.000	-	747.000.000	747.000.000
234	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CCK OM Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian	004 Perawatan Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian	11,00	8,00	74,70%	6.175.487.000	-	4.613.088.789	4.613.088.789
235	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian	001 Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	1,00	0,00	74,70%	1.631.024.000	924.459.350	1.218.374.928	293.915.578
236	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian	002 Perawatan Prasarana Perkeretaapian	18,00	13,50	74,70%	17.061.318.000	-	12.744.804.546	12.744.804.546
237	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian	003 Operasi Prasarana Perkeretaapian	4,00	0,00	74,70%	56.344.048.000	24.005.392.049	42.089.003.856	18.083.611.807
238	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4643 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	CBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian	008 Infrastruktur Perkeretaapian	1,00	0,00	74,70%	92.557.292.000	29.531.250	69.140.297.124	69.110.765.874
239	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4643 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	RBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian	018 Kewajiban Pembayaran atas Ketersediaan Layanan (Availability Payment) (Dukungan/Pendamping KPBU)	60,00	45,00	74,70%	249.554.000.000	121.881.479.462	186.416.838.000	64.535.358.538
240	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4644 Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1,00	0,00	74,70%	496.810.000	-	371.117.070	371.117.070
241	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	RBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian	050 Pembangunan Prasarana Perkeretaapian untuk Mendukung Pengoperasian Kereta Api Makassar - Parepare antara Mandai - Palanro	1,00	0,00	74,70%	76.917.750.000	25.896.319.245	57.457.559.250	31.561.240.005
242	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	WA Program Dukungan Manajemen	4600 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,00	0,00	74,97%	231.000.000	-	173.180.700	173.180.700
243	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	001 Kebijakan Perencanaan	1,00	0,00	74,70%	1.000.000.000	-	747.000.000	747.000.000
244	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	957 Layanan Hukum	1,00	0,00	74,97%	62.845.000	-	47.114.897	47.114.897

No.	Unit Kerja	Program	Kegiatan	KRO	RO	TVRO	RVRO	Persentase Capaian Per RO	Alokasi Anggaran RO (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
245	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,00	0,00	74,97%	2.656.843.000	74.826.300	1.991.835.197	1.917.008.897
246	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 Layanan Perkantoran	1,00	0,00	74,97%	27.970.964.000	11.222.168.230	20.969.831.711	9.747.663.481
247	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2,00	0,00	74,70%	283.816.000	4.014.300	212.010.552	207.996.252
248	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1,00	0,00	74,70%	1.266.780.000	24.710.000	946.284.660	921.574.660
249	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	955 Layanan Manajemen Keuangan	1,00	0,00	74,70%	375.670.000	-	280.625.490	280.625.490
250	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	961 Layanan Reformasi Kinerja	1,00	0,00	74,70%	4.379.049.000	6.030.000	3.271.149.603	3.265.119.603
251	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	WA Program Dukungan Manajemen	4602 Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	001 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	45,00	0,00	74,70%	165.000.000	-	123.255.000	123.255.000
Jumlah									**8.210.325.183.000**	**1.076.285.649.409**	**2.038.854.381.215**	**962.568.731.806**

EFISIENSI RO ESELON I → **11,72%**

"Efisiensi Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Triwulan III Tahun 2025 sebesar 11,72% atau Rp962.568.731.806,00"

LAMPIRAN IV

MONITORING RENAKSI PERIODE JULI-SEPTEMBER 2025

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Bulan: Juli, Tahun: 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 7				Realisasi Bulan 7		Realisasi Bulan 7		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	Rasio	0,460	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	-	-	0.46	-	474.381.944.750	8.97	0.46	201.936.105.693	100%	42.57%	Rasio konektivitas s.d Juli Tahun 2025 diperoleh sebesar 0,460 dengan jumlah PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional (KSN) / simpul transportasi sebanyak 69 lokasi (52 lokasi PKN/PKW/KSN, 6 lokasi simpul bandara, 10 lokasi simpul pelabuhan dan 1 lokasi simpul terminal tipe A) dibandingkan target Rencana Induk Perkeretaapian Nasional sebanyak 150 lokasi (104 lokasi PKN/PKW/KSN, 16 lokasi simpul bandara, 29 lokasi simpul pelabuhan dan 1 lokasi simpul terminal tipe A), Terdapat beberapa kegiatan pendukung konektivitas transportasi perkeretaapian yang berprogres antara lain: a. Konektivitas PKW Lhokseumawe (Kecamatan Muara Satu) dengan kegiataan pendukung berupa pembangunan jalur kereta api lintas Krueng Geukeuh – Muara Satu telah selesai 100% berupa pembangunan jalur KA sepanjang 8 km'sp dengan lebar spoor 1.435 mm. Posisi Triwulan II Tahun 2025, telah dilakukan tindak lanjut terhadap hasil temuan pengujian. Saat ini telah diusulkan pengujian kembali sebagaimana surat dari Kepala BTP Medan kepada Balai Pengujian perkeretaapian pada tanggal 28 Mei 2025. b. Kegiatan lanjutan pembangunan jalur KA Rantauprapat – Pondok S5 – Kotapinang masih dalam tahap persiapan pengoperasian KA perintis segmen Rantauprapat – Pondok S5 (penyelesaian sertifikasi kelaikan, serta koordinasi kesiapan sarana yang akan dioperasikan). Sedangkan untuk segmen lanjutan Pondok S5 – Kota Pinang masih berprogres pengadaan lahan melalui anggaran LMAN (progress 93,30% yaitu sebanyak 710 dari 762 bidang telah dibebaskan). Pada tahun 2025, terhadap bidang yang belum dibebaskan diperlukan anggaran DPPT dan penilaian ganti kerugian kembali terhadap masa waktu penetapan lokasi pengadaan tanah yang telah habis. c. Pekerjaan utilitas dan penyempurnaan lintas Bandar Tinggi-Kuala Tanjung untuk mendukung konektivitas Pelabuhan Kuala Tanjung sudah selesai dilaksanakan pada Tahun 2024, dimana terdapat kendala dalam pembebasan lahan untuk frontage road yang sebelumnya direncanakan pada 532 bidang menjadi 479 bidang. Untuk itu, direncanakan lanjutan pembayaran pengadaan lahan oleh LMAN sebesar Rp 50,02 Milyar namun perlu diusulkan terlebih dahulu relaksasi anggaran pada Tahun 2025 pada kegiatan BOBP pengadaan tanah jalur kereta api lintas Bandar Tinggi - Kuala Tanjung diantaranya untuk: 1) BOBP untuk biaya panjar perkara pada 15 bidang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Kisaran pada lintasan segmen I. Selain itu 2 bidang milik Pemerintah Kabupaten Batu Bara menunggu surat BPN Asahan untuk pembuatan penetapan lokasi; 2) Pengusulan anggaran DPPT dan penilaian ganti kerugian kembali terhadap masa waktu penetapan lokasi pengadaan tanah yang telah habis pada segmen II Bandar Tinggi – Kuala Tanjung. d. Konektivitas PKW Sawahlunto didukung dengan kegiatan reaktivasi jalur kereta api Sawahlunto – Muarokalaban, masih proses koordinasi dengan PT. KAI dan Pemerintah Daerah Sawahlunto guna percepatan penyelesaian dokumen teknis untuk persyaratan pengujian prasarana perkeretaapian. e. Kegiatan pembangunan MRT Jakarta East-West Phase I untuk mendukung konektivitas di wilayah perkotaan Jabodetabek, masih dalam tahap persiapan pengadaan lahan oleh Pemerintah Daerah, pelelangan kegiatan pendukung/konsultan tender of assistance (seleksi consulting service 1), serta penetapan Pinjaman Hibah Daerah (PHD) oleh Kementerian Keuangan dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. f. Kegiatan lanjutan pembangunan prasarana perkeretaapian untuk mendukung pengoperasian KA Makassar - Pare Pare antara Mandai –Palanro yang bersumber dari pembiayaan SBSN (MYC) dengan progres 96%.	Upaya peningkatan kinerja terhadap indikator rasio konektivitas antar wilayah pada periode berikutnya diantaranya: a. Penyelesaian sertifikasi kelaikan prasarana perkeretaapian termasuk koordinasi ketersediaan/kesiapan sarana kereta api mendukung pengoperasian hasil pembangunan konektivitas, diantaranya jalur KA Rantau Prapat Baru-Pondok S5 dan perpanjangan perintis KA Aceh menuju Muara Satu. b. Lanjutan pembangunan prasarana mendukung pengoperasian KA Makassar - Pare Pare dan persiapan pembangunan MRT Jakarta East – West, serta penyelesaian pemenuhan kebutuhan lahan pendukung konektivitas melalui LMAN.	Dit. Prasarana Perkeretaapian, Dit. Lalu Lintas dan Angkutan KA, Dit Sarana Perkeretaapian dan Balai Teknik di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	%	0,460	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Jaringan Jalur KA dan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian)	7	74	3.84	5.19	-	-	7.69	-	200.26%	-	Capaian kinerja Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Jaringan Jalur KA dan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian Tahun 2025 adalah sebesar 7,69% dan kinerja tahunan 33,33%. Terpenuhinya 2 dokumen perencanaan teknis bidang perkeretaapian dari 6 (enam) target yang telah ditetapkan pada tahun 2025, yaitu : 1. Dokumen Persetujuan Penetapan Trase MRT Jakarta Fase 2B (Kota – Ancol) 2. Dokumen Hasil Evaluasi Trase Jalur KA Mass Rapid Transit Est West Line (Cikarang-Balaraja)	a.Melakukan koordinasi intens dengan stakeholder meliputi pembahasan laporan dan pelaksanaan rapat koordinasi teknis syudi kelayakan sesuai jadwal yang telah direncanakan.sampai tersusun policy brief; b.Melakukan pengawasan dan koordinasi dengan stakeholder terkait evaluasi dokumen permohonan dalam pengusulan penetapan dan persetujuan trase kereta api. c. melakukan permohonan pengajuan revisi anggaran dan melengkapi data dukung yang menunjang penyesuaian kegiatan.	Dit Lalu Lintas dan Angkutan KA
MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	%	0,460	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (Persentase Penyelesaian Kerjasama Pengembangan Infrastruktur Perkeretaapian)	20	92	8	8.7	-	-	20	-	250%	-	Capaian kinerja Persentase Penyelesaian Kerja Sama Pengembangan Infrastruktur Perkeretaapian pada Juli 2025 adalah sebesar 8,00% dengan persentase kinerja triwulan 100,00% dan kinerja tahunan 40,00%. Terpenuhinya 2 dokumen kerja sama bidang perkeretaapian dari 5 target yang telah ditetapkan pada tahun 2025, yaitu: 1. Dokumen Evaluasi atas Permohonan Pembangunan Stasiun Bekasi Ekstensi di TOD Hub Summarecon Bekasi 2. Dokumen Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan PT KAI sebagai Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum berupa Stasiun di KM 57+00 - KM 57+400 Antara Stasiun Tenjo - Stasiun Tigaraksa pada Lintas Tanah Abang - Merak	Melakukan koordinasi bersama stakeholder melalui pembahasan teknis dan hukum secara paralel untuk memastikan pencapaian target, dengan menyiapkan dukungan legal dan teknis seperti Surat Keterangan, Draft Perjanjian dan Reviu BPKP.	Dit Lalu Lintas dan Angkutan KA
MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	%	0,460	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana)	61	742	61.43	8.28	-	-	61.7	-	100.44%	-	progress sampai dengan bulan Juli tahun 2025 Dokumen Teknis BED / DED: 1. BED St. Padalarang - Telah dilakukan pengawasan terhadap perbaikan gambar design yang dilakukan oleh konsultan dan telah diserahkan kembali hasil perbaikan kepada Direktorat Prasarana Perkeretaapian pada tanggal 31 Juli 2025 - Telah dilakukan pemeriksaan terhadap laporan BED Stasiun Padalarang oleh Direktorat Prasarana pada 31 Juli 2025 dengan hasil perbaikan: a) Perbaikan format laporan dengan menambahkan BAB (Pendahuluan, Isi, Kesimpulan) disertai ruang lingkup pekerjaan (parkir dan landscape) beserta batasan masalah. Penambahan halaman, daftar tabel, daftar gambar, daftar isi, header dan perbaikan penomoran b) Penambahan regulasi dan studi literatur, analisis untuk perbandingan eksisting dan studi literatur c) Penyesuaian RAB, AHS, BOQ, Spesifikasi dan Sumber Harga dengan yang ada pada laporan dan gambar teknis, pengurutan material serta penambahan spesifikasi yang berdasarkan regulasi. d) Penambahan penjelasan pekerjaan dengan satuan LS (tidak terdefinisi) - untuk BED padalarang belum bisa dilakukan pengesahan pada bulan Juli dikarenakan dari hasil asistensi masih ada yang perlu dilakukan perbaikan oleh konsultan 2. BED Beautifikasi St. Klaten Tahap II - Telah dilakukan pengawasan terhadap perbaikan gambar design yang dilakukan oleh konsultan dan telah diserahkan kembali hasil perbaikan kepada Direktorat Prasarana Perkeretaapian pada 31 Juli 2025 - Telah dilakukan pemeriksaan terhadap laporan dan gambar teknis BED Stasiun Padalarang oleh Direktorat Prasarana pada 31 Juli 2025 dengan hasil perbaikan: a) Penambahan penjelasan pada perencanaan prespektif desain b) Penyesuaian hirarki penomoran, keterangan gambar dan tabel c) Penambahan penjelasan regulasi pada dasar teori dan penambahan dasar hukum d) Penyesuaian RAB dengan menambahkan PPN 12% serta acuan harga dan AHS 3. DED Penanganan Daerah Rawan Jalur Kereta Api di KM.227+300/500, KM.228+100/300, KM.237+100/200, KM.240+600./900, KM.243+700 - KM.244+300 Lintas Bandung - Banjar - Gambar design jalan rel dalam peroses pengesahan - Telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap laporan dan gambar teknis oleh Dit. Prasarana Perkeretaapian dengan Konsultan terkait DED Penanganan Daerah Rawan Lintas Bandung - Banjar bagian jembatan pada 21 Juli 2024 melalui zoom meeting dengan hasil perbaikan: a) Penambahan penutup pada gambar masing - masing tulangan pada box culvert precast serta pertimbangan tambahan material perekat antar segmen precast atas dan bawah b) Penambahan detail RAB, metode pemeriksaan dan perawatan c) Penambahan waktu pekerjaan pada metode kerja 4. DED Balai Yasa KRL Cicalengka - Telah dilaksanakan koordinasi Pemeriksaan gambar teknis antara Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan Konsultan terkait Studi DED Pembangunan Balai Yasa KRL untuk mendukung elektrifikasi KA antara Padalarang - Cicalengka pada tanggal 7, 10 dan 16 Juli melalui zoom meeting dengan hasil perbaikan: a) Perjelas dan lengkapi sistem keterangan, denah pemipaan serta kapasitas air bersih dan air kotor b) Perjelas instalasi potongan dan jalur kabel untuk stopkontak, ruang elektrikal hingga grounding c) Lengkapi dimensi ducting exhaust, jalur pipa refigerant dan drain, outdoor AC dan evaluasi kebutuhan kipas pada beberapa ruangan d) Memberikan diameter plat lantai - Telah dilakukan pengawasan terhadap perbaikan gambar design yang dilakukan oleh konsultan 5. DED Peningkatan Jembatan Kereta Api Lintas Lubuk Alung - Kayu Tanam - Telah dilakukan pengesahan DED Peningkatan Jembatan Kereta Api Lintas Lubuk Alung - Kayu Tanam pada bulan Juli 2025	1. BED St. Padalarang - Akan dilakukan pengawasan terhadap proses perbaikan gambar desain oleh konsultan - Akan dilaksanakan pembahasan finalisasi asistensi antara Dit. Prasarana Perkeretaapian dengan Konsultan setelah melengkapi dokumen pendukung (laporan akhir) pada Agustus 2025 2. BED Beautifikasi St. Klaten Tahap II - Akan dilakukan pengawasan terhadap proses perbaikan gambar desain oleh konsultan - Akan dilakukan asistensi hasil perbaikan 3. DED Penanganan Daerah Rawan Jalur Kereta Api di KM.227+300/500, KM.228+100/300, KM.237+100/200, KM.240+600./900, KM.243+700 - KM.244+300 Lintas Bandung - Banjar - Akan dilakukan asistensi gambar bangunan - Akan dilakukan pengesahan pada bulan Agustus 4. DED Balai Yasa KRL Cicalengka - Akan dilakukan pengawasan terhadap proses perbaikan gambar desain oleh konsultan - Akan dilakukan asistensi hasil perbaikan gambar pada bulan agustus 5. DED Peningkatan Jembatan Kereta Api Lintas Lubuk Alung - Kayu Tanam - akan dilakukan penyampaian DED kepada BTP Kelas II Padang 6. Perlu dilakukan identifikasi terhadap kebutuhan dokumen perencanaan teknis yang mendukung konektivitas pada konsep Renstra 2025-2029 dan pemisahan antara dokumen perencanaan teknis yang mendukung konektivitas dan pelayanan dengan menambahkan indikator persentase pemenuhan perencanaan teknis bidang pelayanan prasarana perkeretaapian	Dit Prasarana Perkeretaapian
MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	%	0,460	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian)	30	792	66.67	8.42	-	-	30	-	45%	-	● Pada Tahun 2025 tidak terdapat kegiatan yang mendukung kinerja Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian, sehingga target dan capaian mengacu pada baseline Tahun 2024. ● Realisasi kinerja berdasarkan baseline periode 2020-2024 terdiri dari pengesahan dokumen perencanaan teknis bidang sarana perkeretaapian: o Kebijakan fasilitas sarana KRL Lintas Yogyakarta-Solo (2020); o Kebijakan fasilitas Sarana Milik Negara di Sumatera Utara (2020); o Kebijakan DED Balai Yasa Kereta Rel Listrik Yogyakarta- Solo (2022).	Koordinasi terkait pengesahan 3 studi/kebijakan yang telah selesai dilaksanakan	Dit Sarana Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (pengujian dan sertifikasi kelaikan sarana, prasarana dan kompetensi SDM, perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara, pembinaan dan pengaturan/pengendalian/pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian)	99	1200	100	8.33	1.584.441.682.250	8.97	99.242	93.557.365.923	99.24%	5.9%	Sampai dengan bulan Juli 2025, Jumlah kejadian kecelakaan kereta api kumulatif sebanyak 2 kejaidan serta jumlah keberangkatan kereta api sebanyak 527.972 KA, maka diperoleh tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian per 1.000 jumlah keberangkatan KA sebesar 99,242% Kendala/permasalahan yang perlu penyelesaian diantaranya: a. Pelaksanaan IMO Tahun 2025 oleh masing-masing Balai Teknik Perkeretaapian belum dapat dilaksanakan sampai dengan Triwulan II karena masih dalam tahap persiapan kontrak untuk kegiatan IO dan untuk kegiatan IM masih dalam tahap rekonsiliasi terkait aset dan assistensi data dukung; b. Keterbatasan anggaran akibat efisiensi untuk penanganan daerah rawan kecelakaan dan bencana alam/longsoran/amblesan serta keterbatasan dukungan anggaran pengawasan terhadap perawatan dan pemantauan kondisi prasarana/sarana perkeretaapian.	Upaya peningkatan kinerja terhadap Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian pada periode berikutnya diantaranya: a. Percepatan pelaksanaan kegiatan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian (IMO) Tahun 2025. b. Koordinasi dengan KNKT, PT KAI (Divre III Palembang) dan stakeholder terkait lainnya guna mengumpulkan data dan melakukan analisa untuk mengetahui penyebab kecelakaan anjlokan KA yang terjadi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025. c. Peningkatan pengawasan dan pelaksanaan penanganan daerah rawan khususnya di wilayah Sumatera Selatan dengan koordinasi Badan Usaha Penyelenggara Prasarana (BUPP), diantaranya: 1) Pada Divre IV Tanjung Karang akan dilakukan pergantian rel menggunakan rel BMN sebanyak 2.000 Batang (25 km'sp) dan pengadaan oleh KAI sebanyak 704 Batang (8,8 km'sp) dengan pelaksanaan kegiatan penggantian oleh PT.KAI; 2) Penanganan daerah rawan oleh BTP Palembang sebanyak 5 titik di lokasi Divre III Palembang dan 6 titik di lokasi Divre IV Tanjungkarang. Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas, anggaran, serta penempatan jabatan/pegawai untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya: a. Penyesuaian Aktivitas/Anggaran: Usulan relaksasi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan anggaran terkait peningkatan keselamatan transportasi perkeretapian (perbaikan kerusakan prasarana yang tidak termasuk dalam komponen IMO, dukungan pengawasan dan pengendalian sebagai regulator, lainnya). b. Penyesuaian strategi/kebijakan: Pemutakhiran dan sinkronisasi data kondisi jalur dan jembatan KA termasuk data perlintasan sebidang dengan mengoptimalkan penggunaan sistem informasi untuk mempermudah pengawasan dan pengendalian guna mendukung peningkatan keselamatan dan keamanan penyelenggaraan perkeretaapian. c. Penyesuaian penempatan jabatan/pegawai: Pengoptimalan peran inspektur prasarana dan sarana perkeretaapian untuk pelaksanaan pengawasan/inspeksi keselamatan dalam penyelenggaraan perkeretaapian termasuk peningkatan peran Satpel pada masing-masing wilayah Balai Teknik Perkeretaapian.	Dit. Keselamatan Perkeretaapian, Dit. Prasarana Perkeretaapian, Dit. Sarana Perkeretaapian, Balai Pengujian Perkeretaapian dan Balai Teknik di lingkungan Ditjen Perkeretaapian

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 7				Realisasi Bulan 7		Realisasi Bulan 7		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian)	48	567	47.67	8.41	-	-	48.41	-	101.55%	-	● Target kinerja 2025 adalah sebanyak 85 sertifikat terdiri dari 35 sertifikasi kelaikan prasarana jalur dan bangunan kereta api serta 50 sertifikasi kelaikan prasarana fasilitas operasi kereta api, dengan total sertifikasi sampai dengan 2029 sebanyak 3.084 sertifikat. ● Penyelesaian sertifikasi prasarana pada periode Jan s.d Juli sebanyak 23 sertifikat terdiri dari 7 sertifikat kelaikan jalur dan bangunan kereta api dan 16 sertifikat kelaikan fasilitas operasi. ● Kegiatan pendukung antara lain : o Bimbingan Teknis Bidang Kelaikan Prasarana Perkeretaapian o Monitoring atau Pengawasan Bidang Kelaikan Prasarana Perkeretaapian; o Pengoperasian dan Perawatan/rehabilitasi jalur jembatan stasiun dan fasilitas operasi kereta api; o Kegiatan Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Perawatan Dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian ● Analisis keberhasilan dilaksanakan penyesuaian aktivitas dan sebagai tahapan penerapan inovasi kinerja/Launching Aplikasi untuk aplikasi sertifikasi prasarana perkeretaapian telah dilakukan koordinasi dengan Setditjen Perkeretaapian terkait integrasi aplikasi sesuai proses bisnis antara Direktorat Prasarana Perkeretaapian dan Balai Pengujian Perkeretaapian menjadi satu aplikasi sertifikasi terintegrasi yaitu aplikasi sertifikasi perkeretaapian. ● Kendala dalam pelaksanaan kegiatan: o Belum terintegrasi aplikasi sertifikasi prasarana perkeretaapian antara Balai Pengujian Perkeretapian dan Direktorat Prasarana Perkeretapian; o Terdapat sertifikasi yang masih dalam proses penyelesaiaan.	Penyesuaian aktivitas adalah: o Untuk penyelesaian aplikasi pelayanan sertifikasi prasarana perkeretaapian akan dilakukan koordinasi dengan Setditjen Perkeretaapian terkait dengan proses penyelesaian integrasi aplikasi sertifikasi perkeretaapian. o Akan dilakukan koordinasi dengan Setditjen Perkeretaapian terkait dengan penetapan sertifikasi prasarana perkeretaapian yang masih berproses. o Percepatan proses kontraktual Jasa Konsultansi Pengawasan IMO dan berkoordinasi dengan Balai terkait persiapan pelaksanaan IMO Tahun 2025.	Dit Prasarana Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian)	28	279	21.15	7.58	-	-	28.31	-	133.85%	-	● Target jumlah sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian yang telah ditetapkan pada naskah Rencana Strategis sebanyak 8.000 sertifikat dari target kebutuhan sertifikat kelaikan sarana perkeretaapian (13.030 sertifikat) dengan presentase sebesar 61,39%. Dengan rincian 4.000 sertifikat oleh Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I dan 4.000 sertifikat oleh Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah II. ● Realisasi s.d Juni 2025 untuk IKK Persentase sarana perkeretaapian yang telah memiliki sertifikat kelaikan sebesar 28,31% atau realisasi penerbitan sertifikat sebanyak 3.689 sertifikat (2.249 sertifikat dari Subdit Kelaikan Sarana Wilayah I dan 1.440 sertifikat dari Subdit Kelaikan Sarana Wilayah II) dibandingkan dengan target Tahun 2025 yang tercantum pada naskah Renstra sebanyak 8.000 sertifikat.	● Mempercepat sertifikasi sarana, mempercepat progres pekerjaan rutin yang belum sesuai target. ● Meningkatkan koordinasi dengan operator sarana agar sarana yang diusulkan sertifikasi dapat tersedia saat Tim Penguji datang ke lokasi serta memaksimalkan pengujian sarana.	Dit Sarana Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Sarana Perkeretaapian yang Telah ditindaklanjuti sesuai hasil Rampcheck)	100	910	91	10	-	-	100	-	109.89%	-	● Terdapat 2 kegiatan yaitu pelaksanaan rampcheck angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru di bidang sarana serta rampcheck pemeriksaan kelaikan angkutan barang batubara. ● Berdasarkan hasil pelaksanaan rampcheck sarana angkutan lebaran Tahun 2025, sarana yang dilakukan rampcheck sebesar 2.462 unit. Selain itu, temuan yang didapat sebanyak 171 unit sarana dan telah ditindaklanjuti oleh pihak operator sehingga realisasi sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai hasil rampcheck sebesar 100%.	Evaluasi terhadap hasil rampcheck Angkutan Lebaran yang sudah dilakukan untuk memenuhi target pada rampcheck selanjutnya.	Dit Sarana Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator dan Operator Perkeretaapian)	7	126	15.63	12.4	-	-	7.98	-	51.06%	-	• Target yang ditetapkan s.d 2029 berupa sertifikat kompetensi SDM regulator dan operator sebanyak 36.000 sertifikat. Sampai dengan Juli 2025, telah diterbitkan sebanyak 2.873 sertifikat kompetensi SDM: o Awak Sarana 560 sertifikat; o PPKA 501 sertifikat; o Penjaga Pintu Perlintasan 68 sertifikat; o Tenaga Perawatan Prasarana 544 sertifikat; o Tenaga Perawatan Sarana 356 sertifikat; o Tenaga Pemeriksa Prasarana 647 sertifikat; o Tenaga Pemeriksa Sarana 197 sertifikat. ● Telah dilaksanakan sertifikasi kepada operator perkeretapian dan kepada stakeholder terkait diantaranya dalah PT. KAI (persero) dan juga Dinas Perhubungan namun target belum tercapai dikarenakan penyelenggara perkeretaapan (operator dan Dinas Perhubungan) belum semua mengajukan permohonan sertifikasi baru maupun perpanjangan. ● Pendidikan dan Pelatihan yang bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun dan Politeknik Transportasi Darat Indonesia/Sekolah Tinggi Transportasi Darat Bekasi, sedangkan untuk proses ujian sertifikasi pelaksanaannya bekerja sama dengan Balai Pengujian Perkeretaapian sebagai bentuk crosscutting Direktorat Keselamatan Perkeretaapian.	Berkoordinasi dengan seluruh operator perkeretaapian dan para stakeholder agar dapat segera mengajukan perpanjangan untuk sertifikat yang mendekati batas masa berlakunya (satu bulan sebelum berakhir masa berlaku sertifikat), serta melakukan percepatan proses penerbitan bagi sertifikat yang telah lulus proses verifikasi.	Dit Keselamatan Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Hasil Audit Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan)	11	102	9.72	9.53	-	-	11.11	-	114.3%	-	• Telah disampaikan surat terkait pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penerapan SMKP kepada PT LRT, PT KCIC, PT Celebes Railways Indonesia, dan pada bulan Mei 2025 telah dilaksanakan audit SMKP pada PT. Celebes Railways Indonesia (CRI). • Sampai dengn Juli 2025 telah ditindaklanjuti/ dimanfaatkan sebanyak 2 (dua) hasil audit dan target Renstra periode Tahun 2025- 2029 sebanyak 18 (delapan belas) hasil Audit SMKP. • Perhitungan 2 (dua) rekomendasi yang telah ditindaklanjut berdasarkan surat dari Manager Unit Makasar-Parepare PT. KAI (Persero) dan Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan (BPKASS) yang disampaikan pada bulan Juni 2025.	● Berkoordinasi dengan PT. Celebes Railways Indonesia (CRI) agar segera menindaklanjuti hasil Audit SMKP yang telah disampaikan ● Melaksanakan audit SMKP pada PT LRT Jabodebek dan PT KCIC.	Dit Keselamatan Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian)	9	106	9.773	9.22	-	-	9.17	-	93.83%	-	● Realisasi pengujian SDM perkeretaapian bulan Januari hingga Juni 2025 sebanyak 4.005 orang dari target tahun 2025 sebanyak 8.528 orang. Sedangkan target berdasarkan dokumen Rancangan Renstra Balai Pengujian Perkeretaapian periode tahun 2025 – 2029 adalah 43.640 orang. ● Pada periode Triwulan II Tahun 2025 telah dilakukan pengujian berdasarkan permohonan, untuk mencapai target yang ditetapkan telah dilakukan beberapa hal sebagai berikut : o Memaksimalkan ketersediaan anggaran BLU dan sumber daya manusia; o Keterbatasan lokasi uji praktek yang digunakan untuk Kompetensi Awak Sarana Perkeretaapian (ASP) Manual, sehingga pengujian hanya bisa dilaksanakan di Balai Pengujian Perkeretaapian; o Terdapat kendala pada server pengujian/database website (server down), sehingga menghambat proses pengajuan sertifikasi SDM dari pihak operator; o Kegiatan perawatan/upgrade software pada Simulator Multipurpose telah dilaksanakan pada triwulan II, sehingga simulator sudah dapat digunakan. ● Kegiatan pendukung diantaranya: o Pengadaan Peralatan Pengujian SDM Perkeretaapian yang belum bisa dilaksanakan dikarenakan adanya efisiensi anggaran; o Kegiatan Pembiayaan Operasional dan Pemeliharaan Fasilitas Pengujian SDM Perkeretaapian saat ini sedang tahap persiapan dan akan dilaksanakan sesuai timeline yang telah disusun.	● Menggunakan checksheet untuk memastikan kesiapan peralatan pengujian SDM sebelum pelaksanaan pengujian. ● Melakukan evaluasi internal secara berkala terhadap pelaksanaan rencana kerja. ● Menentukan skala prioritas terhadap SDM perkeretaapian yang dilakukan pengujian. ● Menentukan skala prioritas terhadap peralatan pengujian SDM perkeretaapian yang harus dilakukan perawatan	Balai Pengujian Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian)	7	89	8.281	9.3	-	-	7.91	-	95.52%	-	• Realisasi pengujian sarana perkeretaapian bulan Januari - Juni 2025 sebanyak 5.560 unit. • Pada periode s.d Juli Tahun 2025 telah dilakukan pengujian berdasarkan permohonan. Banyaknya permohonan sehingga agar dapat mencapai target yang ditetapkan telah dilakukan beberapa hal sebagai berikut: o Memaksimalkan ketersediaan anggaran BLU dan SDM penguji sarana perkeretaapian; o Melakukan monitoring dan evaluasi Triwulan II dengan Direktorat Sarana Perkeretaapian terhadap pelaksanaan rencana kerja pengujian sarana perkeretaapian yang telah disusun pada awal tahun; o Melakukan perawatan peralatan pengujian yang akan digunakan sebanyak 30 unit pada Triwulan II 2025. • Kegiatan pendukung baik yang berasal dari sumber pendanaan RM maupun BLU diantaranya: o Pengadaan peralatan pengujian/pemeriksaan sarana perkeretaapian; o Perawatan, perbaikan dan kalibrasi peralatan pengujian sarana perkeretaapian; o Kegiatan perawatan sarana perkeretaapian milik negara dan kegiatan pengoperasionalan sarana perkeretaapian milik negara, belum dapat dilaksanakan dikarenakan adanya Efisiensi Anggaran.	Upaya Peningkatan Kinerja : ● Melakukan perawatan dan kalibrasi peralatan pengujian sarana perkeretaapian sebanyak 74 unit. ● Melakukan monitoring terhadap pengujian yang telah dilaksanakan pada Triwulan II bersama Direktorat Sarana Perkeretaapian. ● Mengikuti kegiatan alih teknologi Kereta Cepat di Qingdao, China oleh CRRC. ● Menentukan skala prioritas terhadap sarana perkeretaapian yang diuji dan mendahulukan sarana yang akan habis masa berlaku sertifikasinya dan uji pertama sarana perkeretaapian	Balai Pengujian Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian)	7	104	9.87	9.49	-	-	7.22	-	73.15%	-	• Realisasi pengujian prasarana perkeretaapian bulan Januari hingga Juni sebanyak 71 Unit dan 107,747 km dari target tahun 2025 sebanyak 261 Unit dan 202,664 km. Sedangkan target berdasarkan dokumen Rancangan Renstra Balai Pengujian Perkeretaapian periode tahun 2025 – 2029 adalah 1.363 Unit dan 1.166,522 km. • Pada periode s.d Juli Tahun 2025 telah dilakukan pengujian berdasarkan surat perintah pelaksanaan pengujian yang dikeluarkan Direktorat Prasarana Perkeretaapian. • Beberapa hal yang perlu dilakukan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan diantaranya adalah: o Ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia yang memadai; o Melakukan monitoring terhadap pemohon terkait kesiapan pelaksanaan pengujian (dokumen dan fisik); o Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana kerja yang telah disusun pada awal tahun; o Memastikan peralatan pengujian yang akan digunakan tersedia dan telah dilakukan kalibrasi agar pelaksanaan pengujian berjalan lancar. • Kegiatan pendukung pada diantaranya: o Pengadaan Peralatan Pengujian/Pemeriksaan Prasarana Perkeretaapian yang saat ini belum dapat dilaksanakan dikarenakan terdampak efisiensi anggaran; o Untuk kegiatan perawatan, perbaikan dan kalibrasi peralatan pengujian prasarana perkeretaapian saat ini sedang tahap pelaksanaan.	● Melakukan perawatan dan kalibrasi peralatan pengujian prasarana perkeretaapian pada Triwulan III sejumlah 19 unit. ● Mempercepat proses penyusunan intruksi kerja penggunaan alat pengujian yang dijadwalkan akan selesai pada Triwulan III. ● Meninndaklanjuti hasil monitoring terhadap pengujian yang telah dilaksanakan. ● Memastikan proses pengadaan peralatan pengujian prasarana perkeretaapian dapat terlaksana sesuai timeline yang telah ditentukan. ● Meninndaklanjuti hasil monitoring terhadap pengujian yang telah dilaksanakan. ● Mempercepat proses penyusunan intruksi kerja penggunaan alat pengujian yang dijadwalkan akan selesai pada Triwulan III.	Balai Pengujian Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	3,740	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (subsidi perintis dan monitoring PSO, penetapan, pemantauan dan evaluasi GAPEKA, pembangunan jalur ganda kereta api dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian baik jalur kereta api dan fasilitas operasi dan lainnya)	3	36	3.74	10.39	522.228.441.583	8.97	3.793	331.749.465.351	101.42%	63.53%	Nilai IKM Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan nilai rata-rata IKM setiap bulan dari masing-masing unit kerja selama Januari s.d Juli Tahun 2025 dimana diperoleh nilai 3,793 atau dapat diintrepretasikan bahwa kinerja unit pelayanan telah sangat baik. Pelayanan publik tidaklah hanya meliputi layanan administrasi Pemerintahan sebagai contoh layanan perijinan, sertifikasi, pengujian, dan lainnya) serta layanan angkutan kereta api yang diselenggarakan oleh unit kerja/BLU di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Adapun beberapa faktor keberhasilan dalam pencapaian kinerja diantaranya: a. Sampai dengan Juli Tahun 2025 telah diterbitkan 16 perizinan perpotongan dan/atau persinggungan jalur kereta api dengan bangunan lain dan 9 perizinan usaha/operasi. b. Pelayanan sertifikasi telah dilaksanakan oleh unit kerja meliputi: 1) Pelayanan sertifikasi komponen prasarana perkeretaapian sebanyak 3 penetapan sertifikat oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian. 2) Pelayanan sertifikasi sarana perkeretaapian sebanyak 3.689 sertifikat sarana oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian. 3) Pelayanan sertifikasi SDM Perkeretaapian sebanyak 2.873 sertifikat sarana oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian. c. Kehandalan SDM dalam memberikan layanan serta pemenuhan kualitas dan tahapan pelayanan sesuai proses bisnis/SOP yang telah ditetapkan. d. Pelaksanaan sosialisasi layanan dan survei IKM kepada stakeholder, termasuk upaya penambahan jumlah responden dengan perluasan pelaksanaan survei melalui google form untuk mempermudah pengisian responden. e. Pemanfaatan sistem informasi diantaranya pada layanan pengujian, sertifikasi kelaikan sarana serta sertifikasi kompetensi SDM perkeretaapian, sehingga penyelesaian layanan dengan tepat waktu serta menjaga kualitas pelayanan sesuai dengan prosedur dan alur yang telah ditetapkan. Adapun beberapa upaya pengembangan sistem informasi yang sedang dilaksanakan antara lain: 1) Pengembangan fitur perizinan online pada Portal Layanan dan Data Ditjen Perkeretaapian dengan progres pada Triwulan II Tahun 2025 sudah berkontrak. 2) Ujicoba penggunaan fitur perizinan crossing pada Portal Layanan dan Data Ditjen Perkeretaapian dengan dilakukan sinkronisasi SSO. Beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan layanan dan pelaksanaan surevi IKM diantaranya: a. Kendala pada saat pelaksanaan survey Indeks Kepuasan Masyarakat diantaranya kesulitan beberapa responden dalam mengakses link survei dikarenakan alat/media komunikasi responden yang kurang mendukung. b. Gangguan/error sistem informasi yang menyebabkan tertundanya persetujuan dan penerbitan sertifikat diantaranya sertifikat kelaikan sarana	Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada periode mendatang meliputi beberapa langkah antara lain: a. Lanjutan pengembangan sistem informasi (perizinan online, sistem penyajuan terpusat/sertifikasi, lainnya) untuk mengakomodir layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai superapps. b. Penyajuan laporan berkala/triwulan kepada PPTB Setjen Kementerian Perhubungan untuk mempermudah koordinasi pengelolaan survei kepuasan masyarakat. Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas dan anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya: a. Penyesuaian alternatif pembiayaan untuk pelaksanaan kajian survei IKM pada Balai Perawatan Perkeretaapian dikarenakan alokasi anggaran untuk kajian terdampak efisiensi anggaran (diusulkan pelaksanaan secara swakelola). b. Penyesuaian penempatan jabatan/pegawai: Pelaksanaan pelatihan penggunaan bahasa isyarat untuk petugas customer service, petugas piket, petugas keamanan dan lainnya untuk mendukung layanan angkutan khususnya yang dioperasikan oleh Balai Pengelola Kereta Api. c. Penyesuaian strategi/kebijakan: Melakukan pendampingan kepada responden pada saat pengisian kuesioner survei kepuasan masyarakat.	Dit. LLAKA, Dit. Prasarana Perkeretaapian,Dit. Sarana Perkeretaapian, BTP, BPKA
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	3,740	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA)	3	36	3.71	10.31	-	-	3.79	-	102.16%	-	● Terdapat 8 unsur yang menjadi penyumbang nilai agregat IKM yaitu Informasi, Persyaratan, Prosedur/Alur, Waktu Penyelesaian, Tarif/Biaya, Sarana Prasarana, Unsur Respon, Konsultasi dan Pengaduan yang seluruhnya memperoleh Kategori Sangat Baik. ● Terdapat kategori pelayanan berupa Informasi dan Persyaratan yang memiliki nilai survei yang tinggi, yang dapat diartikan bahwa informasi terkait pelayanan izin usaha dan izin operasi perkeretaapian, serta penetapan trase sudah diketahui oleh pengguna layanan dengan baik yang didukung dengan adanya peraturan yang mendukung pelayanan tersebut sehingga dapat menjadi pedoman dan petunjuk pengguna layanan dalam mengajukan izin dan trase dalam bidang kereta api.	Upaya peningkata kinerja : ● Menjaga kualitas pelayanan dan proses bisnis sesuai dengan prosedur dan alur yang telah ditetapkan. ● Melakukan pemantauan agar survei terkait IKM di lingkungan Direktorat LLAKA dilaksanakan setiap bulan	Dit Lalu Lintas dan Angkutan KA
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	3,740	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian)	3	36	3.7	10.28	-	-	3.82	-	103.24%	-	● Pada pelaksanaan survei periode Januari s.d Juni 2025, Direktorat Sarana secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 3,82 dalam skala 4 atau 16.72 dalam skala 17,50 dengan rincian nilai IKM: o Januari 4 dari skala 4 dengan responden sebanyak 4 orang o Februari 4 dari skala 4 dengan responden sebanyak 5 orang o Maret 3,34 dari skala 4 dengan responden sebanyak 7 orang o April 4,00 dari skala 4 dengan responden sebanyak 5 orang o Mei 4,00 dari skala 4 dengan responden sebanyak 2 orang o Juni 3,62 dari skala 4 dengan responden sebanyak 6 orang ● Terdapat 8 unsur yang menjadi nilai agregat atau rata-rata IKM pada periode Januari s.d Juni 2025 dengan memperoleh kategori Sangat Baik, mencakup: o Unsur Informasi. o Unsur Persyaratan. o Unsur Prosedur/Alur. o Unsur Waktu Penyelesaian. o Unsur Tarif/Biaya. o Unsur Sarana Prasarana. o Unsur Respon. o Unsur Konsultasi dan Pengaduan.	Upaya peningkatan kinerja : ● Sosialisasi berkelanjutan agar jumlah responden bertambah supaya hasil rata-rata capaiannya lebih representative. ● Menyediakan nomor helpdesk yang sigap dalam menjawab kebutuhan informasi pengguna layanan. ● Menciptakan konten informasi pelayanan yang menarik di media sosial. ● Melakukan telaahan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kepada pimpinan terkait konsultasi dan laporan pengaduan yang telah ditindaklanjuti. ● Memastikan pengumuman tentang informasi pelayanan mudah diakses oleh masyarakat	Dit Sarana Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	3,740	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian)	3	36	3.89	10.81	-	-	3.88	-	99.74%	-	● Realisasi capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan kategori penilaian Sangat Baik (3,88) dengan jumlah responden s.d Juni 2025 sebanyak 27 orang ● Analisis keberhasilan didukung adanya kegiatan : o Penyelesaian proses perizinan sebanyak 19 pelayanan bidang prasarana yang telah selesai/diterbitkan terdiri dari: ? Pelayanan Perizinan Perpotongan dan/atau persinggungan jalur kereta api dengan bangunan lain sebanyak 16 Penetapan ? Pelayanan sertifikasi komponen prasarana perkeretaapian sebanyak 3 penetapan sertifikasi. o Penyesuaian aktivitas dan sebagai tahapan penerapan inovasi kinerja/Launching Aplikasi telah dilaksanakan monitoring terhadap pembangunan aplikasi Perpotongan dan persinggungan jalur kereta api dengan bangunan lain masih dilakukan penyempurnaan teknis aplikasi o Komunikasi yang baik dengan pemohon untuk memberikan asistensi terkait persyaratan dan perihal teknis serta kekurangan data teknis yang harus dilengkapi secara resmi oleh pemohon serta unit kerja sehingga penyelesaian pelayanan (perizinan dan sertifikasi) bisa selesai tepat waktu dan dilakukan pelaksanaan survey secara berkala dalam satu periode triwulan kepada para pemohon. ● Kendala dalam pelaksanaan kegiatan yakni untuk penyelesaian aplikasi pelayanan di Direktorat Prasarana Perkeretaapian masih terdapat ditemukan beberapa bug pada proses input data dan validasi data saat proses permohonan	upaya peningkatan kinerja melalui Penyesuaian aktivitas/strategi: o Akan dilakukan perbaikan beberapa bug pada aplikasi perpotongan dan/atau persinggungan jalur kereta api dengan bangunan lain; o Koordinasi dengan Setditjen Perkeretaapian dalam integrasi aplikasi sertifikasi perkeretaapian; o Aktif menyebarkan link survei kepuasan masyarakat unit kerja kepada pemohon/pengguna jasa unit kerja, menjaga komunikasi yang baik dengan pemohon, serta menjelaskan tentang tujuan dari pelaksanaan SKM; dan o Penyelesaian permohonan perizinan yang masih berproses sampai akhir periode triwulan II tahun 2025	Dit Prasarana Perkeretaapian

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 7				Realisasi Bulan 7		Realisasi Bulan 7		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	3,740	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktur Keselamatan Perkeretaapian)	3	36	3.86	10.72	-	-	3.76	-	97.41%	-	• Pada Juli 2025, terdapat 28 responden terhadap kualitas pelayanan dengan nilai rata-rata 3,76. • Berkoordinasi dan berupaya untuk mengajak peran serta penyelenggara perkeretaapian dan stakeholder yang telah melaksanakan proses sertifikasi agar mengisi survei tersebut, namun hingga saat ini jumlah responden masih belum memenuhi target yang ditentukan.	Upaya peningkatan kinerja : • Sosialisasi survei kepuasan masyarakat kepada SDM operator yang telah melakukan pengujian agar mengoptimalkan survei kepuasan masyarakat dengan cara mengisi link. • Meningkatkan kualitas pelayanan dengan sosialisasi pentingnya pelayanan publik yang berdampak pada kepuasan masyarakat serta pemantauan berkala.	Dit Keselamatan Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	3,740	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian)	3	36	3.86	10.72	-	-	3.85	-	99.74%	-	• Perhitungan capaian kinerja Triwulan II didapatkan dari dashboard Aplikasi SKM dengan nilai 3,850 atau capaian sebesar sebesar 99,74% dan realisasi capaian masuk dalam kategori on the right track (90-110%). • Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dilaksanakan menggunakan aplikasi SKM dari PPTB secara rutin setiap selesai pelaksanaan pengujian. Jumlah responden selama Triwulan II yaitu sebanyak 1.865 orang. • Keberhasilan dalam pencapaian kinerja didukung dengan sosialisasi layanan dan pelaksanaan survey Indeks Kepuasan Masyrakat (IKM) kepada pengguna layanan pengujian perkeretaapian termasuk peningkatan layanan tim penguji dengan berperan aktif dalam melakukan penyebaran kuesioner survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kepada penerima layanan untuk menambah responden, pemanfaatan dan pengembangan sistem informasi diantara terkait layanan pengujian perkeretaapian, ketepatan waktu penyelesaian layanan, kehandalan SDM dalam memberikan layanan termasuk menjaga kualitas pelayanan sesuai dengan prosedur dan alur yang telah ditetapkan. • Kendala yang dihadapi yaitu beberapa responden mengalami kesulitan dalam mengakses link survei dikarenakan alat komunikasi responden yang kurang mendukung.	Upaya peningkatan kinerja : • Melakukan dokumentasi pendampingan kepada responden pada saat pengisian link survei. • Menyusun laporan Triwulan III yang dilaporkan kepada PPTB.	Balai Pengujian Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	3,740	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan)	3	36	3.58	9.94	-	-	3.58	-	100%	-	• Berdasarkan hasil survey internal yang dilakukan, sampai dengan Triwulan II terdapat sebanyak 1.120 responden telah ikut berpartisipasi pada kegiatan survey ini. Rata-rata skala Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Transportasi Publik LRT Sumsel sebesar 3,58 (interval 1-4) dan 89,54 (interval 1-100) dan termasuk dalam kategori Sangat Baik. • Hal ini dapat dicapai dikarenakan bantuan dari pihak internal yang selalu membantu menyebarkan link survei dan terselesaikannya atau berkurangnya aduan yang diterima di LRT Sumsel	Upaya peningkatan kinerja : • Tindak lanjut tentang pengaduan yang diberikan oleh penumpang dari hasil survei yang dilakukan di 13 stasiun LRT Sumatera Selatan. • Koordinasi dengan pihak terkait perihal perbaikan dan pemeliharaan sarana maupun prasarana yang mengalami kerusakan. • Memberikan pembinaan untuk semua petugas di stasiun agar memberikan pelayanan yang lebih kepada penumpang demi menjaga dan meningkatkan pelayanan prima di LRT Sumatera Selatan.	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	3,740	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan)	3	36	3.23	8.97	-	-	3.37	-	104.33%	-	• Rincian perolehan realisasi IKM per-Bulan sebagai berikut: o Januari = 3,37 o Februari = 3,28 o Maret = 3,38 o April = 3,43 o Mei = 3,46 o Juni = 3,30 • Beberapa faktor keberhasilan pencapaian target antara lain: o Balai Pengelola Kereta Api senantiasa meningkatkan standar pelayanan minimum yang ada si stasiun, dan juga meningkatkan mutu pelayanan serta berkoordinasi dengan APS selaku pihak ketiga dalam pelayanan. o Sistem pemesanan tiket online mulai H-7 sebelum keberangkatan. • Beberapa kegiatan Balai yang bersifat crosscutting yang terdapat keterlibatan pihak eksternal di luar Balai yaitu: o Melakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (melalui outsourcing) dengan pengisian barcode oleh penumpang; o Melakukan kegiatan training service excellence dan hospitality bagi Pegawai Outsourcing tanggal 30 Juni 2025.	• Melakukankoordinasi dengan PT. Angkasa Pura Support untuk melakukan peningkatan kualitas layanan yang ramah dan professional. • Melakukan koordinasi dengan Angkasa Pura Support selaku poenyedia jasa layanan di kereta api Makassar – Parepare untuk melakukan peningkatan kualitas layanan yang ramah dan profesional. • Memfasilitasi Layanan Pengaduan melalui Barcode yang ditempel pada Area Boarding dan Sosial Media. • Selain itu, beberapa hal yang perlu dilakukan penyesuaian terhadap strategi, kebijakan, aktivitas, anggaran, organisasi, jabatan/pegawai: o Penyesuaian Strategi/Kebijakan: Pada kerangka pendanaan Tahun 2025-2029 Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan yang nantinya akan digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis BPKA Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 terdapat kegiatan yang dapat mendukung IKK 6 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik yangdiselenggarakan BPKA Sulsel yaitu Penataan Estetika dan Lanskap Stasiun Mandai, Stasiun Rammang-rammang, dan Stasiun Barru. o Penyesuaian Aktivitas dan Anggaran: Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan menempelkan barcode yang dapat di scan oleh penumpang di masing-masing stasiun dan juga menugaskan petugas stasiun untuk menghampiri dan memberi pengarahan kepada penumpang untuk melakukan pengisian survei. o Penyesuaian Jabatan/Pegawai: Pada Seksi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana jumlah pegawai yang ditugaskan dalam mendukung pelaksanaan IKK Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan BPKA Sulsel adalah sebanyak 15-17 orang.	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PERSENTASE ON TIME PERFORMANCE (OTP) TRANSPORTASI KERETA API	%	96,100	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	97	1152	96.1	8.34	-	-	97.797	-	101.77%	-	Dengan realisasi perjalanan kereta api tepat waktu sebanyak 516.339 KA dibandingkan jumlah keseluruhan perjalanan kereta api pada periode Jan s.d Juli Tahun 2025 sebanyak 527.972 KA, maka diperoleh realisasi persentase On Time Performance (OTP) sebesar 97,797% Beberapa faktor tercapainya target kinerja pada Tahun 2025 diantaranya: a. Terpenuhinya target perolehan on time performance pada beberapa jenis pelayanan kereta api (khususnya angkutan KA perkotaan) seperti MRT Jakarta (99,99%), LRT Sumatera Selatan (99,96%), LRT Jakarta (99,94%), LRT Jabodebek (99,66%), dan LRT Jabodebek (99,28%). b. Telah dilaksanakan evaluasi harian kinerja operasi pada jaringan jalur kereta api nasional di Kereta Api Ringan Terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, serta Kereta Api Kecepatan Tinggi Jakarta - Bandung. c. Koordinasi secara aktif dengan Badan Usaha Penyelenggara Prasarana dan Balai Teknik Perkeretaapian terhadap penyebab dan penanganan kejadian kelambatan perjalanan kereta api serta mengantisipasi potensi adanya rintang jalan. Sebagai contoh, pada masa Angkutan Lebaran dan libur Idul Adha Tahun 2025 telah dilaksanakan koordinasi teknis dengan stakeholders (PT. KAI, PT. MRT, PT. KCI, PT. KCIC) yang mencakup rencana operasi, kesiapan sarana, prasarana dan SDM termasuk identifikasi daerah rawan dan upaya preventif dan mitigasinya. d. Secara rutin melaksanakan evaluasi berkala (triwulan) terhadap realisasi perjalanan kereta api sesuai GAPEKA yang berlaku sehingga perjalanan KA dapat sesuai jadwal dan keterlambatan KA dapat diminimalisir.	Upaya peningkatan kinerja pada periode berikutnya diantaranya: a. Lanjutan pembangunan jalur ganda kereta api (jalur ganda KA elevated Medan – Binjai, Solo-Semarang, lainnya) dan peningkatan jalur/jembatan/fasilitas operasi kereta api (Jember – Kalisat, Jabodetabek, lainnya) untuk meningkatkan kapasitas lintas dan kecepatan operasional kereta api serta memudahkan pengaturan operasional kereta api agar tepat waktu; b. Pelaksanaan evaluasi dan penerbitan persetujuan perjalanan kereta api di luar GAPEKA melalui Peraturan/Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian.	
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PERSENTASE ON TIME PERFORMANCE (OTP) TRANSPORTASI KERETA API	%	96,100	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Realisasi Perjalanan KA berdasarkan GAPEKA)	103	1140	95.42	8.37	-	-	103.02	-	107.96%	-	● Realisasi kumulatif perjalanan KA penumpang dan KA barang pada Triwulan II 2025 sebesar 527.972 KA dengan rincian KA Penumpang 490.351 KA dan KA Barang 37.621 KA. ● Penambahan frekuensi LRT Jabodebek yang sebelumnya diprogramkan sebanyak 158 KA, saat ini beroperasi sebanyak 366 KA saat weekday dan 270 KA saat weekend. • Penambahan frekuensi LRT Sumsel yang sebelumnya diprogramkan sebanyak 88 KA, saat ini beroperasi sebanyak 94 KA saat weekday, 102 KA saat weekend. • Pengoperasian KA Tambahan pada masa libur panjang akhir pekan selama April s.d Juni 2025. • Telah dilakukan rapat pembahasan rencana penyesuaian perjalanankereta api di wilayah Daop 1 Jakarta dan Daop 8 Surabaya. • Telah dilaksanakan evaluasi harian kinerja operasi pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Kereta Api Ringan Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, serta Kereta Api KecepatanTinggi Jakarta - Bandung. • Telah menghadiri Rapat Koordinasi Perubahan Grafik Perjalanan Kereta Api 2025 dalam rangka Peningkatan Kecepatan Prasarana Lintas Duri-Bandara Soekarno Hatta pada tanggal 15 April 2025. • Telah dilakukan Persiapan Evaluasi Pelaksanaan Gapeka Triwulan I Tahun 2025, dan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas kereta api, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perkeretapian pada tanggal 11 Juni 2025	Upaya peningkatan kinerja : ● Menjaga agar perjalanan kereta api sesuai dengan yang telah diprogramkan pada Gapeka dan Perjalanan di Luar Gapeka. ● Melaksanakan evaluasi pelaksanaan Gapeka secara berkala setiap 3 bulan sekali. ● Melakukan penyesuaian program perjalanan KA pada jaringan jalur KA nasional Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi dan Kereta Api Ringan Sumatera Selatan. ● Menetapkan Grafik Perjalanan Kereta Api baru setelah evaluasi pelaksanaan Gapeka pada jaringan jalur KA Nasional Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi dan Kereta Api Ringan Sumatera Selatan. ● Melakukan evaluasi dan penerbitan persetujuan perjalanan kereta api di luar Grafik Perjalanan Kereta Api oleh Dirjen Perkeretaapian.	Dit Lalu Lintas dan Angkutan KA
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PERSENTASE ON TIME PERFORMANCE (OTP) TRANSPORTASI KERETA API	%	96,100	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kalegori I dan II)	93	1140	95.02	8.34	-	-	93.2	-	98.08%	-	● Kualitas TQI Jalur Kereta Api Kategori I dan II sepanjang 5.553,676 Km yang terdiri dari Kategori I (kecepatan >100 s.d 120 Km/Jam) di wilayah Jawa dan Sumatera sepanjang 3.502,818 Km dan Kategori II (kecepatan > 80 s.d 100 Km/jam) di wilayah Jawa dan Sumatera sepanjang 2.050,858 Km ● Kegiatan Pendukung: o Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalur dan Bangunan KA; o Monitoring dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalur dan Bangun KA; dan o Pemeriksaan Jalan Rel dengan KA Ukur di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. ● Analisa kegagalan dikarenakan terjadinya kondisi perubahan cuaca ekstrim, hujan deras yang berakibat beberapa jalur kereta api mengalami banjir, longsor dan ambles sehingga mengganggu stabilitas jalan kereta api. Tindak lanjut perawatan jalur kereta api mendukung keberhasilan dalam mempertahankan atau meningkatkan kategori TQI Kategori I dan Kategori II ● Kendala/hambatan, terjadinya kondisi perubahan cuaca ekstrim, hujan deras yang berakibat beberapa jalur kereta api mengalami banjir, longsor dan ambles sehingga mengganggu stabilitas jalan kereta api	Upaya peningkatan kinerja melalui Penyesuaian aktivitas: o Akan dilakukan pengukuran TQI periode ke 2 tahun 2025 di wilayah Sumatera; o Akan dilakukan koordinasi terkait dengan kegiatan perawatan/kontrak IM dengan Balai Teknik Perkeretaapian dan PT. Kereta Api Indonesia (persero), untuk prioritas pemeliharaan petak jalan yang mengalami penurunan Kategori 3 dan Kategori 4; o Evaluasi hasil pengukuran TQI Periode II Tahun 2025 dengan Balai Teknik Perkeretaapian dan PT. Kereta Api Indonesia (persero). o Pengukuran dengan menggunakan kereta ukur secara periodik ditahun 2025 oleh PT. Kereta Api Indonesia (persero) melalui pembiayaan Infrastruktur Operation (IO) TA 2025 di Balai Teknik Perkeretaapian, sebagai fungsi pengawasan Direktorat PrasaranaPerkeretaapian melalukan pendampingan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran TA 2025 (pagu efektif)	Dit Prasarana Perkeretaapian dan Balai Teknik Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PERSENTASE ON TIME PERFORMANCE (OTP) TRANSPORTASI KERETA API	%	96,100	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Fasilitas Operas! Kereta Api dengan Teknologi Handai)	64	756	63.4	8.39	-	-	64.43	-	101.62%	-	● Jumlah unit persinyalan yang berbasis elektrik sebanyak 384 unit dengan jumlah unit persinyalan berbasis elektrik dan mekanik (eksisting dan rencana pembangunan fasilitas operasi elektrik pada Tahun 2025 s.d. 2029) sebanyak 596 unit. ● Kegiatan pendukung antara lain: o Bimbingan Teknis Bidang Fasilitas Operasi Kereta Api; o Jabodetabek Railway Capacity Enhancement Phase I; o Pemeriksaan dan Pengawasan Prasarana Fasilitas Operasi Kereta Api. ● Telah dilakukan audensi terkait dokumen teknis penggunaan kontainer untuk Bangunan Equipment Room (ER) di wilayah Divre III Palembang serta dilakukan koordinasi intensif dengan PT. Kereta Api Indonesia (persero) proses Perizinan Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum berupa pembangunan sistem persinyalan elektrik dan intermediate blok Segmen I Lintas Lahat – Kertapati pada lintas Prabumulih Simpang. ● Telah dilakukan sinkronisasi data fasilitas operasi kereta api antara prasarana perkeretaapian dengan Balai Teknik Perkeretapian ● Kendala/hambatan berupa justifikasi teknis dari PT. KAI terkait Bangunan ER dengan menggunakan kontaine	Upaya peningkatan kinerja melalui Penyesuaian aktivitas/strategi maupun penggunaan anggaran melalui kegiatan: o Koordinasi dengan PT. KAI melalui surat penyampaian hasil asistensi gambar teknis kepada PT. KAI untuk dapat diproses lanjut; o Evaluasi data kinerja bidang fasilitas operasi kereta api; o Evaluasi Perjanjian Kinerja serta rencana aksi Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025.	Dit Prasarana Perkeretaapian dan Balai Teknik Perkeretaapian

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 7				Realisasi Bulan 7		Realisasi Bulan 7		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PEMENUHAN TARGET ANGKUTAN KERETA API	%	19,000	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	9	118	11.58	9.81	-	-	9.339	-	80.65%	-	Realisasi kinerja diperoleh dari penjumlahan Persentase Pemenuhan Target Angkutan Penumpang KA+ Persentase Pemenuhan Target Angkutan Barang KA, dengan rincian : a. Persentase pemenuhan target angkutan penumpang KA diperoleh dari realisasi angkutan penumpang kereta api sebanyak 262.891.369 penumpang pada s.d Juli Tahun 2025 dibandingkan target angkutan penumpang kereta api berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029 sebanyak 2.798.554.050 penumpang, maka diperoleh nilai sebesar 4,697% (pembobotan 50%). b. Persentase pemenuhan target angkutan barang diperoleh dari realisasi angkutan barang kereta api sebanyak 33.321.703 ton s.d Juli 2025 Tahun 2025 dibandingkan target angkutan barang kereta api berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029 sebanyak 358.912.917 ton, maka diperoleh nilai sebesar 4,642% (pembobotan 50%). Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja persentase pemenuhan target angkutan kereta api diantaranya: Angkutan Penumpang: a. Persentase realisasi angkutan penumpang terhadap target penumpang pada Triwulan II Tahun 2025 dapat melebihi taget yaitu sebesar 105%, dengan uraian yang cukup siginifikan: 1) Realisasi angkutan penumpang KRL Jabodetabek pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar 166.432.692 penumpang dengan rata-rata penumpang weekday sebesar 1.032.790 penumpang/hari. 2) Realisasi angkutan penumpang kereta cepat Jakarta - Bandung pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar 2.936.345 penumpang dengan rata-rata penumpang sebesar 16.250 penumpang/hari; 3) Realisasi angkutan penumpang LRT Jabodebek pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar 13.040.406 penumpang dengan rata-rata penumpang weekday sebesar 93.471 penumpang/hari. b. Penyelenggaraan angkutan perintis di lingkungan Ditjen Perkeretaapian didukung juga dengan relaksasi anggaran sesuai program mencakup: ? 1) KA Cut Meutia (Muara Satu - Kuta Blang) telah berjalan dengan kontrak Nomor KA.204/1/1/BTP-MDN/2025 tanggal 8 April 2025 dan jumlah penumpang periode Januari s.d Juni 2025 sebanyak 26.929 penumpang; 2) KA Lembah Anai (Lubuk Alung - Kayu Tanam) telah berjalan dengan kontrak Nomor KA.204/1/5/BTP-PDG/2025 tanggal 6 Mei 2025 dan jumlah penumpang periode Januari s.d Juni 2025 sebanyak 51.116 penumpang; 3) KA Bathara Kresna (Purwosari – Wonogiri) telah berjalan dengan kontrak Nomor 001/KONT-PERINTIS/BTP-SMG/IV/2025 tanggal 8 April 2025 dan jumlah penumpang periode Januari s.d Juni 2025 sebanyak 93.903 penumpang; 4) LRT Sumatera Selatan telah berjalan dengan kontrak Nomor 01/KP.LRT/BPKAR-SS/IV/2025 tanggal 8 April 2025 dan jumlah penumpang periode Januari s.d Juni 2025 sebanyak 2.227.144 penumpang; 5) KA Makassar-Parepare telah berjalan dengan kontrak Nomor PL.107/1/2/P7-BPKASS/2025 tanggal 2 Juni 2025 dan jumlah penumpang periode Januari s.d Juni 2025 sebanyak 149.019 orang. c. Layanan angkutan penumpang membaik dapat dilihat dengan peningkatan On Time Performance (OTP) pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar 97,80% atau meningkat sebesar 0,39% dibanding periode Triwulan I Tahun 2025 sebesar 97,41%. d. Penambahan sarana KRL baru untuk layanan KRL Jabodetabek didukung juga dengan pelaksanaan inspeksi, pengujian dan sertifikasi terhadap KRL baru pengadaan PT. KAI sebanyak 11 trainset. e. Dukungan penyelenggaraan PSO termasuk adanya paket stimulus transportasi kereta api berupa diskon 30% pada momen libur sekolah (5 Juni - 31 Juli 2025) untuk 12 KA ekonomi stainless steel new generation pada keberangkatan stasiun antara lain: 1) KA Progo relasi Lempuyangan - Pasarsenen (PP); 2) KA Lodaya relasi Solo Balapan - Bandung (PP); 3) KA Lodaya Tambahan relasi Solo Balapan - Bandung (PP); 4) KA Bogowonto relasi Lempuyangan - Pasarsenen (PP); 5) KA Tambahan LPN - PSE relasi Lempuyangan - Pasarsenen (PP); 6) KA Mataram relasi Solo Balapan - Pasarsenen (PP); 7) KA Batavia relasi Solobalapan - Gambir (PP); 8) KA Jaka Tingkir relasi Solo Balapan - Pasarsenen (PP); 9) KA Senja Utama Solo relasi Solo Balapan – Pasarsenen; 10) KA Tambahan PSE - SLO relasi Solo Balapan - Pasarsenen (PP); 11) KA Majapahit relasi Pasarsenen - Malang (PP) via Sragen dan Solo Jebres; 12) KA Gaya Baru Malam Selatan relasi Pasar Senen - Surabaya Gubeng (PP). f. Beberapa kegiatan pendukung berupa kegiatan peningkatan stasiun kereta api Tahun 2025 dengan tujuan mendukung peningkatan layanan angkutan penumpang, diantaranya: 1) Peningkatan Stasiun Rangkasbitung dengan progres 84,71%; 2) Peningkatan Stasiun Tanah Abang Tahap I telah selesai dan telah dioperasikan pada 29 Juni 2025. Angkutan Barang: a. Realisasi angkutan barang pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar 17.262.808 ton mengalama peningkatan apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada Tahun 2024 dan dibandingkan dengan program/target pada Triwulan II Tahun 2025; b. Meningkatnya permintaan volume barang yang diangkut pada Triwulan II dibsanding periode sebelumnya khususnya pada angkutan batubara, BBM dan pupuk; c. Peningkatkan frekuensi perjalanan kereta api barang serta adanya penambahan gerbong khusus terutama di wilayah Sumatera Bagian Selatan.	Upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada periode mendatang diantaranya: a. Percepatan penyelesaian kegiatan peningkatan stasiun kereta api Rangkasbitung dalam upaya peningkatan layanan angkutan penumpang, serta monitoring pemanfaatan Stasiun Tanah Abang yang telah beroperasi; b. Lanjutan pelaksanaan pengujian dan sertifikasi terhadap hasil pengadaan sarana KRL baru oleh badan usaha untuk mendukung peningkatan kapasitas layanan kereta api penumpang khususnya di Jabodetabek; c. Koordinasi intensif untuk penyelesaian pengujian dan sertifikasi terhadap kegiatan peningkatan prasarana yang dilaksanakan badan usaha (fasilitas operasi, jalur dan bangunan) khususnya di wilayah Sumatera Bagian Selatan dalam rangka mendukung peningkatan kehandalan dan kapasitas perjalanan kereta api barang. Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas dan anggaran diantaranya: a. Penyesuaian aktivitas dan anggaran: Usulan relaksasi anggaran untuk mendukung kelanjutan layanan kereta api yang dikelola Balai Pengelola Kereta Api (diantaranya di wilayah BPKA Sulawesi Selatan berupa perawatan 14 Stasiun, OCC dan Gudang Pekkae). b. Penyesuaian/Penataan/Refocusing Organisasi: Pengoptimalan Satpel di masing-masing wilayah Balai Teknik Perkeretaapian untuk pengawasan penyelenggaraan angkutan penumpang dan barang sesuai standar pelayanan minimum. c. Penyesuaian strategi/kebijakan: 1) Koordinasi dan berpartisipasi aktif dalam penyusunan rancangan Perpres Penguatan Logistik Nasional Tahun 2025-2029; 2) Integrasi data angkutan kereta api yang update dan valid untuk peningkatan pengawasan dalam sistem yang terintegrasi (Strategi Kemenhub, Portal Layanan DJKA).	Dit Lalu Lintas dan Angkutan KA
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	%	100,000	Program Dukungan Manajemen (Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian, Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian, Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian, Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian & Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian)	29	379	34.63	9.14	405.203.426.250	8.97	29.727	225.753.683.491	85.84%	55.71%	Persentase pencapaian kinerja tata kelola pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian diperoleh dari rata-rata dari persentase tingkat pencapaian kinerja yang mencakup Nilai Evaluasi AKIP, Nilai Kinerja Anggaran, Realisasi PNBP Bidang Perkeretaapian dan Indeks Profesional ASN, progress s.d Juli per masing-masing komponen sebagai berikut: a. SAKIP dengan progres belum ditetapkan target kinerja (target ditetapkan pemenuhannya pada Triwulan IV) dikarenakan evaluasi/penilaian masih berlangsung pada Triwulan II-III baik oleh Tim Internal Unit Kerja dan Tingkat Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk penilaian mandiri maupun oleh Tim Evaluasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan b. NKA dengan progress realisasi Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian diperoleh melalui aplikasi Monev Kemenkeu sebesar 48,40 dengan rincian: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: 7,45 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran: 89,34. c. Pencapaian Realisasi PNBP dengan progress realisasi kinerja sebesar 59,16% yang diperoleh dari perbandingan antara realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar Rp737.279.659.005,00 dengan target Tahun 2025 sebesar Rp1.246.326.325.000 d. Tingkat pencapaian Indeks Profesional ASN dengan progress masih dalam upaya peningkatan nilai diantaranya dengan pemenuhan kebutuhan data secara mandiri untuk komponen kompetensi dan kinerja melalui aplikasi SIK oleh masing-masing pegawai serta pemutakhiran data pada aplikasi SIASN BKN oleh admin masing-masing unit kerja. Secara pararel juga dilakukan upaya peningkatan kompetensi pegawai melalui pendidikan/pelatihan/workshop baik yang dilaksanakan mandiri oleh Setditjen/Direktorat teknis maupun lembaga lain, serta peningkatan disiplin dan kinerja pegawai secara berkala oleh pimpinan	Beberapa upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada periode mendatang diantaranya: a. Lanjutan evaluasi implementasi SAKIP tingkat Kementerian Perhubungan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan untuk kemudian menjadi acuan dalam finalisasi penilaian pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian; b. Meningkatkan penyerapan anggaran unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan percepatan penyelesaian kegiatan/output yang telah diprogramkan pada Tahun 2025 serta pemenuhan readiness criteria sesuai ketentuan; c. Koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk penerapan Standar Biaya Keluaran pada Tahun 2025 serta pengusulan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026 (SBKU dan SBKK) sebagaimana diatur pada PMK Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2025; d. Lanjutan penyelesaian Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk koordinasi dengan KPKNL setempat untuk menindaklanjuti usulan sewa aset; e. Lanjutan pembinaan ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian mencakup sosialisasi/workshop/bimbingan teknis terkait peningkatan disiplin dan kinerja kepegawaian implementasi penilaian kinerja pegawai dan organisasi sesuai kebijakan Kementerian PANRB terbaru. Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas dan anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya: a. Penyesuaian aktivitas dan anggaran: 1) Koordinasi intensif dengan Kemenkeu dan Setjen Kemenhub terkait usulan relaksasi anggaran khususnya untuk mendukung peningkatan keselamatan perkeretaapian; 2) Meningkatkan ketepatan revisi DIPA dan akurasi Halaman III DIPA. b. Penyesuaian organisasi/penempatan pegawai: 1) Penyusunan rencana pengembangan karier pegawai berbasis kompetensi; 2) Penempatan pegawai yang kompeten pada unit pengelola anggaran/keuangan dan pengelola kepegawaian untuk mendukung peningkatan kinerja termasuk kualitas data dan pelaporan berkala. c. Penyesuaian strategi/kebijakan: Dukungan finalisasi dan penetapan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 tingkat Kementerian Perhubungan untuk selanjutnya menjadi acuan pada tingkat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, serta penyempurnaan terhadap konsep Keputusan Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan untuk unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna mengakomodir perubahan-perubahan terkait komponen penilaian sesuai pembahasan/kebijakan terkini.	
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	%	100,000	Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pencapaian Target Regulasi/Legislasi (Jumlah Rancangan Dan Peraturan Perundangan) Di Bidang Perkeretaapian)	-	110	10	9.09	-	-	-	-	-	-	● Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah berkoordinasi dengan seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam kegiatan penyusunan dan/atau reviu terkait peraturan/regulasi guna pelaksanaan yang lebih efektif dan efisien. ● Penyusunan dilaksanakan secara berjenjang dengan pembahasan dengan seluruh pihak terkait (Biro Hukum, Direktorat Teknis, Kemenkumham, Sekretariat Negara, operator, dan lainnya), termasuk dalam pelaksanaan harmonisasi dengan peraturan perundangan lainnya. Selain itu, pada Triwulan II 2025 juga terdapat dukungan in house consultant dalam upaya membantu penyusunan rekomendasi kebijakan dalam bidang perencanaan dan pemenuhan NSPK. ● Dalam proses penyusunan dan penerbitan regulasi, saat ini terdapat kendala/hambatan yang cukup signifikan diantaranya substansi teknis pada rancangan regulasi yang belum siap dan masih membutuhkan kajian/pembahasan lanjutan, kebutuhan keterlibatan Kementerian/Lembaga lain, kendala sinkronisasi jadwal pembahasan/koordinasi, serta adanya efisiensi anggaran yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pendukung (termasuk pembahasan menjadi terbatas melalui daring namun belum optimal). Hal ini juga disebabkan oleh faktor eksternal dengan banyaknya regulasi yang sedang menunggu pengesahan. ● Adapun beberapa rancangan peraturan/legislasi bidang perkeretaapian yang masih berproses sampai dengan periode Triwulan II Tahun 2025 diantaranya: o Revisi PM 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Trase; o Revisi PM 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang antara Jalur KA dengan Jalan; o Revisi PM 14 Tahun 2011 tentang Tata cara dan Standar Pengujian Lokomotif; o Revisi PM 121 Tahun 2017 tentang Lalu Lintas Kereta Api; o Revisi PM 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan KA; o Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sertifikasi Pengendali Distribusi Listrik; o Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Tata Cara, Standar Peralatan dan SDM Petugas Penanganan Kecelakaan Kereta Api; o Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Tata Cara, Standar Peralatan dan SDM Petugas Pemeriksa dan Analisis Kecelakaan Kereta Api.	● Koordinasi intensif dengan Setjen Kementerian Perhubungan untuk percepatan pengundangan peraturan yang sudah dilakukan harmonisasi serta pelaksanaan harmonisasi rancangan peraturan perundangan dengan Kementerian Hukum? ● Penyusunan rekomendasi kebijakan diantaranya berupa pembahasan usulan revisi PM 112 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di lingkungan Kementerian Perhubungan serta penyelesaian dokumen Renstra Tahun 2025–2029 termasuk dengan pengoptimalan dukungan in house consultant? ● Percepatan pembahasan dan koordinasi dengan Direktorat teknis serta stakeholder lainnya (Kementerian Koordinator/lainnya, Badan Kebijakan Transportasi, akademisi, lainnya) untuk penyelesaian substansi teknis pada rancangan peraturan perundangan yang disusun. ● Finalisasi kerangka regulasi pada rancangan Rencana Strategis Tahun 2025~2029 mengacu perkembangan isu/kebijakan pada RPJMN dan Renstra Kementerian Perhubungan. ● Penyesuaian pelaksanaan kegiatan pendukung/rapat pembahasan/kajian dengan menyesuaikan alokasi anggaran pasca efisiensi agar output rancangan peraturan perundangan tetap terpenuhi sesuai target.	Setditjen Perkeretaapian

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 7				Realisasi Bulan 7		Realisasi Bulan 7		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Nilai	100,000	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian (Indeks Profesional ASN)	-	89	-	-	-	-	-	-	-	-	● Sampai dengan Juli Tahun 2025 belum ditetapkan target serta belum terdapat realisasi untuk indeks profesional ASN karena hasil penilaian direncanakan terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2025. Posisi saat ini masih dalam upaya peningkatan nilai indeks profesional ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. ● Berdasarkan perolehan nilai sementara atas indeks profesional ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian (posisi 26 Juni 2025), diperoleh bahwa 2 dari 4 kriteria masih bernilai rendah yaitu kriteria kompetensi (nilai 28,93 dari 40) dan kriteria kinerja (nilai 25,16 dari 30). Beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut antara lain: o Terdapat pegawai yang belum melakukan "Terima Penilaian" pada aplikasi e-Kinerja Kemenhub terhadap penilaian kinerja individu Tahun 2024 sehingga data kinerja ASN belum terkonfirmasi dan nilai menjadi rendah (nol)? o Terdapat pegawai yang belum melakukan unggah/upload data kompetensi Tahun 2024 berupa sertifikat/bukti dukung lain dari keikutsertaan pendidikan/pelatihaan/bimtek/sosialisasi/pelatihan/lainnya ke aplikasi SIK Kemenhub sehingga mempengaruhi rendahnya nilai kompetensi? o Terdapat kendala dalam pelaksanaan sinkronisasi data dari aplikasi SIK ke aplikasi SIASN BKN (gagal post data SKP/error)? o Terdapat pegawai yang seharusnya tidak masuk dalam penilaian IP ASN karena pegawai tersebut bukan lagi menjadi bagian dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian (resign, hukuman disiplin, dll). Kendala tersebut sudah disampaikan kepada Biro SDM dan Organisasi guna dilakukan perubahan status kepegawaian pada data BKN (menjadi non-aktif) ● Secara berkala telah dilakukan beberapa upaya guna meningkatkan indeks profesional ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian diantaranya: o Penyampaian hasil evaluasi sistem merit terkait manajemen kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagaimana surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor KP.406/1/2/K1/DJKA/2025 tanggal 28 Mei 2025 guna pemutakhiran data kinerja pada aplikasi e-Kinerja serta monitor pengisian data indeks profesional ASN Tahun 2025? o Himbauan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk melakukan pemutakhiran data kepegawaian pada aplikasi SIK guna peningkatan kualitas data ASN melalui surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor KP.001/1/10/K1/DJKA/2025 tanggal 23 Juni 2025 perihal Pemutakhiran Data Kepegawaian pada Sistem Informasi Kepegawaian (SIK)? o Penyampaian hasil monitoring penilaian indeks profesional ASN kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara berkala setiap bulan? o Mendorong pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan mengikuti pendidikan/pelatihan berkoordinasi dengan BPSDMP, Setjen Kemenhub (Biro SDMO), serta pelaksana pendidikan/pelatihan lainnya baik teknis perkeretaapian maupun manajerial; o Melakukan kegiatan evaluasi penerapan aturan kepegawaian (disiplin pegawai, kode etik, regulasi hari dan jam kerja, ketentuan cuti, tugas belajar, dll) secara langsung/on site di lokasi (Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan, BTP Surabaya dan Balai Pengujian Perkeretaapian) guna peningkatan komponen/kriteria disiplin pada penilaian IP ASN periode berikutnya? o Koordinasi dengan admin SIK untuk pemutakhiran data kompetensi dan kinerja termasuk melakukan pendampingan dan melaporkan ke unit kerja terkait apabila terdapat kendala dalam proses sinkronisasi.	Upaya peningkatan kinerja : ● Lanjutan pembinaan ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian mencakup sosialisasi/bimbingan teknis terkait isu-isu kepegawaian (disiplin pegawai, pembinaan keluarga, kode etik, dan lainnya). ● Pengelolaan jenjang karir terkait jabatan fungsional tertentu bidang perkeretaapian melalui pelaksanaan pendidikan/pelatihan/bimbingan teknis/workshop/uji kompetensi kenaikan jenjang/perpindahan jabatan dari jabatan lain ke jabatan fungsional perkeretaapian yang dibutuhkan untuk mendukung kompetensi. ● Koordinasi intensif dengan Direktorat/Balai, Setjen Kemenhub dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memastikan pemenuhan data penilaian indeks professional ASN termasuk antisipasi kegagalan sinkronisasi data. ● Monitoring kelengkapan kebutuhan data dari setiap ASN secara berkala melalui aplikasi SIK Kemenhub termasuk monitoring SKP dan laporan bulanan melalui aplikasi e-Kinerja. ● Penggunaan sisa anggaran kegiatan pendukung dampak efisiensi belanja anggaran dengan selektif berdasarkan prioritas.	Setditjen Perkeretaapian
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Nilai	100,000	Tersedianya Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal (Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian)	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	● Sampai dengan Juli Tahun 2025, belum terdapat realisasi Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Direktorat Jenderal Perkeretaapian dikarenakan belum dilakukan penilaian (menunggu update dan rincian kebijakan terkait indeks pemerintahan digital oleh Kementerian PANRB dan Pusdatin Kementerian Perhubungan). Adapun pemenuhan penilaiannyanya ditargetkan pada periode Triwulan IV Tahun 2025. ● Dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja indikator Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Direktorat Jenderal Perkeretaapian, telah dilaksanakan beberapa kegiatan pada Triwulan II Tahun 2025 diantaranya: o Pelaksanaan survei evaluasi kualitas penggunaan (indikator pada ISO/IEC 25010:2023) dan kebutuhan pengembangan Portal Layanan dan Data (PLD) Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan responden seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna meningkatkan kualitas layanan digital dan tata kelola data yang terintegrasi; o Workshop Peningkatan Kesadaran Keamanan Data dan Informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan mengundang narasumber Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Pusdatin Kementerian Perhubungan; o Koordinasi dan tindak lanjut perbaikan atas kejadian insiden keamanan temuan Pusdatin Kementerian Perhubungan terkait hasil forensik digital/keamanan pada Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian; o Koordinasi dengan Pusdatin Kementerian Perhubungan terkait rekomendasi hasil clearance terhadap kegiatan TIK Tahun 2025 sesuai dengan arsitektur pemerintah digital dan kebijakan penyederhanaan aplikasi; o Pembahasan laporan pendahuluan dan progres pengembangan Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai SuperApps yang dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Teknis dan Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian; o Koordinasi dan pendampingan terkait pelaksanaan User Acceptance Test (UAT) serta Vulnerability Assessment (VA) untuk aplikasi/sistem informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian; o Koordinasi pengelolaan domain dan penggunaan server di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian; o Koordinasi pemenuhan data dukung usulan kegiatan TIK Tahun 2026 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna tahapan reviu tingkat II oleh Pusdatin Kementerian Perhubungan dan tahapan clearance oleh Tim SPBE Nasional.	Upaya peningkatan kinerja : ● Lanjutan pengembangan Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai superapps Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang terintegrasi dengan penambahan fitur/modul layanan sesuai prioritas termasuk pengembangan modul layanan perizinan penyelenggaraan perkeretaapian. ● Peningkatan keamanan sistem dari ancaman siber dengan pelaksanaan perbaikan celah keamanan (remediasi) berdasarkan hasil forensik/temuan insiden oleh Pusdatin Kementerian Perhubungan. ● Penyiapan metode pengukuran Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian mengacu Indeks Pemerintah Digital khususnya pada aspek pengukuran kepuasan pengguna layanan digital pemerintah mencakup tingkat kepuasan pengguna, tingkat pemenuhan kualitas layanan digital, dan tingkat pemanfaatan layanan digital. ● Pelaksanaan reviu tingkat I terhadap usulan kegiatan TIK Tahun 2026 sesuai dengan arsitektur dan peta rencana pemerintah digital Kementerian Perhubungan serta mengacu kebijakan penyederhanaan aplikasi. ● Penyesuaian kebijakan TIK terbaru di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagai acuan dalam perencanaan TIK Tahun 2025~2029 sebagaimana arsitektur dan peta rencana pemerintah digital Kementerian Perhubungan. ● Mengusulkan penambahan pegawai pranata komputer di unit kerja Setditjen Perkeretaapian guna mendukung pengelolaan TIK di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	Setditjen Perkeretaapian
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Nilai	100,000	Terwujudnya Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian (Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perkeretaapian)	-	90	-	-	-	-	-	-	-	-	● Sampai dengan Juli Tahun 2025 belum ditetapkan target dan tidak terdapat realisasi nilai keterbukaan informasi publik dimana penilaian direncanakan terpenuhi pada periode Triwulan IV Tahun 2025. ● Untuk mendukung pencapaian target kinerja nilai keterbukaan informasi publik, telah dilakukan beberapa upaya pada periode Triwulan II 2025, diantaranya: o Pemenuhan permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon informasi pada periode Triwulan II 2025 (2 permohonan) melalui PPID Utama Kementerian Perhubungan (via website https://ppid.kemenhub.go.id/ dan surat) yang selanjutnya didistribusikan kepada PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan sebanyak 1 permohonan telah selesai ditindaklanjuti sedangkan 1 permohonan lainnya masih dalam proses? o Koordinasi intensif dengan Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan terkait percepatan penetapan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Daftar Informasi Publik (DIP) Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 sebagai dasar/ketentuan dalam penyampaian informasi publik? o Koordinasi intensif dengan Biro Komunikasi dan Informasi Publik dan Biro Hukum Kementerian Perhubungan terkait penetapan dan uji konsekuensi Daftar Informasi Publik Dikecualikan (DIK) Tahun 2025? o Monitoring media setiap hari dengan kategori isu negatif, netral dan positif, termasuk melakukan update berkala "Top Issue Perkeretaapian" dengan publikasi/pemberitaan melalui media sosial maupun media elektronik lainnya.	Upaya peningkatan kinerja : ● Sosialisasi terkait Daftar Informasi Publik (DIP) dan Informasi Dikecualikan (DIK) kepada seluruh petugas pengelola PPID di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. ● Koordinasi persiapan kegiatan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (AKIP) yang dilaksanakan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan dalam rangka peningkatan kinerja keterbukaan informasi publik pada unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan yang direncanakan pelaksanaan pada Triwulan III 2025. ● Penyiapan laporan hasil analisis pemberitaan terkait Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara rutin/setiap hari. ● Koordinasi intensif dengan Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Setjen Kementerian Perhubungan (Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Biro Hukum) Kementerian Perhubungan dalam penyampaian informasi publik sesuai ketentuan.	Setditjen Perkeretaapian
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	%	100,000	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian (Tingkat Pencapaian Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian)	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	SAKIP dengan progres belum ditetapkan target kinerja (target ditetapkan pemenuhannya pada Triwulan IV) dikarenakan evaluasi/penilaian masih berlangsung pada Triwulan II-III baik oleh Tim Internal Unit Kerja dan Tingkat Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk penilaian mandiri maupun oleh Tim Evaluasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan	Lanjutan evaluasi implementasi SAKIP tingkat Kementerian Perhubungan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan untuk kemudian menjadi acuan dalam finalisasi penilaian pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;	Seluruh Unit Kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	%	100,000	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian (Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ditjen Perkeretaapian)	59	785	65	8.28	-	-	59.16	-	91.02%	-	Tingkat pencapaian realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah indikator yang menunjukkan seberapa besar realisasi penerimaan PNBP dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Target PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 sebesar Rp1.246.326.325.000,00 dan pada Triwulan II Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp311.581.581.250,00 atau sebesar 25,000%. Berdasarkan data pada aplikasi SPAN dan SIMPONI Kementerian Keuangan, diperoleh realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp737.279.659.005,00.	Lanjutan penyelesaian Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk koordinasi dengan KPKNL setempat untuk menindaklanjuti usulan sewa aset	Setditjen Perkeretaapian
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	%	100,000	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian (Tingkat Pencapaian Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Perkeretaapian)	48	704	59.25	8.42	-	-	48.4	-	81.69%	-	Nilai Kinerja Anggaran (skala 0-100) mengacu pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 dengan perhitungannya merupakan penjumlahan dari 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran, yang nilainya dapat diperoleh pada Dashboard Aplikasi Monev Kementerian Keuangan. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) dikelompokkan pada kategori: 1. Lebih dari 90: Kategori Sangat Baik; 2. 80 - 90: Kategori Baik; 3. 60 - 80: Kategori Cukup; 4. 50 - 60: Kategori Kurang; 5. Kurang dari 50: Kategori Sangat Kurang. Target Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 sebesar 81,000 dan pada Triwulan II 2025 ditargetkan sebesar 46,348 (57,220% dari target Tahun 2025). Adapun realisasi Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Triwulan II Tahun 2025 yang diperoleh melalui aplikasi Monev Kemenkeu sebesar 48,40 dengan rincian: 1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: 7,45; 2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran: 89,34. Dengan realisasi sebesar 48,40, maka diperoleh tingkat pencapaian kinerja Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan II Tahun 2025 sebesar 59,753% dari target Tahun 2025 sebesar 81,000 (Tingkat Pencapaian = 59,753%).	Meningkatkan penyerapan anggaran unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan percepatan penyelesaian kegiatan/output yang telah diprogramkan pada Tahun 2025 serta pemenuhan readiness criteria sesuai ketentuan	Seluruh Unit Kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian

Jakarta, 2025
DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,

ALLAN TANDIONO
NIP 198801182025211023

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Bulan: Agustus, Tahun: 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 8				Realisasi Bulan 8		Realisasi Bulan 8		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	Rasio	0,460	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	-	-	0.46	-	542.150.794.000	10.26	0.46	212.852.371.313	100%	39.26%	Rasio konektivitas s.d AgustusTahun 2025 diperoleh sebesar 0,460 dengan jumlah PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional (KSN) / simpul transportasi sebanyak 69 lokasi (52 lokasi PKN/PKW/KSN, 6 lokasi simpul bandara, 10 lokasi simpul pelabuhan dan 1 lokasi simpul terminal tipe A) dibandingkan target Rencana Induk Perkeretaapian Nasional sebanyak 150 lokasi (104 lokasi PKN/PKW/KSN, 16 lokasi simpul bandara, 29 lokasi simpul pelabuhan dan 1 lokasi simpul terminal tipe A). Terdapat beberapa kegiatan pendukung konektivitas transportasi perkeretaapian yang berprogres antara lain: a. Konektivitas PKW Lhokseumawe (Kecamatan Muara Satu) dengan kegiatan pendukung berupa pembangunan jalur kereta api lintas Krueng Geukeuh – Muara Satu telah selesai 100% berupa pembangunan jalur KA sepanjang 8 km'sp dengan lebar spoor 1.435 mm. Posisi Triwulan II Tahun 2025, telah dilakukan tindak lanjut terhadap hasil temuan pengujian. Saat ini telah diusulkan pengujian kembali sebagaimana surat dari Kepala BTP Medan kepada Balai Pengujian perkeretaapian pada tanggal 28 Mei 2025. b. Kegiatan lanjutan pembangunan jalur KA Rantauprapat – Pondok S5 – Kotapinang masih dalam tahap persiapan pengoperasian KA perintis segmen Rantauprapat – Pondok S5 (penyelesaian sertifikasi kelaikan, serta koordinasi kesiapan sarana yang akan dioperasikan). Sedangkan untuk segmen lanjutan Pondok S5 – Kota Pinang masih berprogres pengadaan lahan melalui anggaran LMAN (progress 93,30% yaitu sebanyak 710 dari 762 bidang telah dibebaskan), Pada tahun 2025, terhadap bidang yang belum dibebaskan diperlukan anggaran DPPT dan penilaian ganti kerugian kembali terhadap masa waktu penetapan lokasi pengadaan tanah yang telah habis. c. Pekerjaan utilitas dan penyempurnaan lintas Bandar Tinggi-Kuala Tanjung untuk mendukung konektivitas Pelabuhan Kuala Tanjung sudah selesai dilaksanakan pada Tahun 2024, dimana terdapat kendala dalam pembebasan lahan untuk frontage road yang sebelumnya direncanakan pada 532 bidang menjadi 479 bidang. Untuk itu, direncanakan lanjutan pembayaran pengadaan lahan oleh LMAN sebesar Rp 50,02 Milyar namun perlu diusulkan terlebih dahulu relaksasi anggaran pada Tahun 2025 pada kegiatan BOBP pengadaan tanah jalur kereta api lintas Bandar Tinggi - Kuala Tanjung diantaranya untuk: 1) BOBP untuk biaya panjar perkara pada 15 bidang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Kisaran pada lintasan segmen I. Selain itu 2 bidang milik Pemerintah Kabupaten Batu Bara menunggu surat BPN Asahan untuk pembuatan penetapan lokasi; 2) Pengusulan anggaran DPPT dan penilaian ganti kerugian kembali terhadap masa waktu penetapan lokasi pengadaan tanah yang telah habis pada segmen II Bandar Tinggi – Kuala Tanjung. d. Konektivitas PKW Sawahlunto didukung dengan kegiatan reaktivasi jalur kereta api Sawahlunto – Muarokalaban, masih proses koordinasi dengan PT. KAI dan Pemerintah Daerah Sawahlunto guna percepatan penyelesaian dokumen teknis untuk persyaratan pengujian prasarana perkeretaapian. e. Kegiatan pembangunan MRT Jakarta East-West Phase I untuk mendukung konektivitas di wilayah perkotaan Jabodetabek, masih dalam tahap persiapan pengadaan lahan oleh Pemerintah Daerah, pelelangan kegiatan pendukung/konsultan tender of assistance (seleksi consulting service 1), serta penetapan Pinjaman Hibah Daerah (PHD) oleh Kementerian Keuangan dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. f. Kegiatan lanjutan pembangunan prasarana perkeretaapian untuk mendukung pengoperasian KA Makassar - Pare Pare antara Mandai –Palanro yang bersumber dari pembiayaan SBSN (MYC) dengan progres 96%.	Upaya peningkatan kinerja terhadap indikator rasio konektivitas antar wilayah pada periode berikutnya diantaranya: a. Penyelesaian sertifikasi kelaikan prasarana perkeretaapian termasuk koordinasi ketersediaan/kesiapan sarana kereta api mendukung pengoperasian hasil pembangunan konektivitas, diantaranya jalur KA Rantau Prapat Baru-Pondok S5 dan perpanjangan perintis KA Aceh menuju Muara Satu. b. Lanjutan pembangunan prasarana mendukung pengoperasian KA Makassar - Pare Pare dan persiapan pembangunan MRT Jakarta East – West, serta penyelesaian pemenuhan kebutuhan lahan pendukung konektivitas melalui LMAN.	Dit. Prasarana Perkeretaapian, Dit. Lalu Lintas dan Angkutan KA, Dit Sarana Perkeretaapian dan Balai Teknik di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	%	0,460	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Jaringan Jalur KA dan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian)	7	74	3.84	5.19	-	-	7.69	-	200.26%	-	Capaian kinerja Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Jaringan Jalur KA dan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian s.d Agustus Tahun 2025 adalah sebesar 7,69% dan kinerja tahunan 33,33%. Terpenuhinya 2 dokumen perencanaan teknis bidang perkeretaapian dari 6 (enam) target yang telah ditetapkan pada tahun 2025, yaitu : 1. Dokumen Persetujuan Penetapan Trase MRT Jakarta Fase 2B (Kota – Ancol) 2. Dokumen Hasil Evaluasi Trase Jalur KA Mass Rapid Transit Est West Line (Cikarang-Balaraja)	a.Melakukan koordinasi intens dengan stakeholder meliputi pembahasan laporan dan pelaksanaan rapat koordinasi teknis syudi kelayakan sesuai jadwal yang telah direncanakan sampai tersusun policy brief; b.Melakukan pengawasan dan koordinasi dengan stakeholder terkait evaluasi dokumen permohonan dalam pengusulan penetapan dan persetujuan trase kereta api. c. melakukan permohonan pengajuan revisi anggaran dan melengkapi data dukung yang menunjang penyesuaian kegiatan	Dit Lalu Lintas dan Angkutan KA
MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	%	0,460	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (Persentase Penyelesaian Kerjasama Pengembangan Infrastruktur Perkeretaapian)	20	92	8	8.7	-	-	20	-	250%	-	Capaian kinerja Persentase Penyelesaian Kerja Sama Pengembangan Infrastruktur Perkeretaapian s.d Agustus2025 adalah sebesar 8,00% dengan persentase kinerja triwulan 100,00% dan kinerja tahunan 40,00%. Terpenuhinya 2 dokumen kerja sama bidang perkeretaapian dari 5 target yang telah ditetapkan pada tahun 2025, yaitu: 1. Dokumen Evaluasi atas Permohonan Pembangunan Stasiun Bekasi Ekstensi di TOD Hub Summarecon Bekasi 2. Dokumen Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan PT KAI sebagai Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum berupa Stasiun di KM 57+00 - KM 57+400 Antara Stasiun Tenjo - Stasiun Tigaraksa pada Lintas Tanah Abang - Merak	Melakukan koordinasi bersama stakeholder melalui pembahasan teknis dan hukum secara paralel untuk memastikan pencapaian target, dengan menyiapkan dukungan legal dan teknis seperti Surat Keterangan, Draft Perjanjian dan Reviu BPKP.	Dit Lalu Lintas dan Angkutan KA
MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	%	0,460	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana)	61	742	62.14	8.37	-	-	61.7	-	99.29%	-	progress sampai dengan bulan Agustus tahun 2025 Dokumen Teknis BED / DED: 1. BED St. Padalarang - Telah dilakukan pengawasan terhadap perbaikan gambar design yang dilakukan oleh konsultan dan telah diserahkan kembali hasil perbaikan kepada Direktorat Prasarana Perkeretaapian pada tanggal 31 Juli 2025 - Telah dilakukan pemeriksaan terhadap laporan BED Stasiun Padalarang oleh Direktorat Prasarana pada 31 Juli 2025 dengan hasil perbaikan: a) Perbaikan format laporan dengan menambahkan BAB (Pendahuluan, Isi, Kesimpulan) disertai ruang lingkup pekerjaan (parkir dan landscape) beserta batasan masalah. Penambahan halaman, daftar tabel, daftar gambar, daftar isi, header dan perbaikan penomoran b) Penambahan regulasi dan studi literatur, analisis untuk perbandingan eksisting dan studi literatur c) Penyesuaian RAB, AHS, BOQ, Spesifikasi dan Sumber Harga dengan yang ada pada laporan dan gambar teknis, pengurutan material serta penambahan spesifikasi yang berdasarkan regulasi. d) Penambahan penjelasan pekerjaan dengan satuan LS (tidak terdefinisi) - untuk BED padalarang belum bisa dilakukan pengesahan pada bulan Juli dikarenakan dari hasil asistensi masih ada yang perlu dilakukan perbaikan oleh konsultan 2. BED Beautifikasi St. Klaten Tahap II - Telah dilakukan pengawasan terhadap perbaikan gambar design yang dilakukan oleh konsultan dan telah diserahkan kembali hasil perbaikan kepada Direktorat Prasarana Perkeretaapian pada 31 Juli 2025 - Telah dilakukan pemeriksaan terhadap laporan dan gambar teknis BED Stasiun Padalarang oleh Direktorat Prasarana pada 31 Juli 2025 dengan hasil perbaikan: a) Penambahan penjelasan pada perencanaan prespektif desain b) Penyesuaian hirarki penomoran, keterangan gambar dan tabel c) Penambahan penjelasan regulasi pada dasar teori dan penambahan dasar hukum d) Penyesuaian RAB dengan menambahkan PPN 12% serta acuan harga dan AHS 3. DED Penanganan Daerah Rawan Jalur Kereta Api di KM.227+300/500, KM.228+100/300, KM.237+100/200, KM.240+600./900, KM.243+700 - KM.244+300 Lintas Bandung - Banjar - Gambar design jalan rel dalam peroses pengesahan - Telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap laporan dan gambar teknis oleh Dit. Prasarana Perkeretaapian dengan Konsultan terkait DED Penanganan Daerah Rawan Lintas Bandung - Banjar bagian jembatan pada 21 Juli 2024 melalui zoom meeting dengan hasil perbaikan: a) Penambahan penutup pada gambar masing - masing tulangan pada box culvert precast serta pertimbangan tambahan material perekat antar segmen precast atas dan bawah b) Penambahan detail RAB, metode pemeriksaan dan perawatan c) Penambahan waktu pekerjaan pada metode kerja 4. DED Balai Yasa KRL Cicalengka - Telah dilaksanakan koordinasi Pemeriksaan gambar teknis antara Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan Konsultan terkait Studi DED Pembangunan Balai Yasa KRL untuk mendukung elektrifikasi KA antara Padalarang - Cicalengka pada tanggal 7, 10 dan 16 Juli melalui zoom meeting dengan hasil perbaikan: a) Perjelas dan lengkapi sistem keterangan, denah pemipaan serta kapasitas air bersih dan air kotor b) Perjelas instalasi potongan dan jalur kabel untuk stopkontak, ruang elektrikal hingga grounding c) Lengkapi dimensi ducting exhaust, jalur pipa refigerant dan drain, outdoor AC dan evaluasi kebutuhan kipas pada beberapa ruangan d) Memberikan diameter plat lantai - Telah dilakukan pengawasan terhadap perbaikan gambar design yang dilakukan oleh konsultan 5. DED Peningkatan Jembatan Kereta Api Lintas Lubuk Alung - Kayu Tanam - Telah dilakukan pengesahan DED Peningkatan Jembatan Kereta Api Lintas Lubuk Alung - Kayu Tanam pada bulan Agustus 2025	1. BED St. Padalarang - Akan dilakukan pengawasan terhadap proses perbaikan gambar desain oleh konsultan - Akan dilaksanakan pembahasan finalisasi asistensi antara Dit. Prasarana Perkeretaapian dengan Konsultan setelah melengkapi dokumen pendukung (laporan akhir) pada Agustus 2025 2. BED Beautifikasi St. Klaten Tahap II - Akan dilakukan pengawasan terhadap proses perbaikan gambar desain oleh konsultan - Akan dilakukan asistensi hasil perbaikan 3. DED Penanganan Daerah Rawan Jalur Kereta Api di KM.227+300/500, KM.228+100/300, KM.237+100/200, KM.240+600./900, KM.243+700 - KM.244+300 Lintas Bandung - Banjar - Akan dilakukan asistensi gambar bangunan - Akan dilakukan pengesahan pada bulan Agustus 4. DED Balai Yasa KRL Cicalengka - Akan dilakukan pengawasan terhadap proses perbaikan gambar desain oleh konsultan - Akan dilakukan asistensi hasil perbaikan gambar pada bulan agustus 5. DED Peningkatan Jembatan Kereta Api Lintas Lubuk Alung - Kayu Tanam - akan dilakukan penyampaian DED kepada BTP Kelas II Padang 6. Perlu dilakukan identifikasi terhadap kebutuhan dokumen perencanaan teknis yang mendukung konektivitas pada konsep Renstra 2025-2029 dan pemisahan antara dokumen perencanaan teknis yang mendukung konektivitas dan pelayanan dengan menambahkan indikator persentase pemenuhan perencanaan teknis bidang pelayanan prasarana perkeretaapian	Dit Prasarana Perkeretaapian
MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	%	0,460	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian)	30	792	66.67	8.42	-	-	30	-	45%	-	Pada Tahun 2025 tidak terdapat kegiatan yang mendukung kinerja Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian, sehingga target dan capaian mengacu pada baseline Tahun 2024. ● Realisasi kinerja berdasarkan baseline periode 2020-2024 terdiri dari pengesahan dokumen perencanaan teknis bidang sarana perkeretaapian: o Kebijakan fasilitas sarana KRL Lintas Yogyakarta-Solo (2020); o Kebijakan fasilitas Sarana Milik Negara di Sumatera Utara (2020); o Kebijakan DED Balai Yasa Kereta Rel Listrik Yogyakarta- Solo (2022).	Koordinasi terkait pengesahan 3 studi/kebijakan yang telah selesai dilaksanakan	Dit Sarana Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (pengujian dan sertifikasi kelaikan sarana, prasarana dan kompetensi SDM, perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara, pembinaan dan pengaturan/pengendalian/pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian)	99	1200	100	8.33	1.810.790.494.000	10.26	99.242	108.815.901.317	99.24%	6.01%	Sampai dengan bulan Agustus 2025, Jumlah kejadian kecelakaan kereta api kumulatif sebanyak 2 kejaidan serta jumlah keberangkatan kereta api sebanyak 527.972 KA, maka diperoleh tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian per 1.000 jumlah keberangkatan KA sebesar 99,242% Kendala/permasalahan yang perlu penyelesaian diantaranya: a. Pelaksanaan IMO Tahun 2025 oleh masing-masing Balai Teknik Perkeretaapian belum dapat dilaksanakan sampai dengan Triwulan II karena masih dalam tahap persiapan kontrak untuk kegiatan IO dan untuk kegiatan IM masih dalam tahap rekonsiliasi terkait aset dan assistensi data dukung; b. Keterbatasan anggaran akibat efisiensi untuk penanganan daerah rawan kecelakaan dan bencana alam/longsoran/amblesan serta keterbatasan dukungan anggaran pengawasan terhadap perawatan dan pemantauan kondisi prasarana/sarana perkeretaapian.	Upaya peningkatan kinerja terhadap Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian pada periode berikutnya diantaranya: a. Percepatan pelaksanaan kegiatan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian (IMO) Tahun 2025. b. Koordinasi dengan KNKT, PT KAI (Divre III Palembang) dan stakeholder terkait lainnya guna mengumpulkan data dan melakukan analisa untuk mengetahui penyebab kecelakaan anjlokan KA yang terjadi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025. c. Peningkatan pengawasan dan pelaksanaan penanganan daerah rawan khususnya di wilayah Sumatera Selatan dengan koordinasi Badan Usaha Penyelenggara Prasarana (BUPP), diantaranya: 1) Pada Divre IV Tanjung Karang akan dilakukan pergantian rel menggunakan rel BMN sebanyak 2.000 Batang (25 km'sp) dan pengadaan oleh KAI sebanyak 704 Batang (8,8 km'sp) dengan pelaksanaan kegiatan penggantian oleh PT.KAI; 2) Penanganan daerah rawan oleh BTP Palembang sebanyak 5 titik di lokasi Divre III Palembang dan 6 titik di lokasi Divre IV Tanjungkarang. Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas, anggaran, serta penempatan jabatan/pegawai untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya: a. Penyesuaian Aktivitas/Anggaran: Usulan relaksasi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan anggaran terkait peningkatan keselamatan transportasi perkeretaapian (perbaikan kerusakan prasarana yang tidak termasuk dalam komponen IMO, dukungan pengawasan dan pengendalian sebagai regulator, lainnya). b. Penyesuaian strategi/kebijakan: Pemutakhiran dan sinkronisasi data kondisi jalur dan jembatan KA termasuk data perlintasan sebidang dengan mengoptimalkan penggunaan sistem informasi untuk mempermudah pengawasan dan pengendalian guna mendukung peningkatan keselamatan dan keamanan penyelenggaraan perkeretaapian. c. Penyesuaian penempatan jabatan/pegawai: Pengoptimalan peran inspektur prasarana dan sarana perkeretaapian untuk pelaksanaan pengawasan/inspeksi keselamatan dalam penyelenggaraan perkeretaapian termasuk peningkatan peran Satpel pada masing-masing wilayah Balai Teknik Perkeretaapian.	Dit. Keselamatan Perkeretaapian, Dit. Prasarana Perkeretaapian, Dit. Sarana Perkeretaapian, Balai Pengujian Perkeretaapian dan Balai Teknik di lingkungan Ditjen Perkeretaapian

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 8				Realisasi Bulan 8		Realisasi Bulan 8		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian)	48	567	47.67	8.41	-	-	48.41	-	101.55%	-	● Target kinerja 2025 adalah sebanyak 85 sertifikat terdiri dari 35 sertifikasi kelaikan prasarana jalur dan bangunan kereta api serta 50 sertifikasi kelaikan prasarana fasilitas operasi kereta api, dengan total sertifikasi sampai dengan 2029 sebanyak 3.084 sertifikat. ● Penyelesaian sertifikasi prasarana pada periode Jan s.d Agustus sebanyak 23 sertifikat terdiri dari 7 sertifikat kelaikan jalur dan bangunan kereta api dan 16 sertifikat kelaikan fasilitas operasi. ● Kegiatan pendukung antara lain : o Bimbingan Teknis Bidang Kelaikan Prasarana Perkeretaapian o Monitoring atau Pengawasan Bidang Kelaikan Prasarana Perkeretaapian; o Pengoperasian dan Perawatan/rehabilitasi jalur jembatan stasiun dan fasilitas operasi kereta api; o Kegiatan Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Perawatan Dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian ● Analisis keberhasilan dilaksanakan penyesuaian aktivitas dan sebagai tahapan penerapan inovasi kinerja/Launching Aplikasi untuk aplikasi sertifikasi prasarana perkeretaapian telah dilakukan koordinasi dengan Setditjen Perkeretaapian terkait integrasi aplikasi sesuai proses bisnis antara Direktorat Prasarana Perkeretaapian dan Balai Pengujian Perkeretaapian menjadi satu aplikasi sertifikasi terintegrasi yaitu aplikasi sertifikasi perkeretaapian. ● Kendala dalam pelaksanaan kegiatan: o Belum terintegrasi aplikasi sertifikasi prasarana perkeretaapian antara Balai Pengujian Perkeretaapian dan Direktorat Prasarana Perkeretaapian; o Terdapat sertifikasi yang masih dalam proses penyelesaiaan.	Penyesuaian aktivitas adalah: o Untuk penyelesaian aplikasi pelayanan sertifikasi prasarana perkeretaapian akan dilakukan koordinasi dengan Setditjen Perkeretaapian terkait dengan proses penyelesaian integrasi aplikasi sertifikasi perkeretaapian. o Akan dilakukan koordinasi dengan Setditjen Perkeretaapian terkait dengan penetapan sertifikasi prasarana perkeretaapian yang masih berproses. o Percepatan proses kontraktual Jasa Konsultansi Pengawasan IMO dan berkoordinasi dengan Balai terkait persiapan pelaksanaan IMO Tahun 2025.	Dit Prasarana Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian)	28	279	26.92	9.65	-	-	28.31	-	105.16%	-	● Target jumlah sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian yang telah ditetapkan pada naskah Rencana Strategis sebanyak 8.000 sertifikat dari target kebutuhan sertifikat kelaikan sarana perkeretaapian (13.030 sertifikat) dengan presentase sebesar 61,39%. Dengan rincian 4.000 sertifikat oleh Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I dan 4.000 sertifikat oleh Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah II. ● Realisasi s.d Agustus 2025 untuk IKK Persentase sarana perkeretapaian yang telah memiliki sertifikat kelaikan sebesar 28,31% atau realisasi penerbitan sertifikat sebanyak 3.689 sertifikat (2.249 sertifikat dari Subdit Kelaikan Sarana Wilayah I dan 1.440 sertifikat dari Subdit Kelaikan Sarana Wilayah II) dibandingkan dengan target Tahun 2025 yang tercantum pada naskah Renstra sebanyak 8.000 sertifikat.	● Mempercepat sertifikasi sarana, mempercepat progres pekerjaan rutin yang belum sesuai target. ● Meningkatkan koordinasi dengan operator sarana agar sarana yang diusulkan sertifikasi dapat tersedia saat Tim Penguji datang ke lokasi serta memaksimalkan pengujian sarana.	Dit Sarana Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Presentase Sarana Perkeretaapian yang Telah ditindaklanjuti sesuai hasil Rampcheck)	100	910	91	10	-	-	100	-	109.89%	-	● Terdapat 2 kegiatan yaitu pelaksanaan rampcheck angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru di bidang sarana serta rampcheck pemeriksaan kelaikan angkutan barang batubara. ● Berdasarkan hasil pelaksanaan rampcheck sarana angkutan lebaran Tahun 2025, sarana yang dilakukan rampcheck sebesar 2.462 unit. Selain itu, temuan yang didapat sebanyak 171 unit sarana dan telah ditindaklanjuti oleh pihak operator sehingga realisasi sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai hasil rampcheck sebesar 100%.	Evaluasi terhadap hasil rampcheck Angkutan Lebaran yang sudah dilakukan untuk memenuhi target pada rampcheck selanjutnya.	Dit Sarana Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator dan Operator Perkeretaapian)	12	126	16.52	13.11	-	-	12.01	-	72.7%	-	sampai dengan bulan Agustus 2025 telah diterbitkan sertifikasi SDM Regulator dan Operator Perkeretaapian sebanyak 4.325 sertifikat ● Telah dilaksanakan sertifikasi kepada operator perkeretaapian dan kepada stakeholder terkait diantaranya dalah PT. KAI (persero) dan juga Dinas Perhubungan namun target belum tercapai dikarenakan penyelenggara perkeretapian (operator dan Dinas Perhubungan) belum semua mengajukan permohonan sertifikasi baru maupun perpanjangan. ● Pendidikan dan Pelatihan yang bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan Politeknik Perkeretapian Indonesia Madiun dan Politeknik Transportasi Darat Indonesia/Sekolah Tinggi Transportasi Darat Bekasi, sedangkan untuk proses ujian sertifikasi pelaksanaannya bekerja sama dengan Balai Pengujian Perkeretaapian sebagai bentuk crosscutting Direktorat Keselamatan Perkeretapian.	Berkoordinasi dengan seluruh operator perkeretaapian dan para stakeholder agar dapat segera mengajukan perpanjangan untuk sertifikat yang mendekati batas masa berlakunya (satu bulan sebelum berakhir masa berlaku sertifikat), serta melakukan percepatan proses penerbitan bagi sertifikat yang telah lulus proses verifikasi.	Dit Keselamatan Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Hasil Audit Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) yang ditindaklanjuti/dimantaatkan)	16	102	11.11	10.89	-	-	16.66	-	149.95%	-	Laporan Tindak Lanjut penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) Penyelenggara Perkeretaapian PT CRI	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian akan melaksanakan audit SMKP selanjutnya pada PT. KCIC	Dit Keselamatan Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian)	8	106	12.007	11.33	-	-	8.781	-	73.13%	-	Realisasi pengujian SDM perkeretaapian hingga bulan Agustus tahun 2025 adalah sebanyak Orang dari target tahun 2025 sebanyak Orang	Melaksanakan kegiatan pengujian berdasarkan permohonan pada bulan selanjutnya	Balai Pengujian Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian)	7	89	10.267	11.54	-	-	7.899	-	76.94%	-	Realisasi pengujian sarana perkeretaapian hingga bulan Agustus tahun 2025 adalah sebanyak Unit dari target tahun 2025 sebanyak Unit	Melaksanakan pengujian berdasarkan permohonan pada bulan selanjutnya	Balai Pengujian Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian)	7	104	11.612	11.17	-	-	7.191	-	61.93%	-	Realisasi pengujian prasarana perkeretaapian hingga bulan Agustus tahun 2025 adalah Unit dan km dari target tahun 2025 sebanyak Unit dan km	Melaksanakan kegiatan pengujian berdasarkan permohonan pada bulan selanjutnya	Balai Pengujian Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	3,740	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (subsidi perintis dan monitoring PSO, penetapan, pemantauan dan evaluasi GAPEKA, pembangunan jalur ganda kereta api dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian baik jalur kereta api dan fasilitas operasi dan lainnya)	3	36	3.74	10.39	596.832.504.667	10.26	3.793	373.805.256.009	101.42%	62.63%	Nilai IKM Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan nilai rata-rata IKM setiap bulan dari masing-masing unit kerja selama Januari s.d AgustusTahun 2025 dimana diperoleh nilai 3,793 atau dapat diintrepretasikan bahwa kinerja unit pelayanan telah sangat baik. Pelayanan publik bidang perkeretaapian meliputi layanan administrasi Pemerintahan sebagai regulator (perijinan, sertifikasi, pengujian, dan lainnya) serta layanan angkutan kereta api yang diselenggarakan oleh unit kerja/BLU di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Adapun beberapa faktor keberhasilan dalam pencapaian kinerja diantaranya: a. Sampai dengan Juli Tahun 2025 telah diterbitkan 16 perizinan perpotongan dan/atau persinggungan jalur kereta api dengan bangunan lain dan 9 perizinan usaha/operasi. b. Pelayanan sertifikasi telah dilaksanakan oleh unit kerja meliputi: 1) Pelayanan sertifikasi komponen prasarana perkeretaapian sebanyak 3 penetapan sertifikat oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian. 2) Pelayanan sertifikasi sarana perkeretaapian sebanyak 3.689 sertifikat sarana oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian. 3) Pelayanan sertifikasi SDM Perkeretaapian sebanyak 2.873 sertifikat sarana oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian. c. Kehandalan SDM dalam memberikan layanan serta pemenuhan kualitas dan tahapan pelayanan sesuai proses bisnis/SOP yang telah ditetapkan. d. Pelaksanaan sosialisasi layanan dan survei IKM kepada stakeholder, termasuk upaya penambahan jumlah responden dengan perluasan pelaksanaan survei melalui google form untuk mempermudah pengisian responden. e. Pemanfaatan sistem informasi diantaranya pada layanan pengujian, sertifikasi kelaikan sarana serta sertifikasi kompetensi SDM perkeretapian, sehingga penyelesaian layanan dengan tepat waktu serta menjaga kualitas pelayanan sesuai dengan prosedur dan alur yang telah ditetapkan. Adapun beberapa upaya pengembangan sistem informasi yang sedang dilaksanakan antara lain: 1) Pengembangan fitur perizinan online pada Portal Layanan dan Data Ditjen Perkeretaapian dengan progres pada Triwulan II Tahun 2025 sudah berkontrak. 2) Ujicoba penggunaan fitur perizinan crossing pada Portal Layanan dan Data Ditjen Perkeretaapian dengan dilakukan sinkronisasi SSO. Beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan layanan dan pelaksanaan survei IKM diantaranya: a. Kendala pada saat pelaksanaan survey Indeks Kepuasan Masyarakat diantaranya kesulitan beberapa responden dalam mengakses link survei dikarenakan alat/media komunikasi responden yang kurang mendukung. b. Gangguan/error sistem informasi yang menyebabkan tertundanya persetujuan dan penerbitan sertifikat diantaranya sertifikat kelaikan sarana	Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada periode mendatang meliputi beberapa langkah antara lain: a. Lanjutan pengembangan sistem informasi (perizinan online, sistem persetujuan terpusat/sertifikasi, lainnya) untuk mengakomodir layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai regulator perkeretaapian yang terpadu dan terintegrasi melalui Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai superapps. b. Penyiapan laporan berkala/triwulan kepada PPTB Setjen Kementerian Perhubungan untuk mempermudah koordinasi pengelolaan survei kepuasan masyarakat. Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas dan anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya: a. Penyesuaian aktivitas dan anggaran: Penyiapan alternatif pembiayaan untuk pelaksanaan kajian survei IKM pada Balai Perawatan Perkeretaapian dikarenakan alokasi anggaran untuk kajian terdampak efisiensi anggaran (diusulkan pelaksanaan secara swakelola). b. Penyesuaian penempatan jabatan/pegawai: Pelaksanaan pelatihan penggunaan bahasa isyarat untuk petugas customer service, petugas piket, petugas keamanan dan lainnya untuk mendukung layanan angkutan khususnya yang dioperasikan oleh Balai Pengelola Kereta Api. c. Penyesuaian strategi/kebijakan: Melakukan pendampingan kepada responden pada saat pengisian kuesioner survei kepuasan masyarakat.	Dit. LLAKA, Dit. Prasarana Perkeretaapian,Dit. Sarana Perkeretaapian, BTP, BPKA
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	3,740	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA)	3	36	3.71	10.31	-	-	3.79	-	102.16%	-	● Terdapat 8 unsur yang menjadi penyumbang nilai agregat IKM yaitu Informasi, Persyaratan, Prosedur/Alur, Waktu Penyelesaian, Tarif/Biaya, Sarana Prasarana, Unsur Respon, Konsultasi dan Pengaduan yang seluruhnya memperoleh Kategori Sangat Baik. ● Terdapat kategori pelayanan berupa Informasi dan Persyaratan yang memiliki nilai survei yang tinggi, yang dapat diartikan bahwa informasi terkait pelayanan izin usaha dan izin operasi perkeretaapian, serta penetapan trase sudah diketahui oleh pengguna layanan dengan baik yang didukung dengan adanya peraturan yang mendukung pelayanan tersebut sehingga dapat menjadi pedoman dan petunjuk pengguna layanan dalam mengajukan izin dan trase dalam bidang kereta api.	Upaya peningkata kinerja : ● Menjaga kualitas pelayanan dan proses bisnis sesuai dengan prosedur dan alur yang telah ditetapkan. ● Melakukan pemantauan agar survei terkait IKM di lingkungan Direktorat LLAKA dilaksanakan setiap bulan	Dit Lalu Lintas dan Angkutan KA
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	3,740	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian)	3	36	3.7	10.28	-	-	3.82	-	103.24%	-	● Pada pelaksanaan survei periode Januari s.d Agustus 2025, Direktorat Sarana secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 3,82 dalam skala 4 atau 16.72 dalam skala 17,50 dengan rincian nilai IKM: o Januari 4 dari skala 4 dengan responden sebanyak 4 orang o Februari 4 dari skala 4 dengan responden sebanyak 5 orang o Maret 3,34 dari skala 4 dengan responden sebanyak 7 orang o April 4,00 dari skala 4 dengan responden sebanyak 5 orang o Mei 4,00 dari skala 4 dengan responden sebanyak 2 orang o Juni 3,62 dari skala 4 dengan responden sebanyak 6 orang ● Terdapat 8 unsur yang menjadi nilai agregat atau rata-rata IKM pada periode Januari s.d Juni 2025 dengan memperoleh kategori Sangat Baik, mencakup: o Unsur Informasi. o Unsur Persyaratan. o Unsur Prosedur/Alur. o Unsur Waktu Penyelesaian. o Unsur Tarif/Biaya. o Unsur Sarana Prasarana. o Unsur Respon. o Unsur Konsultasi dan Pengaduan.	Upaya peningkatan kinerja : ● Sosialisasi berkelanjutan agar jumlah responden bertambah supaya hasil rata-rata capaiannya lebih representative. ● Menyediakan nomor helpdesk yang sigap dalam menjawab kebutuhan informasi pengguna layanan. ● Menciptakan konten informasi pelayanan yang menarik di media sosial. ● Melakukan telaahan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kepada pimpinan terkait konsultasi dan laporan pengaduan yang telah ditindaklanjuti. ● Memastikan pengumuman tentang informasi pelayanan mudah diakses oleh masyarakat	Dit Sarana Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	3,740	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian)	3	36	3.89	10.81	-	-	3.88	-	99.74%	-	● Realisasi capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan kategori penilaian Sangat Baik (3,88) dengan jumlah responden s.d Agustus 2025 sebanyak 27 orang ● Analisis keberhasilan didukung adanya kegiatan : o Penyelesaian proses perizinan sebanyak 19 pelayanan bidang prasarana yang telah selesai/diterbitkan terdiri dari: ? Pelayanan Perizinan Perpotongan dan/atau persinggungan jalur kereta api dengan bangunan lain sebanyak 16 Penetapan ? Pelayanan sertifikasi komponen prasarana perkeretaapian sebanyak 3 penetapan sertifikasi. o Penyesuaian aktivitas dan sebagai tahapan penerapan inovasi kinerja/Launching Aplikasi telah dilaksanakan monitoring terhadap pembangunan aplikasi Perpotongan dan persinggungan jalur kereta api dengan bangunan lain masih dilakukan penyempurnaan teknis aplikasi o Komunikasi yang baik dengan pemohon untuk memberikan asistensi terkait persyaratan dan perihal teknis serta kekurangan data teknis yang harus dilengkapi secara resmi oleh pemohon serta unit kerja sehingga penyelesaian pelayanan (perizinan dan sertifikasi) bisa selesai tepat waktu dan dilakukan pelaksanaan survey secara berkala dalam satu periode triwulan kepada para pemohon. ● Kendala dalam pelaksanaan kegiatan yakni untuk penyelesaian aplikasi pelayanan di Direktorat Prasarana Perkeretaapian masih terdapat ditemukan beberapa bug pada proses input data dan validasi data saat proses permohonan	upaya peningkatan kinerja melalui Penyesuaian aktivitas/strategi: o Akan dilakukan perbaikan beberapa bug pada aplikasi perpotongan dan/atau persinggungan jalur kereta api dengan bangunan lain; o Koordinasi dengan Setditjen Perkeretaapian dalam integrasi aplikasi sertifikasi perkeretaapian; o Aktif menyebarkan link survei kepuasan masyarakat unit kerja kepada pemohon/pengguna jasa unit kerja, menjaga komunikasi yang baik dengan pemohon, serta menjelaskan tentang tujuan dari pelaksanaan SKM; dan o Penyelesaian permohonan perizinan yang masih berproses sampai akhir periode triwulan II tahun 2025	Dit Prasarana Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	3,740	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktur Keselamatan Perkeretaapian)	3	36	3.86	10.72	-	-	3.76	-	97.41%	-	Pada bulan agustus 2025 tidak terdapat responden yang mengisi link survey yang telah disampaikan sehingga tidak terdapat nilai IKM pada buan Agustus	Melakukan pemantauan berkala terkait rata-rata penilaian IKM sehingga capaian IKM Direktorat Keselamatan Perkeretaapian mencapai target	Dit Keselamatan Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	3,740	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian)	3	36	3.86	10.72	-	-	3.85	-	99.74%	-	Kegiatan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pengguna layanan Pengujian Sarana, Prasarana dan SDM Perkeretaapian melalui survei elektronik	Memaksimalkan pelayanan yang PRIMA kepada stakeholder pengguna layanan Balai Pengujian Perkeretaapian	Balai Pengujian Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	3,740	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan)	3	36	3.58	9.94	-	-	3.58	-	100%	-	• Berdasarkan hasil survey internal yang dilakukan, sampai dengan Agustus 2025 terdapat sebanyak 1.120 responden telah ikut berpartisipasi pada kegiatan survey ini. Rata-rata skala Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Transportasi Publik LRT Sumsel sebesar 3,58 (interval 1-4) dan 89,54 (interval 1-100) dan termasuk dalam kategori Sangat Baik. • Hal ini dapat dicapai dikarenakan bantuan dari pihak internal yang selalu membantu menyebarkan link survei dan terselesaikannya atau berkurangnya aduan yang diterima di LRT Sumsel	Upaya peningkatan kinerja : • Tindak lanjut tentang pengaduan yang diberikan oleh penumpang dari hasil survei yang dilakukan di 13 stasiun LRT Sumatera Selatan. • Koordinasi dengan pihak terkait perihal perbaikan dan pemeliharaan sarana maupun prasarana yang mengalami kerusakan. • Memberikan pembinaan untuk semua petugas di stasiun agar memberikan pelayanan yang lebih kepada penumpang demi menjaga dan meningkatkan pelayanan prima di LRT Sumatera Selatan.	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 8				Realisasi Bulan 8		Realisasi Bulan 8		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	3,740	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan)	3	36	3.23	8.97	-	-	3.36	-	104.02%	-	Nilai IKM sampai dengan Agustus 3.36	• Melakukankoordinasi dengan PT. Angkasa Pura Support untuk melakukan peningkatan kualitas layanan yang ramah dan professional. • Melakukan koordinasi dengan Angkasa Pura Support selaku poenyedia jasa layanan di kereta api Makassar – Parepare untuk melakukan peningkatan kualitas layanan yang ramah dan profesional. • Memfasilitasi Layanan Pengaduan melalui Barcode yang ditempel pada Area Boarding dan Sosial Media. • Selain itu, beberapa hal yang perlu dilakukan penyesuaian terhadap strategi, kebijakan, aktivitas, anggaran, organisasi, jabatan/pegawai: o Penyesuaian Strategi/Kebijakan: Pada kerangka pendanaan Tahun 2025-2029 Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan yang nantinya akan digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis BPKA Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 terdapat kegiatan yang dapat mendukung IKK 6 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik yangdiselenggarakan BPKA Sulsel yaitu Penataan Estetika dan Lanskap Stasiun Mandai, Stasiun Rammang-rammang, dan Stasiun Barru. o Penyesuaian Aktivitas dan Anggaran: Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan menempelkan barcode yang dapat di scan oleh penumpang di masing-masing stasiun dan juga menugaskan petugas stasiun untuk menghampiri dan memberi pengarahan kepada penumpang untuk melakukan pengisian survei. o Penyesuaian Jabatan/Pegawai: Pada Seksi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana jumlah pegawai yang ditugaskan dalam mendukung pelaksanaan IKK Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan BPKA Sulsel adalah sebanyak 15-17 orang.	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PERSENTASE ON TIME PERFORMANCE (OTP) TRANSPORTASI KERETA API	%	96,100	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	97	1152	96.1	8.34	-	-	97.797	-	101.77%	-	Dengan realisasi perjalanan kereta api tepat waktu sebanyak 516.339 KA dibandingkan jumlah keseluruhan perjalanan kereta api pada periode Jan s.d Agustus Tahun 2025 sebanyak 527.972 KA, maka diperoleh realisasi persentase On Time Performance (OTP) sebesar 97,797% Beberapa faktor tercapainya target kinerja pada Tahun 2025 diantaranya: a. Terpenuhinya target perolehan on time performance pada beberapa jenis pelayanan kereta api (khususnya angkutan KA perkotaan) seperti MRT Jakarta (99,99%), LRT Sumatera Selatan (99,96%), LRT Jakarta (99,94%), LRT Jabodebek (99,66%), dan LRT Jabodebek (99,28%). b. Telah dilaksanakan evaluasi harian kinerja operasi pada jaringan jalur kereta api nasional di Kereta Api Ringan Terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, serta Kereta Api Kecepatan Tinggi Jakarta - Bandung. c. Koordinasi secara aktif dengan Badan Usaha Penyelenggara Prasarana dan Balai Teknik Perkeretaapian terhadap penyebab dan penanganan kejadian kelambatan perjalanan kereta api serta mengantisipasi potensi adanya rintang jalan. Sebagai contoh, pada masa Angkutan Lebaran dan libur Idul Adha Tahun 2025 telah dilaksanakan koordinasi teknis dengan stakeholders (PT. KAI, PT. MRT, PT. KCI, PT. KCIC) yang mencakup rencana operasi, kesiapan sarana, prasarana dan SDM termasuk identifikasi daerah rawan dan upaya preventif dan mitigasinya. d. Secara rutin melaksanakan evaluasi berkala (triwulan) terhadap realisasi perjalanan kereta api sesuai GAPEKA yang berlaku sehingga perjalanan KA dapat sesuai jadwal dan keterlambatan KA dapat diminimalisir.	Upaya peningkatan kinerja pada periode berikutnya diantaranya: a. Lanjutan pembangunan jalur ganda kereta api (jalur ganda KA elevated Medan – Binjai, Solo-Semarang, lainnya) dan peningkatan jalur/jembatan/fasilitas operasi kereta api (Jember – Kalisat, Jabodetabek, lainnya) untuk meningkatkan kapasitas lintas dan kecepatan operasional kereta api serta memudahkan pengaturan operasional kereta api agar tepat waktu; b. Pelaksanaan evaluasi dan penerbitan persetujuan perjalanan kereta api di luar GAPEKA melalui Peraturan/Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian.	
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PERSENTASE ON TIME PERFORMANCE (OTP) TRANSPORTASI KERETA API	%	96,100	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Realisasi Perjalanan KA berdasarkan GAPEKA)	103	1140	95.42	8.37	-	-	103.02	-	107.96%	-	● Realisasi kumulatif perjalanan KA penumpang dan KA barang s.d Agustus 2025 sebesar 527.972 KA dengan rincian KA Penumpang 490.351 KA dan KA Barang 37.621 KA. ● Penambahan frekuensi LRT Jabodebek yang sebelumnya diprogramkan sebanyak 158 KA, saat ini beroperasi sebanyak 366 KA saat weekday dan 270 KA saat weekend. • Penambahan frekuensi LRT Sumsel yang sebelumnya diprogramkan sebanyak 88 KA, saat ini beroperasi sebanyak 94 KA saat weekday, 102 KA saat weekend. • Pengoperasian KA Tambahan pada masa libur panjang akhir pekan selama April s.d. Juni 2025. • Telah dilakukan rapat pembahasan rencana penyesuaian perjalanankereta api di wilayah Daop 1 Jakarta dan Daop 8 Surabaya. • Telah dilaksanakan evaluasi harian kinerja operasi pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Kereta Api Ringan Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, serta Kereta Api KecepatanTinggi Jakarta - Bandung. • Telah menghadiri Rapat Koordinasi Perubahan Grafik Perjalanan Kereta Api 2025 dalam rangka Peningkatan Kecepatan Prasarana Lintas Duri-Bandara Soekarno Hatta pada tanggal 15 April 2025. • Telah dilakukan Persiapan Evaluasi Pelaksanaan Gapeka Triwulan I Tahun 2025, dan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas kereta api, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perkeretaapian pada tanggal 11 Juni 2025	Upaya peningkatan kinerja : ● Menjaga agar perjalanan kereta api sesuai dengan yang telah diprogramkan pada Gapeka dan Perjalanan di Luar Gapeka. ● Melaksanakan evaluasi pelaksanaan Gapeka secara berkala setiap 3 bulan sekali. ● Melakukan penyesuaian program perjalanan KA pada jaringan jalur KA nasional Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi dan Kereta Api Ringan Sumatera Selatan. ● Menetapkan Grafik Perjalanan Kereta Api baru setelah evaluasi pelaksanaan Gapeka pada jaringan jalur KA Nasional Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi dan Kereta Api Ringan Sumatera Selatan. ● Melakukan evaluasi dan penerbitan persetujuan perjalanan kereta api di luar Grafik Perjalanan Kereta Api oleh Dirjen Perkeretaapian.	Dit Lalu Lintas dan Angkutan KA
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PERSENTASE ON TIME PERFORMANCE (OTP) TRANSPORTASI KERETA API	%	96,100	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kalegori I dan II)	93	1140	95.02	8.34	-	-	93.2	-	98.08%	-	● Kualitas TQI Jalur Kereta Api Kategori I dan II sepanjang 5.553,676 Km yang terdiri dari Kategori I (kecepatan >100 s.d 120 Km/Jam) di wilayah Jawa dan Sumatera sepanjang 3.502,818 Km dan Kategori II (kecepatan > 80 s.d 100 Km/jam) di wilayah Jawa dan Sumatera sepanjang 2.050,858 Km ● Kegiatan Pendukung: o Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalur dan Bangunan KA; o Monitoring dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalur dan Bangun KA; dan o Pemeriksaan Jalan Rel dengan KA Ukur di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. ● Analisa kegagalan dikarenakan terjadinya kondisi perubahan cuaca ekstrim, hujan deras yang berakibat beberapa jalur kereta api mengalami banjir, longsor dan ambles sehingga mengganggu stabilitas jalan kereta api. Tindak lanjut perawatan jalur kereta api mendukung keberhasilan dalam mempertahankan atau meningkatkan kategori TQI Kategori I dan Kategori II ● Kendala/hambatan, terjadinya kondisi perubahan cuaca ekstrim, hujan deras yang berakibat beberapa jalur kereta api mengalami banjir, longsor dan ambles sehingga mengganggu stabilitas jalan kereta api	Upaya peningkatan kinerja melalui Penyesuaian aktivitas: o Akan dilakukan pengukuran TQI periode ke 2 tahun 2025 di wilayah Sumatera; o Akan dilakukan koordinasi terkait dengan kegiatan perawatan/kontrak IM dengan Balai Teknik Perkeretaapian dan PT. Kereta Api Indonesia (persero), untuk prioritas pemeliharaan petak jalan yang mengalami penurunan Kategori 3 dan Kategori 4; o Evaluasi hasil pengukuran TQI Periode II Tahun 2025 dengan Balai Teknik Perkeretaapian dan PT. Kereta Api Indonesia (persero). o Pengukuran dengan menggunakan kereta ukur secara periodik ditahun 2025 oleh PT. Kereta Api Indonesia (persero) melalui pembiayaan Infrastruktur Operation (IO) TA 2025 di Balai Teknik Perkeretaapian, sebagai fungsi pengawasan Direktorat PrasaranaPerkeretaapian melalukan pendampingan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran TA 2025 (pagu efektif)	Dit Prasarana Perkeretaapian dan Balai Teknik Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PERSENTASE ON TIME PERFORMANCE (OTP) TRANSPORTASI KERETA API	%	96,100	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Fasilitas Operasi/ Kereta Api dengan Teknologi Handai)	64	756	63.57	8.41	-	-	64.43	-	101.35%	-	● Jumlah unit persinyalan yang berbasis elektrik sebanyak 384 unit dengan jumlah unit persinyalan berbasis elektrik dan mekanik (eksisting dan rencana pembangunan fasilitas operasi elektrik pada Tahun 2025 s.d. 2029) sebanyak 596 unit. ● Kegiatan pendukung antara lain: o Bimbingan Teknis Bidang Fasilitas Operasi Kereta Api; o Jabodetabek Railway Capacity Enhancement Phase I; o Pemeriksaan dan Pengawasan Prasarana Fasilitas Operasi Kereta Api. ● Telah dilakukan audensi terkait dokumen teknis penggunaan kontainer untuk Bangunan Equipment Room (ER) di wilayah Divre III Palembang serta dilakukan koordinasi intensif dengan PT. Kereta Api Indonesia (persero) proses Perizinan Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum berupa pembangunan sistem persinyalan elektrik dan intermediate blok Segmen I Lintas Lahat – Kertapati pada lintas Prabumulih Simpang. ● Telah dilakukan sinkronisasi data fasilitas operasi kereta api antara prasarana perkeretaapian dengan Balai Teknik Perkeretaapian ● Kendala/hambatan berupa justifikasi teknis dari PT. KAI terkait Bangunan ER dengan menggunakan kontaine	Upaya peningkatan kinerja melalui Penyesuaian aktivitas/strategi maupun penggunaan anggaran melalui kegiatan: o Koordinasi dengan PT. KAI melalui surat penyampaian hasil asistensi gambar teknis kepada PT. KAI untuk dapat diproses lanjut; o Evaluasi data kinerja bidang fasilitas operasi kereta api; o Evaluasi Perjanjian Kinerja serta rencana aksi Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025.	Dit Prasarana Perkeretaapian dan Balai Teknik Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PEMENUHAN TARGET ANGKUTAN KERETA API	%	19,000	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	9	118	13.17	11.16	-	-	9.339	-	70.91%	-	Realisasi kinerja diperoleh dari penjumlahan Persentase Pemenuhan Target Angkutan Penumpang KA+ Persentase Pemenuhan Target Angkutan Barang KA, dengan rincian : a. Persentase pemenuhan target angkutan penumpang KA diperoleh dari realisasi angkutan penumpang kereta api sebanyak 262.891.369 penumpang pada s.d Agustus Tahun 2025 dibandingkan target angkutan penumpang kereta api berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029 sebanyak 2.798.554.050 penumpang, maka diperoleh nilai sebesar 4,697% (pembobotan 50%). b. Persentase pemenuhan target angkutan barang diperoleh dari realisasi angkutan barang kereta api sebanyak 33.321.703 ton s.d Agustus 2025 Tahun 2025 dibandingkan target angkutan barang kereta api berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029 sebanyak 358.912.917 ton, maka diperoleh nilai sebesar 4,642% (pembobotan 50%). Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja persentase pemenuhan target angkutan kereta api diantaranya: Angkutan Penumpang: a. Persentase realisasi angkutan penumpang terhadap target penumpang pada Triwulan II Tahun 2025 dapat melebihi taget yaitu sebesar 105%, dengan uraian yang cukup siginifikan: 1) Realisasi angkutan penumpang KRL Jabodetabek pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar 166.432.692 penumpang dengan rata-rata penumpang weekday sebesar 1.032.790 penumpang/hari. 2) Realisasi angkutan penumpang kereta cepat Jakarta - Bandung pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar 2.936.345 penumpang dengan rata-rata penumpang sebesar 16.250 penumpang/hari; 3) Realisasi angkutan penumpang LRT Jabodebek pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar 13.040.406 penumpang dengan rata-rata penumpang weekday sebesar 93.471 penumpang/hari. b. Penyelenggaraan angkutan perintis di lingkungan Ditjen Perkeretaapian didukung juga dengan relaksasi anggaran sesuai program mencakup: ? 1) KA Cut Meutia (Muara Satu - Kuta Blang) telah berjalan dengan kontrak Nomor KA.204/1/1/BTP-MDN/2025 tanggal 8 April 2025 dan jumlah penumpang periode Januari s.d Juni 2025 sebanyak 26.929 penumpang; 2) KA Lembah Anai (Lubuk Alung - Kayu Tanam) telah berjalan dengan kontrak Nomor KA.204/1/5/BTP-PDG/2025 tanggal 6 Mei 2025 dan jumlah penumpang periode Januari s.d Juni 2025 sebanyak 51.116 penumpang; 3) KA Bathara Kresna (Purwosari – Wonogiri) telah berjalan dengan kontrak Nomor 001/KONT-PERINTIS/BTP-SMG/IV/2025 tanggal 8 April 2025 dan jumlah penumpang periode Januari s.d Juni 2025 sebanyak 93.903 penumpang; 4) LRT Sumatera Selatan telah berjalan dengan kontrak Nomor 01/KP-LRT/BPKAR-SS/IV/2025 tanggal 8 April 2025 dan jumlah penumpang periode Januari s.d Juni 2025 sebanyak 2.227.144 penumpang; 5) KA Makassar-Parepare telah berjalan dengan kontrak Nomor PL.107/1/2/P7-BPKASS/2025 tanggal 2 Juni 2025 dan jumlah penumpang periode Januari s.d Juni 2025 sebanyak 149.019 orang. c. Layanan angkutan penumpang membaik dapat dilihat dengan peningkatan On Time Performance (OTP) pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar 97,80% atau meningkat sebesar 0,39% dibanding periode Triwulan I Tahun 2025 sebesar 97,41%. d. Penambahan sarana KRL baru untuk layanan KRL Jabodetabek didukung juga dengan pelaksanaan inspeksi, pengujian dan sertifikasi terhadap KRL baru pengadaan PT. KAI sebanyak 11 trainset. e. Dukungan penyelenggaraan PSO termasuk adanya paket stimulus transportasi kereta api berupa diskon 30% pada momen libur sekolah (5 Juni - 31 Juli 2025) untuk 12 KA ekonomi stainless steel new generation pada keberangkatan stasiun antara lain: 1) KA Progo relasi Lempuyangan - Pasarsenen (PP); 2) KA Lodaya relasi Solo Balapan - Bandung (PP); 3) KA Lodaya Tambahan relasi Solo Balapan - Bandung (PP); 4) KA Bogowonto relasi Lempuyangan - Pasarsenen (PP); 5) KA Tambahan LPN - PSE relasi Lempuyangan - Pasarsenen (PP); 6) KA Mataram relasi Solo Balapan - Pasarsenen (PP); 7) KA Batavia relasi Solobalapan - Gambir (PP); 8) KA Jaka Tingkir relasi Solo Balapan - Pasarsenen (PP); 9) KA Senja Utama Solo relasi Solo Balapan – Pasarsenen; 10) KA Tambahan PSE - SLO relasi Solo Balapan - Pasarsenen (PP); 11) KA Majapahit relasi Pasarsenen - Malang (PP) via Sragen dan Solo Jebres; 12) KA Gaya Baru Malam Selatan relasi Pasar Senen - Surabaya Gubeng (PP). f. Beberapa kegiatan pendukung berupa kegiatan peningkatan stasiun kereta api Tahun 2025 dengan tujuan mendukung peningkatan layanan angkutan penumpang, diantaranya: 1) Peningkatan Stasiun Rangkasbitung dengan progres 84,71%; 2) Peningkatan Stasiun Tanah Abang Tahap I telah selesai dan telah dioperasikan pada 29 Juni 2025. Angkutan Barang: a. Realisasi angkutan barang pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar 17.262.808 ton mengalama peningkatan apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada Tahun 2024 dan dibandingkan dengan program/target pada Triwulan II Tahun 2025; b. Meningkatnya permintaan volume barang yang diangkut pada Triwulan II dibsanding periode sebelumnya khususnya pada angkutan batubara, BBM dan pupuk; c. Peningkatkan frekuensi perjalanan kereta api barang serta adanya penambahan gerbong khusus terutama di wilayah Sumatera Bagian Selatan.	Upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada periode mendatang diantaranya: a. Percepatan penyelesaian kegiatan peningkatan stasiun kereta api Rangkasbitung dalam upaya peningkatan layanan angkutan penumpang, serta monitoring pemanfaatan Stasiun Tanah Abang yang telah beroperasi; b. Lanjutan pelaksanaan pengujian dan sertifikasi terhadap hasil pengadaan sarana KRL baru oleh badan usaha untuk mendukung peningkatan kapasitas layanan kereta api penumpang khususnya di Jabodetabek; c. Koordinasi intensif untuk penyelesaian pengujian dan sertifikasi terhadap kegiatan peningkatan prasarana yang dilaksanakan badan usaha (fasilitas operasi, jalur dan bangunan) khususnya di wilayah Sumatera Bagian Selatan dalam rangka mendukung peningkatan kehandalan dan kapasitas perjalanan kereta api barang. Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas dan anggaran diantaranya: a. Penyesuaian aktivitas dan anggaran: Usulan relaksasi anggaran untuk mendukung kelanjutan layanan kereta api yang dikelola Balai Pengelola Kereta Api (diantaranya di wilayah BPKA Sulawesi Selatan berupa perawatan 14 Stasiun, OCC dan Gudang Pekkae). b. Penyesuaian/Penataan/Refocusing Organisasi: Pengoptimalan Satpel di masing-masing wilayah Balai Teknik Perkeretaapian untuk pengawasan penyelenggaraan angkutan penumpang dan barang sesuai standar pelayanan minimum. c. Penyesuaian strategi/kebijakan: 1) Koordinasi dan berpartisipasi aktif dalam penyusunan rancangan Perpres Penguatan Logistik Nasional Tahun 2025-2029; 2) Integrasi data angkutan kereta api yang update dan valid untuk peningkatan pengawasan dalam sistem yang terintegrasi (Strategi Kemenhub, Portal Layanan DJKA).	Dit Lalu Lintas dan Angkutan KA

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 8				Realisasi Bulan 8		Realisasi Bulan 8		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	%	100,000	Program Dukungan Manajemen (Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian, Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian, Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian, Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian & Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretapian)	110	379	35.505	9.37	463.089.630.000	10.26	110.674	262.155.475.929	311.71%	56.61%	Persentase pencapaian kinerja tata kelola pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian diperoleh dari rata-rata dari persentase tingkat pencapaian kinerja yang mencakup Nilai Evaluasi AKIP, Nilai Kinerja Anggaran, Realisasi PNBP Bidang Perkeretapaian dan Indeks Profesional ASN, progress s.d Agustus per masing-masing komponen sebagai berikut: a. Nilai SAKIP Ditjen Perkeretapian sesuai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 pada Direktorat Jenderal Perkeretapian sebesar 83,94 b. NKA s.d Agustus 2025 sebesar 41,35 c. Pencapaian Realisasi PNBP dengan progress realisasi kinerja sebesar 148,58% yang diperoleh dari perbandingan antara realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perkeretapian sebesar Rp1.851.785.635.218 ,00 dengan target Tahun 2025 sebesar Rp1.246.326.325.000 d. Tingkat pencapaian Indeks Profesional ASN dengan progress masih dalam upaya peningkatan nilai diantaranya dengan pemenuhan kebutuhan data secara mandiri untuk komponen kompetensi dan kinerja melalui aplikasi SIK oleh masing-masing pegawai serta pemutakhiran data pada aplikasi SIASN BKN oleh admin masing-masing unit kerja. Secara pararel juga dilakukan upaya peningkatan kompetensi pegawai melalui pendidikan/pelatihan/workshop baik yang dilaksanakan mandiri oleh Setditjen/Direktorat teknis maupun lembaga lain, serta peningkatan disiplin dan kinerja pegawai secara berkala oleh pimpinan	Beberapa upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada periode mendatang diantaranya: a. Menindaklanjuti hasil evaluasi implementasi SAKIP tingkat Kementerian Perhubungan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan untuk kemudian menjadi acuan dalam finalisasi penilaian pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian; b. Meningkatkan penyerapan anggaran unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan percepatan penyelesaian kegiatan/output yang telah diprogramkan pada Tahun 2025 serta pemenuhan readiness criteria sesuai ketentuan; c. Koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk penerapan Standar Biaya Keluaran pada Tahun 2025 serta pengusulan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026 (SBKU dan SBKK) sebagaimana diatur pada PMK Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2025; d. Lanjutan penyelesaian Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk koordinasi dengan KPKNL setempat untuk menindaklanjuti usulan sewa aset; e. Lanjutan pembinaan ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian mencakup sosialisasi/workshop/bimbingan teknis terkait peningkatan disiplin dan kinerja kepegawaian implementasi penilaian kinerja pegawai dan organisasi sesuai kebijakan Kementerian PANRB terbaru. Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas dan anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya: a. Penyesuaian aktivitas dan anggaran: 1) Koordinasi intensif dengan Kemenkeu dan Setjen Kemenhub terkait usulan relaksasi anggaran khususnya untuk mendukung peningkatan keselamatan perkeretaapian; 2) Meningkatkan ketepatan revisi DIPA dan akurasi Halaman III DIPA. b. Penyesuaian organisasi/penempatan pegawai: 1) Penyusunan rencana pengembangan karier pegawai berbasis kompetensi; 2) Penempatan pegawai yang kompeten pada unit pengelola anggaran/keuangan dan pengelola kepegawaian untuk mendukung peningkatan kinerja termasuk kualitas data dan pelaporan berkala. c. Penyesuaian strategi/kebijakan: Dukungan finalisasi dan penetapan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 tingkat Kementerian Perhubungan untuk selanjutnya menjadi acuan pada tingkat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, serta penyempurnaan terhadap konsep Keputusan Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan untuk unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna mengakomodir perubahan-perubahan terkait komponen penilaian sesuai pembahasan/kebijakan terkini.	
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	%	100,000	Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pencapaian Target Regulasi/Legislasi (Jumlah Rancangan Dan Peraturan Perundangan) Di Bidang Perkeretaapian)	-	110	10	9.09	-	-	-	-	-	-	Dalam rangka pemenuhan kebutuhan legislasi melalui peraturan perundang-undangan bidang perkeretaapian, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah berkoordinasi dengan seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam kegiatan penyusunan dan/atau revisi terkait peraturan/regulasi guna pelaksanaan yang lebih efektif dan efisien. Penyusunan dilaksanakan secara berjenjang dengan pembahasan dengan seluruh pihak terkait (Biro Hukum, Direktorat Teknis, Kemenkumham, Sekretariat Negara, operator, dan lainnya), termasuk dalam pelaksanaan harmonisasi dengan peraturan perundangan lainnya. Dalam proses penyusunan dan penerbitan regulasi, saat ini terdapat kendala/hambatan yang cukup signifikan diantaranya substansi teknis pada rancangan regulasi belum siap dan masih membutuhkan kajian/pembahasan lanjutan, kebutuhan keterlibatan Kementerian/Lembaga lain, kendala sinkronisasi jadwal pembahasan/koordinasi, serta adanya efisiensi anggaran yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pendukung (termasuk pembahasan menjadi terbatas melalui daring namun belum optimal). Hal ini juga disebabkan oleh faktor eksternal seperti padatnya agenda nasional dan banyaknya regulasi yang sedang menunggu pengesahan.a. Nilai SAKIP Ditjen Perkeretaapian sesuai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar 83,94 b. NKA s.d Agustus 2025 sebesar 41,35 c. Pencapaian Realisasi PNBP dengan progress realisasi kinerja sebesar 148,58% yang diperoleh dari perbandingan antara realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar Rp1.851.785.635.218 ,00 dengan target Tahun 2025 sebesar Rp1.246.326.325.000 d. Tingkat pencapaian Indeks Profesional ASN dengan progress masih dalam upaya peningkatan nilai diantaranya dengan pemenuhan kebutuhan data secara mandiri untuk komponen kompetensi dan kinerja melalui aplikasi SIK oleh masing-masing pegawai serta pemutakhiran data pada aplikasi SIASN BKN oleh admin masing-masing unit kerja. Secara pararel juga dilakukan upaya peningkatan kompetensi pegawai melalui pendidikan/pelatihan/workshop baik yang dilaksanakan mandiri oleh Setditjen/Direktorat teknis maupun lembaga lain, serta peningkatan disiplin dan kinerja pegawai secara berkala oleh pimpinan	1. Koordinasi intensif dengan Biro Hukum terkait percepatan pelaksanaan pengundangan peraturan yang sudah dilakukan harmonisasi serta rancangan peraturan perundangan yang menunggu pelaksanaan harmonisasi dengan Kementerian Hukum; 2. Percepatan pembahasan dan koordinasi dengan Direktorat teknis serta stakeholder lainnya (Kementerian/Lembaga lainnya, Badan Kebijakan Transportasi, akademisi, lainnya) untuk penyelesaian substansi teknis pada rancangan peraturan perundangan yang disusun.	Setditjen Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Nilai	100,000	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian (Indeks Profesional ASN)	84	89	-	-	-	-	84.32	-	-	-	Berdasarkan perolehan nilai sementara atas indeks profesional ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian (posisi 1 September 2025) sebesar 84,32. Adapun rincian nilai per-kriteria antara lain kriteria kualifikasi nilai 23,48 dari 25, kriteria kompetensi nilai 30,26 dari 40, kriteria kinerja nilai 26,24 dari 30, dan kriteria disiplin nilai 5,00 dari 5,00. Adapun 2 dari 4 kriteria masih bernilai rendah yaitu kriteria kompetensi dan kriteria kinerja. Beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut antara lain: 1. Terdapat pegawai yang belum melakukan "Terima Penilaian" pada aplikasi e-Kinerja Kemenhub terhadap penilaian kinerja individu Tahun 2024 sehingga data kinerja ASN belum terkonfirmasi dan nilai menjadi rendah (nol); 2. Terdapat pegawai yang belum melakukan unggah/upload data kompetensi Tahun 2024 berupa sertifikat/bukti dukung lain dari keikutsertaan pendidikan/pelatihan/bimtek/sosialisasi/pelatihan/lainnya ke aplikasi SIK Kemenhub sehingga mempengaruhi rendahnya nilai kompetensi; 3. Terdapat kendala dalam pelaksanaan sinkronisasi data dari aplikasi SIK ke aplikasi SIASN BKN (gagal post data SKP/error); 4. Terdapat pegawai yang seharusnya tidak masuk dalam penilaian IP ASN karena pegawai tersebut bukan lagi menjadi bagian dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian (resign, hukuman disiplin, dll). Kendala tersebut sudah disampaikan kepada Biro SDM dan Organisasi guna dilakukan perubahan status kepegawaian pada data BKN (menjadi non-aktif). Namun demikian, secara berkala telah dilakukan beberapa upaya guna meningkatkan indeks profesional ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui himbauan kepada seluruh ASN di seluruh unit kerja baik secara formal dan informal diantaranya: 1. Penyampaian hasil evaluasi sistem merit terkait manajemen kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagaimana surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor KP.406/1/2/K1/DJKA/2025 tanggal 28 Mei 2025 guna pemutakhiran data kinerja pada aplikasi e-Kinerja serta monitor pengisian data indeks profesional ASN Tahun 2025; 2. Himbauan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk melakukan pemutakhiran data kepegawaian pada aplikasi SIK guna peningkatan kualitas data ASN melalui surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor KP.001/1/10/K1/DJKA/2025 tanggal 23 Juni 2025 perihal Pemutakhiran Data Kepegawaian pada Sistem Informasi Kepegawaian (SIK); 3. Penyampaian hasil monitoring penilaian indeks profesional ASN kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara berkala setiap bulan; 4. Melakukan kegiatan evaluasi penerapan aturan kepegawaian (disiplin pegawai, kode etik, regulasi hari dan jam kerja, ketentuan cuti, tugas belajar, dll) secara langsung/on site di lokasi (Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan, BTP Surabaya dan Balai Pengujian Perkeretaapian) guna peningkatan komponen/kriteria disiplin pada penilaian IP ASN periode berikutnya; 5. Koordinasi dengan admin SIK untuk pemutakhiran data kompetensi dan kinerja termasuk melakukan pendampingan dan melaporkan ke unit kerja terkait apabila terdapat kendala dalam proses sinkronisasi.	1. Lanjutan pembinaan ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian mencakup sosialisasi/bimbingan teknis terkait isu-isu kepegawaian (disiplin pegawai, pembinaan keluarga,kode etik, dan lainnya). 2. Pengelolaan jenjang karir terkait jabatan fungsional tertentu bidang perkeretaapian melalui pelaksanaan pendidikan/pelatihan/bimbingan teknis/workshop/uji kompetensi kenaikan jenjang/perpindahan jabatan dari jabatan lain ke jabatan fungsional perkeretaapian yang dibutuhkan untuk mendukung kompetensi.	Setditjen Perkeretaapian
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Nilai	100,000	Tersedianya Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal (Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian)	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	Hingga akhir bulan Agustus 2025, belum dilakukan penilaian terkait tingkat kematangan layanan publik berbasis elektronik. Adapun beberapa hal yg sudah dilakukan s.d Agustus 2025 sebagai berikut: 1. Pelaksanaan survei evaluasi kualitas penggunaan (menggunakan indikator pada ISO/IEC 25010:2023) dan kebutuhan pengembangan Portal Layanan dan Data (PLD) Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan responden seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna meningkatkan kualitas layanan digital dan tata kelola data yang terintegrasi. 2. Rapat Peningkatan Kesadaran Keamanan Data dan Informasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan mengundang narasumber Pusdatin Kementerian Perhubungan dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 3. Koordinasi dan tindak lanjut perbaikan atas kejadian insiden keamanan yang temuan Pusdatin Kementerian Perhubungan terkait hasil forensik digital/keamanan pada Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. 4. Koordinasi dan monitoring dengan Pusdatin Kementerian Perhubungan terkait rekomendasi hasil clearance terhadap usulan kegiatan TIK Tahun 2025 sesuai dengan arsitektur pemerintah digital dan kebijakan penyederhanaan aplikasi. 5. Pembahasan laporan pendahuluan dan progres pengembangan Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai SuperApps yang dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Teknis dan Balai di lingkungan Ditjen Perkeretaapian. 6. Koordinasi dan pendampingan terkait pelaksanaan User Acceptance Test (UAT) serta Vulnerability Assessment (VA) untuk aplikasi/sistem informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. 7. Koordinasi pengelolaan domain dan penggunaan server di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. 8. Koordinasi pemenuhan data dukung usulan kegiatan TIK Tahun 2026 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna tahapan reviu tingkat II oleh Pusdatin Kementerian Perhubungan dan tahapan clearance oleh Tim SPBE Nasional.	1. Lanjutan pengembangan Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai superapps Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang terintegrasi dengan penambahan fitur/modul layanan sesuai prioritas serta penyesuaian arsitektur aplikasi. 2. Pengembangan Modul Layanan Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian guna meningkatkan layanan perizinan serta mendukung optimalisasi layanan pada Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian. 3. Peningkatan penanganan keamanan informasi dari ancaman siber dengan pelaksanaan perbaikan celah keamanan (remediasi) berdasarkan hasil forensik/temuan insiden. 4. Penyusunan tools/pengukuran Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian mengacu pada Indeks Pemerintah Digital, khususnya pada aspek pengukuran kepuasan pengguna layanan digital pemerintah yang mencakup tingkat kepuasan pengguna, tingkat pemenuhan kualitas layanan digital, dan tingkat pemanfaatan layanan digital. 5. Pelaksanaan reviu tingkat I terhadap usulan kegiatan TIK Tahun 2026 sesuai dengan Rencana Induk/Roadmap TIK, Arsitektur dan Peta Rencana Pemerintah Digital Kementerian Perhubungan serta mengacu rencana penataan domain dan simplifikasi/penyederhanaan aplikasi.	Setditjen Perkeretaapian

Jakarta, 2025

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,

ALLAN TANDIONO

NIP 198801182025211023

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Bulan: September, Tahun: 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 9				Realisasi Bulan 9		Realisasi Bulan 9		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	Rasio	0,460	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	-	-	0.46	-	609.919.643.250	11.54	0.46	224.614.611.183	100%	36.83%	Pada Tahun 2025 belum ditargetkan penambahan konektivitas dikarenakan belum terdapat rencana penambahan pembangunan/perpanjangan prasarana perkeretaapian baru menghubungkan PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional/simpul transportasi yang selesai dan beroperasi pada Tahun 2025. Selain itu, kegiatan yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2025 mayoritas kegiatan lanjutan yang fokus pada pengembangan kapasitas/kehandalan prasarana perkeretaapian eksisting. Hal tersebut didorong juga dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang membatasi ruang fiskal kegiatan pembangunan prasarana perkeretaapian baru yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Pada Triwulan II Tahun 2025, terdapat beberapa kegiatan pendukung konektivitas transportasi perkeretaapian yang berprogres antara lain: a. Konektivitas PKW Lhokseumawe (Kecamatan Muara Satu) dengan kegiataan pendukung berupa pembangunan jalur kereta api lintas Krueng Geukeuh – Muara Satu telah selesai 100% berupa pembangunan jalur KA sepanjang 8 km'sp dengan lebar spoor 1.435 mm. Posisi Agustus Tahun 2025, telah dilakukan tindak lanjut terhadap hasil temuan pengujian. Saat ini masih diperlukan pengujian kembali, BTP Medan sudah bersurat kepada Balai Pengujian pada tanggal 28 Mei 2025. b. Konektivitas PKW Sawahlunto didukung dengan kegiatan reaktivasi jalur kereta api Sawahlunto – Muarokalaban, masih proses koordinasi dengan PT. KAI dan Pemerintah Daerah Sawahlunto guna percepatan penyelesaian dokumen teknis untuk persyaratan pengujian prasarana perkeretaapian. c. Dukungan konektivitas di wilayah IKN berupa penyiapan dokumen perencanaan teknis (Studi Penyusunan Dokumen Identifikasi Jalur KA Perkotaan yang menghubungkan Wilayah Perencanaan KIPP-IKN Barat - IKN Timur 1 - IKN Timur 2 - IKN Utara dan yang menghubungkan Wilayah Perencanaan IKN Barat - IKN Timur 2) serta penyelenggaraan subsidi angkutan perintis Trem Otonom di IKN tidak dapat dilaksanakan karena terdampak efisiensi anggaran (blokir). d. Kegiatan lanjutan pembangunan prasarana perkeretaapian untuk mendukung pengoperasian KA Makassar - Pare Pare antara Mandai –Palanro yang bersumber dari pembiayaan SBSN (MYC) dengan progres 95,91%. e. Kegiatan lanjutan pembangunan jalur KA Rantauprapat – Pondok S5 – Kotapinang masih dalam tahap persiapan pengoperasian KA perintis segmen Rantauprapat – Pondok S5 (penyelesaian sertifikasi kelaikan/penetapan perencanaan teknis). Sedangkan untuk segmen lanjutan Pondok S5 – Kota Pinang pada tahun 2024 telah selesai pengadaan lahan melalui anggaran LMAN (progress 93,30% yaitu sebanyak 710 dari 762 bidang telah dibebaskan). Pada tahun 2025, terhadap bidang yang belum dibebaskan diperlukan anggaran DPPT dan penilaian ganti kerugian kembali terhadap masa waktu penetapan lokasi pengadaan tanah yang telah habis. f. Pekerjaan utilitas dan penyempurnaan lintas Bandar Tinggi-Kuala Tanjung untuk mendukung konektivitas Pelabuhan Kuala Tanjung pada Tahun 2024 sudah selesai dilaksanakan, dimana terdapat kendala dalam pembebasan lahan untuk frontage road yang sebelumnya direncanakan pada 532 bidang menjadi 479 bidang. Untuk itu, direncanakan pengusulan kembali pekerjaan frontage road menyesuaikan kemampuan fiskal yang dimiliki Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2026. Sehingga pada tahun 2025 diperlukan: 1) KA Bandar Tinggi – Kuala Tanjung diperlukan usulan anggaran buka blokir BOBP untuk biaya panjar perkara pada 15 bidang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Kisaran pada lintasan segmen I. Selain itu 2 bidang milik Pemerintah Kabupaten Batu Bara menunggu surat BPN Asahan untuk pembuatan penetapan lokasi; 2) Pada segmen II KA Bandar Tinggi – Kuala Tanjung terdapat pengusulan anggaran DPPT dan penilaian ganti kerugian kembali terhadap masa waktu penetapan lokasi pengadaan tanah yang telah habis. g. Kegiatan pembangunan MRT Jakarta East-West Phase I untuk mendukung konektivitas di wilayah perkotaan Jabodetabek, masih dalam tahap persiapan pengadaan lahan oleh Pemerintah Daerah serta pelelangan kegiatan pendukung/konsultan tender of assistance) dengan progres pada akhir Maret 2025 telah selesai tahap verifikasi dokumen DPPT oleh Kantor Wilayah BPN Jawa Barat. Selain itu, juga terdapat beberapa usulan kegiatan pembangunan perkeretaapian mendukung konektivitas yang didorong dengan skema pembiayaan alternatif namun masih dalam tahap koordinasi awal dan penyiapan dokumen perencanaan teknis, diantaranya pengembangan layanan kereta api feeder Stasiun MRT Lebak Bulus dan Stasiun LRT Harjamukti, pengembangan jalur KA mendukung Pelabuhan Patimban, pengembangan jalur KA mendukung BIJB Kertajati, serta reaktivasi jalur KA beberapa segmen di Provinsi Jawa Barat.	a. Monitoring berkala progres kegiatan pendukung konektivitas perkeretaapian, diantaranya pemenuhan readiness criteria salah satunya dokumen perencanaan yang masih berproses pada Direktorat teknis diantaranya b. Penyelesaian pembangunan prasarana mendukung pengoperasian KA Makassar - Pare Pare, serta persiapan pembangunan MRT Jakarta East – West. c. Lanjutan beberapa kegiatan pendukung rasio konektivitas, diantaranya Pembangunan Jalur Kereta Api Antara Medan-Binjai, Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Pada Jalur Ganda KA Antara Padalarang-Bandung Lintas Bogor-Yogyakarta Tahap II, Pembangunan Jalur Ganda Solo - Semarang Fase I (Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso) yang masih dapat dilaksanakan pada Tahun 2025. d. Mendorong kegiatan pendukung konektivitas perkeretaapian melalui pembiayaan alternatif/KPBU/pemanfaatan aset/konsesi/lainnya diantaranya dengan pelaksanaan investor gathering. e. Peninjauan kembali terhadap titik-titik konektivitas perkeretaapian yang dimungkinan konektivitas dengan simpul transportasi seperti terminal tipe A dan lain-lain. f. Lanjutan kegiatan perencanaan teknis terhadap kegiatan yang menundukung indikator Rasio Konektivitas Antar Wilayah salah satunya penyusunan Policy Brief Studi Kelayakan Jalur KA akses menuju Pelabuhan Makassar New Port (MNP) dan menuju Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin.	Dit. Prasarana Perkeretaapian, Dit. Lalu Lintas dan Angkutan KA, Dit Sarana Perkeretaapian dan Balai Teknik di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	%	0,460	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Jaringan Jalur KA dan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian)	11	74	11.53	15.58	-	-	11.54	-	100.09%	-	Target jumlah dokumen tahun 2025 adalah sebanyak 6 dokumen dan realisasi s.d TW 3 antara lain : 1. Dokumen Penetapan Trase MRT Jakarta Fase 2B (Kota-Ancol); 2. Dokumen Hasil Evaluasi atas Permohonan Penyesuaian Alinyemen Trase MRT East West Line Phase 1 Stage 1 3. Dokumen Hasil Evaluasi Perubahan Nama Stasiun sesuai dengan Surat Direktur LLAKA Nomor KA.107/1/1/K2/DJKA/2025 perihal Perubahan Nama Stasiun Paloh menjadi Stasiun Muara Satu	a.Melakukan koordinasi intens dengan stakeholder meliputi pembahasan laporan dan pelaksanaan rapat koordinasi teknis syudi kelayakan sesuai jadwal yang telah direncanakan sampai tersusun policy brief; b.Melakukan pengawasan dan koordinasi dengan stakeholder terkait evaluasi dokumen permohonan dalam pengusulan penetapan dan persetujuan trase kereta api.	Dit Lalu Lintas dan Angkutan KA
MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	%	0,460	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (Persentase Penyelesaian Kerjasama Pengembangan Infrastruktur Perkeretaapian)	12	92	12	13.04	-	-	12	-	100%	-	Realisasi kegiatan s.d TW 3 sebagai berikut : 1. Dokumen Evaluasi atas Permohonan Pembangunan Stasiun Bekasi Ekstensi di TOD Hub Summarecon Bekasi 2. Dokumen Rancangan Keputusan Menteri tentang Penetapan PT KAI sebagai Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum berupa Stasiun di KM 57+00 - KM 57+400 Antara Stasiun Tenjo - Stasiun Tigaraksa 3. Draft Perjanjian Konsesi atas Permohonan Pembangunan Stasiun Bekasi Ekstensi di TOD HUB Summarecon Bekasi	Melakukan koordinasi bersama stakeholder melalui pembahasan teknis dan hukum secara paralel untuk memastikan pencapaian target, dengan menyiapkan dukungan legal dan teknis seperti Surat Keterangan, Draft Perjanjian dan Reviu BPKP.	Dit Lalu Lintas dan Angkutan KA
MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	%	0,460	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana)	63	742	63.57	8.57	-	-	63.57	-	100%	-	Sampai dengan Triwulan III, terdapat beberapa dokumen perencanaan yang telah disahkan, diantaranya yaitu: 1. BED St. Padalarang Telah dilakukan pengesahan pada 30 September 2025 2. DED Penanganan Daerah Rawan Jalur Kereta Api di KM.227+300/500, KM.228+100/300, KM.237+100/200, KM.240+600./900, KM.243+700 - KM.244+300 Lintas Bandung - Banjar , telah dilakukan pengesahan pada bulan September 2025 3. DED Peningkatan Jembatan Kereta Api Lintas Lubuk Alung - Kayu Tanam Telah dilakukan pengesahan pada bulan Juli 2025	1. BED St. Padalarang - Dari hasil pengesahan BED St. Padalarang akan disampaikan ke BTP Kelas I Bandung 2. BED Beautifikasi St. Klaten Tahap II - Akan disampaikan hasil perbaikan BED Beautifikasi St. Klaten Tahap II ke Direktorat Prasarana Perkeretaapian untuk dilakukan proses pengecekan secara berjenjang dan akan dilakukan asistensi pada bulan Oktober 3. DED Penanganan Daerah Rawan Jalur Kereta Api di KM.227+300/500, KM.228+100/300, KM.237+100/200, KM.240+600./900, KM.243+700 - KM.244+300 Lintas Bandung - Banjar - Dari hasil pengesahan DED Penanganan Daerah Rawan Jalur Kereta Api Lintas Bandung - Banjar akan disampaikan ke BTP Kelas I Bandung 4. DED Balai Yasa KRL Cicalengka - Akan dilakukan pengawasan terhadap proses perbaikan gambar desain Gedung Depo oleh konsultan setalah dilakukan pemeriksaan	Dit Prasarana Perkeretaapian
MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	%	0,460	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian)	-	792	66.67	8.42	-	-	-	-	-	-	Tidak terdapat kegiatan dalam DIPA POK TA 2025, capaian berdasarkan baseline capaian renstra 2020-2024	Memantau pengesahan rekomendasi kebijakan yang sudah selesai tahun sebelumnya	Dit Sarana Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (pengujian dan sertifikasi kelaikan sarana, prasarana dan kompetensi SDM, perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara, pembinaan dan pengaturan/pengendalian/pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian)	99	1200	100	8.33	2.037.139.305.750	11.54	99.02	129.134.257.807	99.02%	6.34%	Realisasi perjalanan kereta api pada bulan Januari – Agustus Tahun 2025 dengan jumlah keberangkatan sebanyak 712.772 Kereta Api, sehingga Tingkat Keselamatan yang diperoleh pada Triwulan III tahun 2025 sebesar 99,02%	a. Penanganan daerah rawan di wilayah Sumatera Selatan : • Pada Divre IV Tanjung Karang akan dilakukan pergantian Rel oleh PT.KAI menggunakan Rel BMN sebanyak 2.000 Batang (25 km'sp) dan pengadaan oleh KAI sebanyak 704 Batang (8,8 km'sp) dengan mekanisme pelaksanaan kegiatan penggantian oleh PT.KAI • Penanganan daerah rawan oleh BTP Kelas II Palembang sebanyak 5 titik di lokasi Divre III Palembang dan 6 titik di lokasi Divre IV Tanjungkarang. b. Koordinasi dengan KNKT, BTP Palembang, dan PT KAI (Persero) Divre 3 Palembang guna mengumpulkan data-data yang diduga berkontribusi terhadap penyebab kecelakaan anjlokan KA di emplasemen Banjarsari. Data-data yang telah diperoleh saat ini masih dalam proses pemeriksaan untuk memastikan apakah data tersebut merupakan faktor penyebab awal terjadinya kecelakaan atau justru merupakan dampak dari kecelakaan tersebut. c. Percepatan pelaksanaan kegiatan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian tahun 2025. d. Kegiatan roadshow pemutakhiran, sinkronisasi data dan tinjauan lapangan dalam penerapan aplikasi e-perlintasan pad abulan Juli s.d Agustus 2025 e. Lanjutan pelaksanaan audit SMKP terhadap badan usaha perkeretaapian termasuk memastikan operator perkeretaapian telah melakukan identifikasi bahaya dan upaya pengendalian risiko secara menyeluruh.	• Dit. Keselamatan Perkeretaapian, Dit. Prasarana Perkeretaapian, Dit. Sarana Perkeretaapian, Balai Pengujian Perkeretaapian dan Balai Teknik di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian)	-	567	47.67	8.41	-	-	-	-	-	-	Realisasi bulan September sebesar 48.83% dengan realisasi sertifikasi sampai dengan bulan September tahun 2025 yaitu : 1. Subdirektorat Kelaikan Jalur dan Bangunan KA dengan 12 sertifikat (Uji Pertama sebanyak 8 sertifikat dan Uji Komponen 3 sertifikat) 2. Subdirektorat Kelaikan Jalur dan Bangunan KA dengan 12 sertifikat (Uji Pertama sebanyak 13 sertifikat dan Uji Berkala 11 sertifikat)	1. Bidang Kelaikan Jalur dan Bangunan KA - melakukan koordinasi dengan sesditjen terkait dengan SK dan Sertifikasi Jakpro - melakukan koordinasi dengan sesditjen terkait dengan SK dan Sertifikat Komponen PT Jaya Beton Indonesia 2. Bidang Kelaikan Fasilitas Operasi KA a. Memonitoring progres di Sesditjen terkait penerbitan sertifikat, antara lain: 1) 1 Sertifikat Persinyalan Tanah Abang 2) 1 Sertifikat LAA Tanah Abang 3) 12 Sertifikat Persinyalan dan Telekomunikasi di Solo Jebres - Kedung Banteng b. melakukan monitoring penguijan berkala Daop 7 dengan jumlah sertifikat 34.	Dit Prasarana Perkeretaapian

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 9				Realisasi Bulan 9		Realisasi Bulan 9		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian)	55	279	32.69	11.72	-	-	55.5	-	169.78%	-	Realisasi sampai bulan September 55,50%. Sehingga Persentase capaian sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian sampai bulan September adalah sebesar 123,66%. Dengan capaian Output bulan September sebanyak 7232 sertifikat, dengan rincian 3782 sertifikat dari Subdit Kelaikan Sarana Wilayah I dan 3450 sertifikat dari Subdit Kelaikan Sarana Wilayah II.	Pemantauan kegiatan	Dit Sarana Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Presentase Sarana Perkeretaapian yang Telah ditindaklanjuti sesuai hasil Rampcheck)	100	910	91	10	-	-	100	-	109.89%	-	Melaksanakan Kegiatan Pemeriksaan Kelaikan dan Kesiapoperasian (Rampcheck) Sarana Perkeretaapian dalam rangka Antisipasi Libur Hari Raya Idul Adha dan Libur Sekolah pada Bulan Juni – Juli 2025 di Wilayah Jabodetabek, sebanyak 2.462 unit, dengan temuan dan seluruhnya telah ditindak lanjuti sebanyak 171 unit.	Upaya peningkatan kinerja untuk kegiatan rampcheck yaitu dengan melakukan evaluasi terhadap hasil rampcheck angkutan lebaran yang sudah dilakukan untuk memenuhi target pada pelaksanaan rampcheck selanjutnya	Dit Sarana Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator dan Operator Perkeretaapian)	15	126	17.76	14.1	-	-	15.81	-	89.02%	-	Pada bulan Januari Sampai dengan bulan September 2025 telah tercapai 5.691 sertifikasi SDM Regulator dan Operator Perkeretaapian, target pada Tw 3 adalah 17,76 dengan realisasi sebesar 15,81 sehingga target belum tercapai. Target pada Tw 3 tahun 2025 belum tercapai dikarenakan penyelenggara perkeretaapan (operator dan dinas perhubungan) belum seluruhnya mengajukan permohonan sertifikat baik baru maupun perpanjangan.	Melakukan koordinasi dan percepatan pencetakan setifikat SDM Operator PT. KAI (persero) dan PT. KCIC.	Dit Keselamatan Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Hasil Audit Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan)	16	102	12.49	12.25	-	-	16.66	-	133.39%	-	Sampai dengan bulan September 2025 terdapat 3 hasil Audit SMKP yang telah Ditindajlanjuti/Dimanfaatkan diantaranya adalah: 1. Tindaklanjut hasil audit khusus SMKP oleh PT. KAI (Persero) Manajer Unit Makassar – Parepare; 2. Tindaklanjut hasil audit khusus SMKP oleh Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan 3. Tindaklanjut hasil Audit SMKP oleh PT. Celebes Railway Indonesia (CRI) Dengan ditindaklanjutinya 2 Hasil audit khusus SMKP tahun 2024 dan 1 hasil Audit SMKP pada tahun 2025 maka realisasi pada TW 3 tahun 2025 sebesar 16,66 % dan capaian kinerja TW 3 sebesar 299,64 % serta capaian kinerja tahunan sebesar 100 %	Melaksanakan bimbingan teknis dan pengawasan penerapan SMKP kepada PT. Bukitasam	Dit Keselamatan Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian)	15	106	14.201	13.4	-	-	15.433	-	108.68%	-	Jumlah pengujian SDM s.d bulan Sepetember 2025 sebanyak 6.735 orang dari target 2025 sebanyak 8.528 orang	1. memastikan kesiapan peralatan pengujian SDM sebelum pelaksanaan pengujian; 2. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya.; dan 3. update Materi Uji Kompetensi untuk seluruh kompetensi.	Balai Pengujian Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian)	15	89	11.26	12.65	-	-	15.323	-	136.08%	-	Sampai dengan bulan September 2025 jumlah pengujian sarana sebanyak 10.776 unit dengan target tahun 2025 sebanyak 13.868 unit Analisis keberhasilan, didukung adanya kegiatan : 1. ketersediaan anggaran BLU dan sumber daya manusia yang memadai; 2. memaksimalkan penggunaan aplikasi SIAPKA; 3. memastikan peralatan pengujian yang akan digunakan dalam kondisi baik dan telah terkalibrasi;dan 4. Tersusunnya instruksi kerja penggunaan alat pengujian.	1. melakukan perawatan dan kalibrasi peralatan pengujian sarana perkeretaapian;dan 2. memastikan proses pengadaan peralatan pengujian sarana perkeretaapian dapat terlaksana sesuai timeline yang telah ditentukan.	Balai Pengujian Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian)	19	104	13.355	12.84	-	-	19.839	-	148.55%	-	Realisasi pengujian prasarana s.d September 2025 sebanyak 168 unit dan 319,078 km dari target 2025 sebanyak 261 unit dan 202,664 km Analisis keberhasilan didukung pelaksanaan kegiatan : 1. ketersediaan anggaran BLU dan sumber daya manusia yang memadai; 2. melakukan monitoring terhadap pemohon terkait kesiapan pelaksanaan pengujian (dokumen dan fisik); 3. melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana kerja yang telah disusun pada awal tahun. 4.perlu memastikan peralatan pengujian yang akan digunakan tersedia dan 5. telah dilakukan kalibrasi agar pelaksanaan pengujian berjalan lancar;dan Tersusunnya instruksi kerja penggunaan alat pengujian	1. melakukan perawatan dan kalibrasi peralatan pengujian prasarana perkeretaapian; 2. meindindaklanjuti hasil monitoring terhadap pengujian yang telah dilaksanakan pada beberapa tahun sebelumnya; dan 3. memastikan proses pengadaan peralatan pengujian prasarana perkeretaapian dapat terlaksana sesuai timeline yang telah ditentukan.	Balai Pengujian Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	3,740	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (subsidi perintis dan monitoring PSO, penetapan, pemantauan dan evaluasi GAPEKA, pembangunan jalur ganda kereta api dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian baik jalur kereta api dan fasilitas operasi dan lainnya)	3	36	3.74	10.39	671.436.567.750	11.54	3.793	426.723.687.293	101.42%	63.55%	Nilai IKM Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan nilai rata-rata IKM setiap bulan dari masing-masing unit kerja periode s.d September Tahun 2025 dimana diperoleh nilai 3,793 atau dapat diintrepretasikan bahwa kinerja unit pelayanan telah sangat baik. Pelayanan publik bidang perkeretaapian meliputi layanan administrasi Pemerintahan sebagai regulator (perijinan, sertifikasi, pengujian, dan lainnya) serta layanan angkutan kereta api yang diselenggarakan oleh unit kerja/BLU di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Periode s.d September 2025, pelaksanaan survey IKM dilaksanakan secara parsial menggunakan aplikasi 3A IPK yang dikelola oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan serta dilengkapi dengan menggunakan google form pada beberapa unit kerja seperti Direktorat LLAKA, BPKAPI Sumatera Selatan dan BPKA Sulawesi Selatan). Adapun beberapa faktor keberhasilan dalam pencapaian kinerja diantaranya: a. Hingga Triwulan II 2025 telah diterbitkan 16 Perizinan Perpotongan dan/atau persinggungan jalur kereta api dengan bangunan lain dan 9 perizinan usaha/operasi. b. Telah dilaksanakan pelayanan sertifikasi yang dilaksanakan oleh unit kerja pusat yaitu 1) Pelayanan Sertifikasi komponen Prasarana Perkeretaapian sebanyak 3 penetapan sertifikat. 2) Pelayanan Sertifikasi Sarana Perkeretaapian sebanyak 3.689 sertifikat sarana. 3) Pelayanan sertifikasi SDM Perkeretaapian sebanyak 2.873 sertifikat sarana. c. Pelaksanaan pelatihan penggunaan bahasa isyarat untuk petugas customer service, petugas piket, petugas keamanan dan petugas kebersihan LRT Sumatera Selatan pada 9-11 Juli 2025 di Stasiun Ampera. d. Kehandalan SDM dalam memberikan layanan serta pemenuhan kualitas dan tahapan pelayanan sesuai proses bisnis/SOP yang telah ditetapkan. e. Pelaksanaan sosialisasi layanan dan survei IKM kepada stakeholder, termasuk upaya penambahan jumlah responden dengan perluasan pelaksanaan survei melalui google form untuk mempermudah pengisian responden. f. Pemanfaatan sistem informasi diantaranya pada layanan pengujian perkeretaapian, sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian serta sertifikasi kompetensi SDM perkeretaapian, sehingga penyelesaian layanan dengan tepat waktu serta menjaga kualitas pelayanan sesuai dengan prosedur dan alur yang telah ditetapkan. 1) Pada Tahun 2025 direncanakan pengembangan fitur perizinan online pada aplikasi Portal Layanan Data Ditjen Perkeretaapian dengan progres pada triwulan II 2025 sudah berkontrak dan pada triwulan III 2025 direncanakan pembahasan Laporan Pendahuluan pada studi tersebut. 2) Penggunaan fitur perizinan crossing dan sertifikasi Prasarana Perkeretaapian pada aplikasi Portal Layanan Data Ditjen Perkeretaapian saat ini telah selesai dilakukan sinkronisasi SSO. Adapun beberapa kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan survey Indeks Kepuasan Masyarakat diantaranya kesulitan beberapa responden dalam mengakses link survei dikarenakan alat/media komunikasi responden yang kurang mendukung. Dalam penyelenggaraan penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) juga telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (crosscutting) antara lain hubungan kerja dengan Badan Usaha/Operator Perkeretaapian/Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan layanan regulator bidang perkeretaapian termasuk melibatkan masyarakat pengguna KA dan sektor terkait lainnya (sektor industri perkeretaapian).	a. Diperlukan alternatif pelaksanaan kajian survei IKM Balai Perawatan KA dikarenakan alokasi anggaran untuk kajian terdampak efisiensi anggaran. b. Lanjutan pengembangan sistem informasi untuk mengakomodir layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai regulator perkeretaapian yang terpadu dan terintegrasi melalui Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai superapps. c. Penyelesaian perizinan dan sertifikasi dari Badan Usaha/Operator/Pemerintah Daerah yang telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai target waktu.	Dit. LLAKA, Dit. Prasarana Perkeretaapian,Dit. Sarana Perkeretaapian, BTP, BPKA
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	3,740	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA)	3	36	3.71	10.31	-	-	3.75	-	101.08%	-	Capaian kinerja pada Triwulan III Tahun 2025 memperoleh nilai 3,75 dengan capaian kinerja triwulan dan tahunan sebesar 101,18% yang dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Direktorat LLAKA telah memperoleh kategori Sangat Baik dengan jumlah responden sebanyak 115 orang per September 2025.	peningkatan pelayanan terutama terkait perijinan	Dit Lalu Lintas dan Angkutan KA
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	3,740	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian)	3	36	3.7	10.28	-	-	3.79	-	102.43%	-	Pada pelaksanaan survei periode Januari s.d. September 2025, Direktorat Sarana Perkeretaapian secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 3,79 dalam skala 4 atau 16,59 dalam skala 17,50 dengan jumlah responden sebanyak 62 responden. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian telah memperoleh kategori sangat baik.	melakukan tindaklanjut hasil SKM periode triwulan III	Dit Sarana Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	3,740	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) lerhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian)	3	36	3.89	10.81	-	-	3.87	-	99.49%	-	Sehingga sampai dengan periode Bulan September tahun 2025 nilai rata rata IKM Direktorat Prasarana Perkeretaapian sebesar 3,87 dari 53 responden dengan target Bulan September sebesar 3,87 sehingga capaian Bulan September sebesar 100% Pada tanggal 31 Juli 2025 telah dilaksanakan sosialisasi internal penggunaan aplikasi izin perpotongan & persinggungan dalam acara penajaman aplikasi bidang prasarana perkeretaapian dan SOP pengesahan izin teknis pemanfaatan prasarana perkeretaapian Telah dilakukan penyelesaian layanan perizinan dan sertifikasi dari Juli sampai dengan September sebagai berikut : 1. Subdit 1 : 4 Pemohon Crossing 2. Subdit 2 : Proses penyelesaian 3. Subdit 3 : 0 Pemohon Crossing 4. Subdit 4 : 12 Pemohon Crossing, 3 Pemohon Sertifikasi 5. Subdit 5 : 2 Pemohon Crossing, 8 Pemohon Sertifikasi	1. Melakukan evaluasi terhadap 3 indikator terendah dan menyusun rekomendasi dan rencana aksi pelaksanaan rekomendasi 2. Menjaga hubungan yang baik dengan pengguna jasa bidang Prasarana perkertaapian dalam melakukan pelayanan baik secara langsung maupun tidak langsung 3. Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat pada unit kerja setiap bulanPenerapan Aplikasi Perizinan 4. Melakukan pembaruan atau update terhadap standar pelayanan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Dit Prasarana Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	3,740	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktur Keselamatan Perkeretaapian)	3	36	3.86	10.72	-	-	3.34	-	86.53%	-	Pada bulan September 2025 terdapat nilai kualitas pelayanan pada Direktorat Keselamatan Perkeretaapian sebesar 3,58 sehingga nilai IKM tw 3 tahun 2025 sebesar 3,34 dari Target tw 3 sebesar 3,86 sehingga capaian kinerja tw 3 sebesar 86,53 %	Melakukan pemantauan terhadap Link IKM untuk memastikan operator telah mengisi link IKM tersebut	Dit Keselamatan Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	3,740	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian)	3	36	3.86	10.72	-	-	3.84	-	99.48%	-	Analisa keberhasilan : 1. Survey dilaksanakan secara rutin tiap selesai pelaksanaan pengujian; 2. Menggunakan aplikasi PPTB dan dapat melihat secara rinci dan jelas variabel-variabel yang diukur; 3. Realisasi merupakan rata-rata dari bulan Januari-September dengan jumlah responden sebanyak 3.498 Orang.	1. melakukan pendampingan kepada responden pada saat pengisian; dan 2. menyusun laporan SKM setiap triwulan.	Balai Pengujian Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	3,740	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan)	3	36	3.58	9.94	-	-	3.58	-	100%	-		Pelaksanaan rapat evaluasi SKM	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	3,740	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan)	3	36	3.23	8.97	-	-	3.23	-	100%	-	Pelaksanaan IKM pada bulan sSeptember 2025 dengan perolehan nilai : 3,23	Montiroing dan evaluasi pelaksanaan SPM	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 9				Realisasi Bulan 9		Realisasi Bulan 9		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PERSENTASE ON TIME PERFORMANCE (OTP) TRANSPORTASI KERETA API	%	96,100	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	97	1152	96.1	8.34	-	-	97.797	-	101.77%	-	a. Terpenuhinya target perolehan on time performance pada beberapa jenis pelayanan kereta api (khususnya angkutan KA perkotaan) seperti MRT Jakarta (99,99%), LRT Sumatera Selatan (99,96%), LRT Jakarta (99,94%), LRT Jabodebek (99,66%), dan LRT Jabodebek (99,28%). b. Telah dilaksanakan evaluasi harian kinerja operasi pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Kereta Api Ringan Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, serta Kereta Api Kecepatan Tinggi Jakarta - Bandung. c. Telah dilakukan perubahan GAPEKA pada jaringan jalur kereta api nasional di Jawa, Sumatera Bagian Utara, Sumatera Bagian Barat, Sumatera Bagian Selatan, dan Kereta Api Kecepatan Tinggi Jakarta - Bandung (terhitung berlaku sejak 1 Februari 2025) sebagai upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan perjalanan kereta api. d. Koordinasi secara aktif dengan Badan Usaha Penyelenggara Prasarana dan Balai Teknik Perkeretaapian terhadap penyebab dan penanganan kejadian kelambatan perjalanan kereta api serta mengantisipasi potensi adanya rintang jalan. Sebagai contoh, pada masa Angkutan Lebaran dan libur Idul Adha Tahun 2025 telah dilaksanakan koordinasi teknis dengan stakeholders (PT. KAI, PT. MRT, PT. KCI, PT. KCIC) yang mencakup rencana operasi, kesiapan sarana, prasarana dan SDM termasuk identifikasi daerah rawan dan upaya preventif dan mitigasinya. e. Secara rutin melaksanakan evaluasi berkala (triwulan) terhadap realisasi perjalanan kereta api sesuai GAPEKA yang berlaku sehingga perjalanan KA dapat sesuai jadwal dan keterlambatan KA dapat diminimalisir. Selain itu, juga terdapat kendala/permasalahan selama Triwulan II seperti diantaranya gangguan operasional perjalanan kereta api yang didominasi oleh kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang, khususnya yang melibatkan kendaraan berukuran besar seperti truk dan alat berat yang mengakibatkan kerusakan sarana maupun prasarana serta memicu keterlambatan perjalanan. Selain itu, masih terdapat kendala pada aspek pengelolaan jalur, termasuk pengaturan persilangan kereta, penambahan atau pelepasan rangkaian di stasiun antara, serta penyesuaian pola operasi yang belum optimal sehingga berdampak pada ketepatan waktu perjalanan. Sementara itu, faktor lingkungan seperti bencana banjir besar mengalami penurunan frekuensi dibandingkan Triwulan I, namun potensi gangguan akibat genangan air dan cuaca ekstrem tetap menjadi perhatian. Di sisi lain, isu keselamatan di perlintasan sebidang serta kebutuhan peningkatan efektivitas pengendalian operasional teknis masih menjadi tantangan utama dalam menjaga kelancaran dan keamanan layanan angkutan kereta api. Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (crosscutting) antara lain koordinasi teknis dengan stakeholders (PT. KAI, PT. MRT, PT. KCI, PT. KCIC) terkait persiapan penyelenggaraan Angkutan Lebaran dan Idul Adha yang mencakup rencana operasi, kesiapan sarana, prasarana dan SDM termasuk identifikasi daerah rawan dan upaya preventif dan mitigasinya. Selain itu, koordinasi pengamanan posko Angkutan Lebaran dan Idul Adha Tahun 2025 melalui pelaksanaan posko terpadu di kantor pusat dan daerah dengan mencakup kerjasama instansi multisektor (Kepolisian, BMKG, Badan SAR, Pemerintah Daerah, PUPR, dan lainnya), serta penetapan dan pengelolaan GAPEKA dengan hubungan kerja badan usaha/operator perkeretaapian yang juga memperhatikan permintaan/masukan dari masyarakat serta Pemerintah Daerah.	a. Monitoring perjalanan kereta api secara berkala agar sesuai dengan yang diprogramkan pada GAPEKA termasuk memantau perjalanan kereta api pada lokasi rawan bencana/banjir/longsoran/amblesan/lokasi taspat yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu perjalanan kereta api serta meminimalkan perjalanan di luar GAPEKA sesuai ketentuan. b. Lanjutan pembangunan jalur ganda kereta api (jalur ganda KA elevated Medan – Binjai dan Solo-Semarang) untuk meningkatkan kapasitas lintas dan memudahkan pengaturan operasional kereta api agar tepat waktu. c. Lanjutan kegiatan peningkatan jalur/jembatan kereta api untuk meningkatkan kehandalan dan kecepatan operasional kereta api, diantaranya pada segmen Jember – Kalisat dan lokasi lainnya. d. Akan dilakukan evaluasi dan penerbitan persetujuan perjalanan kereta api di luar Gapeka oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian	
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PERSENTASE ON TIME PERFORMANCE (OTP) TRANSPORTASI KERETA API	%	96,100	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Realisasi Perjalanan KA berdasarkan GAPEKA)	104	1140	95.42	8.37	-	-	104.99	-	110.03%	-	Capaian kinerja pada Triwulan III Tahun 2025 (data sementara) sebesar 104,99% dengan persentase capaian kinerja triwulan dan tahunan 109,83%. Realisasi frekuensi sampai Bulan Agustus 2025 adalah sebanyak 712.772 KA dari target triwulan III sebanyak 762.430 KA. Data realisasi frekuensi perjalanan kereta api antarkota dan perkotaan (penumpang dan barang) yang bersifat komersial dan penugasan, meliputi: 1. Jawa (PT KAI, PT KCI, PT Railink) 2. Sumatera bagian utara (PT KAI dan PT Railink) 3. Sumatera bagian barat (PT KAI) 4. Sumatera bagian selatan (PT KAI) 5. Sulawesi Selatan (Konsorsium KA Sulsel) 6. Kereta api ringan Sumatera Selatan (PT KAI) 7. Kereta api ringan terintegrasi di wilayah Jabodebek (PT KAI) 8. Kereta api kecepatan tinggi Jakarta-Bandung (PT KCIC) 9. Moda Raya Terpadu di Jakarta (PT MRT Jakarta) 10. Lintas Raya Terpadu di Jakarta (PT LRT Jakarta)	evaluasi GAPEKA	Dit Lalu Lintas dan Angkutan KA
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PERSENTASE ON TIME PERFORMANCE (OTP) TRANSPORTASI KERETA API	%	96,100	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kalegori I dan II)	93	1140	95.02	8.34	-	-	93.71	-	98.62%	-	1. Realisasi hasil TQI periode II Tahun 2025 Kategori I dan II sebesar 93,71% dengan panjang jalur 5.584,19 KM dari total panjang jalur keseluruhan 5958,96 KM terdiri dari : a. Track Quality Index Kategori I (nyaman) dengan panjang 3.604,324 KM b. Track Quality Index Kategori II (aman) dengan panjang 1.979,865 KM 2. Realisasi hasil TQI periode II Tahun 2025 Kategori III dan IV sebesar 6,29% dengan panjang jalur 374,77 KM dari total panjang jalur keseluruhan 5985,96 KM terdiri dari : c. Track Quality Index Kategori III (waspada) dengan panjang 326,583 KM d. Track Quality Index Kategori IV (bahaya) dengan panjang 48,183 KM 3. Dari hasil pengukuran periode I dan periode II terdapat Kenaikan kategori sebagai berikut: Kategori I dan II periode I sepanjang 5553,68 KM atau 93,20% dan pada periode II meningkat menjadi sepanjang 5.584,19 KM atau 93,71%. Kategori III dan IV periode I sepanjang 405,279 KM atau 6.801% dan pada periode II menurun menjadi sepanjang 374,77 KM atau 6,29%	Akan dilakukan penyusunan laporan hasil evaluasi pengukuran TQI periode III Tahun 2025 dan akan dikirimkan surat hasil evaluasi pengukuran TQI periode III Tahun 2025. Pada periode triwulan selanjutnya akan diadakan pembahasan pedoman TQI dengan akademisi.	Dit Prasarana Perkeretaapian dan Balai Teknik Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PERSENTASE ON TIME PERFORMANCE (OTP) TRANSPORTASI KERETA API	%	96,100	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Fasilitas Operasi Kereta Api dengan Teknologi Handai)	64	756	63.4	8.39	-	-	64.43	-	101.62%	-	Proses asistensi untuk pengesahan gambar design telah selesai. Namun untuk pengesahan gambar desain masih menunggu kajian dari tim independent untuk bangunan ER Peti Kemas Lintas Lahat – Kertapati Sumatera Selatan	Akan bersurat kepada BTP Palembang untuk penugasan monitoring perawatan Fasilitas Operasi pada lintas Prabumulih - Simpang	Dit Prasarana Perkeretaapian dan Balai Teknik Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PEMENUHAN TARGET ANGKUTAN KERETA API	%	19,000	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	9	118	14.785	12.53	-	-	9.339	-	63.17%	-	Angkutan Penumpang; a. Realisasi Angkutan Penumpang KRL Jabodetabek sebesar 166.432.692 penumpang dengan rata-rata penumpang weekday sebesar 1.032.790 penumpang. b. Realisasi Angkutan Penumpang Kereta Cepat Jakarta Bandung sebesar 2.936.345 penumpang dengan rata-rata penumpang sebesar 16.250 penumpang; c. Realisasi Angkutan penumpang LRT Jabodebek sebesar 13.040.406 penumpang dengan rata-rata penumpang weekday sebesar 93.471 penumpang; d. Persentase Realisasi Angkutan Penumpang terhadap Target Penumpang sebesar 105%. e. Telah dilaksanakan angkutan perintis di lingkungan Ditjen Perkeretaapian antara lain : • KA Cut Meutia : Muara Satu - Kuta Blang telah berjalan dengan kontrak Nomor KA.204/1/1/BTP-MDN/2025 tanggal 8 April 2025 dan jumlah penumpang sebanyak 24.677 orang • KA Lembah Anai : Lubuk Alung - Kayu Tanam telah berjalan dengan kontrak Nomor KA.204/1/5/BTP-PDG/2025 tanggal 6 Mei 2025 dan jumlah penumpang sebanyak 42.641 orang • KA Bathara Kresna : Purwosari – Wonogiri telah berjalan dengan kontrak Kontrak Nomor: 001/KONT-PERINTIS/BTP-SMG/IV/2025 tanggal 8 April 2025 dan jumlah penumpang sebanyak 77.013 orang • LRT Sumatera Selatan telah berjalan dengan kontrak Nomor 01/KP.LRT/BPKAR-SS/IV/2025 tanggal 8 April 2025 dan jumlah penumpang sebanyak 1.831.993 orang f. Meningkatnya On Time Performance (OTP) pada triwulan II 2025 sebesar 97,80% atau meningkat sebesar 0,39% dibanding triwulan I 2025 sebesar 97,41%; g. Adanya paket stimulus transportasi kereta api berupa diskon 30% pada momen libur sekolah (Juni–Juli 2025) untuk 12 KA ekonomi stainless steel new generation keberangkatan stasiun di wilayah KAI Daop 6 yang mendapatkan diskon tarif 30 persen pada periode libur sekolah 5 Juni hingga 31 Juli 2025 antara lain: • KA Progo relasi Lempuyangan - Pasarsenen (PP) • KA Lodaya relasi Solo Balapan - Bandung (PP) • KA Lodaya Tambahan relasi Solo Balapan - Bandung (PP) • KA Bogowonto relasi Lempuyangan - Pasarsenen (PP) • KA Tambahan LPN - PSE relasi Lempuyangan - Pasarsenen (PP) • KA Mataram relasi Solo Balapan - Pasarsenen (PP) • KA Batavia relasi Solobalapan - Gambir (PP) • KA Jaka Tingkir relasi Solo Balapan - Pasarsenen (PP) • KA Senja Utama Solo relasi Solo Balapan – Pasarsenen • KA Tambahan PSE - SLO relasi Solo Balapan - Pasarsenen (PP) • KA Majapahit relasi Pasarsenen - Malang (PP) via Sragen dan Solo Jebres • KA Gaya Baru Malam Selatan relasi Pasar Senen - Surabaya Gubeng (PP) h. Telah dilaksanakan inspeksi pabrikasi (on site)/ Factory Acceptance Test (FAT) pengadaan oleh PT. KAI untuk 11 Trainset China pada tanggal 18 s.d 22 Mei 2022. Angkutan barang: a. Realisasi Angkutan Barang sebesar 17.262.808 Ton, bila disandingkan dengan realisasi Triwulan II Tahun 2024 terdapat peningkatan sebesar 37.758 Ton. Dan juga bila dibandingkan dengan program yang ada di 2025, telah mencapai target. b. Meningkatnya permintaan volume barang yang diangkut pada triwulan II mengakibatkan naiknya volume angkutan dari triwulan I, khususnya pada angkutan Batubara dan BBM. c. Lonjakan angkutan barang untuk komoditas batu bara dan pupuk; d. Peningkatkan frekuensi perjalanan, menambah gerbong khusus (terutama di Sumatera Selatan) Selain itu, disampaikan pula beberapa kegiatan pendukung berupa kegiatan peningkatan stasiun kereta api dengan tujuan mendukung peningkatan layanan angkutan penumpang, diantaranya: a. Peningkatan Stasiun Rangkasbitung dengan progres 84,71%. b. Peningkatan Stasiun Tanah Abang Tahap I telah selesai dan telah dioperasikan pada 29 Juni 2025 Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (crosscutting) antara lain penambahan frekuensi layanan kereta api dengan memperhatikan usulan dari badan usaha/operator perkeretaapian dan masukan/demand masyarakat.	a. Lanjutan Inspeksi pabrikasi on site maupun online pengadaan sarana KRL baru pada Tahun 2025 oleh badan usaha untuk mendukung peningkatan kapasitas layanan kereta api penumpang (antara lain 11 trainset impor dari China, 12 trainset baru produksi PT INKA termasuk assessment 2 trainset hasil retrofit oleh PT INKA dengan melibatkan tenaga ahli). b. Koordinasi dan berpartisipasi aktif dalam penyusunan rancangan Perpres Penguatan Logistik Nasional Tahun 2025-2029. c. Meningkatkan koordinasi aktif dengan Badan Usaha Penyelenggara Sarana dalam pengangkutan barang.	Dit Lalu Lintas dan Angkutan KA
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	%	100,000	Program Dukungan Manajemen (Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian, Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian, Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian, Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian & Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian)	72	379	40	10.55	520.975.833.750	11.54	72.837	295.813.093.126	182.09%	56.78%	Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian target kinerja diantaranya: a. Faktor penyelenggaraan SAKIP secara komprehensif. 1) Perencanaan dan penetapan target kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah disusun dengan memperhatikan realisasi kinerja Tahun 2024, arah kebijakan 2025-2029, analisa mendalam diantaranya ketersediaan sumber daya (anggaran, SDM) termasuk telah dilakukan sinkronisasi target kinerja sub unit kerja (Bagian) dan unit kerja lainnya (Direktorat, Balai). 2) Publikasi/updating/pembaharuan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Laporan Monitoring Kinerja Triwulan IV Tahun 2024, Laporan Kinerja Tahun 2024, Indikator Kinerja, Pohon Kinerja termasuk DIPA Tahun 2025 melalui e-SAKIP Reviu dan website Ditjen Perkeretaapian (official). Selain itu, telah dilakukan publikasi naskah teknokratik/rancangan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 - 2029. 3) Pada Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024, Laporan Monitoring Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 dan Triwulan I Tahun 2025 telah tercantum/dijelaskan seluruh informasi capaian kinerja mencakup tata cara perhitungan capaian kinerja, analisa keberhasilan/kegagalan, analisa penyesuaian kebijakan/strategi/kegiatan maupun anggaran, analisa hubungan kerja/crosscutting termasuk perbandingan di level nasional/internasional serta penjelasan keberadaan sumber data dukung capaian kinerja pada lampiran laporan. 4) Perencanaan kinerja unit kerja telah menjadi acuan dalam penyusunan PK berjenjang dan SKP masing-masing pegawai melalui aplikasi e-Kinerja, yang selanjutnya diacu dalam pelaporan kinerja pegawai setiap bulan. 5) Koordinasi internal yang efektif terlihat dari pembahasan yang mengikutsertakan Direktorat, Balai dan Bagian dalam pengukuran dan pelaporan kinerja serta evaluasi internal yang sinergis. b. Faktor pengelolaan/pelaksanaan anggaran: 1) Adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi belanja anggaran yang berdampak langsung pada penundaan hingga pembatalan kegiatan dan anggaran. 2) Telah dilakukan sosialisasi kepada seluruh unit kerja terkait penerapan Standar Biaya Keluaran (SBKK/SBKU) guna optimalisasi efektivitas dan efisiensi perencanaan anggaran. 3) Efektivitas dan ketepatan pelaksanaan anggaran melalui penyusunan dan revisi DIPA, penyesuaian RPD, dan pelaporan output yang rutin dan tepat waktu. 4) Kemampuan adaptasi terhadap efisiensi fiskal, menunjukkan bahwa organisasi harus fleksibel dan tetap meniaga keberlangsungan kegiatan prioritas meskipun pagu mengalami pemangkasan drastis. c. Faktor optimalisasi PNBP melalui aset prasarana milik negara: Persetujuan dari instansi terkait seperti Kementerian Keuangan dalam pemanfaatan BMN termasuk perolehan realisasi PNBP TAC Tahun 2024 turut mempengaruhi realisasi PNBP. d. Faktor manajerial SDM: 1) Pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan mengikuti pendidikan/pelatihan berkoordinasi dengan BPSDMP, Setjen Kemenhub (Biro SDMO), serta pelaksana pendidikan/pelatihan lainnya baik teknis perkeretaapian maupun manajerial. 2) Himbauan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk melakukan pemutakhiran data kepegawaian pada aplikasi SIK guna peningkatan kualitas data ASN melalui surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor KP.001/1/10/K1/DJKA/2025 tanggal 23 Juni 2025 perihal Pemutakhiran Data Kepegawaian pada Sistem Informasi Kepegawaian (SIK). 3) Penyampaian hasil monitoring penilaian indeks profesional ASN kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara berkala setiap bulan. e. Faktor tata laksana termasuk pemanfaatan teknologi/digitalisasi: 1) Ketepatan dan ketertiban pelaporan melalui aplikasi seperti e-SAKIP Reviu, e-Kinerja, SILAKI, SAKTI, dan lainnya menunjukkan bahwa sistem pelaporan yang terintegrasi dan disiplin administratif turut mempengaruhi pencapaian kinerja pada beberapa komponen penilaian. 2) Kapasitas SDM dalam pengelolaan aplikasi dimana minimnya pemahaman atau keterlambatan input oleh admin berdampak pada rendahnya nilai kinerja ASN maupun pelaporan keuangan.	a. Penyempurnaan terhadap konsep Keputusan Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan untuk unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian setelah penetapan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 untuk mengakomodir perubahan-perubahan terkait komponen penilaian sesuai kebijakan/ketentuan terkini. b. Meningkatkan ketepatan revisi DIPA dan akurasi Halaman III DIPA termasuk percepatan realisasi anggaran. Selain itu, diperlukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu untuk penerapan Standar Biaya Keluaran (SBK) pada tahun berjalan (2025) termasuk proses tagging pada Rincian Output (RO) SBKK, serta pengusulan Rincian Output (RO) SBKU pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026 sebagaimana diatur pada PMK Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2025. c. Lanjutan proses usulan pemanfaatan PNBP sebagai alternatif pembiayaan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dari beberapa unit kerja dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran. d. Lanjutan pembinaan ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian mencakup sosialisasi/bimbingan teknis terkait isu-isu kepegawaian (disiplin pegawai, pembinaan keluarga, kode etik, dan lainnya). Selain itu, juga diperlukan pengelolaan jenjang karir terkait jabatan fungsional tertentu bidang perkeretaapian melalui pelaksanaan pendidikan/pelatihan/bimbingan teknis/workshop/uji kompetensi kenaikan jenjang/perpindahan jabatan dari jabatan lain ke jabatan fungsional perkeretaapian yang dibutuhkan untuk mendukung kompetensi.	
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	%	100,000	Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pencapaian Target Regulasi/Legislasi (Jumlah Rancangan Dan Peraturan Perundangan) Di Bidang Perkeretaapian)	8	110	15	13.64	-	-	8	-	53.33%	-	Sampai dengan September 2025 telah terbit 2 peraturan : 1. KM 5 Tahun 2025 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian 2. KM 42 Tahun 2025 tentang Sistem Akuntansi Balai Pengujian Perkeretaapian	Pemantauan proses penerbitan peraturan	Setditjen Perkeretaapian

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 9				Realisasi Bulan 9		Realisasi Bulan 9		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Nilai	100,000	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian (Indeks Profesional ASN)	-	89	-	-	-	-	-	-	-	-	Berdasarkan perolehan nilai sementara atas indeks profesional ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian (posisi 1 September 2025) sebesar 84,32. Adapun rincian nilai per-kriteria antara lain kriteria kualifikasi nilai 23,48 dari 25, kriteria kompetensi nilai 30,26 dari 40, kriteria kinerja nilai 26,24 dari 30, dan kriteria disipilin nilai 5,00 dari 5,00. Adapun 2 dari 4 kriteria masih bernilai rendah yaitu kriteria kompetensi dan kriteria kinerja. Beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut antara lain: 1. Terdapat pegawai yang belum melakukan "Terima Penilaian" pada aplikasi e-Kinerja Kemenhub terhadap penilaian kinerja individu Tahun 2024 sehingga data kinerja ASN belum terkonfirmasi dan nilai menjadi rendah (nol); 2. Terdapat pegawai yang belum melakukan unggah/upload data kompetensi Tahun 2024 berupa sertifikat/bukti dukung lain dari keikutsertaan pendidikan/pelatihaan/bimtek/sosialisasi/pelatihan/lainnya ke aplikasi SIK Kemenhub sehingga mempengaruhi rendahnya nilai kompetensi; 3. Terdapat kendala dalam pelaksanaan sinkronisasi data dari aplikasi SIK ke aplikasi SIASN BKN (gagal post data SKP/error); 4. Terdapat pegawai yang sehanusnya tdak masuk dalam penilaian IP ASN karena pegawai tersebut bukan lagi menjadi bagian dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian (resign, hukuman disiplin, dll). Kendala tersebut sudah disampaikan kepada Biro SDM dan Organisasi guna dilakukan perubahan status kepegawaian pada data BKN (menjadi non-aktif). Namun demikian, secara berkala telah dilakukan beberapa upaya guna meningkatkan indeks profesional ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui himbauan kepada seluruh ASN di seluruh unit kerja baik secara formal dan informal diantaranya: 1. Penyampaian hasil evaluasi sistem merit terkait manajemen kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagaimana surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor KP.406/1/2/K1/DJKA/2025 tanggal 28 Mei 2025 guna pemutakhiran data kinerja pada aplikasi e-Kinerja serta monitor pengisian data indeks profesional ASN Tahun 2025; 2. Himbauan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk melakukan pemutakhiran data kepegawaian pada aplikasi SIK guna peningkatan kualitas data ASN melalui surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor KP.001/1/10/K1/DJKA/2025 tanggal 23 Juni 2025 perihal Pemutakhiran Data Kepegawaian pada Sistem Informasi Kepegawaian (SIK); 3. Penyampaian hasil monitoring penilaian indeks profesional ASN kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara berkala setiap bulan; 4. Melakukan kegiatan evaluasi penerapan aturan kepegawaian (disiplin pegawai, kode etik, regulasi hari dan jam kerja, ketentuan cuti, tugas belajar, dll) secara langsung/on site di lokasi (Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan, BTP Surabaya dan Balai Pengujian Perkeretaapian) guna peningkatan komponen/kriteria disiplin pada penilaian IP ASN periode berikutnya; 5. Koordinasi dengan admin SIK untuk pemutakhiran data kompetensi dan kinerja termasuk melakukan pendampingan dan melaporkan ke unit kerja terkait apabila terdapat kendala dalam proses sinkronisasi.	1. Lanjutan pembinaan ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian mencakup sosialisasi/bimbingan teknis terkait isu-isu kepegawaian (disiplin pegawai, pembinaan keluarga,kode etik, dan lainnya). 2. Pengelolaan jenjang karir terkait jabatan fungsional tertentu bidang perkeretaapian melalui pelaksanaan pendidikan/pelatihan/bimbingan teknis/workshop/uji kompetensi kenaikan jenjang/perpindahan jabatan dari jabatan lain ke jabatan fungsional perkeretaapian yang dibutuhkan untuk mendukung kompetensi.	Setditjen Perkeretaapian
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Nilai	100,000	Tersedianya Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal (Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian)	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	Hingga akhir bulan September 2025, belum dilakukan penilaian terkait tiingkat kematangan layanan publik berbasis elektronik. Adapun beberapa hal yg sudah dilakukan s.d Agustus 2025 sebagai berikut: 1. Pelaksanaan survei evaluasi kualitas penggunaan (menggunakan indikator pada ISO/IEC 25010:2023) dan kebutuhan pengembangan Portal Layanan dan Data (PLD) Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan responden seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna meningkatkan kualitas layanan digital dan tata kelola data yang terintegrasi. 2. Rapat Peningkatan Kesadaran Keamanan Data dan Informasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan mengundang narasumber Pusdatin Kementerian Perhubungan dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 3. Koordinasi dan tindak lanjut perbaikan atas kejadian insiden keamanan yang temuan Pusdatin Kementerian Perhubungan terkait hasil forensik digital/ keamanan pada Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. 4. Koordinasi dan monitoring dengan Pusdatin Kementerian Perhubungan terkait rekomendasi hasil clearance terhadap usulan kegiatan TIK Tahun 2025 sesuai dengan arsitektur pemerintah digital dan kebijakan penyederhanaan aplikasi. 5. Pembahasan laporan pendahuluan dan progres pengembangan Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai SuperApps yang dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Teknis dan Balai di lingkungan Ditjen Perkeretaapian. 6. Koordinasi dan pendampingan terkait pelaksanaan User Acceptance Test (UAT) serta Vulnerability Assessment (VA) untuk aplikasi/sistem informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. 7. Koordinasi pengelolaan domain dan penggunaan server di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. 8. Koordinasi pemenuhan data dukung usulan kegiatan TIK Tahun 2026 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna tahapan reviu tingkat II oleh Pusdatin Kementerian Perhubungan dan tahapan clearance oleh Tim SPBE Nasional.	1. Lanjutan pengembangan Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai superapps Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang terintegrasi dengan penambahan fitur/modul layanan sesuai prioritas serta penyesuaian arsitektur aplikasi. 2. Pengembangan Modul Layanan Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian guna meningkatkan layanan perizinan serta mendukung optimalisasi layanan pada Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian. 3. Peningkatan penanganan keamanan informasi dari ancaman siber dengan pelaksanaan perbaikan celah keamanan (remediasi) berdasarkan hasil forensik/temuan insiden. 4. Penyusunan tools/pengukuran Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian mengacu pada Indeks Pemerintah Digital, khususnya pada aspek pengukuran kepuasan pengguna layanan digital pemerintah yang mencakup tingkat kepuasan pengguna, tingkat pemenuhan kualitas layanan digital, dan tingkat pemanfaatan layanan digital. 5. Pelaksanaan reviu tingkat I terhadap usulan kegiatan TIK Tahun 2026 sesuai dengan Rencana Induk/Roadmap TIK, Arsitektur dan Peta Rencana Pemerintah Digital Kementerian Perhubungan serta mengacu rencana penataan domain dan simplifikasi/penyederhanaan aplikasi.	Setditjen Perkeretaapian
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Nilai	100,000	Terwujudnya Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian (Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perkeretaapian)	-	90	-	-	-	-	-	-	-	-	Hingga akhir September 2025 belum dilakukan penilaian terhadap keterbukaan informasi publik dan proses penilaian direncanakan dilaksanakan pada Triwulan IV 2025. Adapun hal-hal yang sudah dilaksanakan s.d Agustus 2025 sebagai berikut: 1. Pemenuhan permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon informasi pada periode Triwulan II 2025 (2 permohonan) melalui PPID Utama Kementerian Perhubungan (via website https://ppid.kemenhub.go.id/ dan surat) yang selanjutnya didistribusikan kepada PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perkeretapian dan sebanyak 1 permohonan telah selesai ditindaklanjuti sedangkan 1 permohonan lainnya masih dalam proses; 2. Koordinasi intensif dengan Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan terkait percepatan penetapan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Daftar Informasi Publik (DIP) Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 sebagai dasar/ketentuan dalam penyampaian informasi publik; 3. Koordinasi intensif dengan Biro Komunikasi dan Informasi Publik dan Biro Hukum Kementerian Perhubungan terkait penetapan dan uji konsekuensi Daftar Informasi Publik Dikecualikan (DIK) Tahun 2025; 4. Monitoring media setiap hari dengan kategori isu negatif, netral dan positif, termasuk melakukan update berkala "Top Issue Perkeretaapian" dengan publikasi/pemberitaan melalui media sosial maupun media elektronik lainnya.	1. Melaksanakan sosialisasi terkait Daftar Informasi Publik (DIP) dan Informasi Dikecualikan (DIK) kepada seluruh petugas pengelola PPID di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara onsite di masing-masing wilayah unit kerja/Balai; 2. Penyiapan laporan hasil analisis pemberitaan terkait Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara rutin/setiap hari; 3. Koordinasi intensif dengan Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Setjen Kementerian Perhubungan (Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Biro Hukum) Kementerian Perhubungan dalam penyampaian informasi publik sesuai ketentuan.	Setditjen Perkeretaapian
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	%	100,000	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian (Tingkat Pencapaian Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian)	8	400	100	25	-	-	8.72	-	8.72%	-	Berdasarkan surat Inspektorat Jenderal No. PR. 205/1/1/DJKA/2025 tanggal 3 Juli 2025 tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian, diperoleh nilai 83,72 (Predikat A) dengan interpretasi Memuaskan.	Menindaklanjuti hasil rekomendasi atas hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Jenderal	Seluruh Unit Kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	%	100,000	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian (Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ditjen Perkeretaapian)	-	785	75	9.55	-	-	-	-	-	-	Perolehan PNBP Ditjen Perkeretaapian s.d bulan September 2025 sebesar Rp. 1.971.648.036.653 atau capaian sebesar 158,197% dari target PNBP tahun 2025 sebesar Rp. 1.246.326.325.000	Lanjutan penyelesaian Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk koordinasi dengan KPKNL setempat untuk meninddaklanjuti usulan sewa aset	Setditjen Perkeretaapian
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	%	100,000	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian (Tingkat Pencapaian Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Perkeretaapian)	46	704	71	10.09	-	-	46.85	-	65.99%	-	NKA Ditjen Perkeretaapain s.d September 2025 sebesar 46,85 dengan rincian : 1. NK perencanaan anggaran sebesar 8,92 2. NK Pelaksanaan anggaran sebesar 84,77	Meningkatkan penyerapan anggaran unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan percepatan penyelesaian kegiatan/output yang telah diprogramkan pada Tahun 2025 serta pemenuhan readiness criteria sesuai ketentuan	Seluruh Unit Kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian

Jakarta, Oktober 2025
DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,

ALLAN TANDIONO
NIP 198801182025211023

LAMPIRAN V

DATA DUKUNG PER-INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 1

RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN

DATA PERHITUNGAN RASIO KONEKTIVITAS TAHUN 2025

NO	UNIT KERJA	PKN		PKW / KSN		PELABUHAN		BANDARA		TERMINAL TIPE A		TERHUBUNG	BLM TERHUBUNG	RASIO
		TERHUBUNG	BELUM TERHUBUNG	TERHUBUNG	BELUM TERHUBUNG	TERHUBUNG	BELUM TERHUBUNG	TERHUBUNG	BELUM TERHUBUNG	TERHUBUNG	BELUM TERHUBUNG	LOKASI	LOKASI	
1	**BTP Kelas I Medan**	1	3	5	3	2	2	1	1	0	0	9	9	0,50
	Provinsi Aceh		Banda Aceh	Lhokseumawe			Lhokseumawe (NAD)							
					Langsa									
	Provinsi Sumatera Utara	Mebidangro		Rantau Prapat	KSN Danau Toba	Belawan (Sumatera Utara)		Kualanamu						
				Pematang Siantar		Kuala Tanjung (Sumatera Utara)								
				Tebingtinggi										
				Kisaran										
	Provinsi Riau		Dumai		Rengat		Dumai (Riau)		Hang Nadim (Batam)					
			Pekanbaru											
2	**BTP Kelas II Padang**	1	0	1	4	1	0	1	0	0	0	4	4	0,50
	Provinsi Sumatera Barat	Perkotaan Padang - Lubuk Agung -Pariaman		Pariaman	Solok	Teluk Bayur (Sumatera Barat)		Minangkabau						
					Bukit Tinggi									
					Payakumbuh									
					Sawahlunto									
	Provinsi Bengkulu													
3	**BTP Kelas II Palembang**	2	1	6	0	1	3	1	0	0	0	10	4	0,71
	Provinsi Jambi		Jambi											
	Provinsi Sumatera Selatan	Patungraya Agung		Lubuklinggau			Tanjung Api-api (Sumatera Selatan)	SM Badarudin						
				Muara enim										
				Baturaja										
				Prabumulih										
				Lahat										
	Provinsi Lampung	Bandar Lampung		Kotabumi		Tarahan (Lampung)	Panjang (Lampung)							
							Bakauheni (Lampung)							
4	**BTP Kelas I Jakarta**	3	0	2	1	2	3	1	1	1	0	9	5	0,64
	Provinsi Banten	Serang		Rangkasbitung	Pandeglang	Merak (Banten)	Tanjung Lesung (Banten)	Soekarno-Hatta (Banten)	Panimban (Banten)	Kampung Rambutan (Jakarta)				
		Cilegon					Bojanegora (Banten)							
	Provinsi DKI Jakarta	Jabodetabek				Tanjung Priok (DKI Jakarta)	Kali Baru (DKI Jakarta)							
	Provinsi Jawa Barat			Cikampek										
5	**BTP Kelas I Bandung**	2	0	4	2	0	2	0	1	0	0	6	5	0,55
	Provinsi Jawa Barat	Cirebon		Sukabumi	Kadipaten		Cirebon (Jawa Barat)		Kertajati (Jawa Barat)					
		Bandung Raya		Indramayu	Pangandaran		Patimban (Jawa Barat)							
				Tasikmalaya										
				Cikampek-Cikopo										
6	**BTP Kelas I Semarang**	4	4	7	11	2	3	2	3	0	0	15	21	0,42
	Provinsi Jawa Tengah	Kedungsepur		Tegal	Wonosobo	Cilacap (Jawa Tengah)		Adisumarmo (Solo)	Ahmad Yani (Semarang)					
		Cilacap		Pekalongan	Kudus	Tanjung Mas (Jawa Tengah)								
		Surakarta		Cepu	Magelang									
				Purwokerto	KSN Borobudur									
				kebumen										
				klaten										
	Provinsi DIY	Yogyakarta		Sleman				Kulonprogo (Yogyakarta)						
	Kalimantan		Perkotaan Balikpapan, Samarinda, Tenggarong, Bontang		Tanjung Radeb		Banjarmasin (Kalimantan Selatan)		Syamsudin Noor (Kalsel)					
			Perkotaan Banjarmasin,Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala, Tanah Laut		Sangata		Samarinda (Kalimantan Timur)		Supadio (Kalbar)					
			Palangkaraya		Martapura		Balikpapan (Kalimantan Timur)							
			Pontianak		Mempawah									
					Singkawang									
					Sanggau									
					Muara Teweh									
7	**BTP Kelas I Surabaya**	2	5	9	8	1	4	0	3	0	0	12	20	0,38
	Provinsi Jawa Timur	Malang		Bojonegoro	Tuban	Tanjung Perak (Jawa Timur)			Juanda (Surabaya)					
		Gerbangkertosusila		Madiun	Pamekasan		Tuban (Jawa Timur)							
				Jember	Sumenep		Teluk Lamong (Jawa Timur)							
				Banyuwangi										
				Probolinggo										
				Blitar										
				Pasuruan										
				Tulungagung										
				Kediri										
	Provinsi Bali		Sarbagita		Singaraja				Ngurah Rai (Denpasar)					
					Negara									
	Papua Barat		Sorong		Manokwari		Sorong (Papua Barat)							
	Provinsi Papua		Jayapura		Sarmi		Jayapura (Papua)		Sentani (Papua)					
			Timika		Tanah Merah									
			Merauke											

DATA PERHITUNGAN RASIO KONEKTIVITAS TAHUN 2025

NO	UNIT KERJA	PKN		PKW / KSN		PELABUHAN		BANDARA		TERMINAL TIPE A		TERHUBUNG	BLM TERHUBUNG	RASIO
		TERHUBUNG	BELUM TERHUBUNG	TERHUBUNG	BELUM TERHUBUNG	TERHUBUNG	BELUM TERHUBUNG	TERHUBUNG	BELUM TERHUBUNG	TERHUBUNG	BELUM TERHUBUNG	LOKASI	LOKASI	
8	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	1	5	2	5	1	2	0	1	0	0	4	13	0,24
	Sulawesi Selatan	Maminasata		Pangkajene	Parepare	Garongkong (Sulawesi Selatan)	Makassar (Sulawesi Selatan)		Hasanuddin (Makassar)					
				Barru	Watampone									
					Bulukumba									
	Sulawesi Utara		Perkotaan Manado-Bitung				Bitung (Sulawesi Utara)							
	Gorontalo		Gorontalo											
	Sulawesi Tengah		Palu		Poso									
	Sulawesi Barat		Mamuju											
	Sulawesi Tenggara		Kendari		Kolaka									
	DITJEN PERKERETAAPIAN	16	18	36	34	10	19	6	10			69	81	0,460
		Jumlah PKW/PKN/PKSN/SIMPUL Berdasarkan RIPNAS 2030										150		

Jakarta, Oktober 2025
Plt. DIREKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN

CATUR WICAKSONO, ATD, MT
NIP 197004191995031001

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA POGRAM 2

TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110
TELP : 0813 6001 3838
WEBSITE : http://djka.dephub.go.id/
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

NOTA DINAS

Nomor: 230/K5/X/2025

Yth. : Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Dari : Direktur Keselamatan Perkeretaapian

Hal : Penyampaian Jumlah Data Kecelakaan dan Jumlah Data Korban Kecelakaan Kereta Api Bulan Januari – Oktober 2025

Tanggal : 29 Oktober 2025

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: PR.205/3/25/K1/DJKA/2025 tanggal 13 Oktober 2025 perihal Tindak Lanjut Rapat Pembahasan Pelaporan kinerja Periode Triwulan III Tahun 2025. Bersama ini disampaikan rekapitulasi data kecelakaan kereta api tahun 2025 sampai dengan bulan Oktober 2025, dapat kami laporkan sebagai berikut:

A. Data Kecelakaan Kereta Api Bulan Januari – Oktober 2025

NO	HARI/ TANGGAL	OPERATOR	JENIS KECELAKAAN	URAIAN KEJADIAN	KORBAN	PENYEBAB
1.	Sabtu, 15 Maret 2025	PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre III Palembang	Anjlokan	**KA 3100 (Barapati)** anjlok di Km 381+9/0 Jalur II Emplasemen Stasiun Ujan Mas.	Nihil	**Sarana, yaitu:** 1. Pegas yang terpasang pada bogie tidak terdeteksi memiliki nilai hasil pengujian pegas (Not OK); 2. Kondisi bowliner yang sudah rusak (sobek); 3. Kondisi taspot/upper terdapat indikasi tidak meratanya distribusi beban gerbong yang diteruskan ke bogie. **Prasarana, yaitu:** 1. Sebelum Titik Awal Naik (TAN) adanya mud pumping di bantalan ke -1 s.d -6 dan bantalan -24, -25 dan -26; 2. Pada Titik Awal Naik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	HARI/ TANGGAL	OPERATOR	JENIS KECELAKAAN	URAIAN KEJADIAN	KORBAN	PENYEBAB
						(TAN) terdapat pertinggian jalan rel di lengkung yang berlebih yaitu 100 mm; 3. Lebar jalur di Titik Awal Naik (TAN) yaitu 1082 mm; 4. Skilu statis di TAN adalah 10 mm/3 m, pada bantalan -3 sebelum TAN adalah 14 mm/3 m dan pada bantalan -4 sebelum TAN adalah 15 mm/3 m.
2.	Senin, 23 Juni 2025	PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre III Palembang	Anjlokan	**KA 3335F (Barasimpang)** anjlok di KM 407+7/8 Emplasemen Stasiun Banjarsari.	Nihil	**Prasarana, yaitu** terdapat skilu statis sebesar 20mm/3m. **SDM, yaitu** dikarenakan tidak dipastikannya kondisi jalur KA telah aman setelah dilakukan perbaikan di Jalur III Stasiun Banjarsari.
3.	Minggu, 27 Juli 2025	PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre III Palembang	Anjlokan	**KA 3992 (Linggapati)** anjlok di KM 389+4/5 antara Stasiun Muara Gula - Stasiun Muara Enim, jalur hulu, lengkung nomor 78A.	Nihil	**Prasarana, yaitu:** 1. Terdapat corrugation/ kerutan/pola gelombang pada permukaan kepala rel; 2. Skilu statis jalan rel sebesar 30 mm/3m.
4.	Selasa, 29 Juli 2025	PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre III Palembang	Anjlokan	**KA 3106 (Barapati)** anjlok di KM 377 +8/9 antara Stasiun Ujan Mas - Penanggiran jalur hulu, lengkung nomor 66A.	Nihil	**Prasarana, yaitu:** 1. Terdapat corrugation/ kerutan/pola gelombang pada permukaan kepala rel; 2. lebar jalur pada Titik Awal Naik (TAN) sebesar 1100mm/3m.
5.	Jumat, 1 Agustus 2025	PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 3 Cirebon	Anjlokan	**KA 1 (Argo Bromo Anggrek)** anjlok di KM 129+5/6 Emplasemen Stasiun Pegaden Baru.	1 Orang Luka Ringan	**Sarana, yaitu** Kerusakan pada Bearing Roda

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	HARI/ TANGGAL	OPERATOR	JENIS KECELAKAAN	URAIAN KEJADIAN	KORBAN	PENYEBAB
6.	Selasa, 5 Agustus 2025	PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta	Anjlokan	**KA 1189 (Commuter Line Bogor – Jakarta Kota)** anjlok di KM 0+300/400 Emplasemen Stasiun Jakarta kota antara wesel 23A2 dan wesel 43A1.	Nihil	**Prasarana, yaitu** Adanya lebar jalur yang melebihi toleransi dan celah rel paksa yang tidak mengakomodir standar *back to back* KRL 990 mm
7.	Selasa, 5 Agustus 2025	PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre IV Tanjungkarang	Anjlokan	**KA S5 (Kuala Stabas)** anjlok di Km 141+1/2 Petak Jalan Stasiun Negeri Agung - Stasiun Tulung Buyut	Nihil	**SDM, yaitu** Peletakan material rel bekas di bahu jalan rel yang tidak memenuhi jarak lebar dan tinggi pada standar ruang bebas sarana.
8.	Rabu, 22 Oktober 2025	PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta	Anjlokan	**KA 1689 (Commuter Line Rangkasbitung – Tanah Abang)** anjlok di KM 79+330 s/d 79+291 Emplasemen Stasiun Rangkasbitung	Nihil	**SDM, yaitu** ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan perawatan oleh penyedia jasa setelah selesainya pekerjaan penataan *track* pada jalur V **Prasarana, yaitu** adanya skilu pada lengkung KM 79+330 s/d 79+291 yang melebihi toleransi yaitu sebesar 26 mm/3m.
9.	Sabtu, 25 Oktober 2025	PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta	Anjlokan	**KA 58F (Purwojaya)** anjlok di KM 55+9 Jalur Hulu antara Stasiun Kedunggedeh – Stasiun Lemahabang lengkung No. 11.	1 Orang Luka Ringan	**Masih dalam proses analisis penyebab kecelakaan.**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B. Data Jumlah Kejadian Kecelakaan dan Jumlah Korban Kecelakaan Kereta Api Bulan Januari – Oktober 2025)

NO	KEJADIAN	JUMLAH KEJADIAN	JUMLAH KORBAN		
			LUKA RINGAN	LUKA BERAT	MENINGGAL
1.	TABRAKAN ANTAR KA	0	0	0	0
2.	KA TERGULING	0	0	0	0
3.	KA ANJLOK	9	2	0	0
4.	KA TERBAKAR	0	0	0	0
TOTAL		**9**	**2**	**0**	**0**

Atas perkenan dan arahan lanjut Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian diucapkan terima kasih.

Jumardi

NIP 196903061998031002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : 0813 6001 3838

WEBSITE : http://djka.dephub.go.id/
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

NOTA DINAS

Nomor 0134/K5/VIII/2025

Yth. : Direktur Jenderal Perkeretaapian

Dari : Direktur Keselamatan Perkeretaapian

Hal : Laporan Awal dan Hasil Pembahasan Kecelakaan Anjlokan KA 1 Argo Bromo Anggrek di Emplasemen Stasiun Pegaden Baru, Daop 3 Cirebon tanggal kejadian 1 Agustus 2025

Tanggal : 5 Agustus 2025

Menindaklanjuti kejadian Kecelakaan Anjlokan KA 1 Argo Bromo Anggrek di Emplasemen Stasiun Pegaden Baru, Daop 3 Cirebon tanggal kejadian 1 Agustus 2025 dan telah dilaksanakan rapat pembahasan bersama Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT INKA (Persero), dan internal DJKA yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian. Adapun beberapa pokok pembahasan yang dapat kami laporkan sebagai berikut:

1. Pokok-Pokok Hasil Pembahasan:
   a. Kronologi Kejadian:
      1) Tanggal dan Lokasi: 1 Agustus 2025, pukul 15.47 WIB, KA Argo Bromo Anggrek anjlok di emplasemen Stasiun Pegaden Baru, lintas Cikunegara – Pegaden Baru.
      2) Korban: Tidak ada korban jiwa, 1 luka ringan.
      3) Kerusakan: 5 kereta belakang anjlok (total 20 as).
      4) Kerusakan prasarana berupa:
         a) kerusakan terhadap bantalan dan Penambat Rel sepanjang 5,19 KM dari Titik Awal Jatuh KM 129+742,6 s.d Titik Berhenti KM 124+545.
         b) Patahnya stang motor wesel.
         c) Kerusakan pada wesel 17A dan 17B
      5) Titik awal jatuh di km 129+742, jalur lurus.
      6) Titik Berhenti di km 124+5/6, Wesel 17A

7) Kecepatan: 114–118 km/jam (batas Kecepatan maksimum di lintas tersebut Adalah 120 km/jam).

b. Temuan Awal:
   1) Pemeliharaan rutin terakhir: P-12 (14 Feb 2025), P-3 (21 Mei 2025), P-1 (23 Juli 2025) – tanpa temuan anomali.
   2) Ditemukan komponen End Cap Bearing di km 181+095 jalur 4 Stasiun Tanjung.
   3) Ditemukan As Tap (bagian bearing/axle box) di km 153+0 petak Kadokangabus – Cilegeh.
   4) Kondisi Bearing pada kereta K102350 rangkaian ke-8 dari Lokomotif rusak (bogie belakang as depan searah KA)
      a) As Tap tidak ada (putus);
      b) End Cap tidak ada
   5) Riwayat gangguan sebelumnya: 1 Juni 2025 (gangguan rem) dan 1 minggu sebelum kejadian (as panas di KA ini).

c. Analisis Sementara:
   1) Penyebab utama: kegagalan bearing, as panas, patah as, roda keluar rel.
   2) Material bogie: TB1014 produksi PT INKA, bearing tipe *free maintenance* tanpa pelumasan, seharusnya bertahan hingga ±800 ribu km namun gagal lebih awal.

d. Tindak Lanjut dan Rekomendasi:
   1) Menghentikan sementara pengoperasian dua trainset rangkaian KA Argo Bromo Anggrek guna dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap rangka bawah dan komponen keselamatan utama (safety critical items), termasuk pemeriksaan dan pengujian kondisi bearing (sudah dilakukan)
   2) Melakukan pemeriksaan sarana di beberapa titik di Stasiun antara, baik di lintas utara dan lintas selatan untuk memastikan kondisi rangka bawah seperti bearing, roda, perangkat pengereman dan komponen lainnya pada sarana yang sedang beroperasi dalam kondisi baik (sudah dilakukan uji coba di Semarang dan Cirebon).
   3) Melakukan investigasi teknis bersama pabrikan/manufaktur dan KNKT terhadap bearing pada kereta K102350 untuk mengidentifikasi penyebab bearing mengalami kerusakan (overheat/aspan) dari sisi desain, material dan lainnya.

4) Pembentukan tim gabungan antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian, KNKT, PT. Kereta Api Indonesia (Persero), Timken dan PT. INKA (Persero) untuk melakukan uji material komponen bearing yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2025 bertempat di PT. INKA Madiun.

Terlampir kami sampaikan konsep surat laporan awal dan hasil pembahasan rapat dimaksud dari Direktur Jenderal Perkeretaapian kepada Bapak Menteri Perhubungan. Atas perkenan dan arahan lanjut Bapak Direktur Jenderal Perkeretaapian diucapkan terima kasih.

Direktur Keselamatan Perkeretaapian

Jumardi
NIP 196903061998031002

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP: +62 813-6001-3838

WEBSITE : http://djka.dephub.go.id/
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Laporan Kejadian Kecelakaan

1. Ringkasan Kejadian

a. Tanggal Kejadian : Jumat, 1 Agustus 2025

b. Data Lokasi Kejadian Kecelakaan
   1) Kilometer Jalur Kereta Api : 124+5/6
   2) Petak Jalur Kereta Api : Cipunagara – Pagedan Baru
   3) Lintas Jalur : Cikampek – Cirebon
   4) Penyelenggara Perkeretaapian : PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 3 Cirebon
   5) Wilayah Kerja BTP : BTP Kelas I Jawa Barat
   6) Kecamatan, Kota/Kab. : Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang

c. Data Prasarana KA
   1) Jumlah Jalur : 5 (Lima) Jalur
   2) Tipe Rel : R 54
   3) Jenis Bantalan : Beton
   4) Jenis Penambat : KA-clip, E-Clip, dan DE-Clip
   5) Topografi : Dataran
   Kecamatan, Kota/Kab. : Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang

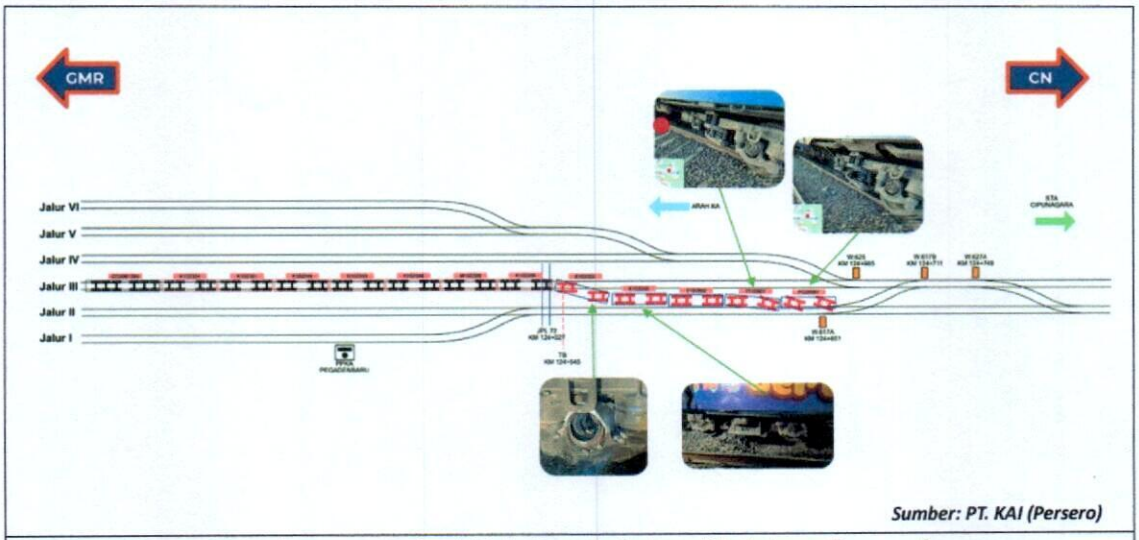
d. Data Sarana Kereta Api
   Nomor Sarana : KA 1 Argo Bromo Anggrek
   Jenis Pelayanan : Kereta Penumpang
   Susunan Rangkaian : CC 206 13 80
   1. K1 0 23 54
   2. K1 0 23 51
   3. K1 0 23 44
   4. K1 0 23 43
   5. K1 0 23 48
   6. M1 0 23 06
   7. K1 0 23 56
   8. K1 0 23 50
   9. K1 0 23 45
   10. T1 0 09 02 / *Compartement Suite*
   11. T1 0 09 01 / *Compartement Suite*
   12. P 0 23 06

d. Data SDM : Masinis: Teguh Widodo (65192)
   Asisten Masinis: Edy Suradi (47863)

e. Jenis Kecelakaan : Anjlokan

f. Kronologi Kejadian Kecelakaan :
   Pada hari jumat tanggal 1 Agustus 2025 pukul 15.47 WIB KA 1 Argo Bromo Anggrek dengan relasi perjalanan Surabaya Pasar Turi – Gambir mengalami anjlok di Emplasemen Pegadenbaru. pukul 15.47 WIB Pusat Pengendali menerima laporan dari

Masinis KA 152 (Brantas) melihat rangkaian KA 1 Argo Bromo Anggrek anjlok di Emplasemen Pegaden Baru. Pukul 15.48 WIB petugas terkait melakukan koordinasi mengenai kejadian tersebut. Pukul 15.54 WIB Kepala Stasiun Pegaden Baru memberikan informasi, bahwa ada 5 rangkaian kereta KA 1 Argo Bromo Anggrek yang anjlok. Berdasarkan Sumber dari PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sejauh 137, 29 KM dari titik jatuh kereta KA 1 Argo Bromo Anggrek ditemukan End Cap Bearing lepas dari bogie nomor rangkaian K1 0 23 50 tepatnya di KM 181+095 jalur 4 Stasiun Tanjung. Kemudian di titik KM 153+0 (Petak Kadokangabus Cilegeh) ditemukan potongan AS Tap yang lepas dari bogie nomor rangkaian K1 0 23 50. Berdasarkan dari sumber PT. Kereta Api Indonesia (Persero) KA 1 Argo Bromo Anggrek mengalami Titik Angkat Jatuh di KM 129+742,6 dan mengalami Titik Berhenti di KM 124+545.



Sumber: PT. KAI (Persero)

Layout Emplasemen Lokasi Kejadian Anjlokan KA 1 Argo Bromo Anggre



Sumber: PT. KAI (Persero)

Peta Lintas Kejadian Anjlokan KA 1 Argo Bromo Anggrek

2. Dampak Kejadian Kecelakaan

a. Gangguan Operasional Kereta Api

- Terdapat beberapa pembatalan perjalanan KA pada tanggal 1 Agustus 2025 (imbas dari anjlokan KA 1 Argo Bromo Anggrek), diantaranya:

NO	NO KA	NAMA KA	RELASI PEMBATALAN	STATUS PERJALANAN
1	64	Manahan	Gambir – Solo	Batal Relasi Penuh
2	19	Argo Sindoro	Semarang Tawang – Gambir	Batal Relasi Penuh
3	180	Tawangjaya Premium	Pasar Senen – Semarang Tawang	Batal Relasi Penuh
4	150	Singasari	Pasar Senen - Blitar	Batal Relasi Penuh
5	92-93	Jayabaya	Pasar Senen – Malang	Batal Relasi Penuh
6	123	Cakrabuana	Jatibarang – Gambir	Batal Sebagian Relasi
7	122	Cakrabuana	Gambir – Purwokerto	Batal Relasi Penuh
8	116	Sawunggalih	Pasarsenen – Kutoarjo	Batal Relasi Penuh
9	27	Argo Merbabu	Cirebong – Gambir	Batal Sebagian Relasi
10	28	Argo Merbabu	Gambir – Semarang Tawang	Batal Relasi Penuh
11	164	Gumarang	Pasar Senen – Surabaya Pasarturi	Batal Relasi Penuh
12	30F	Argo Anjasmoro	Gambir – Surabaya Pasarturi	Batal Relasi Penuh
13	260	Tawang Jaya	Pasar Senen – Semarang Tawang	Batal Relasi Penuh
14	119	Gunungjati	Cirebon-Gambir	Batal Sebagian Relasi
15	252	Jayakarta	Karawang-SurabayaGubeng	Batal Sebagian Relasi
16	254	Kertajaya	Cikampek – Surabaya Pasarturi	Batal Sebagian Relasi
17	48	Taksaka	Gambir – Yogyakarta	Batal Relasi Penuh
18	60F-57F	Purwojaya	CP – Gambir	Batal Relasi Penuh
19	61	Manahan	Cirebon – Gambir	Batal Sebagian Relasi
20	179	Tawangjaya Premium	Cirebon – Pasar Senen	Batal Sebagian Relasi
21	49	Purwojaya	Cirebon – Gambir	Batal Sebagian Relasi
22	54-55	Purwojaya	Gambir – Cilacap	Batal Relasi Penuh
23	22	Argo Muria	Gambir – Semarang Tawang	Batal Relasi Penuh
24	258	Progo	Pasar Senen - Lempuyanagan	Batal Relasi Penuh

- Terdapat beberapa pembatalan perjalanan KA pada tanggal 2 Agustus 2025 (imbas dari anjlokan KA 1 Argo Bromo Anggrek), diantaranya:

NO	NO KA	NAMA KA	RELASI PEMBATALAN	STATUS PERJALANAN
1	1	Argo Bromo Anggrek	Sb Pasarturi-Gambir	Batal Relasi Penuh
2	2	Argo Bromo Anggrek	Gambir-Sb Pasarturi	Batal Relasi Penuh
3	5	Argo Semeru	Sb Gubeng-Gambir	Batal Relasi Penuh
4	6	Argo Semeru	Gambir-Sb Gubeng	Batal Relasi Penuh
5	13	Argo Lawu	Solo Balapan-Gambir	Batal Relasi Penuh
6	16	Argo Dwipangga	Gambir-Solo Balapan	Batal Relasi Penuh
7	17	Argo Sindoro	Semarang Tawang-Gambir	Batal Relasi Penuh
8	20	Argo Muria	Gambir-Semarang Tawang	Batal Relasi Penuh
9	26	Argo Merbabu	Gambir-Semarang Tawang	Batal Relasi Penuh

10	27	Argo Merbabu	Semarang Tawang-Gambir	Batal Relasi Penuh
11	29F	Argo Anjasmoro	Sb Pasarturi-Gambir	Batal Relasi Penuh
12	39	Sembrani	Sb Pasarturi-Gambir	Batal Relasi Penuh
13	40	Sembrani	Gambir-Sb Pasarturi	Batal Relasi Penuh
14	43	Taksaka	Yogyakarta-Gambir	Batal Relasi Penuh
15	50F-51F	Purwojaya	Gambir - Cilacap	Batal Relasi Penuh
16	61	Manahan	Solo Balapan-Gambir	Batal Relasi Penuh
17	74	Fajar Utama Solo	Pasarsenen-Solo Balapan	Batal Relasi Penuh
18	75	Mataram	Solo Balapan-Pasarsenen	Batal Relasi Penuh
19	94-91	Jayabaya	Malang - Sb Pasarturi - Pasarsenen	Batal Relasi Penuh
20	103	Bogowonto	Lempuyangan-Pasarsenen	Batal Relasi Penuh
21	106	Gajahwong	Pasarsenen-Lempuyangan	Batal Relasi Penuh
22	109	Fajar Utama Yk	Yogyakarta-Pasarsenen	Batal Relasi Penuh
23	110	Fajar Utama Yk	Pasarsenen-Yogyakarta	Batal Relasi Penuh
24	111	Sawunggalih	Kutoarjo-Pasarsenen	Batal Relasi Penuh
25	114	Sawunggalih	Pasarsenen-Kutoarjo	Batal Relasi Penuh
26	115	Sawunggalih	Kutoarjo-Pasarsenen	Batal Relasi Penuh
27	132	Parahyangan	Gambir-Bandung	Batal Relasi Penuh
28	133	Parahyangan	Bandung-Gambir	Batal Relasi Penuh
29	137	Parahyangan	Bandung-Gambir	Batal Relasi Penuh
30	138	Parahyangan	Gambir-Bandung	Batal Relasi Penuh
31	143	Madiun Jaya	Madiun-Pasarsenen	Batal Relasi Penuh
32	144	Madiun Jaya	Pasarsenen-Madiun	Batal Relasi Penuh
33	149	Singasari	Blitar-Pasarsenen	Batal Relasi Penuh
34	163	Gumarang	Sb Pasarturi-Pasarsenen	Batal Relasi Penuh
35	175	Menoreh	Semarang Tawang-Pasarsenen	Batal Relasi Penuh
36	178	Tawangjaya Premium	Pasarsenen-Semarang Tawang	Batal Relasi Penuh
37	179	Tawangjaya Premium	Semarang Tawang-Pasarsenen	Batal Relasi Penuh
38	251	Jayakarta	Sb Gubeng-Pasarsenen	Batal Relasi Penuh
39	259	Tawang Jaya	SemarangPoncol-Pasarsenen	Batal Relasi Penuh
40	267	Banyubiru	Solo Balapan-Semarang Tawang	Batal Relasi Penuh
41	268	Banyubiru	Semarang Tawang-Solo Balapan	Batal Relasi Penuh
42	7006	Batavia	Gambir - Solo Balapan	Batal Relasi Penuh
43	7005	Batavia	Solo Balapan - Gambir	Batal Relasi Penuh
44	101-100	Harina	Bandung - Sb Pasarturi	Batal Relasi Penuh
45	70	Malabar	Bandung-Malang	Batal Relasi Penuh
46	257	Progo	Lempuyangan-Pasarsenen	Batal Relasi Penuh
47	46	Taksaka	Gambir-Yogyakarta	Batal Relasi Penuh
48	47	Taksaka	Yogyakarta-Gambir	Batal Relasi Penuh
49	166	Dharmawangsa Ekspres	Pasarsenen-Sb Pasarturi	Batal Relasi Penuh

50	165	Dharmawangsa Ekspres	Sb Pasarturi-Pasarsenen	Batal Relasi Penuh
51	271	Airlangga	Sb Pasarturi-Pasarsenen	Batal Relasi Penuh
52	272	Airlangga	Pasarsenen-Sb Pasarturi	Batal Relasi Penuh
53	282	Bengawan	Pasarsenen-Purwosari	Batal Relasi Penuh
54	281	Bengawan	Purwosari-Pasarsenen	Batal Relasi Penuh

b. Prasarana Kereta Api :

Akibat Anjlokan Kereta Api 1 Argo Bromo Anggrek terdapat kerusakan terhadap Prasarana Perkertetaapian yaitu:

- Kerusakan terhadap bantalan dan Penambat Rel sepanjang 5,19 KM dari Titik Awal Jatuh KM 129+742,6 s.d Titik Berhenti KM 124+545;
- Kerusakan terhadap wesel 17B dan wesel 17A akibat anjlokan KA 1 Argo Bromo Anggrek;
- Patahnya Stang Motor wesel 17B dan wesek 17A



Kerusakan Bantalan Akibat Anjlokan KA 1 Argo Bromo Anggrek



Kerusakan Wesel Akibat Anjlokan KA 1 Argo Bromo Anggrek

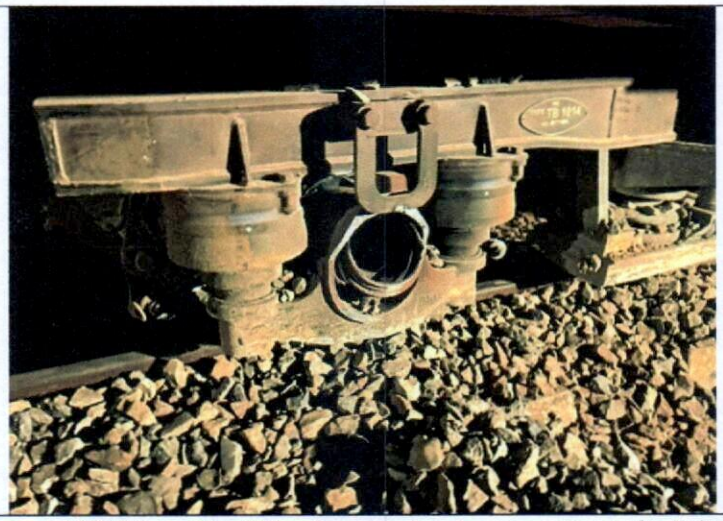
c. Sarana Kereta Api :

a) Kereta Api 1 Argo Bromo Anggrek mengalamai anjlok dan berdampak terhadap 5 kereta (total 20 as) yaitu:
   - K1 0 23 50 (anjlok);
   - K1 0 23 45 (anjlok);
   - T1 0 09 02 / Compartement Suite (anjlok);
   - T1 0 09 01 / Compartement Suite (anjlok);
   - P 0 23 06 (anjlok).

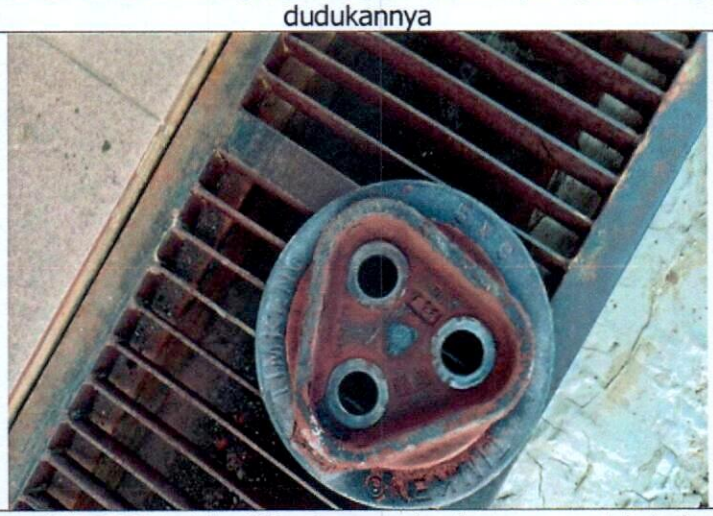
b) Terdapat komponen bogie yaitu End Cap Bearing yang lepas dari K1 0 23 50;

c) Terdapat kerusakan pada Astap dan mengalami lepas dari bogie KA 1 Argo Bromo Anggrek;

d) Kerusakan terhadap roda kereta api pada ke-5 (Lima) kereta yang terdampak Anjlok.



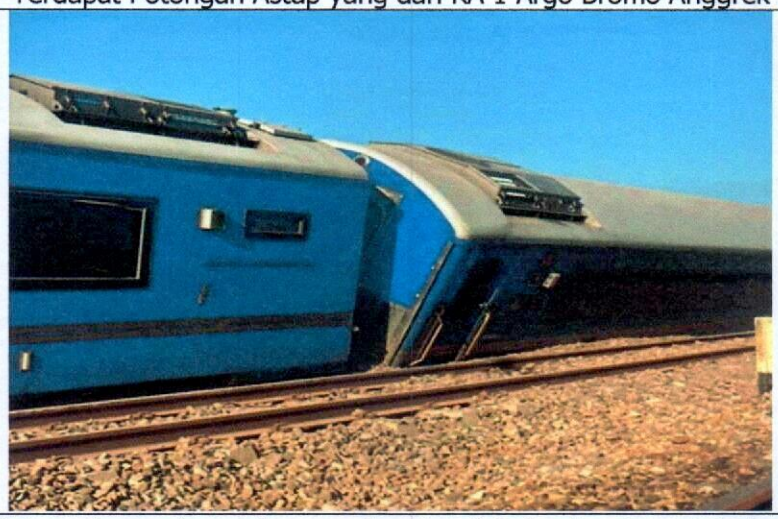
Sarana K102350 teridentifikasi mengalami gangguan pada Axle End Cap salah satu as roda yang mengakibatkan lepasnya bearing dari dudukannya



Sarana K102350 teridentifikasi mengalami gangguan teknis berupa lepas bearing pada salah satu as roda.



Terdapat Potongan Astap yang dari KA 1 Argo Bromo Anggrek



KA 1 Argo Bromo Anggrek mengalamai anjlok dan berdampak terhadap 5 kereta (total 20 as)

3. TINDAK LANJUT PENANGANAN

1. Melakukan Evakuasi terhadap ke 5 Sarana yang terdampak Anjlok dengan menggunakan Sarana Crane milik DJKA dan PT. KAI (Persero) sebanyak 2 (Dua) unit:
   a. pengangkatan pertama dilakukan pada K102350 dan berhasil diangkat pada pukul 23.54 WIB (1 Agustus 2025);
   b. pengangkatan kedua dilakukan pada K102345 dan berhasil diangkat pada pukul 03.06 WIB (2 Agustus 2025);
   c. pengangkatan ke tiga dilakukan pada T100902 dan berhasil diangkat pada pukul 05.04 WIB (2 Agustus 2025);
   d. pengangkatan ke empat dilakukan pada T100901 dan berhasil diangkat pada pukul 06.21 WIB (2 Agustus 2025);
   e. pengangkatan kelima dilakukan pada P02305 dan berhasil diangkat pukul 07.08 dan evakuasi sarana selesai pada pukul 07.09 (2 Agustus 2025).
2. Tanggal 2 Agustus 2025 pukul 07.30 - 10.30 WIB, proses perbaikan menggunakan sarana MTT (Multi Tie Temper) dimulai untuk memulihkan lintas yang terdampak.

Pekerjaan difokuskan pada penataan kembali posisi rel, pemerataan dan pemadatan balas, serta pemeriksaan bantalan dan sambungan rel;

3. Pada tanggal 2 Agustus 2025 pukul 10. 30 WIB, selesai perbaikan Jalur dapat dilalui kembali oleh Kereta api Argo Lawu (KA 14) rute Gambir - Solo Balapan pada pukul 10.57 WIB dengan kecepatan terbatas 10 Km/jam;
4. Pada tanggal 2 Agustus 2025 pada pukul 17:49 WIB, perjalanan kereta Api untuk Kereta Api yang berjalan langsung di Stasiun Pegadenbaru dapat diatur lewat jalur belok (IV) berlaku ketentuan pembatasan kecepatan 60 km/jam.

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA POGRAM 3

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN

Dashboard

SURVEI

IKM/ IPK
IKM-IPK Juli 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK Juni 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK Mei 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK April 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK Maret 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK Februari 2025

< >
1 - 20 dari ?

Copy Share Infografis

SURVEI IKM-IPK JULI 2025

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)
16.83/17.50
96.19/100 3.85/4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)
17.03/17.50
97.33/100 3.89/4

Responden
402

Lokus
6/8
Partisipasi (75 %)

Sangat Baik Baik Kurang Baik Tidak Baik



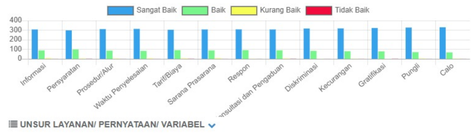
UNIT ORGANISASI

Unit Organisasi	Lokus	Nilai	Mutu
Unit Pusat Ditjen Perkertaapian	6	96.76	Sangat Baik (A)

LOKUS

No.	Nama Lokus	Nilai	Indeks 4	Mutu
1	Balai Pengelola Kereta Api Ringan	98.25	3.93	Sangat Baik (A)
2	Balai Pengujian Perkeretaapian	96.42	3.86	Sangat Baik (A)
3	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	98.36	3.93	Sangat Baik (A)
4	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	100	4	Sangat Baik (A)
5	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	97.51	3.90	Sangat Baik (A)
6	Direktorat Sarana Perkeretaapian	90	3.60	Sangat Baik (A)

IKM/ IPK



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

16.83/17 96.19/10 3.85/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

ANALISIS GAP VARIABEL



Variabel	Indeks Rata-Rata
Informasi	16.79
Persyaratan	16.74
Prosedur/Alur	16.90
Waktu Penyelesaian	16.79
Tarif/Biaya	16.96
Sarana Prasarana	16.82
Respon	16.87
Konsultasi dan Pengaduan	16.78

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

17.03/17 97.33/10 3.89/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

ANALISIS GAP VARIABEL



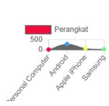
Variabel	Indeks Rata-Rata
Diskriminasi	17.02
Kecurangan	16.99
Gratifikasi	17
Pungli	17.07
Calo	17.08

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

PENGGUNAAN PERANGKAT

PERANGKAT



PENYEDIA INTERNET (ISP)



BROWSER



OPERATING SYSTEM

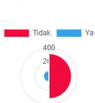


PROFIL RESPONDEN

PENCACAHAN



PENGARAHAN PETUGAS/ PEGAWAI



PERBAIKAN



USIA



JENIS KELAMIN



Muhammad Sofyan Hadi Mustofa
Analis Organisasi dan Tata Laksana

Dashboard

SURVEI

- IKM/ IPK — IKM-IPK Agustus 2025
- IKM/ IPK — IKM-IPK Juli 2025
- IKM/ IPK — IKM-IPK Juni 2025
- IKM/ IPK — IKM-IPK Mei 2025
- IKM/ IPK — IKM-IPK April 2025
- IKM/ IPK — IKM-IPK Maret 2025

1 - 20 dari ?

Copy Share Infografis

SURVEI IKM-IPK AGUSTUS 2025

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)
16.56/17.50
94.61/100 3.78/4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)
16.66/17.50
95.20/100 3.81/4

Responden
692

Lokus
5/8
Partisipasi (62.50 %)

Sangat Baik Baik Kurang Baik Tidak Baik



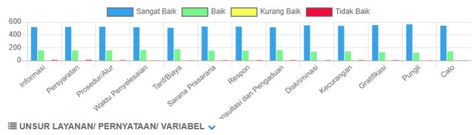
UNIT ORGANISASI

Unit Organisasi	Lokus	Nilai	Mutu
Unit Pusat Ditjen Perkertaapian	5	94.90	Sangat Baik (A)

LOKUS

No.	Nama Lokus	Nilai	Indeks 4	Mutu
1	Balai Pengelola Kereta Api Ringan	99.38	3.98	Sangat Baik (A)
2	Balai Pengujian Perkeretaapian	96.20	3.85	Sangat Baik (A)
3	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	85	3.40	Baik (B)
4	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	99.63	3.99	Sangat Baik (A)
5	Direktorat Sarana Perkeretaapian	94.32	3.77	Sangat Baik (A)

IKM/ IPK



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

16.56/17 | 94.61/10 | 3.78/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

ANALISIS GAP VARIABEL



Variabel	Indeks Rata-Rata
Informasi	16.61
Persyaratan	16.62
Prosedur/Alur	16.45
Waktu Penyelesaian	16.47
Tarif/Biaya	16.62
Sarana Prasarana	16.55
Respon	16.49
Konsultasi dan Pengaduan	16.64

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

16.66/17 | 95.20/10 | 3.81/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

ANALISIS GAP VARIABEL



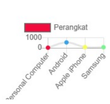
Variabel	Indeks Rata-Rata
Diskriminasi	16.67
Kecurangan	16.64
Gratifikasi	16.64
Pungli	16.69
Calo	16.67

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

PENGGUNAAN PERANGKAT

PERANGKAT



PENYEDIA INTERNET (ISP)



BROWSER



OPERATING SYSTEM



PROFIL RESPONDEN

PENCACAHAN



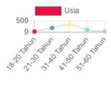
PENGARAHAN PETUGAS/ PEGAWAI



PERBAIKAN



USIA



JENIS KELAMIN



™ Transparent, Informative, Great, Action, Actual and Synergy, © 2020 - 2025 Kementerian Perhubungan.

Muhammad Sofyan Hadi Mustofa
Analis Organisasi dan Tata Laksana

Dashboard

SURVEI

- IKM/ IPK — IKM-IPK September 2025
- IKM/ IPK — IKM-IPK Agustus 2025
- IKM/ IPK — IKM-IPK Juli 2025
- IKM/ IPK — IKM-IPK Juni 2025
- IKM/ IPK — IKM-IPK Mei 2025
- IKM/ IPK — IKM-IPK April 2025

1 - 20 dari ?

Copy Share Infografis

SURVEI IKM-IPK SEPTEMBER 2025

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)
16.43/17.50
93.88/100 3.76/4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)
16.78/17.50
95.89/100 3.84/4

Responden 691

Lokus 6/8
Partisipasi (75 %)

Sangat Baik Baik Kurang Baik Tidak Baik



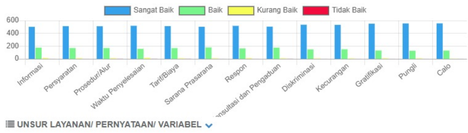
UNIT ORGANISASI

Unit Organisasi	Lokus	Nilai	Mutu
Unit Pusat Ditjen Perkertaapian	6	94.89	Sangat Baik (A)

LOKUS

No.	Nama Lokus	Nilai	Indeks 4	Mutu
1	Balai Pengelola Kereta Api Ringan	97.72	3.91	Sangat Baik (A)
2	Balai Pengujian Perkeretaapian	96.27	3.85	Sangat Baik (A)
3	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	89.89	3.60	Baik (B)
4	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	95.18	3.81	Sangat Baik (A)
5	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	94.55	3.78	Sangat Baik (A)
6	Direktorat Sarana Perkeretaapian	95.71	3.83	Sangat Baik (A)

IKM/ IPK



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

16.43/17 93.88/10 3.76/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

ANALISIS GAP VARIABEL



Variabel	Indeks Rata-Rata
Informasi	16.28
Persyaratan	16.39
Prosedur/Alur	16.33
Waktu Penyelesaian	16.47
Tarif/Biaya	16.62
Sarana Prasarana	16.44
Respon	16.46
Konsultasi dan Pengaduan	16.45

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

16.78/17 95.89/10 3.84/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

ANALISIS GAP VARIABEL



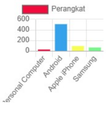
Variabel	Indeks Rata-Rata
Diskriminasi	16.74
Kecurangan	16.78
Gratifikasi	16.75
Pungli	16.77
Calo	16.86

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

PENGGUNAAN PERANGKAT

PERANGKAT



PENYEDIA INTERNET (ISP)



BROWSER



OPERATING SYSTEM



PROFIL RESPONDEN

PENCACAHAN



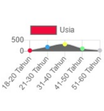
PENGARAHAN PETUGAS/ PEGAWAI



PERBAIKAN



USIA



JENIS KELAMIN



LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA POGRAM 4

PERSENTASE ON TIME PERFORMANCE (OTP) TRANSPORTASI KERETA API

I. Capaian Kinerja Tahun 2025

A. Realisasi Perjalanan Kereta Api

Bulanan			Renaksi	Program		Realisasi					
						Frekuensi				Capaian	
			Bulanan	Bulanan	Kumulatif	KA Penumpang	KA Barang	Total	Total Kumulatif	Bulanan	Kumulatif
TW 1	1	Januari	95,6%	89.201	89.201	82.002	6.398	88.400	88.400	99,10%	99,10%
	2	Februari	95,6%	77.948	167.149	76.090	5.958	82.048	170.448	105,26%	101,97%
	3	Maret	95,6%	86.518	253.667	84.652	6.068	90.720	261.168	104,86%	102,96%
TW 2	4	April	95,6%	83.355	337.022	81.933	6.124	88.057	349.225	105,64%	103,62%
	5	Mei	95,6%	85.963	422.985	84.030	6.728	90.758	439.983	105,58%	104,02%
	6	Juni	95,6%	83.315	506.300	81.676	6.270	87.946	527.929	105,56%	104,27%
TW 3	7	Juli	95,6%	86.359	592.659	85.939	6.609	92.548	620.477	107,17%	104,69%
	8	Agustus	95,6%	86.143	678.802	85.453	6.842	92.295	712.772	107,14%	105,00%
	9	September	95,6%	83.496	762.298	82.834	6.634	89.468	802.240	107,15%	105,24%
TW 4	10	Oktober	95,6%	86.347	848.645	-	-	-	-	-	-
	11	November	95,6%	83.428	932.073	-	-	-	-	-	-
	12	Desember	95,6%	86.684	1.018.757	-	-	-	-	-	-

B. Jumlah Kedatangan Kereta Api Tepat Waktu (OTP)

BULAN		RENAKSI	REALISASI		KA BERANGKAT TEPAT				KA DATANG TEPAT				RATA RATA		PERSENTASE CAPAIAN	
		Bulanan	Barang + Penumpang	Kumulatif	Barang	Penumpang	Barang + Penumpang	Kumulatif	Barang	Penumpang	Barang + Penumpang	Kumulatif	Berangkat + Datang	Kumulatif	Bulanan	Kumulatif
TW 1	Januari	96,2%	88.400	88.400	6.035	81.436	87.471	87.471	5.165	79.812	84.977	84.977	86.224	86.224	97,54%	97,54%
	Februari	96,2%	82.048	170.448	5.646	75.295	80.941	168.412	4.361	73.855	78.216	163.193	79.579	165.803	96,99%	97,27%
	Maret	96,2%	90.720	261.168	5.740	84.045	89.785	258.197	4.621	82.793	87.414	250.607	88.600	254.402	97,66%	97,41%
TW 2	April	96,2%	88.057	349.225	5.830	81.406	87.236	345.433	4.937	80.504	85.441	336.048	86.339	340.741	98,05%	97,57%
	Mei	96,2%	90.758	439.983	6.416	83.758	90.174	435.607	5.376	83.287	88.663	424.711	89.419	430.159	98,52%	97,77%
	Juni	96,2%	87.946	527.929	6.059	81.345	87.404	523.011	5.222	80.850	86.072	510.783	86.738	516.897	98,63%	97,91%
TW 3	Juli	96,2%	92.548	620.477	6.304	85.466	91.770	614.781	5.328	84.941	90.269	601.052	91.020	607.917	98,35%	97,98%
	Agustus	96,2%	92.295	712.772	6.448	84.552	91.000	705.781	5.218	83.739	88.957	690.009	89.979	697.895	97,49%	97,91%
	September	96,2%	89.468	802.240	6.248	82.492	88.740	794.521	5.124	81.852	86.976	776.985	87.858	785.753	98,20%	97,94%
TW 4	Oktober	96,2%	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-
	November	96,2%	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-
	Desember	96,2%	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-

Keterangan:

: Rencana Aksi (Renaksi) bulanan berdasarkan Perjanjian Kinerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Tahun 2025

: Data sementara, akan disampaikan revisi data setelah evaluasi pelaksanaan Gapeka Triwulan III 2025

II. Matriks Analisis Keberhasilan

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Triwulan III 2025	Realisasi Triwulan III 2025	Analisis Keberhasilan
1	Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api berdasarkan Gapeka	95,60%	105,24%	Terpenuhinya Target IKU tersebut dipengaruhi oleh: a. Penambahan frekuensi Kereta Api Ringan / *Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi yang sebelumnya diprogramkan sebanyak 158 KA, saat ini beroperasi sebanyak 366 KA saat *weekday* dan 270 KA saat *weekend*; b. Penambahan frekuensi Kereta Api Ringan Sumatera Selatan yang sebelumnya diprogramkan sebanyak 88 KA, saat ini beroperasi sebanyak 94 KA saat *weekday* dan 102 KA saat *weekend*; dan c. Pengoperasian KA Tambahan pada masa libur panjang akhir pekan selama Juli s.d. September 2025
2	Persentase Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Tepat Waktu	96,20%	97,94%	Terpenuhinya Target IKU seiring dengan tingginya OTP selama Juli s.d. September 2025 pada MRT Jakarta (99,98%), LRT Jakarta (99,98%), LRT Sumatera Selatan (99,82%), dan LRT Jabodebek (99,55%).

III. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Peningkatan Kinerja Periode Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Rekomendasi Periode Sebelumnya	Tindak Lanjut
1	Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api berdasarkan Gapeka	a. Menjaga agar perjalanan KA sesuai dengan yang telah diprogramkan pada Gapeka dan Perjalanan di Luar Gapeka; b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan Gapeka pada jaringan jalur kereta api nasional secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali; c. Penyesuaian program perjalanan KA pada jaringan jalur KA nasional Kereta Api Ringan / *Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi dan Kereta Api Ringan Sumatera Selatan.	a. Telah diterbitkan Surat Direktur Jenderal Perkeretaapian perihal Penetapan Perjalanan Kereta Api di Luar Grafik Perjalanan Kereta Api >30 hari berturut-turut pada tanggal 18 Juli 2025 dengan Nomor: KA.407/1/2/DJKA/2025 dan tanggal 27 Agustus 2025 dengan Nomor: KA.407/1/3/DJKA/2025; b. Telah dilaksanakan evaluasi pelaksanaan Gapeka pada jaringan jalur ka nasional: - Kereta Api Ringan / *Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi pada tanggal 22 Agustus; - Jawa dan Sumatera pada tanggal 8 - 10 Oktober 2025. c. Telah dilaksanakan pemeriksaan kelengkapan dokumen data dukung penetapan Gapeka Kereta Api Ringan / *Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Hasil pemeriksaan disampaikan melalui Surat Direktur Lalu Lintas Nomor:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Rekomendasi Periode Sebelumnya	Tindak Lanjut
			KA.407/1/15/K2/DJKA/2025 tanggal 8 Oktober 2025
2	Persentase Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Tepat Waktu	a. Menjaga agar perjalanan KA sesuai dengan yang telah diprogramkan pada Gapeka dan Perjalanan di Luar Gapeka; b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan Gapeka pada jaringan jalur kereta api nasional secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali; dan c. Mendorong agar Badan Usaha Penyelenggara Prasarana dan Balai Teknik Perkeretaapian mengantisipasi kelambatan perjalanan KA.	a. Telah dilaksanakan evaluasi harian kinerja operasi pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Kereta Api Ringan Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, serta Kereta Api Kecepatan Tinggi Jakarta - Bandung. Akan dilakukan evaluasi pelaksanaan Gapeka sebagai verifikasi dan validasi data capaian dimaksud; b. Telah dilaksanakan evaluasi pelaksanaan Gapeka pada jaringan jalur Kereta Api Nasional sebagai berikut: - Kereta Api Ringan / *Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi pada tanggal 22 Agustus - Jawa dan Sumatera pada tanggal 8 - 10 Oktober 2025

IV. Matriks Upaya Peningkatan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Triwulan III 2025	Realisasi Triwulan III 2025	Kriteria Upaya	Rekomendasi
1	Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api berdasarkan Gapeka	95,40%	105,24%	Aktivitas	a. Menjaga agar perjalanan KA sesuai dengan yang telah diprogramkan pada Gapeka dan Perjalanan di Luar Gapeka; b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan Gapeka pada jaringan jalur kereta api nasional secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
				Kebijakan	a. Penyesuaian program perjalanan KA pada jaringan jalur KA nasional Kereta Api Ringan / *Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi dan Kereta Api Ringan Sumatera Selatan.
2	Persentase Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Tepat Waktu	96,20%	97,94%	Aktivitas	a. Menjaga agar perjalanan KA sesuai dengan yang telah diprogramkan pada Gapeka dan Perjalanan di Luar Gapeka; b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan Gapeka pada jaringan jalur kereta api nasional secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali; dan

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Triwulan III 2025	Realisasi Triwulan III 2025	Kriteria Upaya	Rekomendasi
					c. Mendorong agar Badan Usaha Penyelenggara Prasarana dan Balai Teknik Perkeretaapian mengantisipasi kelambatan perjalanan KA;

Awang Meindra
NIP 198105162002121003

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA POGRAM 5

PERSENTASE PEMENUHAN TARGET ANGKUTAN KERETA API

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP: +62 813-6001- 3838

WEBSITE : djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

NOTA DINAS
Nomor : 374/ND/K2.3/DJKA/2025

Yth : Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
Dari : Kepala Sub Direktorat Angkutan
Hal : Penyampaian Data Dukung Pencapaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 di Lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
Tanggal : 22 Oktober 2025

Sehubungan dengan Nota Dinas Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Nomor: 0378/K2/X/2025 tanggal 30 September 2025 perihal Permohonan Data Dukung Laporan Kinerja Periode Triwulan III Tahun 2025 di Lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, bersama ini kami sampaikan data dukung kinerja Triwulan III Tahun 2025 di Subdirektorat Angkutan sebagai berikut:

1. Data Capaian Kinerja Triwulan III 2025

Uraian	Target Triwulan III	Realisasi Triwulan III	Persentase
Angkutan Penumpang	386.080.004 Penumpang	403.746.013 Penumpang	**105%**
Angkutan Barang	17.145.500 Ton	17.815.515 Ton	**104%**

Rincian data angkutan terlampir.

2. Matriks Analisa Keberhasilan/Kegagalan

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Triwulan III	Realisasi Per September 2025	Analisa Keberhasilan/Kegagalan
1.	Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	386.080.004 Penumpang	403.746.013 Penumpang	1. Realisasi Angkutan Penumpang KRL Jabodetabek Selama Triwulan III Tahun 2025 sebesar 255.520.949 penumpang dengan rata-rata penumpang *weekday* sebesar 1.034.831 penumpang. 2. Realisasi Angkutan Penumpang Kereta Cepat Jakarta Bandung Selama Triwulan III Tahun 2025 sebesar 4.524.091 penumpang dengan rata-rata penumpang sebesar 16.581 penumpang; 3. Realisasi Angkutan penumpang LRT Jabodebek Selama Triwulan III Tahun 2025 sebesar

No...

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Triwulan III	Realisasi Per September 2025	Analisa Keberhasilan/Kegagalan
				20.769.914 penumpang dengan rata-rata penumpang *weekday* sebesar 95.864 penumpang; 4. Persentase Realisasi Angkutan Penumpang terhadap Target Penumpang pada Triwulan III Tahun 2025 sebesar 105%.
2.	Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api	17.145.500 Ton	17.815.515 Ton	1. Realisasi Angkutan Barang Triwulan III Tahun 2025 sebesar 17.815.515 Ton. Jika dibandingkan dengan realisasi pada Triwulan III Tahun 2024, terdapat penurunan sebesar 353.580 ton. Namun demikian, capaian tersebut telah memenuhi target program per Triwulan III Tahun 2025. 2. Meningkatnya permintaan volume barang yang diangkut pada Triwulan III Tahun 2025 menyebabkan kenaikan volume angkutan dibandingkan dengan Triwulan II Tahun 2025, khususnya pada komoditas batubara.

3. Matriks Tindak lanjut Rekomendasi Peningkatan Kinerja Periode Sebelumnya

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Rekomendasi Periode Sebelumnya	Tindak Lanjut
1.	Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	Mendorong Penyelenggara Sarana Perkeretaapian untuk terus meningkatkan sosialisasi/publikasi pada media sosial untuk menggunakan transportasi kereta api yang telah terintegrasi baik antarmoda maupun intermoda	1. Monitoring Penyelenggaraan Pelaksanaan Layanan Transportasi dalam Rangka Pemberian Diskon Tarif Transportasi Kereta Api untuk Stimulasi Ekonomi pada tanggal 2 Juli 2025; 2. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Perawatan Bangunan Stasiun KRL dan KA Lokal pada tanggal 8 Juli 2025; 3. Telah dilakukan diskusi progress Implementasi QRIS TA di Moda Transportasi pada tanggal 9 Juli 2025;

No...

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Rekomendasi Periode Sebelumnya	Tindak Lanjut
			4. Telah dilakukan Rapat pembahasan Rencana Pemberlakuan Tarif Rp80,- pada KRL Jabodetabek dan LRT Jabodebek Dalam Rangka Kemerdekaan RI pada tanggal 4 Agustus 2025 5. Telah dilakukan FGD Indikasi Proyek Pembangunan 10 Wilayah Metropolitan Terkait Isu Transportasi dan Konektivitas untuk RPJMN 2025-2029 pada tanggal 25 September 2025.
2.	Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api	Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian melakukan publikasi/sosialisasi dan aktif memberikan informasi dan gambaran angkutan barang menggunakan Kereta Api serta berbagai keunggulan yang dimiliki angkutan barang.	1. Telah dilakukan sosialisasi pada media sosial dengan memberikan informasi kelebihan angkutan barang dengan moda KA untuk meningkatkan pengguna transportasi angkutan barang dengan moda KA; 2. Telah disampaikan surat kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) pada tanggal 7 Oktober 2025 perihal Koordinasi Evaluasi Kinerja Angkutan Barang Tahun 2025, sebagai tindak lanjut evaluasi atas capaian kinerja angkutan barang Semester I Tahun 2025 serta upaya peningkatan kinerja angkutan barang menggunakan kereta api. 3. Telah dilaksanakan serangkaian pembahasan Draft RPerpres Penguatan Logistik Nasional yang diprakarsai oleh Kemenko Perekonomian, dalam rangka mendukung peningkatan angkutan barang perkeretaapian dan penguatan logistik nasional; 4. Telah dilaksanakan Audiensi dengan Dishub DKI Jakarta tanggal 18 Juli 2025 perihal Permohonan Audiensi Rencana Pengembangan Stasiun Angkutan Barang di DKI Jakarta, sebagai upaya peningkatan kinerja angkutan barang khususnya komoditas beras dan tekstil;

No...

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Rekomendasi Periode Sebelumnya	Tindak Lanjut
			5. Telah dilakanakan rapat Pembahasan Permohonan Stasiun Kalimas Sebagai Stasiun Muat Angkutan Limbah B3 dan Stasiun Nambo Sebagai Stasiun Bongkar Angkutan Limbah B3, sebagai upaya peningkatan kinerja angkutan barang khususnya komoditas limbah B3; 6. Telah disampaikan Nota Dinas kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian tanggal 1 Oktober 2025 terkait Penyusunan Kajian Peningkatan Utilisasi Jalur KA Pelayanan Angkutan Barang yang Terhubung dengan Pusat Logistik, sebagai upaya optimalisasi sarana dan prasarana dan menyusun rencana pengembangan untuk peningkatan utilisasi jalur KA pelayanan barang yang terhubung dengan pusat logistik.

4. Matriks Upaya Peningkatan Kinerja

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Triwulan	Realisasi Per September 2025	Kriteria Upaya	Upaya Peningkatan Kinerja
1.	Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	386.080.004 Penumpang	403.746.013 Penumpang	Aktivitas	Meningkatkan fasilitas pelayanan baik di stasiun maupun dalam perjalanan kereta.
2.	Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api	17.145.500 Ton	17.815.515 Ton	Aktivitas	Meningkatkan koordinasi aktif dengan Badan Usaha Penyelenggara Sarana dalam pengangkutan barang.

Atas arahan dan petunjuk lanjut Bapak Direktur diucapkan terima kasih.

Aditya Karsa
NIP 198609022008121001

Lampiran Surat
Nomor : 374/ND/K2.3/DJKA/2025
Tanggal : 22 Oktober 2025

JUMLAH PENUMPANG KA TERANGKUT TRIWULAN III TAHUN 2025

PT Kereta Api Indonesia (Persero)

1. KA PSO

KA	Realisasi Jumlah Penumpang KA PSO Tahun 2025												TOTAL
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
KA Ekonomi Jarak Jauh	339.670	315.175	372.014	424.133	358.737	352.146	355.435	361.381	349.335				3.228.026
KA Ekonomi Jarak Sedang	595.501	530.652	531.125	635.461	594.000	620.005	617.269	589.040	563.972				5.277.025
KA Ekonomi Jarak Dekat	412.566	388.181	282.766	477.812	417.602	408.912	428.466	349.565	343.124				3.508.994
KRD Ekonomi	112.895	97.339	73.050	141.247	125.801	125.094	115.838	97.520	103.339				992.123
KA Ekonomi Lebaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
TOTAL	1.460.632	1.331.347	1.258.955	1.678.653	1.496.140	1.506.157	1.517.008	1.397.506	1.359.770				13.006.168
	Triwulan I		4.050.934	Triwulan II		8.731.884	Triwulan III		13.006.168	Triwulan IV			-

2. KA Komersial

KERETA	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	TOTAL
Eksekutif	1.065.697	900.285	880.660	1.276.568	1.021.793	1.232.848	1.234.049	1.076.819	1.097.751				9.786.470
Bisnis	100.989	89.043	84.960	114.097	83.843	102.566	75.881	43.447	38.876				733.702
Ekonomi	1.777.800	1.384.033	1.477.159	2.173.426	1.665.434	2.239.426	2.250.945	1.703.709	1.627.312				16.299.244
Lokal Eksekutif	38.067	23.852	24.355	35.970	30.735	33.560	31.385	28.211	34.779				280.914
Lokal Bisnis	12.900	-	-	-	-	-	-	-	-				12.900
Lokal Ekonomi	92.243	107.603	111.488	149.921	141.964	162.383	167.361	126.677	121.171				1.180.811
Wisata Ambarawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
Priority	15.896	10.056	10.256	20.993	17.936	22.775	26.748	19.684	21.013				165.357
TOTAL	3.103.592	2.514.872	2.588.878	3.770.975	2.961.705	3.793.558	3.786.369	2.998.547	2.940.902				28.459.398
	Triwulan I		8.207.342	Triwulan II		18.733.580	Triwulan III		28.459.398	Triwulan IV			-

3. KA Perintis

Kereta	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	TOTAL
LRT Sumsel	392.423	328.361	288.953	452.566	369.690	395.151	400.951	373.463	384.793				**3.386.351**
Cut Meutia	5.018	8.291	299	5.630	4.911	2.780	1.980	1.155	885				**30.949**
Lembah Anai	9.932	7.270	6.363	10.783	8.293	8.475	8.248	6.987	7.551				**73.902**
Bathara Kresna	12.497	17.931	12.408	17.214	16.963	16.890	16.010	12.645	12.896				**135.454**
Tanete Rilau - Palanro	17.943	17.935	9.453	34.289	36.545	32.868	32.862	22.980	23.993				**228.868**
Jumlah	**437.813**	**379.788**	**317.476**	**520.482**	**436.402**	**456.164**	**460.051**	**417.230**	**430.118**				**3.855.524**
	Triwulan I		**1.135.077**	**Triwulan II**		**2.548.125**	**Triwulan III**		**3.855.524**	**Triwulan IV**			

PT Kereta Commuter Indonesia

1. KA PSO

KA	Realisasi Jumlah Penumpang KA PSO Tahun 2024												TOTAL
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
KRL Jabodetabek	27.936.405	27.204.191	26.973.738	27.552.083	28.561.308	28.204.967	31.400.484	28.946.724	28.741.049				**255.520.949**
KRL Yogyakarta	712.152	608.843	543.808	858.689	849.235	840.963	829.216	682.988	723.394				**6.649.288**
KA Lokal Wilayah I	380.881	345.130	288.934	413.893	383.710	394.123	390.165	350.216	340.265				**3.287.317**
KA Lokal Wilayah II	1.552.573	1.422.530	1.359.801	1.754.750	1.594.782	1.573.892	1.678.628	1.447.284	1.427.537				**13.811.777**
KA Lokal Wilayah VI	86.973	79.276	72.011	113.743	94.481	100.965	101.817	89.422	89.389				**828.077**
KA Lokal Wilayah VII	1.335.245	1.232.033	1.122.288	1.411.818	1.383.247	1.395.232	1.375.500	1.286.213	1.259.557				**11.801.133**
TOTAL	**32.004.229**	**30.892.003**	**30.360.580**	**32.104.976**	**32.866.763**	**32.510.142**	**35.775.810**	**32.802.847**	**32.581.191**				**291.898.541**
	Triwulan I		**93.256.812**	**Triwulan II**		**190.738.693**	**Triwulan III**		**291.898.541**	**Triwulan IV**			

2. KA Komersial

Kereta	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
KA Bandara Soetta (SHIA)	177.466	168.836	170.864	188.693	177.206	179.350	204.871	212.475	205.011				**1.684.772**
Jumlah	**177.466**	**168.836**	**170.864**	**188.693**	**177.206**	**179.350**	**204.871**	**212.475**	**205.011**				**1.684.772**
	Triwulan I		**517.166**	**Triwulan II**		**1.062.415**	**Triwulan III**		**1.684.772**	**Triwulan IV**			

PT Railink

1. KA PSO

Kereta	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
KA Bandara YIA	148.567	120.258	121.988	167.910	151.297	155.167	167.694	162.377	150.278				**1.345.536**
KA Srilelawangsa K3 Premium (MDN - BIJ - KBG)	206.465	192.715	166.787	214.780	203.328	203.190	199.120	176.013	176.866				**1.739.264**
KA Srilelawangsa Woojin (MDN-BIJ)	9.949	21.043	21.570	23.804	23.718	23.423	23.498	23.596	23.672				**194.273**
KA Srilelawangsa (MDN-ARB)	94.677	82.337	72.184	97.468	89.028	86.907	91.010	83.656	81.268				**778.535**
Jumlah	**459.658**	**416.353**	**382.529**	**503.962**	**467.371**	**468.687**	**481.322**	**445.642**	**432.084**				**4.057.608**
	Triwulan I		**1.258.540**			**2.698.560**	**Triwulan III**		**4.057.608**	**Triwulan IV**			

2. KA KOMERSIAL

Kereta	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
Yogyakarta Ekspres	81.149	81.644	68.330	98.807	77.799	85.587	94.142	88.278	82.273				**758.009**
Srilelawangsa (MDN - ARB - KNM)	46.379	42.157	39.920	46.943	41.706	39.641	41.331	39.725	36.931				**374.733**
Jumlah	**127.528**	**123.801**	**108.250**	**145.750**	**119.505**	**125.228**	**135.473**	**128.003**	**119.204**				**1.132.742**
	Triwulan I		**359.579**	**Triwulan II**		**750.062**	**Triwulan III**		**1.132.742**	**Triwulan IV**			

Ket.

Untuk KA Srilelawangsa pada lintas/relasi MDN-ARB-KNM, terdapat 2 jenis kombinasi layanan yaitu PSO dan Komersial, namun demikian penjualan tetap sebagai satu KA yang sama yaitu KA Srilelawangsa.

KA Srilelawangsa dengan relasi MDN-ARB dan ARB-KNM adalah penumpang yang sama dikarenakan menggunakan KA yg sama.

- KA Srilelawangsa Relasi Medan - Araskabu: PSO
- KA Srilelawangsa Relasi Araskabu - Kualanamu: Komersial

PT MRT Jakarta

MRT Jakarta

Kereta	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
MRT J	3.579.538	3.483.799	3.219.035	3.268.690	3.692.387	3.809.796	4.419.821	4.001.641	3.915.980				**33.390.687**
Jumlah	**3.579.538**	**3.483.799**	**3.219.035**	**3.268.690**	**3.692.387**	**3.809.796**	**4.419.821**	**4.001.641**	**3.915.980**				**33.390.687**
	Triwulan I		**10.282.372**	**Triwulan II**		**21.053.245**	**Triwulan III**		**33.390.687**	**Triwulan IV**			

PT LRT Jakarta

LRT Jakarta

Kereta	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
LRT JAKARTA (Velodrome - K. Gading)	100.593	92.439	90.223	101.463	107.151	106.202	121.338	120.987	126.172				**966.568**
Jumlah	**100.593**	**92.439**	**90.223**	**101.463**	**107.151**	**106.202**	**121.338**	**120.987**	**126.172**				**966.568**
	Triwulan I		**283.255**	**Triwulan II**		**598.071**	**Triwulan III**		**966.568**	**Triwulan IV**			

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi LRT Jabodebek

LRT Jabodebek

Kereta	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
LRT Jabodebek	2.146.859	2.147.665	2.056.759	2.083.391	2.293.124	2.312.605	2.732.235	2.547.972	2.449.304				**20.769.914**
Jumlah	**2.146.859**	**2.147.665**	**2.056.759**	**2.083.391**	**2.293.124**	**2.312.605**	**2.732.235**	**2.547.972**	**2.449.304**				**20.769.914**
	Triwulan I		**6.351.283**	**Triwulan II**		**13.040.403**	**Triwulan III**		**20.769.914**	**Triwulan IV**			

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC)

Kereta Whoosh

Kereta	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
Kereta Whoosh *)	530.974	476.579	346.207	498.795	528.831	554.959	580.229	533.949	473.568				**4.524.091**
Jumlah	**530.974**	**476.579**	**346.207**	**498.795**	**528.831**	**554.959**	**580.229**	**533.949**	**473.568**				**4.524.091**
	Triwulan I		**1.353.760**	**Triwulan II**		**2.936.345**	**Triwulan III**		**4.524.091**	**Triwulan IV**			

Jumlah Penumpang terangkut Tahun Anggaran 2025

IKU	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Jumlah penumpang terangkut dengan KA	**44.128.882**	**42.027.482**	**40.899.756**	**44.865.830**	**45.146.585**	**45.822.848**	**50.214.527**	**45.606.799**	**45.033.304**	-	-	-
Jumlah	**Triwulan I**		**127.056.120**	**Triwulan II**		**262.891.383**	**Triwulan III**		**403.746.013**	**Triwulan IV**		-

JUMLAH BARANG KA TERANGKUT TRIWULAN III TAHUN 2025

1. Rekapitulasi Angkutan Barang Pulau Jawa TA. 2025

No	Komoditi	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	BBM	138.431	126.130	143.650	152.789	147.537	145.709	152.985	151.404	150.911			
2	PUPUK	3.810	1.380	1.590	2.340	4.110	-	360	1.440	1.080			
3	SEMEN	91.520	89.720	67.280	63.800	85.240	83.640	109.440	99.400	100.800			
4	BATUBARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5	HASIL PERKEBUNAN (CPO,PULP,KAYU, LATEX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6	PETIKEMAS	326.728	353.534	423.161	346.704	431.073	389.866	401.065	412.381	398.668			
7	KARET & KLINKER	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8	RETAIL (ONS PARCEL UTARA & SELATAN,BHP)	19.761	20.020	18.668	15.219	14.155	14.182	16.716	16.796	15.471			
9	LIMBAH B3	-	-	-	1.869	2.396	1.638	1.575	2.373	756			
10	LAINNYA	9.696	9.713	16.421	21.239	38.748	42.851	37.549	43.198	32.198			
TOTAL		**589.946**	**600.497**	**670.770**	**603.961**	**723.259**	**677.886**	**719.690**	**726.992**	**699.844**			
		Triwulan I		**1.861.213**	**Triwulan II**		**2.005.106**	**Triwulan III**		**2.146.565**	**Triwulan IV**		

2. Rekapitulasi Angkutan Barang Pulau Sumatera TA. 2025

No	Komoditi	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	BBM	72.937	68.703	77.743	82.880	71.985	73.135	75.216	74.042	73.745			
2	PUPUK	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	SEMEN	159.959	161.079	138.996	120.346	103.200	101.033	81.964	104.756	102.568			
4	BATUBARA	4.594.039	4.229.642	4.436.929	4.671.292	5.077.312	4.628.933	4.876.534	4.939.845	4.893.916			
5	HASIL PERKEBUNAN (CPO,PULP,KAYU, LATEX)	59.514	50.417	46.169	45.308	50.514	24.813	41.075	39.768	55.593			
6	PETIKEMAS	28.684	30.358	34.136	26.986	26.280	12.760	28.480	24.440	22.400			
7	KARET & KLINKER	-	-	-	-	58.425	57.000	65.400	79.200	52.800			
8	RETAIL (ONS PARCEL UTARA & SELATAN,BHP)	630	720	745	690	357	328	81.964	-	372			
9	LIMBAH B3	-	-	-	-	-	-	383	367	-			
10	LAINNYA	1.850	2.000	2.433	19.200	2.675	2.250	7.475	12.290	16.320			
TOTAL		**4.917.613**	**4.542.919**	**4.737.151**	**4.996.703**	**5.390.748**	**4.900.251**	**5.176.527**	**5.274.709**	**5.217.715**			
		Triwulan I		**14.197.683**	**Triwulan II**		**15.257.702**	**Triwulan III**		**15.668.950**	**Triwulan IV**		

3. Jumlah Barang terangkut TA. 2025

No	Komoditi	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	BBM	211.368	194.832	221.393	235.669	219.522	218.844	228.201	225.446	224.656			
2	PUPUK	3.810	1.380	1.590	2.340	4.110	-	360	1.440	1.080			
3	SEMEN	251.479	250.799	206.276	184.146	188.440	184.673	191.404	204.156	203.368			
4	BATUBARA	4.594.039	4.229.642	4.436.929	4.671.292	5.077.312	4.628.933	4.876.534	4.939.845	4.893.916			
5	HASIL PERKEBUNAN (CPO,PULP,KAYU, LATEX)	59.514	50.417	46.169	45.308	50.514	24.813	41.075	39.768	55.593			
6	PETIKEMAS	355.412	383.892	457.297	373.690	457.353	402.626	429.545	436.821	421.068			
7	KARET & KLINKER	-	-	-	-	58.425	57.000	65.400	79.200	52.800			
8	RETAIL (ONS PARCEL UTARA & SELATAN,BHP)	20.391	20.740	19.413	15.909	14.512	14.510	16.716	16.796	15.843			
9	LIMBAH B3	-	-	-	1.869	2.396	1.638	1.958	2.740	756			
10	LAINNYA (BANK INDONESIA,BEA KLB,ANGKUTAN DINAS,ANGKUTAN SATKER,MOTIS, BEA LANGSIR)	11.546	11.714	18.854	40.439	41.423	45.101	45.024	55.488	48.518			
TOTAL		**5.507.559**	**5.143.416**	**5.407.921**	**5.570.664**	**6.114.007**	**5.578.137**	**5.896.217**	**6.001.701**	**5.917.598**			
		Triwulan I		**16.058.896**	**Triwulan II**		**17.262.808**	**Triwulan III**		**17.815.515**	**Triwulan IV**		

Aditya Karsa
NIP 198609022008121001

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA POGRAM 6

PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
INSPEKTORAT JENDERAL

JI. MERDEKA BARAT 8
JAKARTA 10110

TEL. (021) 3456919
3813154
3507656

FAX : (021) 3813154
TLX : 44310 DEPHUB IA
FAX :

Nomor : PS.302/5/4/ITJEN/2025

Jakarta, 20 Agustus 2025

Klasifikasi : Terbatas

Lampiran :

Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025
pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Yth. Direktur Jenderal Perkeretaapian

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 74 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP-ITJEN 39 Tahun 2025 tanggal 18 Juli 2025 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Unit Kerja Eselon I Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2025 disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Inspektorat Jenderal telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2024 pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan tujuan:
   a. memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
   b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
   c. menilai akuntabilitas kinerja;
   d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
   e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

2. Evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap akuntabilitas kinerja Eselon I saja, namun juga dilakukan uji petik terhadap akuntabilitas kinerja pada beberapa Unit Kerja yaitu:
   a. Direktrorat Prasarana;
   b. Direktorat Keselamatan;
   c. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
   d. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
   e. Balai Pengujian Perkeretaapian.

3. Evaluasi dilakukan terhadap empat komponen manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

4. Dari hasil evaluasi terhadap empat komponen tersebut, Direktorat Jenderal Perkeretaapian memperoleh nilai **83,72** (**Predikat A**) dengan interpretasi "**Memuaskan**".

5. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30,00	**24,90**
2	Pengukuran Kinerja	30,00	**25,53**
3	Pelaporan Kinerja	15,00	**12,41**
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	**20,88**
Nilai Hasil Evaluasi			**83,72**
Predikat			**A**

6. Hasil penilaian terhadap masing-masing komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dapat diuraikan sebagai berikut:
   a. Perencanaan Kinerja
      Nilai hasil evaluasi atas komponen Perencanaan Kinerja sebesar 24,90 dari nilai maksimal 30, dengan catatan belum seluruh Realisasi target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja Tahun 2024 masuk kriteria on the right track (90% s.d. 110%).
   b. Pengukuran Kinerja
      Nilai hasil evaluasi atas komponen Pengukuran Kinerja sebesar 25,53 dari nilai maksimal 30, dengan catatan pengukuran kinerja tahun 2024 belum seluruhnya dimanfaatkan menjadi dasar penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional.
   c. Pelaporan Kinerja
      Nilai hasil evaluasi atas komponen Pelaporan Kinerja sebesar 12,41 dari nilai maksimal 15,00, dengan catatan laporan kinerja belum memuat informasi terkait perubahan kinerja organisasi.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
Nilai hasil evaluasi atas komponen Pelaporan Kinerja sebesar 20,88 dari nilai maksimal 25,00.

7. Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparat Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi. Direktorat Jenderal Perkeretaapian memperoleh nilai Kinerja Organisasi **101,86%** dengan predikat Istimewa, dengan hasil sebagai berikut:

NILAI AKIP TAHUN 2024 : 83,72

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK(1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3)=(1) x (100%-(2))
1	SP1 Konektivitas Jaringan Perkeretaapian Nasional Yang Diwujudkan Dalam Penyediaan Infrastruktur	Rasio Konektivitas Antar Wilayah	0,46	0,46	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
2	SP2 Keselamatan Transportasi Perkeretaapian Dengan Sumber Daya Manusia, Sarana Dan Prasarana Yang Handal	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (rate of accident)	0,06	0,06	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
3	SP3 Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian Yang Terpercaya Dan Sesuai Kebutuhan	Persentase On Time Performance (OTP) Transportasi Kereta Api	90,5	96,19	106,29%	106,29%	0,00%	106,29%
		Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	78,8	81,65	103,62%	103,62%	0,00%	103,62%
		Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api	77,8	78,73	101,20%	101,195%	0,00%	101,20%
		Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI	94	95,02	101,09%	101,09%	0,00%	101,09%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang	3,7	3,73	100,81%	100,81%	0,00%	100,81%
							Total Capaian PK	713,00%
							Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau rata-rata Capaian PK	101,86%
							Predikat PKO	ISTIMEWA

8. Seluruh Rekomendasi evaluasi AKIP tahun 2024 telah ditindaklanjuti dan dinyatakan tuntas.

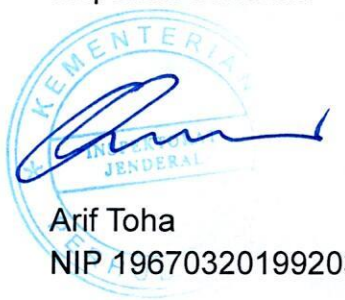
Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian kami merekomendasikan sebagai berikut:

1. Target kinerja yang ditetapkan dimonitoring, dievaluasi secara berkala dan melakukan langkah langkah perbaikan yang diperlukan sehingga sesuai kriteria *on the right track* yaitu realisasi capaiaan IKU/IKK antara 90% s.d. 110%;
2. Memanfaatkan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional dan diinformasikan dalam LMCK/LKIP termasuk tindak lanjut yang tertuang didalamnya agar ditindaklanjuti;
3. Mencantumkan informasi perubahan budaya kinerja pada LKIP (semula - menjadi);

4. Melakukan monitoring secara terus menerus dan memastikan bahwa kriteria dalam keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 74 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi AKIP telah tercantum dalam LMCK/LKIP satuan kerja di lingkungan DJKA yang tidak termasuk dalam sampel evaluasi AKIP Tahun 2025.

Demikian disampaikan hasil evaluasi akuntabilitas AKIP tahun 2025 Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Inspektur Jenderal



Arif Toha
NIP 196703201992031003

Tembusan:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. Direktur Prasarana Ditjen Perkeretaapian;
3. Direktur Keselamatan Ditjen Perkeretaapian;
4. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
5. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
6. Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian.

HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
TAHUN 2025

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja 2025
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24,90
2	Pengukuran Kinerja	30,00	25,53
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,41
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,88
Nilai Akuntabilitas Kinerja			83,72
			A

No	Catatan
1	Belum seluruh Realisasi target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja Tahun 2024 masuk kriteria on the right track (90% s.d. 110%)
2	Pengukuran kinerja tahun 2024 belum seluruhnya dimanfaatkan menjadi dasar penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional
3	Laporan kinerja belum memuat informasi terkait perubahan kinerja organisasi

No	Rekomendasi
1	Target kinerja yang ditetapkan dimonitoring, dievaluasi secara berkala dan melakukan langkah langkah perbaikan yang diperlukan sehingga sesuai kriteria on the right track yaitu realisasi capaiaan IKU/IKK antara 90% s.d. 110%
2	Memanfaatkan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional dan diinformasikan dalam LMCK/LKIP termasuk tindak lanjut yang tertuang didalamnya agar ditindaklanjuti
3	Mencantumkan informasi perubahan budaya kinerja pada LKIP (semula - menjadi)
4	Melakukan monitoring secara terus menerus dan memastikan bahwa kriteria dalam keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 74 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi AKIP telah tercantum dalam LMCK/LKIP satuan kerja di lingkungan DJKA yang tidak termasuk dalam sampel evaluasi AKIP Tahun 2025

Menyetujui,
Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Amin Hudaya, S.T., M.T.
NIP. 197312311998031003

Tim Evaluator

Roy Bernardo Simanjuntak, S.Si.T., M.Sc. CRMO.
NIP. 198202192006041001

Aryadi Prakoso, S.T., C.Fr.A.,QIA
NIP. 198507162008121001

Aulia Widiastuti, S.T., M.T. CRMO.
NIP. 197610152010122001

Muhammad Yusuf, S.E., CGAA
NIP. 198103312008121001

Daffa Reyhan Zulfikar A., A.Md.T.
NIP. 200004042021121001

LEMBAR KERJA EVALUASI GABUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
2025

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Eselon I	Nilai Unit Kerja Sampling	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
1	**PERENCANAAN KINERJA**	**30,00**			**24,90**	**83,00%**
1.1	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	6	6,00	6,00	100,00%
1.2	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik,	9,00	7,2	7,20	7,20	80,00%
1.3	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	12	11,40	11,70	78,00%
2	**PENGUKURAN KINERJA**	**30,00**			**25,53**	**85,10%**
2.1	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	6	5,88	5,94	99,00%
2.2	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan	9,00	8,1	7,38	7,74	86,00%
2.3	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward	15,00	12	11,70	11,85	79,00%
3	**PELAPORAN KINERJA**	**15,00**			**12,41**	**82,70%**
3.1	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	3	2,76	2,88	96,00%
3.2	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan	4,50	3,6	3,60	3,60	80,00%
3.3	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam	7,50	6	5,85	5,93	79,00%
4	**EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL**	**25,00**			**20,88**	**83,50%**
4.1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	4,5	4,50	4,50	90,00%
4.2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	6,75	6,00	6,38	85,00%
4.3	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas	12,50	10	10,00	10,00	80,00%
Nilai Akuntabilitas Kinerja			**85,15**	**82,27**	**83,72**	

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
INSPEKTORAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3456919
3813154
3507656

FAX : (021) 3813154
TLX : 44310 DEPHUB IA

Nomor : KP.904 /5/22/ITJEN /2025 Jakarta 24 September 2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Ikhtisar Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Yth. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian PANRB

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 74 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor 39 Tahun 2025 tanggal 18 Juli 2025 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Unit Kerja Eselon I Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2025, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP tahun 2025 Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Terlampir disampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi pada masing-masing unit kerja Eselon I. Kiranya Saudara berkenan memberikan arahan selanjutnya guna peningkatan akuntabilitas kinerja secara berkesinambungan pada tahun yang akan datang.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Inspektur Jenderal,

Arif Toha
NIP 196703201992031003

Tembusan:
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Perhubungan.

Lampiran Surat
Nomor : KP.904/5/22/ITJEN/2025
Tanggal : 24 September 2025

Hasil Evaluasi dan Rekomendasi atas Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 di lingkungan Kementerian Perhubungan

1. Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2025

No	Unit Kerja	Capaian Kinerja per Komponen Tahun 2025				Penilaian Kinerja	
		Perencanaan Kinerja (30%)	Pengukuran Kinerja (30%)	Pelaporan Kinerja (15%)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)	2025	2024
1	Sekretariat Jenderal	23,61	24,90	11,85	20,50	80,87	80,15
2	Ditjen Hubdat	25,47	24,87	12,93	19,88	83,16	82,69
3	Ditjen Hubla	23,05	25,05	12,29	22,25	82,79	80,82
4	Ditjen Hubud	23,07	24,60	13,01	20,13	80,80	80,79
5	Ditjen Perkeretaapian	24,90	25,53	12,41	20,88	83,72	82,95
6	DJITM	25,13	23,70	11,83	19,38	80,04	77,50
7	Inspektorat Jenderal	25,20	25,20	12.60	19,50	82,50	82,30
8	BKT	22,20	25,35	12,45	20,00	80,01	79,14
9	BPSDMP	23,82	24,60	11,25	20,38	80,06	77,90

2. Rekomendasi berdasarkan hasil capaian kinerja masing-masing Unit Kerja Eselon I

   a. Sekretariat Jenderal
      1) Dalam menetapkan Target IKU/IKK yang ditetapkan pada dokumen perencanaan kinerja memperhatikan realisasi capaian kinerja tahun sebelumnya yang memenuhi prinsip menantang (lebih baik dari realisasi capaian kinerja tahun sebelumnya);
      2) Laporan Kinerja menyajikan:
         a) Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah;
         b) Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark* Kinerja);
         c) Informasi bahwa laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.
      3) Memanfaatkan Hasil Evaluasi AKIP Internal dalam rangka perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

b. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
   1) Menyusun dokumen perencanaan kinerja yang selaras dengan tugas dan fungsi Unit Kerja dengan memperhatikan capaian tahun sebelumnya dengan ukuran keberhasilan (Indikator Kinerja kegiatan) yang memenuhi kriteria SMART;
   2) Hasil pengukuran kinerja digunakan sebagai bagian dalam penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja serta menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional;
   3) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
   4) Agar melaksanakan sosialisasi penyusunan LAKIP secara terus menerus untuk mengantisipasi rotasi personil penyusun LAKIP;
   5) Agar pimpinan memahami Akuntabilitas Kinerja yang menjadi tanggungjawabnya meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;
   6) Agar setiap unit kerja dapat mendokumentasikan dengan baik setiap data yang dibutuhkan dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.

c. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
   1) Indikator kinerja pada unit kerja / satker belum memenuhi kriteria Spesifik *Measurable Achievable Relevance Timebound* dan *Achievable*, menantang, serta realistis;
   2) Realisasi atas indikator kinerja pada unit kerja terdapat realisasi anomali belum (*on the right track*) yang tercantum Renstra dan PK 2024. *On the Right Track* (Range 90% - 110%);
   3) Satker/UPT sampling yang telah melaksanakan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja pada satker lainnya (*Benchmark* Kinerja) yang memiliki kesamaan indikator kinerja tidak tertuang secara berkesinambungan pada dokumen Monitoring Renaksi atas PK (bulanan), Laporan Monitoring Capaian Kinerja (triwulanan) dan Laporan Kinerja (tahunan);
   4) Terdapat Satker/UPT sampling tidak menginformasikan tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*) pada dokumen Perencanaan Kinerja;
   5) Seluruh satker/UPT sampling belum sepenuhnya memaksimalkan pemanfaatan hasil evaluasi AKIP mandiri oleh Eselon I serta hasil Evaluasi AKIP Internal oleh APIP.

d. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
   1) Agar Dokumen Perencanaan Kinerja dapat dipublikasikan tepat waktu;

2) Agar target kinerja perlu ditetapkan secara menantang dan realistis, serta menunjukan peningkatan dari realisasi tahun sebelumnya;
3) Memastikan dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja dipertahankan minimal lima tahun terakhir;
4) Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara mendalam sesuai dengan KM 74 Tahun 2024;
5) Menjadikan hasil pengukuran kinerja sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan peningkatan kinerja.

e. Direktorat Jenderal Perkeretaapian
1) Target kinerja yang ditetapkan dimonitoring, dievaluasi secara berkala dan melakukan langkah langkah perbaikan yang diperlukan sehingga sesuai kriteria on the right track yaitu realisasi capaiaan IKU/IKK antara 90% s.d. 110%;
2) Memanfaatkan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional dan diinformasikan dalam LMCK/LKIP termasuk tindak lanjut yang tertuang didalamnya agar ditindaklanjuti;
3) Mencantumkan informasi perubahan budaya kinerja pada LKIP (semula - menjadi);
4) Melakukan monitoring secara terus menerus dan memastikan bahwa kriteria dalam keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 74 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi AKIP telah tercantum dalam LMCK/LKIP satuan kerja di lingkungan DJKA yang tidak termasuk dalam sampel evaluasi AKIP Tahun 2025.

f. Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda
1) Dokumen administratif, seperti Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahun-tahun sebelumnya, surat pengantar laporan kinerja, harus dilampirkan secara lengkap untuk memperkuat keterlacakan dan validitas pelaporan;
2) Perlu peningkatan integrasi hasil pengukuran kinerja sebagai dasar kebijakan manajemen SDM, termasuk dalam proses penempatan, mutasi, atau penghapusan jabatan struktural/fungsional;
3) Laporan Kinerja perlu menyajikan benchmark capaian IKU/IKK dengan entitas sejenis di tingkat nasional/internasional untuk mendorong pembelajaran dan pencapaian standar lebih tinggi.

g. Inspektorat Jenderal
1) Menambahkan narasi pada manual IKU yang menjelaskan indikator apa saja yang menggunakan rumus *maximize* atau *minimize*;
2) Pimpinan lebih berperan aktif dalam melakukan monitoring capaian kinerja secara berkala dan didokumentasikan;

3) Penanggung jawab kegiatan dalam rencana aksi atas Perjanjian Kinerja agar mendokumentasikan laporan capaian kinerja setiap bulan;
4) Dalam menyusun target indikator kinerja tahun berikutnya agar mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya.

h. Badan Kebijakan Transportasi
1) Mereviu dan mengevaluasi kembali indikator kinerja di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi agar dapat memenuhi kriteria SMART-C (Spesifik, *Measurable, Achieveable, Relevance, Time bound*, dan Cukup);
2) Mereviu kembali penetapan target pada Perjanjian Kinerja untuk memastikan target kinerja dapat dicapai (*achievable*), menantang dan realistis;
3) Dalam pengukuran capaian kinerja agar data yang digunakan sesuai dengan metode pengukuran dan sumber data yang tertuang dalam manual IKU;
4) Menyusun Laporan Kinerja dan menyampaikan kepada Atasan Langsung dengan memperhatikan batas waktu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5) Meningkatkan kualitas Laporan Kinerja dengan menyajikan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target akhir kinerja pada Renstra, analisis efisensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan dan aktivitas antar bidang/tugas fungsi lain yang berkaitan (crosscutting) dan budaya kinerja organisasi;
6) Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja baik hasil evaluasi internal Badan Kebijakan Transportasi maupun hasil evaluasi Inspektorat Jenderal dengan disertai data dukung yang relevan.

i. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
1) Memastikan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tingkat unit kerja disampaikan tepat waktu melalui laman ESR;
2) Meningkatkan komitmen pimpinan Unit Kerja untuk selalu terlibat dan berperan aktif dalam setiap rapat pencapaian kinerja sebagai pengambil keputusan (*Decision Maker*) dalam mengukur capaian kinerja;
3) Pada saat penyusunan laporan kinerja agar mengidentifikasi perbandingan realisasi kinerja Unit Kerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark* Kinerja) dan perubahan budaya kinerja organisasi serta menyampaikanya dalam laporan kinerja;
4) Mereviu kembali penetapan target kinerja dalam dokumen perjanjian kinerja guna memastikan seluruh sasaran kinerja telah dilengkapi dengan indikator kinerja yang SMART (*Spesific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound*) dan memenuhi kriteria menantang sehingga target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track (tidak kurang dari dari 90% atau lebih 110%);

5) Agar pimpinan unit kerja memastikan bahwa seluruh capaian IKU/ IKK dalam Perjanjian Kinerja telah didukung dengan data dukung/ dokumen yang relevan sesuai manual IKU/ IKK untuk mendukung dan mengukur capaian kinerja yang diharapkan;
6) Agar unit kerja menggunakan Informasi dalam laporan kinerja dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja;
7) Agar Unit Kerja Eselon I melakukan pembinaan secara intensif kepada unit kerja serta menyampaikan kelemahan-kelemahan implementasi SAKIP di unit kerja dengan lebih komprehensif sehingga memudahkan unit kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP.

Inspektur Jenderal,

Arif Toha
NIP 196703201992031003

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP: +62 813-6001- 3838

WEBSITE : djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : KP.405/1/12/K1/DJKA/2025 Jakarta, 29 Juli 2025
Klasifikasi : Penting
Lampiran : Satu berkas
Hal : Peningkatan Kinerja dan Disiplin

Yth. Daftar Terlampir

Menunjuk Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP.405/1/1/SKJ/2025 tanggal 24 Juli 2025 hal Peningkatan Kinerja dan Disiplin, bahwa dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap peningkatan kinerja organisasi dan disiplin pegawai di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perkeretaapian, perlu dilakukan pengawasan dan pembinaan kepada seluruh pegawai di Unit Pelaksana Teknis guna memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan secara optimal sehingga kinerja organisasi dapat tercapai.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon Saudara dapat melaksanakan pengawasan dan pembinaan sebagai berikut;

1. Memastikan seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis berada di kantor selama hari dan jam kerja serta memastikan seluruh pegawai di lingkup kewenangannya mematuhi dan menerapkan ketentuan hari dan jam kerja sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 168 Tahun 2024;
2. Dalam hal pelaksanaan tugas menyebabkan Kepala Unit Pelaksana Teknis perlu meninggalkan kantor, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis wajib menyampaikan laporan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian setiap bulannya pada hari kerja ke 10 (sepuluh) sebagai bahan laporan Direktur Jenderal Perkeretaapian kepada Sekretaris Jenderal Perhubungan;
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) paling kurang memuat data capaian kinerja organisasi, data rekapitulasi evaluasi kinerja pegawai, dan data rekapitulasi ketidakhadiran pegawai dikantor yang disebabkan pelaksanaan tugas kedinasan/lainnya.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Perkeretaapian ;
2. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
3. Para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Jenderal Perkeretaapian.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Lampiran Surat
Nomor : KP.405/1/12/K1/DJKA/2025
Tanggal : 29 Juli 2025

1. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
2. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
3. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
4. Kepala Balai Teknik Perekretaapian Kelas I Surabaya;
5. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
6. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
7. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
8. Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian;
9. Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian;
10. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
11. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110
TELP : +62 813-6001-3838
WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : KP.001/1/13/K1/DJKA/2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu lembar
Hal : Penyelesaian Disparitas Data Aparatur Sipil Negara (ASN)

Jakarta, 13 Agustus 2025

Yth. Daftar Terlampir

Menunjuk Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Nomor KP.001/4/4/STJ/2025 tanggal 7 Agustus 2025 Hal Penyelesaian Disparitas Data ASN pada Aplikasi SIASN untuk Peningkatan Indeks Kualitas Data ASN Kementerian Perhubungan, bersama ini disampaikan bahwa dalam rangka monitoring dan evaluasi pengukuran indeks kualitas data pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Perhubungan yang merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas layanan manajemen ASN masih terdapat disparitas data ASN.

Dapat kami sampaikan, bahwa pengukuran indeks kualitas data ASN dan penyelesaian disparitas data ASN sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Edaran Kepala BKN Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengukuran Indeks Kualitas Data Pegawai Aparatur Sipil Negara, BKN telah melakukan pengukuran dan menetapkan nilai Indeks Kualitas Data (IKD) bagi masing-masing instansi sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas layanan manajemen ASN. Nilai Indeks Kualitas Data (IKD) tersebut saat ini dihitung berdasarkan 4 (empat) dimensi kualitas data, yaitu kelengkapan *(completeness),* ketepatan waktu *(timeliness),* keakuratan *(accuracy),* dan konsitensi *(consistency)* yang terdiri dari 27 indikator;
2. Hasil monitoring disparitas data ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian posisi tanggal 5 Agustus 2025 terdapat sejumlah 418 (empat ratus delapan belas) data;
3. Daftar nama ASN, tata cara dan akses monitoring dalam penyelesaian disparitas data ASN dapat di akses melalui tautan https://lnk.dephub.go.id/WMAXI; dan
4. Penyelesaian disparitas data ASN agar dapat dilaporkan ke Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian **paling lambat 19 Agustus 2025**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kiranya Saudara dapat melakukan percepatan tindak lanjut penyelesaian disparitas data ASN yang dijadikan sebagai dasar pengukuran Indeks Kualitas Data (IKD) Kementerian Perhubungan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tembusan:
Direktur Jenderal Perkeretaapian.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Lampiran Surat
Nomor : KP.001/1/13/K1/DJKA/2025
Tanggal : 13 Agustus 2025

1. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
2. Plt. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
3. Plt. Direktur Sarana Perkeretaapian;
4. Direktur Keselamatan Perkeretaapian;
5. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
6. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
7. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
8. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
9. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
10. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
11. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
12. Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian;
13. Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian;
14. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
15. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Nilai Kinerja Anggaran Unit Eselon I

Download Excel

Tampilkan 25 entri

Cari:

No.	Kode Unit	Unit Eselon I	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	022.01	Sekretariat Jenderal	11,73	98,77	55,25
2	022.02	Inspektorat Jenderal	33,74	100,00	66,87
3	022.03	Ditjen Perhubungan Darat	10,52	93,22	51,87
4	022.04	Ditjen Perhubungan Laut	12,92	94,86	53,89
5	022.05	Ditjen Perhubungan Udara	13,61	98,51	56,06
6	022.08	Ditjen Perkeretaapian	12,61	84,77	48,69
7	022.11	Badan Kebijakan Transportasi	13,96	98,42	56,19
8	022.12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	26,08	95,38	60,73
9	022.13	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	0,00	96,60	48,30

Menampilkan 1 sampai 9 dari 9 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Copyright © 2023 DSP DJA KEMENKEU. All rights reserved.

Nilai Kinerja Anggaran Unit Eselon I

Download Excel

Tampilkan 25 entri

Cari:

No.	Kode Unit	Unit Eselon I	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	022.08	Ditjen Perkeretaapian	12,61	84,77	48,69

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Copyright © 2023 DSP DJA KEMENKEU. All rights reserved.

Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja

Download Excel

Tampilkan 25 entri

Cari:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	022.08.445572	PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN FASILITAS KESELAMATAN PERKERETAAPIAN	0,00	95,95	47,98
2	022.08.467005	BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	36,34	95,92	66,13
3	022.08.467006	BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	4,69	88,79	46,74
4	022.08.467309	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA	0,00	88,68	44,34
5	022.08.467321	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG	8,23	79,74	43,99
6	022.08.467337	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SURABAYA	54,10	88,25	71,18
7	022.08.467345	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN	0,00	85,21	42,61
8	022.08.467352	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG	16,29	85,86	51,08
9	022.08.467364	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG	14,82	77,00	45,91
10	022.08.467373	BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN	10,72	96,31	53,52
11	022.08.467385	BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN	9,86	93,87	51,87
12	022.08.467462	PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API	0,00	97,80	48,90
13	022.08.467478	PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN	0,00	91,11	45,56
14	022.08.467484	PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN	7,50	87,09	47,30
15	022.08.467504	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	0,00	94,54	47,27
16	022.08.467515	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANDUNG	4,17	71,33	37,75

Menampilkan 1 sampai 16 dari 16 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Copyright © 2023 DSP DJA KEMENKEU. All rights reserved.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DITJEN PERBENDAHARAAN

LAPORAN PERINGKAT REALISASI BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Nama Kementerian/Lembaga	Total Pagu	Total Realisasi	Persentase
1	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	12,076,160,000	12,075,398,734	99.99%
2	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	661,811,922,000	574,128,691,428	86.75%
3	MAHKAMAH AGUNG	13,129,061,128,000	10,345,212,698,158	78.8%
4	KEMENTERIAN SOSIAL	80,792,712,315,000	61,768,812,884,664	76.45%
5	KEMENTERIAN AGAMA	79,358,176,265,000	60,317,993,837,400	76.01%
6	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	144,513,389,546,000	109,572,679,741,489	75.82%
7	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	1,549,722,676,000	1,172,378,898,054	75.65%
8	KOMISI PEMILIHAN UMUM	5,787,230,594,000	4,332,415,452,090	74.86%
9	KEMENTERIAN KEUANGAN	96,020,481,172,000	70,710,231,535,438	73.64%
10	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	1,464,548,473,000	1,048,261,454,754	71.58%
11	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	58,405,305,393,000	40,220,654,861,853	68.86%
12	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	15,261,272,133,000	10,502,065,966,506	68.82%
13	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	400,000,516,000	271,109,496,700	67.78%
14	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	4,400,252,206,000	2,981,668,446,213	67.76%
15	KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	15,962,130,370,000	10,720,557,216,834	67.16%
16	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	230,000,000,000	154,080,020,384	66.99%
17	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	6,172,644,572,000	4,055,324,138,926	65.7%
18	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	2,474,247,333,000	1,617,948,314,610	65.39%
19	BADAN PUSAT STATISTIK	5,838,710,867,000	3,754,985,856,443	64.31%
20	BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL	436,812,997,000	277,291,868,044	63.48%
21	BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)	1,497,578,812,000	949,785,609,681	63.42%
22	KEMENTERIAN KEHUTANAN	5,478,889,636,000	3,473,972,790,103	63.41%
23	BADAN KARANTINA INDONESIA	1,420,516,135,000	899,434,735,729	63.32%
24	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	983,741,099,000	617,225,911,132	62.74%
25	BADAN PENYELENGGARA HAJI	207,802,882,000	129,089,263,648	62.12%
26	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	9,896,588,491,000	6,143,827,156,659	62.08%
27	KEMENTERIAN KESEHATAN	111,092,181,413,000	68,708,451,736,291	61.85%
28	KEMENTERIAN PARIWISATA	1,488,741,453,000	916,912,975,171	61.59%
29	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	208,429,301,000	128,330,069,302	61.57%
30	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	26,304,675,289,000	16,046,937,022,738	61%
31	KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	2,456,603,382,000	1,480,376,369,666	60.26%
32	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	969,201,354,000	583,334,994,531	60.19%
33	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	1,065,026,757,000	640,289,614,565	60.12%
34	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	9,964,729,311,000	5,940,287,604,908	59.61%
35	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	6,978,623,033,000	4,158,955,520,862	59.6%
36	BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM	3,495,758,247,000	2,075,555,240,403	59.37%
37	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	255,591,019,000	150,648,491,771	58.94%
38	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	187,075,848,000	108,816,430,277	58.17%
39	BADAN STANDARDISASI NASIONAL	223,867,121,000	130,026,272,907	58.08%
40	BADAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA	687,451,614,000	398,293,538,173	57.94%
41	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	6,184,395,090,000	3,576,984,890,393	57.84%
42	KEMENTERIAN PERTAHANAN	310,193,169,382,000	179,170,633,846,509	57.76%
43	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	1,407,613,471,000	807,795,459,033	57.39%
44	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)	374,428,347,000	214,840,095,887	57.38%
45	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	166,711,994,000	95,509,498,159	57.29%
46	KOMISI YUDISIAL RI	184,526,343,000	105,595,716,824	57.23%
47	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	459,766,254,000	260,603,774,488	56.68%
48	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	156,725,426,000	88,565,673,471	56.51%
49	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	135,222,498,000	76,361,040,553	56.47%
50	BADAN KEAMANAN LAUT	2,759,445,970,000	1,555,624,441,046	56.37%
51	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN	199,498,773,000	112,371,031,981	56.33%
52	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	342,759,619,000	192,700,633,617	56.22%
53	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	2,477,359,011,000	1,388,081,941,645	56.03%
54	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	161,151,947,000	90,234,721,064	55.99%
55	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	1,857,887,597,000	1,036,851,940,107	55.81%
56	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP / BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	1,275,694,767,000	709,357,104,295	55.61%
57	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	1,524,203,659,000	834,396,151,057	54.74%

58	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	2,560,935,743,000	1,399,391,946,983	54.64%
59	KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	473,085,318,000	256,009,403,105	54.11%
60	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	293,795,636,000	158,072,669,231	53.8%
61	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	267,135,531,000	143,143,280,754	53.58%
62	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	2,330,383,940,000	1,241,432,888,330	53.27%
63	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	62,548,946,786,000	33,316,609,937,317	53.26%
64	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	2,558,326,924,000	1,353,348,243,091	52.9%
65	BADAN INTELIJEN NEGARA	14,830,154,150,000	7,836,438,590,081	52.84%
66	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	879,611,122,000	461,881,236,358	52.51%
67	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	5,853,634,945,000	3,034,004,652,158	51.83%
68	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	229,919,355,000	118,937,898,955	51.73%
69	KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA	491,513,214,000	252,509,925,142	51.37%
70	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	277,498,437,000	142,119,813,809	51.21%
71	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	2,856,581,975,000	1,428,345,382,760	50%
72	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10,687,114,152,000	5,257,654,050,162	49.2%
73	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	392,980,127,000	188,288,824,409	47.91%
74	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	721,684,480,000	341,581,992,464	47.33%
75	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	209,124,409,000	96,102,623,556	45.95%
76	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5,270,219,174,000	2,393,156,096,856	45.41%
77	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	5,019,888,243,000	2,265,410,175,281	45.13%
78	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	2,025,924,363,000	911,968,075,684	45.01%
79	KEMENTERIAN KEBUDAYAAN	2,589,710,760,000	1,144,264,877,006	44.19%
80	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	489,839,925,000	208,021,862,047	42.47%
81	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	300,654,181,000	126,988,165,111	42.24%
82	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	36,259,677,176,000	15,139,476,471,699	41.75%
83	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	115,835,974,030,000	46,788,861,851,107	40.39%
84	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	294,733,828,000	117,292,114,840	39.8%
85	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	3,528,706,829,000	1,400,098,845,706	39.68%
86	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	53,494,482,000	20,992,788,538	39.24%
87	LEMBAGA SANDI NEGARA	1,321,636,821,000	511,138,981,330	38.67%
88	BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	2,071,397,065,000	748,554,174,522	36.14%
89	BADAN GIZI NASIONAL	71,000,000,000,000	25,109,323,503,079	35.37%
90	KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF / BADAN EKONOMI KREATIF	443,656,098,000	156,587,445,599	35.29%
91	KEMENTERIAN HUKUM	5,066,625,467,000	1,712,513,556,643	33.8%
92	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	8,892,402,138,000	2,773,842,018,645	31.19%
93	KEMENTERIAN PERTANIAN	31,895,525,372,000	9,886,165,618,406	31%
94	BADAN PANGAN NASIONAL	9,252,017,913,000	2,517,703,190,504	27.21%
95	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	15,652,492,854,000	3,860,459,549,162	24.66%
96	KEMENTERIAN TRANSMIGRASI	1,897,503,971,000	433,260,879,394	22.83%
97	KEMENTERIAN KOPERASI	1,217,754,710,000	255,416,171,771	20.97%
98	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA	10,082,966,122,000	2,017,817,899,288	20.01%
99	BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL	952,024,944,000	156,236,308,962	16.41%
100	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	0	0	0%
101	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	0	0	0%
102	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	0	0	0%
103	KEMENTERIAN PARIWISATA	0	0	0%
104	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	0	1	0%

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

REALISASI BELANJA ES.1 PER JENIS BELANJA

Bulan : 01 s.d. 09

NO	Eselon 1	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	02201 | SEKRETARIAT JENDERAL	PAGU	175,807,098,000	438,982,143,000	66,468,668,000	0	0	0	0	0	0	681,257,909,000
		REALISASI	132,335,512,859 (75.27%)	177,051,775,603 (40.33%)	16,784,532,851 (25.25%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	326,171,821,314 (47.88%)
		SISA	43,471,585,141	261,930,367,397	49,684,135,149	0	0	0	0	0	0	355,086,087,686
2	02202 | INSPEKTORAT JENDERAL	PAGU	52,029,002,000	63,366,947,000	787,838,000	0	0	0	0	0	0	116,183,787,000
		REALISASI	40,307,596,083 (77.47%)	22,442,200,965 (35.42%)	755,478,400 (95.89%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	63,505,275,448 (54.66%)
		SISA	11,721,405,917	40,924,746,035	32,359,600	0	0	0	0	0	0	52,678,511,552
3	02203 | DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	PAGU	1,041,077,864,000	3,618,648,795,000	1,337,161,627,000	0	0	0	0	0	0	5,996,888,286,000
		REALISASI	696,067,263,550 (66.86%)	982,364,855,196 (27.15%)	207,430,432,555 (15.51%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1,885,862,551,301 (31.45%)
		SISA	345,010,600,450	2,636,283,939,804	1,129,731,194,445	0	0	0	0	0	0	4,111,025,734,699
4	02204 | DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	PAGU	2,190,758,467,000	4,687,886,661,000	4,384,727,900,000	0	0	0	0	0	0	11,263,373,028,000
		REALISASI	1,615,525,476,976 (73.74%)	2,361,595,943,192 (50.38%)	1,543,748,664,501 (35.21%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5,520,870,084,669 (49.02%)
		SISA	575,232,990,024	2,326,290,717,808	2,840,979,235,499	0	0	0	0	0	0	5,742,502,943,331
5	02205 | DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	PAGU	1,370,309,252,000	3,590,307,471,000	1,627,660,197,000	0	0	0	0	0	0	6,588,276,920,000
		REALISASI	999,427,865,428 (72.93%)	1,562,243,002,006 (43.51%)	392,832,880,432 (24.13%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2,954,503,747,866 (44.84%)
		SISA	370,881,386,572	2,028,064,468,994	1,234,827,316,568	0	0	0	0	0	0	3,633,773,172,134
6	02208 | Ditjen Perkeretaapian	PAGU	256,511,803,000	3,620,597,025,000	4,333,216,355,000	0	0	0	0	0	0	8,210,325,183,000
		REALISASI	183,688,480,772 (71.61%)	452,609,842,536 (12.50%)	439,987,326,101 (10.15%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1,076,285,649,409 (13.11%)
		SISA	72,823,322,228	3,167,987,182,464	3,893,229,028,899	0	0	0	0	0	0	7,134,039,533,591
7	02211 | BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI	PAGU	47,087,041,000	75,844,364,000	2,459,864,000	0	0	0	0	0	0	125,391,269,000
		REALISASI	34,830,448,085 (73.97%)	25,693,116,889 (33.88%)	656,523,830 (26.69%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	61,180,088,804 (48.79%)
		SISA	12,256,592,915	50,151,247,111	1,803,340,170	0	0	0	0	0	0	64,211,180,196

tanggal cetak : 15-10-25 13:49:38 oleh : KL022

8	02212 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN	PAGU REALISASI	433,152,540,000 298,281,076,179 (68.86%)	2,440,557,346,000 1,269,412,449,239 (52.01%)	211,040,398,000 41,366,234,022 (19.60%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	3,084,750,284,000 1,609,059,759,440 (52.16%)
		SISA	134,871,463,821	1,171,144,896,761	169,674,163,978	0	0	0	0	0	0	1,475,690,524,560
9	02213 | BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK	PAGU REALISASI	45,774,065,000 33,764,480,731 (73.76%)	143,305,417,000 51,426,584,665 (35.89%)	4,151,028,000 76,700,000 (1.85%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	193,230,510,000 85,267,765,396 (44.13%)
		SISA	12,009,584,269	91,878,832,335	4,074,328,000	0	0	0	0	0	0	107,962,744,604
GRAND TOTAL		**PAGU REALISASI**	**5,612,507,132,000 4,034,228,200,663 (71.88%)**	**18,679,496,169,000 6,904,839,770,291 (36.96%)**	**11,967,673,875,000 2,643,638,772,692 (22.09%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**36,259,677,176,000 13,582,706,743,647 (37.46%)**
		SISA	**1,578,278,931,337**	**11,774,656,398,709**	**9,324,035,102,308**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22,676,970,432,353**

REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

Bulan : 01 s.d. 09

NO	Kode | Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	445572 | PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN FASILITAS KESELAMATAN PERKERETAAPIAN	PAGU	0	48,093,030,000	0	0	0	0	0	0	0	48,093,030,000
		REALISASI	0.00%	5,776,428,238 (12.01%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5,776,428,238 (12.01%)
		SISA	0	42,316,601,762	0	0	0	0	0	0	0	42,316,601,762
2	467005 | BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	PAGU	7,350,340,000	338,313,209,000	24,441,443,000	0	0	0	0	0	0	370,104,992,000
		REALISASI	5,856,472,269 (79.68%)	120,100,808,712 (35.50%)	117,757,630 (0.48%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	126,075,038,611 (34.06%)
		SISA	1,493,867,731	218,212,400,288	24,323,685,370	0	0	0	0	0	0	244,029,953,389
3	467006 | BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	PAGU	15,099,567,000	377,785,088,000	181,828,387,000	0	0	0	0	0	0	574,713,042,000
		REALISASI	10,589,940,357 (70.13%)	167,707,465,005 (44.39%)	26,114,947,075 (14.36%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	204,412,352,437 (35.57%)
		SISA	4,509,626,643	210,077,622,995	155,713,439,925	0	0	0	0	0	0	370,300,689,563
4	467309 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA	PAGU	16,496,951,000	408,629,012,000	1,241,021,399,000	0	0	0	0	0	0	1,666,147,362,000
		REALISASI	11,856,924,393 (71.87%)	14,660,218,762 (3.59%)	200,518,706,946 (16.16%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	227,035,850,101 (13.63%)
		SISA	4,640,026,607	393,968,793,238	1,040,502,692,054	0	0	0	0	0	0	1,439,111,511,899
5	467321 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG	PAGU	20,538,115,000	703,158,968,000	1,362,542,824,000	0	0	0	0	0	0	2,086,239,907,000
		REALISASI	15,033,449,683 (73.20%)	12,011,839,877 (1.71%)	47,972,405,092 (3.52%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	75,017,694,652 (3.60%)
		SISA	5,504,665,317	691,147,128,123	1,314,570,418,908	0	0	0	0	0	0	2,011,222,212,348
6	467337 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SURABAYA	PAGU	15,541,045,000	195,376,810,000	282,746,645,000	0	0	0	0	0	0	493,664,500,000
		REALISASI	10,593,894,559 (68.17%)	9,735,127,083 (4.98%)	69,415,925,673 (24.55%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	89,744,947,315 (18.18%)
		SISA	4,947,150,441	185,641,682,917	213,330,719,327	0	0	0	0	0	0	403,919,552,685
7	467345 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN	PAGU	17,028,649,000	145,459,553,000	683,917,433,000	0	0	0	0	0	0	846,405,635,000
		REALISASI	11,094,036,512 (65.15%)	12,609,751,702 (8.67%)	91,180,751,974 (13.33%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	114,884,540,188 (13.57%)
		SISA	5,934,612,488	132,849,801,298	592,736,681,026	0	0	0	0	0	0	731,521,094,812

tanggal cetak : 15-10-25 13:45:37 oleh : E02208

8	467352 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG	PAGU	8,982,713,000	97,867,520,000	2,647,000,000	0	0	0	0	0	0	109,497,233,000
		REALISASI	6,671,404,815 (74.27%)	11,056,396,658 (11.30%)	(0.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	17,727,801,473 (16.19%)
		SISA	2,311,308,185	86,811,123,342	2,647,000,000	0	0	0	0	0	0	91,769,431,527
9	467364 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG	PAGU	13,121,685,000	255,371,424,000	29,154,208,000	0	0	0	0	0	0	297,647,317,000
		REALISASI	9,818,130,462 (74.82%)	4,070,489,664 (1.59%)	23,860,000 (0.08%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	13,912,480,126 (4.67%)
		SISA	3,303,554,538	251,300,934,336	29,130,348,000	0	0	0	0	0	0	283,734,836,874
10	467373 | BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN	PAGU	15,757,103,000	62,045,387,000	1,998,085,000	0	0	0	0	0	0	79,800,575,000
		REALISASI	10,269,806,023 (65.18%)	9,542,512,941 (15.38%)	(0.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19,812,318,964 (24.83%)
		SISA	5,487,296,977	52,502,874,059	1,998,085,000	0	0	0	0	0	0	59,988,256,036
11	467385 | BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN	PAGU	15,277,528,000	87,350,273,000	26,874,629,000	0	0	0	0	0	0	129,502,430,000
		REALISASI	10,444,928,922 (68.37%)	19,488,224,694 (22.31%)	1,517,863,699 (5.65%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	31,451,017,315 (24.29%)
		SISA	4,832,599,078	67,862,048,306	25,356,765,301	0	0	0	0	0	0	98,051,412,685
12	467462 | PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API	PAGU	0	140,328,922,000	0	0	0	0	0	0	0	140,328,922,000
		REALISASI	0.00%	16,063,761,240 (11.45%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	16,063,761,240 (11.45%)
		SISA	0	124,265,160,760	0	0	0	0	0	0	0	124,265,160,760
13	467478 | PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN	PAGU	0	61,100,370,000	243,000,000	0	0	0	0	0	0	61,343,370,000
		REALISASI	0.00%	10,202,474,986 (16.70%)	(0.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10,202,474,986 (16.63%)
		SISA	0	50,897,895,014	243,000,000	0	0	0	0	0	0	51,140,895,014
14	467484 | PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN	PAGU	0	43,006,820,000	415,728,953,000	0	0	0	0	0	0	458,735,773,000
		REALISASI	0.00%	9,981,440,837 (23.21%)	(0.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9,981,440,837 (2.18%)
		SISA	0	33,025,379,163	415,728,953,000	0	0	0	0	0	0	448,754,332,163
15	467504 | KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PAGU	92,585,048,000	110,460,669,000	13,119,553,000	0	0	0	0	0	0	216,165,270,000
		REALISASI	68,014,109,456 (73.46%)	21,028,391,928 (19.04%)	1,396,550,000 (10.64%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	90,439,051,384 (41.84%)
		SISA	24,570,938,544	89,432,277,072	11,723,003,000	0	0	0	0	0	0	125,726,218,616

16	467515 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANDUNG	PAGU REALISASI	18,733,059,000 13,445,383,321 (71.77%)	546,249,970,000 8,574,510,209 (1.57%)	66,952,796,000 1,728,558,012 (2.58%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	631,935,825,000 23,748,451,542 (3.76%)
		SISA	5,287,675,679	537,675,459,791	65,224,237,988	0	0	0	0	0	0	608,187,373,458
GRAND TOTAL		**PAGU REALISASI**	**256,511,803,000 183,688,480,772 (71.61%)**	**3,620,597,025,000 452,609,842,536 (12.50%)**	**4,333,216,355,000 439,987,326,101 (10.15%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**8,210,325,183,000 1,076,285,649,409 (13.11%)**
		SISA	**72,823,322,228**	**3,167,987,182,464**	**3,893,229,028,899**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7,134,039,533,591**

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DITJEN PERBENDAHARAAN

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN PER ESELON1

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Bulan : 01 s.d. 09

NO	Kode Es. 1 |Nama Es. 1	Pagu	Realisasi		Persentase
			Perpajakan	PNBP	Realisasi
10	02201 | SEKRETARIAT JENDERAL	3,510,000,000	0	3,141,956,537	89.51%
11	02202 | INSPEKTORAT JENDERAL	0	0	82,387,455	0.00%
12	02203 | DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	1,403,602,549,000	4,502,756	948,963,977,393	67.61%
13	02204 | DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	5,339,533,710,000	612,640	4,949,917,767,242	92.70%
14	02205 | DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	1,834,852,348,000	0	1,609,440,143,676	87.71%
15	02208 | Ditjen Perkeretaapian	1,246,326,325,000	0	1,971,654,157,653	158.20%
16	02211 | BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI	0	0	202,086,499	0.00%
17	02212 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN	1,409,618,929,000	0	1,414,462,794,801	100.34%
18	02213 | BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK	13,770,000,000	0	5,332,001,064	38.72%

Dicetak : 2025-10-15 13:50:20

Laporan Target dan Realisasi PNBP Per Jenis Akun (Data s.d. H-1)

K/L : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
ESELON 1: Ditjen Perkeretaapian
SATUAN KERJA : -
PERIODE PELAPORAN : Januari - September
TAHUN PELAPORAN : 2025

Satuan Kerja	Jenis Akun	Target	Realisasi SIMPONI	Realisasi SPAN
445572 - PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN FASILITAS KESELAMATAN PERKERETAAPIAN	425287 - Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan	1.300.000.000	0	948.850.000
445572 - PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN FASILITAS KESELAMATAN PERKERETAAPIAN	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	57.865
467005 - BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	424119 - Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	21.099.810.000	0	15.825.495.409
467005 - BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	424312 - Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	7.213.648.000	0	49.852.547
467005 - BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	424911 - Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	0	334.154.059
467005 - BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	424915 - Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	2.075.037
467005 - BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	424916 - Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	1.578.799
467005 - BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	424919 - Pendapatan Lain-lain BLU	0	0	108.170.908
467005 - BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	424923 - Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	1.182.168.000	0	224.550.000
467005 - BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	424924 - Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	0	0	600.000
467005 - BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	20
467005 - BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	5.673.389.313
467006 - BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	108.000.000	0	0
467006 - BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	473.100.000	0	149.405.000
467006 - BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	0	26.043.191
467006 - BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	313
467006 - BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	12.942.687
467006 - BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	425999 - Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	0	2.137.718.000
467309 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2.334.137.000	0	5.308.776.020
467309 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	0	922.333.926
467309 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	12.407.742.731
467309 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	2.519.271.310
467321 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG	425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	0	4.110.000
467321 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG	425699 - Pendapatan Jasa Lainnya	0	0	0
467321 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG	425839 - Pendapatan Denda Lainnya	0	0	179.604.290
467321 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	45.188
467321 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	26.025.280.645

Satuan Kerja	Jenis Akun	Target	Realisasi SIMPONI	Realisasi SPAN
467321 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	6.819.149.244
467321 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG	425999 - Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	0	226.504.000
467337 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SURABAYA	425122 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	150.000.000	0	836.938.500
467337 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SURABAYA	425129 - Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0	8.514.500.000
467337 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SURABAYA	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	0	313.455.221
467337 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SURABAYA	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	15.753.979.203
467337 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SURABAYA	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	6.915.961.725
467345 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	80.658.000
467345 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	1.711
467345 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	14.684.085.450
467345 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	4.206.099.160
467345 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN	425999 - Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	0	57.170.000
467352 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG	425129 - Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	3.065.000.000	0	13.365.970.500
467352 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	93.000.000	0	0
467352 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG	425132 - Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	24.000.000	0	0
467352 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	291
467352 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	6.635.405.475
467352 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	160.628.389
467352 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG	425999 - Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	0	153.348.000
467364 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	0	662.409.527
467364 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	1.835
467364 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	6.027.492.418
467364 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	21.772.028.250
467373 - BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	78.300.000.000	0	78.802.984.633
467373 - BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN	425132 - Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	26.225.000.000	0	26.630.675.737
467373 - BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN	425135 - Pendapatan dari KSP Peralatan dan Mesin	0	0	0
467373 - BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN	425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	1.055.060.000	0	384.060.848
467373 - BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	234.546.858
467373 - BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	1.090.000.175
467385 - BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN	424119 - Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	57.997.924.000	0	44.729.853.026
467385 - BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN	424312 - Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	2.332.775.000	0	865.297.000
467385 - BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN	424911 - Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	0	755.337.365
467462 - PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA AP	425512 - Pendapatan Penggunaan Prasarana Perkeretaapian/Track Access Charge	1.023.132.453.000	0	1.518.785.667.646
467462 - PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA AP	425519 - Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	410.000.000	0	1.171.000.000

Satuan Kerja	Jenis Akun	Target	Realisasi SIMPONI	Realisasi SPAN
467462 - PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA AP	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	0	224.474.096
467462 - PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA AP	425839 - Pendapatan Denda Lainnya	0	0	90.134.511.018
467462 - PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA AP	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	892.620.908
467478 - PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN	425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	0	16.698.000
467478 - PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN	425287 - Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan	1.422.000.000	0	1.586.500.000
467478 - PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	0	1.382.410.430
467478 - PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	2.749.923.435
467478 - PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	10.029.216.300
467484 - PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN	425287 - Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan	67.250.000	0	41.400.000
467484 - PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN	425519 - Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	841.000.000	0	2.437.320.000
467484 - PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	0	33.426.363
467484 - PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	184.510.275
467484 - PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	68.016.649
467504 - KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	17.500.000.000	0	744.179.852
467504 - KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	0	148.884
467504 - KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	425839 - Pendapatan Denda Lainnya	0	0	7.058.144
467504 - KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	197.290.118
467515 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANDUNG	425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	0	6.850.000
467515 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANDUNG	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	0	317.435.813
467515 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANDUNG	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	4.606
467515 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANDUNG	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	6.483.759.170
467515 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANDUNG	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	619.146.147
Total		**1.246.326.325.000**	**0**	**1.971.654.157.653**

LAMPIRAN VI

DOKUMENTASI PEMBAHASAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III 2025 DAN DOKUMEN PENDUKUNG LAINNYA

No. ST	:	ST-K1 DJKA 954 Tahun 2025
Lokasi	:	Jakarta

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN
MONITORING DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN KINERJA
PERIODE TRIWULAN III TAHUN 2025

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JANUARI 2025

PEMBAHASAN MONITORING DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN KINERJA PERIODE TRIWULAN III TAHUN 2025

A. DASAR PENUGASAN

1. Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor PR.205/3/14/K1/DJKA/2025 tanggal 25 September 2025 perihal undangan rapat.
2. Surat Perintah Tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: ST-K1 DJKA 954 Tahun 2025 tanggal 7 Oktober 2025.

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Tempat : Hotel Millenium Jakarta dan Aplikasi Zoom Meeting (Hybrid)
2. Tanggal : Rabu-Kamis, 8-9 Oktober 2025
3. Peserta Rapat :
   a. Perwakilan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
   b. Perwakilan Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
   c. Perwakilan Direktorat Sarana Perkeretaapian;
   d. Perwakilan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian;
   e. Perwakilan Bagian SDM dan Organisasi, Setditjen Perkeretaapian;
   f. Perwakilan Bagian Hukum, Humas dan Umum, Setditjen Perkeretaapian;
   g. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
   h. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
   i. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
   j. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
   k. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
   l. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
   m. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
   n. Perwakilan Balai Pengujian Perkeretaapian;
   o. Perwakilan Balai Perawatan Perkeretaapian;
   p. Perwakilan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
   q. Perwakilan Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.
4. Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:
   a. Registrasi;
   b. Evaluasi Lanjutan Implementasi Sakip Tahun 2025 & Pembahasan Rencana Aksi Serta Tindak Lanjut Rekomendasi APIP;

c. Pemantauan Capaian Indikator RPJMN Tahun 2025-2029;
d. Evaluasi Pelaporan Tugas Dan Fungsi BTP/BPKA;
e. Pemantauan Pemanfaatan Aplikasi Pelaporan Kinerja;
f. Penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan;
g. Pembahasan Indikasi Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025;
h. Penutupan .

C. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

1. Rapat ini dilaksanakan dalam rangka monitoring dan evaluasi serta pelaporan kinerja periode Triwulan III Tahun 2025 untuk penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Pembahasan meliputi pemanfaatan Aplikasi Pelaporan Kinerja (e-Monev Bappenas, e-SAKIP Reviu, e-Performance dan Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian) dan Pembahasan Capaian Kinerja Unit Kerja serta Konsep Laporan Monitoring Kinerja Triwulan III Tahun 2025.
2. Pemaparan dari Koordinator Tim Evaluasi dan Pelaporan
   a. Evaluasi lanjutan implementasi SAKIP Tahun 2025 dan pembahasan rencana aksi serta tindak lanjut rekomendasi APIP.
      1) Pada September-Oktober yaitu dalam kegiatan Evaluasi Lanjutan penyamaan Penilaian dari Itjen dengan Unit Kerja Non Sample.



      2) Adapun berdasarkan surat Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan nomor PS.302/5/4/ITJEN/2025 tanggal 20 Agustus 2025 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian, diperoleh bahwa Direktorat Jenderal Perkeretaapian memperoleh nilai 83,72 (Predikat A) dengan interpretasi “Memuaskan“.
      3) Hasil evaluasi AKIP Ditjen Perkeretaapian Tahun 2025 dengan nilai masing-masing unit kerja sebagai berikut:

- Ditjen Perkeretaapian 85,15;
- Rata-rata Nilai Unit kerja Sample 82,27 dengan rincian:
- Dit Prasarana Perkeretaapian 83,20;
- Dit Keselamatan Perkeretaapian 80,50;
- BTP Semarang 82,00;
- BTP Surabaya 83,50;
- Balai Pengujian 82,15.

Direktorat Prasarana Perkeretaapian

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	25,20
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	25,20
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	12,30
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,50
Nilai Hasil Evaluasi		**100,00**	**83,20**
Predikat			**A**

Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	23,70
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	23,70
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	12,60
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,50
Nilai Hasil Evaluasi		**100,00**	**80,50**
Predikat			**A**

BTP Semarang

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	23,70
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	25,50
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	12,30
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,50
Nilai Hasil Evaluasi		**100,00**	**82,00**
Predikat			**A**

BTP Surabaya

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	25,20
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	25,20
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	12,60
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,50
Nilai Hasil Evaluasi		**100,00**	**83,50**
Predikat			**A**

Balai Pengujian Perkeretaapian

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	25,20
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	25,20
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	11,25
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,50
Nilai Hasil Evaluasi		**100,00**	**82,15**
Predikat			**A**

4) Berdasarkan Evaluasi Lanjutan Implementasi AKIP ditemukenali beberapa catatan antara lain:
   a) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja memenuhi kriteria on the right track apabila seluruh realisasi indikator kinerja dapat mencapai nilai 90 % s.d 110% dari target yang ditetapkan;
   b) Upaya peningkatan kinerja berupa penyesuaian penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional harus tertera dan diuraikan pada analisa di pelaporan kinerja (triwulan, tahunan);
   c) Pelaporan kinerja harus dipublikasikan tepat waktu pada aplikasi e-SAKIP reviu dan website unit kerja selama 5 tahun berturut-turut dengan data dukung lengkap (screenshoot sistem) serta dilengkapi paraf berjenjang pada tahapan persetujuan dokumen;
   d) Pelaporan kinerja harus mencantumkan informasi perubahan budaya kinerja organisasi;
   e) Unit kerja harus melakukan update/perbaikan naskah teknokratik Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 sesuai dengan dokumen revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan perkembangan

anggaran/kegiatan sesuai dengan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026;

f) Inovasi terkait penggunaan fitur dukungan SAKIP pada Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai media/tools dalam penyelenggaraan SAKIP hanya diakui untuk level Eselon I;

g) Perbedaan indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja dibandingkan dengan dokumen Rencana Strategis Tahun 2020-2024 harus dituangkan penjelasan dan justifikasinya pada dokumen Evaluasi Paruh Waktu (EPW) dan Evaluasi Akhir Periode (EAP) Rencana Strategis;

h) Benchmarking kinerja agar dilakukan dengan perbandingan level Nasional dan Internasional serta dapat juga dibandingkan dengan sektor lain yang sejenis;

i) Tim SAKIP yang ditetapkan oleh pimpinan unit kerja harus kompeten yang ditunjukkan dengan sertifikat telah mengikuti bimbingan teknis terkait penyelenggaraan SAKIP.

5) Berdasarkan penyesuaian penilaian, diketahui terdapat error pada aplikasi sehingga mempengaruhi penilaian. Oleh karena itu diperlukan koordinasi intesif antara evaluator dan evaluatan guna dapat mendapatkan hasil penilaian yang maksimal. Berikut hasil penyesuaian penilaian tersebut:

Unit Kerja	Hasil Evaluasi Tahun 2024	Hasil Evaluasi Internal Tahun 2025		Evaluasi Lanjutan Menyesuaikan Penilaian Itjen*	Keterangan
		Tingkat Unit Kerja	Tingkat Eselon I		
Setditjen Perkeretaapian	83,35	85,30	84,85	83,20	
Dit. LLAKA	82,10	83,35	83,35	81,10	
Dit. Prasarana Perkeretaapian	82,10	84,10	84,85	83,20	*Unit Sample*
Dit. Sarana Perkeretaapian	81,20	81,35	83,35	69,80	
Dit. Keselamatan Perkeretaapian	83,65	85,75	84,10	80,50	*Unit Sample*
BTP Jakarta	78,60	80,90	79,65	65,10	
BTP Bandung	80,00	86,05	83,50	81,40	
BTP Semarang	81,70	83,51	83,20	82,00	*Unit Sample*
BTP Surabaya	83,35	84,85	84,85	83,50	*Unit Sample*
BTP Medan	80,35	81,55	80,35	73,00	
BTP Padang	79,60	83,35	76,20	56,55	
BTP Palembang	81,50	83,00	82,35	73,50	
Balai Pengujian Perkeretaapian	80,30	83,95	83,80	82,15	*Unit Sample*
Balai Perawatan Perkeretaapian	81,00	82,05	82,20	78,25	
BPKA Ringan Sumatera Selatan	80,35	81,10	78,85	78,10	
BPKA Sulawesi Selatan	80,25	83,30	81,10	77,65	*Nilai Sudah Final*

Update data 7 Oktober 2025 pukul 12.00 WIB

a) Terdapat *error* sistem (karena perbaikan sistem) pada saat melakukan edit data dukung sehingga beberapa penilaian nilainya menjadi hilang dan mempengaruhi penilaian dan beberapa unit kerja nilainya menjadi rendah. Saat ini sudah sedang dilakukan tindak lanjut oleh tim Datin.

b) Secara substansi juga masih terdapat unit kerja yang belum melengkapi data dukung yang dibutuhkan sehingga diperlukan koordinasi lebih lanjut antara evaluator dan evalutan

6) Rencana Aksi dan Tindak Lanjut Rekomendasi APIP diantaranya:

Rencana aksi dan tindak lanjut ini mengikuti arahan MenPANRB dimana terdapat format rencana aksi atas rekomendasi berdasarkan Surat Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor PS.302/5/4/ITJEN/2025 Tanggal 20 Agustus 2025.

a) Telah dibuatkan format matriks rencana aksi dan tindak lanjut untuk Eselon I yang terdiri dari kolom rekomendasi, rencana aksi, *output* kegiatan, waktu penyelesaian, penanggung jawab, uraian/progres tindak lanjut dan data dukung.

b) Diharapkan bantuan seluruh unit kerja dalam penyelenggaraannya, terutama unit kerja *sample* yang menjadi object penilaian dan pemenuhan data dukung yang akan dijadikan dalam satu surat balasan ke Itjen.

c) Rekomendasi 1: Monitoring target kinerja

Target kinerja yang ditetapkan agar dimonitoring, dievaluasi secara berkala dan melakukan langkahlangkah perbaikan yang diperlukan sehingga sesuai kriteria *on the right track* yaitu realisasi capaian IKU/IKK antara 90% s.d 110%. Adapun rencana aksi tindak lanjut yang dilakukan diantaranya:

- Monitoring capaian kinerja setiap bulan melalui e-Performance dan dashboard/fitur dukungan SAKIP pada Portal Ditjen Perkeretaapian serta pembahasan dan penyusunan laparan monitoring kinerja triwulan yang juga melingkupi upaya peningkatan kinerja;
- Evaluasi kinerja unit kerja Eselon II/Balai di lingkungan Ditjen Perkeretaapian secara berkala berdasarkan pelaporan kinerja;
- Koordinasi/himbauan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian;
- Pembahasan dan penyusunan revisi Perjanjian Kinerja sesuai hasil monitoring dan evaluasi kinerja agar memenuhi kriteria *on the right track.*

d) Rekomendasi 2: Perubahan budaya kinerja

Mencantumkan informasi perubahan budaya kinerja pada LKIP (semula-menjadi). Adapun rencana aksi tindak lanjut yang dilakukan diantaranya:

- Evaluasi kepatuhan pelaporan kinerja dengan substansi rekomendasi/upaya peningkatan kinerja terkait terkait penempatan/ penghapusan jabatan sebagai salah satu komponen penilaian;
- Koordinasi/himbauan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian terkait substansi laporan monitoring kinerja triwulan/LKIP;
- Menguraikan rekomendasi/upaya peningkatan kinerja terkait penempatan/ penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional pada Laporan Monitoring Kinerja Triwulan/LKIP;
- Menambahkan data/tindak lanjut terkait penempatan dan penghapusan jabatan pada analisa efisiensi sumber daya manusia dan/atau tindak lanjut rekomendasi periode sebelumnya.

e) Rekomendasi 3: Pengukuran jabatan

Memanfaatkan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional dan diinformasikan dalam LMCK/LKIP termasuk tindak lanjut yang tertuang didalamnya agar ditindaklanjuti. Adapun rencana aksi tindak lanjut yang dilakukan diantaranya:

- Koordinasi/ himbauan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian terkait substansi laporan monitoring kinerja triwulan/LKIP;
- Menguraikan informasi perubahan budaya kinerja (semulamenjadi) pada Laporan Monitoring Kinerja Triwulan/LKIP.

f) Rekomendasi 4: Monitoring kriteria evaluasi

Melakukan monitoring secara terus menerus dan memastikan bahwa kriteria dalam Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 74 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi AKIP telah tercantum dalam LMCK/LKIP Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian yang

tidak termasuk dalam sampel evaluasi AKIP Tahun 2025. Adapun rencana aksi tindak lanjut yang dilakukan diantaranya:

- Update/penajaman komponen penilaian evaluasi kepatuhan pelaporan kinerja sesuai KM 74 Tahun 2024;
- Evaluasi kepatuhan pelaporan kinerja secara berkala (triwulan) untuk seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian sesuai komponen penilaian yang update;
- Evaluasi lanjutan implementasi SAKIP internal pada unit kerja non sample dengan penyesuaian/ persamaan parameter penilaian sesuai hasil evaluasi oleh APIP.

b. Pemantauan Capaian Indikator RPJMN Tahun 2025-2029

1) Dari LMCK TW II 2025 lalu Setditjen Perkeretaapian sudah meminta kepada unit kerja untuk memuat capaian indikator RPJMN 2025-2029 di masing-masing laporan kinerja.
2) Adapun definisi indikator RPJMN dan definisi dari sistem Krisna sebagai berikut:

Indikator RPJMN	Satuan	Rumus	Keterangan
Indikator Program Prioritas (PP) - Penguatan Konektivitas dan Layanan Transportasi			
• **Indikator PP1 : Jumlah Penumpang Angkutan Kereta Api**	Juta penumpang	Jumlah penumpang kereta api seluruh layanan baik antar kota dan perkotaan	Indikator yang menunjukkan jumlah penumpang angkutan penumpang untuk semua moda kereta api di Indonesia setiap tahunnya dan Semakin tinggi jumlah penumpang mengindikasikan semakin baik kinerja moda kereta api dalam melayani angkutan penumpang.
• **Indikator PP2 : Jumlah Penumpang Angkutan Perkotaan di 10 Kota Metropolitan berbasis rel & darat**	Juta penumpang	Jumlah penumpang kereta api khusus layanan di beberapa wilayah perkotaan	Wilayah Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, Bandung, Semarang, Makassar.
• **Indikator PP3 : Jumlah Perjalanan Kereta Api**	Juta perjalanan	Penjumlahan seluruh perjalanan angkutan kereta api dalam satu tahun.	Jumlah perjalanan lalu lintas kereta api dalam satu tahun dan semakin tinggi angka perjalanan menunjukkan semakin tinggi layanan angkutan kereta api
Indikator Kegiatan Prioritas (KP) - Pengembangan KA Penumpang Antar Kota dan Penguatan KA Angkutan Barang			
• **Indikator KP1 : Panjang Jalur KA yang Beroperasi**	km	Penjumlahan secara kumulatif panjang kereta api di Indonesia yang dibangun dan lalk beroperasi	Indikator yang menyatakan panjang jalur kereta api yang operasional, termasuk jalur ganda dan jalur yang direaktivasi dan semakin bertambah nilai indikator, semakin tinggi jumlah jaringan kereta api yang beroperasi maka akan meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas masyarakat
• **Indikator KP2 : Jalur KA yang Menggunakan Persinyalaan Elektrik**	%	Persentase Sinyal Elektrik = (sinyal elektrik/total sinyal termasuk rencana pengembangan) x 100%	Indikator ini menyatakan perbandingan persinyalan elektrik secara nasional dan semakin tinggi persentase sinyal kereta api yang menggunakan sinyal elektrik, maka semakin meningkat keselamatan dan efisiensi perjalanan kereta api.
• **Indikator KP3 : Kondisi jalur KA Sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2**	%	Persentase panjang jalur KA yang memenuhi nilai Track Quality Index (TQI) Kategori I dan II (TQI A dengan Kecepatan 80 s.d 120 Km/jam) dibandingkan jumlah keseluruhan hasil pengukuran termasuk Kategori III dan IV (TQI B dengan Kecepatan 40 s.d 80 Km/jam)	TQI merupakan nilai atau output berupa angka dari hasil pengukuran kereta ukur untuk memberikan informasi kondisi kualitas jalan rel yang dilewati pada wilayah operasional yang dilakukan inspeksi dan makin tinggi persen TQI, makin baik kualitas lintasan track kereta api.
Indikator Kegiatan Prioritas (KP) - Pengembangan Transportasi Perkotaan			
• **Indikator KP : Ketersediaan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel**	Juta Penumpang/ Hari	Jumlah kapasitas penumpang per sarana dikalikan ritase per hari	Indikator ini menjelaskan kapasitas layanan angkutan umum massal perkotaan berbasis rel dalam satuan juta penumpang per hari di wilayah Metropolitan dan bertambahnya ketersediaan angkutan umum massal perkotaan mengindikasikan pembangunan angkutan umum massal perkotaan

3) Kemudian pada surat lalu telah disampaikan surat mengenai pembagian dukungan unit kerja untuk target indikator RPJMN dengan rincian sebagai berikut:

Indikator RPJMN	Satuan	Dukungan Unit Kerja
PP - Penguatan Konektivitas dan Layanan Transportasi		
• Indikator PP1: Jumlah Penumpang Angkutan Kereta Api	Juta penumpang	Ditllaka
• Indikator PP2: Jumlah Penumpang Angkutan Perkotaan di 10 Kota Metropolitan berbasil rel & darat	Juta penumpang	Ditllaka
• Indikator PP3: Jumlah Perjalanan Kereta Api	Juta perjalanan	Ditllaka
KP - Pengembangan KA Penumpang Antar Kota dan Penguatan KA Angkutan Barang		
• Indikator KP1: Panjang Jalur KA yang Beroperasi	km	Ditpras, BTP, BPKA
• Indikator KP2: Jalur KA yang Menggunakan Persinyalaan Elektrik	%	Ditpras
• Indikator KP3: Kondisi jalur KA Sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2	%	Ditpras
ProP - Pembangunan Jalur Kereta Api		
• Indikator 1: Jalur KA yang Dibangun	Km	BTP, BPKA
• Indikator 2: Jalur KA yang Terkoneksi Simpul Transportasi dan Koridor Logistik	Lokasi	
ProP – Peningkatan, Pemeliharaan, Perawatan dan Pengoperasian Jaringan Prasarana KA Mendukung Aspek Keandalan dan Keselamatan		
• Indikator 1: Pemeliharaan, Perawatan dan Pengoperasian Jaringan KA/IMO	Km	BTP, BPKA
• Indikator 2: Peningkatan Prasarana Kereta Api	Km	
• Indikator 3: Penanganan Perlintasan Kereta Api	Lokasi	
• Indikator 4: Peningkatan Persinyalan dan Telekomunikasi Perkeretaapian	Unit	
• Indikator 5: Peningkatan Stasiun KA Antar Kota	Unit	
• Indikator 6: Peningkatan Jembatan	Unit	
• Indikator 7: Peningkatan Terowongan	Unit	
• Indikator 8: Penanganan Rawan Bencana di Jalur KA	Lokasi	
• Indikator 9: Pembayaran atas Ketersediaan Layanan	Kegiatan	
ProP- Penyediaan Layanan Nonkomersil Kereta Api (Perintis/PSO)		
• Indikator 1: Layanan Perintis Kerreta Api	Lintas	BTP, BPKA
ProP- Tata Kelola Pengembangan Perkeretaapian		
• Indikator 1: Jumlah Kegiatan Mendukung Tata Kelola Konektivitas Kereta Api	Dokumen/ Kegiatan	Direktorat Teknis, BTP, BPKA

Indikator RPJMN	Satuan	Dukungan Unit Kerja
KP - Pengembangan Transportasi Perkotaan		
• Indikator KP1: Ketersediaan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel	Juta Penumpang/ Hari	Ditllaka
ProP - Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel		
• Indikator 1: Jaringan KA Perkotaan Dibangun	Km	BTP, BPKA
• Indikator 2: Elektrifikasi Jalur KA Perkotaan	Km	
• Indikator 3: Layanan KA Perkotaan Perintis	Lintas	
• Indikator 4: Stasiun KA Perkotaan yang Ditingkatkan	Unit	
• Indikator 5: KA Perkotaan yang dikembangkan	Lokasi	
ProP – Pengembangan dan Tata Kelola Angkutan Umum Massal Perkotaan		
• Indikator 1: Penyiapan Perencanaan Pengembangan SAUM Perkotaan	Dokumen/ Kegiatan	Direktorat Teknis, BTP, BPKA

Diharapkan pemenuhan data capaian RPJMN ini dapat dilaporkan secara berkelanjutan pada Laporan Monitoring Capaian Kinerja.

4) Adapun target indikator RPJMN 2025-2029 Perkeretaapian yang dimonitoring Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebagai berikut:

Indikator RPJMN	Satuan	Baseline	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
Indikator Program Prioritas (PP) - Penguatan Konektivitas dan Layanan Transportasi							
• Indikator PP1 : Jumlah Penumpang Angkutan Kereta Api	Juta penumpang	501 (2024)	519	538	558	579	601
• Indikator PP2 : Jumlah Penumpang Angkutan Perkotaan di 10 Kota Metropolitan berbasis rel & darat	Juta penumpang	685 (2023)	850* (460)**	870* (476)**	895* (493)**	925* (511)**	950* (529)**
• Indikator PP3 : Jumlah Perjalanan Kereta Api	Juta perjalanan	0,86 (2024)	0,92	0,95	0,99	1,01	1,03
Indikator Kegiatan Prioritas (KP) - Pengembangan KA Penumpang Antar Kota dan Penguatan KA Angkutan Barang							
• Indikator KP1 : Panjang Jalur KA yang Beroperasi	km	6.880 (2023)	6.928	6.928	6.937	6.937	6.937
• Indikator KP2 : Jalur KA yang Menggunakan Persinyalaan Elektrik	%	63 (2023)	65	66	67	68	70
• Indikator KP3 : Kondisi jalur KA Sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2	%	93,85 (2023)	94	95	96	97	98
Indikator Kegiatan Prioritas (KP) - Pengembangan Transportasi Perkotaan							
• Indikator KP : Ketersediaan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel	Juta Penumpang/Hari	2,989 (2023)	2,825	2,828	2,836	2,836	2,836

**) Target penumpang angkutan perkotaan untuk moda darat dan kereta api pada RPJMN*
***) Target penumpang angkutan perkotaan untuk moda kereta api (diolah dari rancangan Renstra)*

Dalam pemenuhan target RPJMN tersebut, capaian yang dilaporkan masih menggunakan data sementara sehingga dibutuhkan bantuan dari seluruh unit kerja terkait. Telah dibuatkan matriks capaian dengan isian kolom meliputi target 2025, capaian Triwulan III 2025, presentase capaian, kegiatan pendukung, kendala/tantangan dan dukungan yang diharapkan seperti berikut:

Indikator RPJMN	Satuan	Target 2025	Capaian Triwulan III 2025	% Capaian	Kegiatan Pendukung	Kendala/ Tantangan	Dukungan yang diharapkan dari Kemenkeuinfra
Indikator Program Prioritas (PP) - Penguatan Konektivitas dan Layanan Transportasi							
• Indikator PP1 : Jumlah Penumpang Angkutan Kereta Api	Juta penumpang	519	358***	68,98	Penyelenggaraan angkutan KA PSO dan perintis	Tidak ada kendala	Dukungan Pengadaan Sarana untuk Angkutan Perintis dan PSO
• Indikator PP2 : Jumlah Penumpang Angkutan Perkotaan di 10 Kota Metropolitan berbasis rel & darat	Juta penumpang	850* (460)**	308,87***	67,14	Penyelenggaraan angkutan KA PSO dan perintis, peningkatan fasilitas stasiun KA (Tanah Abang 100%, Rangkasbitung 94%)	Tidak ada kendala	
• Indikator PP3 : Jumlah Perjalanan Kereta Api	Juta perjalanan	0,92	0,71***	77,17			
Indikator Kegiatan Prioritas (KP) - Pengembangan KA Penumpang Antar Kota dan Penguatan KA Angkutan Barang							
• Indikator KP1 : Panjang Jalur KA yang Beroperasi	km	6.928	6.936	100,12%	Capaian didukung dengan penyelesaian jalur ganda KA Kiaracondong – Cicalengka yang telah beroperasi pada awal Tahun 2025. Selain itu, kegiatan pembangunan jalur KA baru/jalur ganda lainnya yang masih berprogres diantaranya di lokasi Medan - Binjai (57%) dan Solo – Kalioso (96%).	Medan – Binjai: Reviu dokumen teknis akibat perubahan/reviu desain di lapangan, kendala pada proses pengadaan lahan (perpanjangan Penlok menunggu persetujuan perubahan zonasi pada RDTR) Solo – Kalioso: Kendala pada proses pengadaan lahan (tahapan eksekusi hasil persidangan – on progress)	Dukungan percepatan penyelesaian pengadaan lahan terutama di lokasi Medan – Binjai

*) Target penumpang angkutan perkotaan untuk moda darat dan kereta api pada RPJMN
**) Target penumpang angkutan perkotaan untuk moda kereta api (diolah dari rancangan Renstra)
***) Data sementara

Indikator RPJMN	Satuan	Target 2025	Capaian Triwulan III 2025	% Capaian	Kegiatan Pendukung	Kendala/ Tantangan	Dukungan yang diharapkan dari Kemenkeuinfra
• Indikator KP2 : Jalur KA yang Menggunakan Persinyalan Elektrik	%	65	64,43	99,12%	Kegiatan peningkatan fasilitas operasi/sistem persinyalan, diantaranya di lokasi Tegal – Pekalongan (pelelangan), Prupuk – Purwokerto (pelelangan) serta beberapa kegiatan di wilayah Sumbagsel dengan pembiayaan badan usaha (proses perizinan)	Beberapa kegiatan peningkatan fasilitas operasi Tahun 2025 (SBSN) tidak dapat dilaksanakan karena proses penetapan pemenang oleh Menteri Perhubungan menunggu selesainya legal audit, potensi diluncurkan pada Tahun 2026 dan perlu perpanjangan MYC	Dukungan keberlanjutan anggaran di Tahun 2026
• Indikator KP3 : Kondisi jalur KA Sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2	%	94	93,2	99,15%	Kegiatan peningkatan (Jember – Kalisat 84%) dan perawatan prasarana perkeretaapian di seluruh wilayah Jawa, Sumatera dan Sulawesi (persiapan kontrak)	Keterlambatan lelang/kontrak perawatan prasarana milik negara (BM)	Dukungan kebijakan/ alternatif penugasan PT. KAI
Indikator Kegiatan Prioritas (KP) - Pengembangan Transportasi Perkotaan							
• Indikator KP : Ketersediaan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel	Juta Penumpang/Hari	2,825	2,890	102,30%	Peningkatan kapasitas/keandalan fasilitas operasi diantaranya peningkatan sistem elektrifikasi di wilayah Jabodetabek (96%)	Tidak ada kendala	-

c. Evaluasi Pelaporan Tugas dan Fungsi BTP/BPKA

1) Substansi laporan pelaksanaan tugas & fungsi BTP mencakup substansi sekurang-kurangnya meliputi:
   a) Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja;
   b) Pelaksanaan Kegiatan Strategis;
   c) Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Perkeretaapian sesuai Wilayah Kerja, meliputi Lalu Lintas, Angkutan, Prasarana, Sarana, Keselamatan, Isu/Permasalahan dan Upaya Penyelesaian terkait dan Penyelenggaran Perkeretaapian.
   d) Kejadian/Peristiwa Penting; dan
   e) Penutup.
2) Substansi laporan pelaksanaan tugas & fungsi BTP mencakup substansi sekurang-kurangnya meliputi:
   a) Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja:
   b) Pelaksanaan Kegiatan Strategis;

c) Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian, diantaranya meliputi pengoperasian dan pengusahaan sarana dan prasarana perkeretaapian.
d) Perawatan dan Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perkeretaapian;
e) Kejadian/Peristiwa Penting; dan
f) Penutup.

3) Adapun evaluasi beberapa catatan pelaporan tugas dan fungsi BTP/BPKA sebagai berikut:
a) Pada BTP Kelas I Jakarta, Pelaporan telah dilaksanakan dengan tepat waktu, namun perlu dicek kembali apakah ada peristiwa penting yang melibatkan pimpinan.
b) Pada BTP Kelas I Bandung, pelaksanaan kegiatan strategis yang belum dapat dilaksanakan dapat ditambahkan informasi mengenai profil pekerjaan (pagu, lingkup, dll).
c) Pada BTP Kelas I Semarang:
- Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai Teknik Perkeretaapian dan Balai Pengelola Kereta Api disampaikan secara periodik/triwulan kepada Direktur Jenderal Perkeretapian paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya setelah periode triwulan berakhir;
- Isu/Permasalahan dan upaya tindak lanjut terhadap penyelenggaraan perkeretaapian belum ada termasuk kejadian/peristiwa penting yang melibatkan pimpinan perlu dicek kembali apakah ada

d) Pada BTP Kelas I Surabaya, pada kondisi keselamatan, kejadian temperan bukan merupakan jenis kecelakaan kereta api. Kecelakaan kereta api terdiri dari Tabrakan KA dengan KA, anjlokan, terguling dan terbakar.
e) Pada BTP Kelas I Medan isu/permasalahan dan upaya tindak lanjut terhadap penyelenggaraan perkeretaapian belum ada termasuk kejadian/peristiwa penting yang melibatkan pimpinan perlu dicek kembali apakah ada.

f) Pada BTP Kelas II Padang:

- Pada Pelaksanaan anggaran dapat dilengkapi dengan realisasi fisik
- Pada kondisi lalu lintas belum menggambarkan On Time Performance
- Pada Kondisi Prasarana belum menggambarkan kondisi Fasop

g) Pada BTP Kelas II Palembang, isu/permasalahan dan upaya tindak lanjut terhadap penyelenggaraan perkeretaapian belum ada termasuk kejadian/peristiwa penting yang melibatkan pimpinan perlu dicek kembali apakah ada.

h) Pada BPKAR Sumatera Selatan

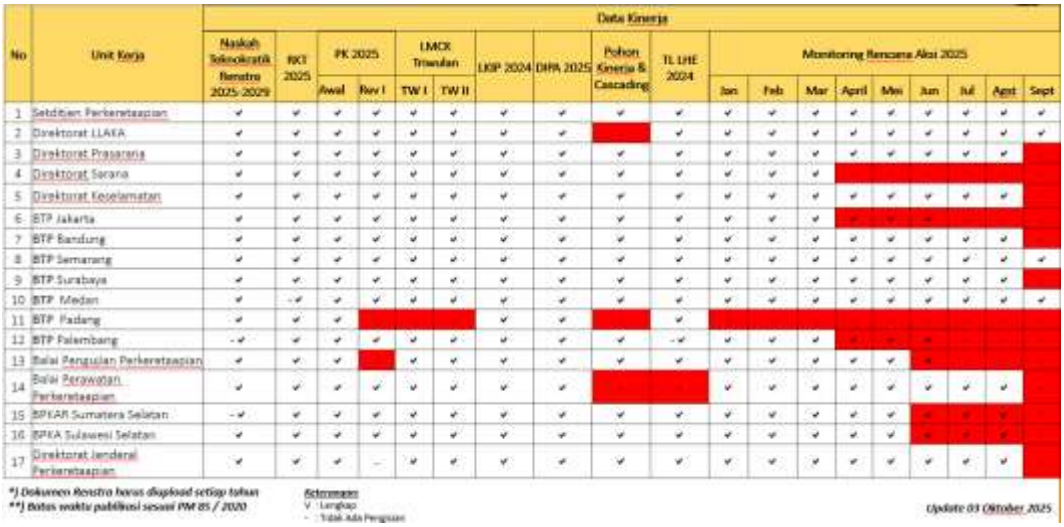
- Penyampaian laporan dilaksanakan secara bulanan, seharusnya disampaikan secara triwulanan;
- Agar ditambahkan target dan realisasi PNBP pada Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lainnya;
- Terkait Upaya Penyelesaian/Tindak Lanjut agar disampaikan timeline/target waktunya.

i) Pada BPKA Sulawesi Selatan

- Terlambat, agar pelaporan disampaikan tepat waktu (15 hari kalender bulan berikutnya);
- Terkait Upaya Penyelesaian/Tindak Lanjut agar disampaikan timeline/target waktunya.

d. Pemantauan Pemanfaatan Aplikasi Pelaporan Kinerja

1) Telah dilakukan pemantauan aplikasi E-Sakip Reviu posisi 3 Oktober 2025 dengan hasil sebagai berikut:



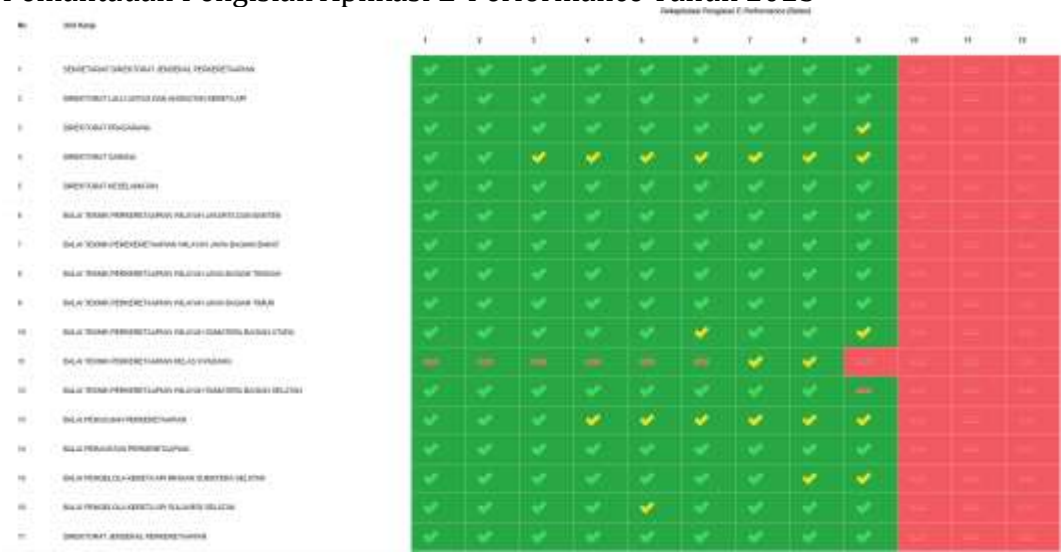
No	Unit Kerja	Data Kinerja																		
		Naskah Sekoderatik Renstra 2025-2029	IKT 2025	PK 2025		LMCR Triwulan		LKIP 2024	DIPA 2025	Pohon Kinerja & Cascading	TL LHE 2024	Monitoring Rencana Aksi 2025								
				Awal	Rev I	TW I	TW II					Jan	Feb	Mar	April	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept
1	Setditjen Perkeretaapian	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Direktorat LLAKA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Direktorat Prasarana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4	Direktorat Sarana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
5	Direktorat Keselamatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	BTP Jakarta	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
7	BTP Bandung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8	BTP Semarang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	BTP Surabaya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10	BTP Medan	✓	- ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	BTP Padang	✓	✓	✓				✓	✓		✓									
12	BTP Palembang	- ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	- ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
13	Balai Pengujian Perkeretaapian	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
14	Balai Pengawasan Perkeretaapian	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15	BPKAR Sumatera Selatan	- ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16	BPKA Sulawesi Selatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

*) Dokumen Renstra harus diupload setiap tahun
**) Batas waktu publikasi sesuai PM 85 / 2020

Keterangan:
V : Lengkap
- : Tidak Ada Pengisian

Update 03 Oktober 2025

2) Pemantauan Pengisian Aplikasi E-Performance Tahun 2025



3) Kelengkapan Pengisian *E-Performance* posisi Juli 2025

No	Unit Kerja	Waktu Pengisian	Kelengkapan Pengisian			Keterangan
			Keterangan/ Analisa	Rencana Selanjutnya	Dokumen Pendukung	
1	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1 Agustus 2025	√	√	√	Tepat Waktu, lengkap
2	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	1 Agustus 2025	√	√	√	**Tepat Waktu, lengkap**
3	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	7 Agustus 2025	√	√	√	**Tepat Waktu, lengkap**
4	Direktorat Sarana Perkeretaapian	7 Agustus 2025	O	O	O	Tepat waktu, Sebagian pengisian Analisa, rencana selanjutnya maupun data dukung
5	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	1 Agustus 2025	√	√	O	Tepat Waktu, tidak ada link dokumen pendukung
6	Balai Teknik Perkeretaapian Jakarta	1 Agustus 2025	√	√	O	Tepat Waktu, **tidak ada link dokumen pendukung**
7	Balai Teknik Perkeretaapian Bandung	4 Agustus 2025	√	O	√	Tepat waktu, rencana selanjutnya tidak lengkap
8	Balai Teknik Perkeretaapian Semarang	5 Agustus 2025	√	√	√	Tepat waktu, lengkap
9	Balai Teknik Perkeretaapian Surabaya	4 s.d 5 Agustus 2025	√	√	√	Tepat waktu, lengkap
10	Balai Teknik Perkeretaapian Medan	[illegible]	√	√	√	**Tidak Tepat Waktu, lengkap**
11	Balai Teknik Perkeretaapian Padang	[illegible]				[illegible]
12	Balai Teknik Perkeretaapian Palembang	6 s.d 7 Agustus 2025	√	√	O	**Tepat Waktu, tidak ada link dokumen pendukung**
13	Balai Pengujian Perkeretaapian	4 Agustus 2025	O	O	O	Tepat waktu, Sebagian pengisian Analisa, rencana selanjutnya maupun data dukung
14	Balai Perawatan Perkeretaapian	4 Agustus 2025	√	√	√	**Tepat waktu, lengkap**
15	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	7 Agustus 2025	√	√	O	Tepat Waktu, tidak ada link dokumen pendukung
16	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	5 s.d 7 Agustus 2025	√	√	√	Tepat waktu, lengkap
17	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1 Agustus 2025	√	√	√	Tepat waktu, lengkap

Kelengkapan Pengisian *E-Performance* posisi Agustus 2025

No	Unit Kerja	Waktu Pengisian	Kelengkapan Pengisian			Keterangan
			Keterangan/ Analisa	Rencana Selanjutnya	Dokumen Pendukung	
1	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1 September 2025	√	√	√	Tepat Waktu, lengkap
2	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	5 September 2025	√	√	√	Tepat Waktu, lengkap
3	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	8 September 2025	√	√	√	Tepat Waktu, lengkap
4	Direktorat Sarana Perkeretaapian	3 s.d 4 September 2025	√	O	O	**Tepat Waktu, tidak lengkap untuk pengisian rencana selanjutnya dan dokumen pendukung**
5	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	1 September 2025	√	√	O	Tepat Waktu, tidak ada link dokumen pendukung
6	Balai Teknik Perkeretaapian Jakarta	3 September 2025	√	√	O	Tepat Waktu, tidak ada link dokumen pendukung
7	Balai Teknik Perkeretaapian Bandung	7 September 2025	√	√	√	Tepat waktu, lengkap
8	Balai Teknik Perkeretaapian Semarang	3 s.d 8 September 2025	√	√	√	Tepat waktu, lengkap
9	Balai Teknik Perkeretaapian Surabaya	1 September 2025	√	√	√	Tepat waktu, lengkap
10	Balai Teknik Perkeretaapian Medan	8 September 2025	√	√	√	Tepat waktu, lengkap
11	Balai Teknik Perkeretaapian Padang	[illegible]	O	O	O	**Tepat Waktu, hanya 2 indikator terisi (Rasio konektivitas dan TOJ)**
12	Balai Teknik Perkeretaapian Palembang	8 September 2025	√	√	O	Tepat Waktu, tidak ada link dokumen pendukung
13	Balai Pengujian Perkeretaapian	4 September 2025	√	√	O	Tepat Waktu, tidak ada file dokumen pendukung
14	Balai Perawatan Perkeretaapian	1 September 2025	√	√	√	**Tepat waktu, lengkap**
15	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	8 September 2025	√	√	O	Tepat Waktu, tidak ada link dokumen pendukung, sebagian dokumen pendukung
16	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	8 September 2025	√	√	O	Tepat Waktu, sebagian link dokumen pendukung
17	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1 September 2025	√	√	√	Tepat waktu, lengkap

Kelengkapan Pengisian *E-Performance* posisi September 2025

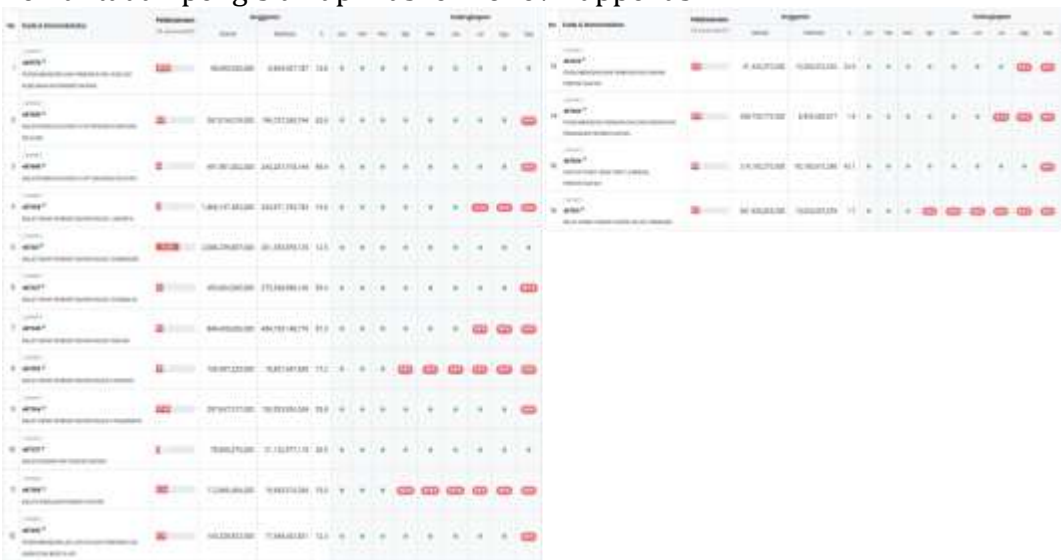
No	Unit Kerja	Waktu Pengisian	Kelengkapan Pengisian			Keterangan
			Keterangan/ Analisa	Rencana Selanjutnya	Dokumen Pendukung	
1	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1 Oktober 2025	√	√	√	Tepat Waktu, lengkap
2	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	5 Oktober 2025	√	√	√	Tepat Waktu, lengkap
3	Direktorat Prasarana Perkeretaapian					Belum melakukan pengisian
4	Direktorat Sarana Perkeretaapian	2 Oktober 2025				Belum melakukan pengisian Analisa, rencana selanjutnya maupun data dukung
5	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	1 Oktober 2025	√	√	O	Tepat Waktu, tidak ada link dokumen pendukung
6	Balai Teknik Perkeretaapian Jakarta	1 s.d 5 Oktober 2025	√	√	O	**Tepat Waktu, tidak ada link dokumen pendukung**
7	Balai Teknik Perkeretaapian Bandung	3 Oktober 2025	√	O	√	Tepat waktu, pengisian rencana selanjutnya tidak lengkap
8	Balai Teknik Perkeretaapian Semarang	3 s.d 6 Oktober 2025	√	√	O	Tepat waktu, pengisian data dukung tidak lengkap
9	Balai Teknik Perkeretaapian Surabaya	1 s.d 3 Oktober 2025	√	√	√	Tepat waktu, lengkap
10	Balai Teknik Perkeretaapian Medan					Belum melakukan pengisian
11	Balai Teknik Perkeretaapian Padang					Belum melakukan pengisian
12	Balai Teknik Perkeretaapian Palembang					Belum melakukan pengisian
13	Balai Pengujian Perkeretaapian	6 Oktober 2025				Belum melakukan pengisian Analisa, rencana selanjutnya maupun data dukung
14	Balai Perawatan Perkeretaapian	2 Oktober 2025	√	√	√	Tepat waktu, lengkap
15	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan					Belum melakukan pengisian
16	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	3 s.d 4 Oktober 2025	√	√	√	Tepat waktu, lengkap
17	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1 Oktober 2025	√	√	√	Tepat waktu, lengkap

4) Pemantauan pengisian Renaksi pada SILAKI



Pada rencana aksi diharapkan untuk melengkapi juga kegiatan pendukung/kegiatan bersifat *output* karena diperiksa juga oleh Itjen.

5) Pemantauan pengisian aplikasi e-Monev Bappenas



6) Pemantauan Pengisian Capaian Output Pada Monev Kemenkeu

No	Kode Satker	Nama Satker	Partisipasi Satker*)									Monitoring Capaian Output**									Keterangan
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Jul	Agst	Sept	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Jul	Agst	Sept	
1	445572	Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Lengkap
2	467005	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	Lengkap
3	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Lengkap
4	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Jakarta	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√		
5	467321	Balai Teknik Perkeretaapian Semarang	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√		
6	467337	Balai Teknik Perkeretaapian Surabaya	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Lengkap
7	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Medan	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	83,20%	85,38%	√	√	√		
8	467352	Balai Teknik Perkeretaapian Padang	√	√	√	√	√	√	√	√		55,33%	√	√	81,44%	77,77%	86,78%	√	√		
9	467364	Balai Teknik Perkeretaapian Palembang	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	90,90%	96,77%	99,23%		
10	467373	Balai Perawatan Perkeretaapian	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√		
11	467385	Balai Pengujian Perkeretaapian	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	88,60%	93,11%	√	√	√	√	Lengkap
12	467462	Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan KA	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Lengkap
13	467478	Pengembangan dan Peningkatan Sarana Perkeretaapian	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Lengkap
14	467484	Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Lengkap
15	467504	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	Lengkap
16	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Bandung	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	88,33%	87,04%	79,32%	74,02%	87,04%	65,78%	

e. Pembahasan Penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan

1) Pada outline LMCK, terdapat tambahan pada BAB II Capaian Kinerja yaitu pada Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan agar menambahkan realisasi penanganan risiko periode triwulan sehingga sinkron dengan manajemen kinerja.



Sumber : Permenhub No. PM 65/2020 (diolah)

2) Pada analisis efisiensi SDM diharapkan ditambahakan penempatan jabatan.

3) Pada Bab III Informasi perubahan budaya kinerja terdapat rekomendasi penambahan kolom semula-menjadi. Pengisian kolom semula diisi tahun lalu dan menjadi diisi tahun ini. Disarankan untuk keterangan bisa untuk menjelaskan dampak dari aktivitas yang telah dilakukan. Pada kolom Keterangan juga bisa diisi Dampak/Manfaat.


BAB 3: Informasi Perubahan Budaya Kinerja

Informasi Budaya Kinerja (Semula)	Informasi Budaya Kinerja (Menjadi)	Keterangan

4) Berdasarkan hasil evaluasi kinerja berdasarkan laporan monitoring kinerja Triwulan II 2025 terdapat beberapa catatan antara lain:
   a) Berdasarkan hasil evaluasi di atas, diidentifikasi beberapa indikator kinerja yang berkinerja rendah (<90%) diantaranya:
      - Nilai Kinerja Anggaran (Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung, Balai Teknik Kelas I Perkeretaapian Palembang);
      - Persentase Perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian (Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian);
      - Persentase Pemenuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara (Direktorat Sarana Perkeretaapian);
      - Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Regulator dan Operator Perkeretaapian (Direktorat Keselamatan Perkeretaapian).
   b) Disampaikan pula beberapa rekomendasi untuk upaya peningkatan kinerja tersebut di atas:
      - Percepatan penyerapan anggaran dan realisasi fisik/capaian output Tahun 2025, penyesuaian/update Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), serta penggunaan Standar Biaya Khusus (SBKK/SBKU) pada tahun berjalan untuk meningkatkan nilai efektivitas dan efisiensi perencanaan serta mengoptimalkan nilai pelaksanaan anggaran;
      - Percepatan penagihan atas kewajiban Track Access Charge (TAC) dari Badan Usaha Wajib Bayar sesuai ketentuan, serta optimalisasi layanan Badan Layanan Umum (BLU) untuk peningkatan perolehan PNBP bidang perkeretaapian.
      - Koordinasi intensif untuk memastikan penyelesaian pengadaan sarana perkeretaapian milik negara secara tepat waktu dalam upaya mendukung pemenuhan sarana perkeretaapian milik negara,

termasuk pemantauan terhadap kondisi sarana milik negara agar dirawat sesuai ketentuan dan dalam kondisi siap operasi.

- Mendorong Balai Teknik Perkeretaapian/Balai Pengelola Kereta Api untuk berperan aktif memantau sertifikat SDM operator perkeretaapian guna memastikan pengoperasian prasarana dan sarana dilaksanakan sesuai kompetensinya.
- Percepatan usulan pembiayaan alternatif melalui pemanfaatan PNBP/BLU untuk memenuhi kegiatan yang terdampak kebijakan efisiensi guna mendukung pelayanan dan keselamatan perkeretaapian.

c) Berdasarkan hasil evaluasi kepatuhan laporan kinerja Triwulan II 2025 terdapat beberapa unit kerja yang masih rendah, diharapkan komitmennya untuk meingkatkan kepatuhan pelaporan.

No.	Unit Kerja	Kepatuhan Pelaporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025		
		Pemenuhan Laporan Monitoring Kinerja	Kepatuhan Pemanfaatan Aplikasi Kinerja	Rata-Rata Kepatuhan
1	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	97,50	100,00	98,75
2	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	97,50	100,00	98,75
3	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	97,50	100,00	98,75
4	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	97,50	94,00	95,75
5	Balai Teknik Perkeretaapian Jakarta	91,25	92,67	91,96
6	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	82,50	96,00	89,25
7	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	85,00	90,00	87,50
8	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	80,00	94,00	87,00
9	Balai Perawatan Perkeretaapian	73,75	98,00	85,88
10	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	87,50	83,33	85,42
11	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	73,75	90,00	81,88
12	Balai Pengujian Perkeretaapian	92,50	64,67	78,59
13	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	85,00	68,67	76,84
14	Direktorat Sarana Perkeretaapian	53,75	67,33	60,54
15	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	56,25	26,67	41,46

5) Sesi Diskusi

a) Untuk *benchmarking* minimal harus ada minimal 50% dan tidak boleh *benchmarking* di tingkat Eselon yang sama, bisa satu tingkat di atas atau terhadap sektor lain atau nasional/internasional.

b) Pada upaya peningkatan kinerja untuk penyusunan strategi/kebijakan lebih mengacu kepada startegi yang dilakukan secara makro. Contohnya startegi penyeusaian MR dan SAKIP yang bisa disampaikan pada Analisa Penanganan Risiko. Sedangkan untuk aktivitas/anggaran lebih ke hal yang bersifat *output.* Sedangkan untuk organisasi (*tentative)* dan pegawai (wajib ada) kemungkinan mengikuti arahan itjen.

c) Terkait tambahan penanganan risiko lebih menceritakan apa saja penanganan risiko yang telah dilaksanakan, mitigasi risiko yang dilaksanakan. Tidak ada format yang menjadi acuan sehingga pada prinsipnya lebih ke hightlight saja.

3. Sesi diskusi pembahasan penilaian Evaluasi AKIP secara umum

Unit Kerja	Hasil Evaluasi Tahun 2024	Hasil Evaluasi Internal Tahun 2025		Evaluasi Lanjutan Menyesuaikan Penilaian Itjen*	Keterangan
		Tingkat Unit Kerja	Tingkat Eselon I		
Setditjen Perkeretaapian	83,35	85,30	84,85	83,20	
Dit. LLAKA	82,10	83,35	83,35	81,10	
Dit. Prasarana Perkeretaapian	82,10	84,10	84,85	83,20	*Unit Sample*
Dit. Sarana Perkeretaapian	81,20	81,35	83,35	69,80	
Dit. Keselamatan Perkeretaapian	83,65	85,75	84,10	80,50	*Unit Sample*
BTP Jakarta	78,60	80,90	79,65	65,10	
BTP Bandung	80,00	86,05	83,50	81,40	
BTP Semarang	81,70	83,51	83,20	82,00	*Unit Sample*
BTP Surabaya	83,35	84,85	84,85	83,50	*Unit Sample*
BTP Medan	80,35	81,55	80,35	73,00	
BTP Padang	79,60	83,35	76,20	56,55	
BTP Palembang	81,50	83,00	82,35	73,50	
Balai Pengujian Perkeretaapian	80,30	83,95	83,80	82,15	*Unit Sample*
Balai Perawatan Perkeretaapian	81,00	82,05	82,20	78,25	
BPKA Ringan Sumatera Selatan	80,35	81,10	78,85	78,10	
BPKA Sulawesi Selatan	80,25	83,30	81,10	77,65	*Nilai Sudah Final*

Update data 7 Oktober 2025 pukul 12.00 WIB

a. Pada proses penialaian evaluasi AKIP, terdapat error system yang ditemukenali yaitu ketika nama file terdapat spasi menyebabkan beberapa file secara sistem ditolak. Beberapa data masih ada kendala karena file data dukungnya tidak bisa dibuka akibat error spasi pada penamaan file. Saat ini dalam proses perbaikan sistem. Batas waktu penilaian evaluasi AKIP diharapkan bisa terpenuhi paling lambat akhir Oktober 2025.

b. Unit kerja yang sudah tidak ada tanggapan/diskusi lagi nilainya akan segera difinalisasi.

c. Evaluasi tim 1

1) Terkait hasil evalausi SAKIP terhadap Dit. LLAKA sudah dilakukan penilaian dan penyesuaian terhadap inovasi upaya maupun pennempatan dan pengahapusan jabatan sudah ditindaklanjuti dengan hasil penilaian akhir 82,60.

2) Untuk evaluasi BTP Kelas I Medan telah dilakukan penyesuaian namun masih terdapat *error system* pada point 3A. Nilai sementara yaitu 80,80.

d. Evaluasi Tim 2
   1) Hasil evaluasi terhadap Setditjen Perkeretaapian dengan penilaian terbaru sebesar 83,20.
   2) Dari BTP Kelas I Bandung sudah dilakukan perbaikan-perbaikan dan hasil terbaru sebesar 81,40.
   3) Untuk hasil penilaian terbaru dari BPKAR Sumatera Selatan di 78,40. Posisi saat ini masih ada beberapa catatan yang sudah ditindaklanjuti namun masih berprogres.

e. Evaluasi Tim 3
   1) Secara umum sudah dilakukan penilaian dan catatan. Posisi awal diberikan keringanan penilaian sehingga naiknya dibuat tinggi, namun pada progresnya masih terdapat beberapa catatan yang belum ditindaklanjut sehingga penilaian diturunkan kembali.
   2) Pada Dit Sarana Perkeretaapian telah dilakukan koordinasi dengan unit kerja terkait pengisian data dukung/deskripsi yang perlu perbaikan. Untuk Lakin akan segera ditindaklanjuti. Pada poin 1A, 1B, 2A, 2B, 3A seharusnya masih bisa ditingkatkan/dioptimalkan kembali kelengkapan data dukungnya, terutama bagian-bagian poin C.
   3) Terdapat arahan Itjen untuk pemenuhan data dukung Buku Pedoman SAKIP dengan periode 5 Tahun walaupun isinya tidak berbeda jauh setiap tahunnya.
   4) Pada BTP Kelas I Jakarta Terkait penilaian saat ini dalam proses koordinasi. Untuk saat ini masih proses tindak lanjut karena beberapa data masih belum bisa dipenuhi.
   5) Pada BTP Kelas II Padang pemenuhan data dukung masih banyak yang kurang seperti wawancara yang jawabannya belum memahami. Perbaikan data dukung masih berproses namun secara keseluruhan belum ada update data yang signifikan. Diharapkan segera melakukan tindak lanjut dan jangan lagi menunda sebab nilai Evaluasi AKIPnya masih rendah. Diharapkan dari seluruh unit kerja terkait agar aktif

berkomunikasi terkait data dukung apa saja yang sudah diperbaiki/ditindaklanjuti.

6) Catatan terkait Renstra harapannya bisa dipenuhi.

f. Evaluator Tim 4

1) Pada penilaian BPKA Sulawesi Selatan sudah final namun terbuka apabila masih mau dilakukan perbaikan.
2) Balai Perawatan masih proses pemenuhan tindak lanjut.
3) BTP Kelas II Palembang sudah dilakukan tindak lanjut dan akan dilakukan pengecekan ulang.

4. Sesi diskusi pembahasan Rencana Aksi dan Tindaklanjut Rekomendasi

a. Link Tindaklanjut Rekomendasi Evaluasi AKIP Tahun 2025 dapat diakses pada link berikut https://drive.google.com/drive/folders/1fQbBlotzl1RxPj_gqKYA3XxA6librxCz?usp=sharing
b. Diharapkan bantuan dari seluruh unit kerja terhadap pemenuhan data dukung rekomendasi tersebut.
c. BTP Surabaya sudah menyiapkan matriks terkait namun melihat format dari Setditjen, dirasa format Setditjen tersebut sudah lebih detial.
d. Pemenuhan rencana aksi dan tindak lanjut rekomendasi ini paling lambat diajukan pada 17 October 2025. Format matriks eksisting mengacu arahan Narasumber MenPANRB lalu.
e. Pada rekomendasi II terkait pengukuran kinerja, selama ini sudah dilakukan pada LMCK Triwulan di Bab II. Hasil analisis tersebut digunakan untuk dasar penempatan pegawai. Hasil pengukuran kinerja masing-masing indikator digunakan sebagai dasar penempatan pegawai. Terdapat 2 pendekatan, pertama dari pengukuran berdasarkan indikator kinerja dan kedua berdasarkan realiasi dari hasil assesment.
f. Pada rekomendasi I terkait target kinerja, rencana aksi poin a s.d c dapat dituntaskan sampai dengan Triwulan III, namun untuk poin d kemungkinan dimonitoring terus sampai nanti dilakukan Revisi PK.
g. Seluruh data dukung diharapkan bisa dipenuhi posisi Oktober 2025.

5. Pelaporan Periodik Tugas dan Fungsi Balai bertujuan untuk simplifikasi pelaporan, jika memungkinkan dapat disampaikan secara bulanan, maksimal triwulan dan untuk substansi bisa mengacu pada KP DJKA 43 Tahun 2025.
6. Telah disusun Tindak Lanjut dari Rekomendasi Evaluasi SAKIP yang dapat diakses pada tautan https://tinyurl.com/TLAKIP2025-DJKA masing-masing unit kerja dipersilahkan memberikan masukan terutama unit kerja sample.
7. Format Pelaporan Kinerja Triwulan III 2025



Sumber : Permenhub No. PM 85/2020 (diolah)

   a. Format TW III realisasi penanganan risikosebagai upaya untuk mengintegrasikan antara pelaporan kinerja dan pelaporan risiko, bisa diuraikan terkait penanganan risiko dalam mencapai tujuan kinerja.
   b. Perbandingan kinerja sejenis disarankan dengan unit kerja di luar Ditjen Perkeretaapian.
   c. Cut off perhitungan capaian NKA pada aplikasi Monev Kemenkeu pada 15 Oktober 2025.
   d. Informasi perubahan budaya kinerja disarankan dibat matrik sebelum dan sesudah adanya perubahan budaya kinerja.
   e. Capaian RPJMN agar dimasukkan dalam Lapmon TW III 2025 pada Bab II.
8. Pembahasan Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Kinerja Triwulan III 2025:
   a. Direktorat LLAKA
      1) Capaian Kinerja Direktorat LLAKA Triwulan III 2025

SASARAN KEGIATAN	KODE IKK	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2025	TARGET TRIWULAN				REALISASI TW III	KINERJA TW III	KINERJA TAHUNAN
					TW I	TW II	TW III	TW IV			
SK 1 Meningkatnya Kebijakan Konektivitas	IKK.1	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Jaringan Jalur	%	23,00	3,84	7,69	11,54	23,00	11,54	100,00	50,00

SASARAN KEGIATAN	KODE IKK	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2025	TARGET TRIWULAN				REALISASI TW III	KINERJA TW III	KINERJA TAHUNAN
					TW I	TW II	TW III	TW IV			
Jaringan Perkeretaapian		KA dan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian									
	IKK.2	Persentase Penyelesaian Kerjasama Pengembangan Infrastruktur Perkeretaapian	%	20,00	4,00	8,00	12,00	20,00	12,00	100,00	60,00
SK 2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan KA	IKK.3	Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api berdasarkan GAPEKA	%	95,60	95,60	95,60	95,60	95,60	*104,99	109,83	109,07
	IKK.4	Persentase Pemenuhan NSPK Bidang LLAKA	%	35,71	4,76	9,52	23,81	35,71	23,81	100,00	66,67
	IKK.5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA	Nilai	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	3,75	101,18	101,18
	IKK.6	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	%	18,57	4,29	8,91	13,80	18,57	*12,82	*92,91	69,03
	IKK.7	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api	%	18,84	4,64	9,34	14,09	18,84	*12,52	*88,88	66,48
SK 3 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	IKK.8	Nilai AKIP Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	Nilai	83.50	-	-	-	83,50	*82,10	*98,32	*98,32
	IKK.9	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat LLAKA	Nilai	15,00	-	-	-	15,00	15,00	100,00	100,00
	IKK.10	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat LLAKA	Nilai	83,00	50,00	50,00	50,00	83,00	48,90	97,80	58,92
	IKK.11	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat LLAKA	%	83,00	50,00	60,00	70,00	83,00	224,88	321,25	270,94
	IKK.12	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat LLAKA	Nilai	76,50	-	-	-	76,50	*73,50	96,08	-

Keterangan:
*) Capaian Agustus 2025

2) Capaian kinerja IKK 6 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api pada kinerja Triwulan III Tahun 2025 (data sementara) sebesar 12,82% dengan capaian kinerja triwulan sebesar 92,91%

dan capaian kinerja tahunan sebesar 69,03% dengan realisasi penumpang sampai bulan Agustus 2025 adalah sebesar 358.712.713 orang dari target jumlah penumpang Tahun 2025 adalah sebesar 519.616.302 orang dan target pada Triwulan III Tahun 2025 sebesar 386.080.004 orang yang terdiri dari KA PSO, KA Komersial dan KA Perintis.

3) Capaian kinerja IKK 7 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api pada Triwulan III Tahun 2025 (data sementara) sebesar 12,52% dengan capaian kinerja triwulan sebesar 88,88% dan capaian kinerja tahunan sebesar 66,48% dengan realisasi angkutan barang sampai bulan Agustus 2025 adalah sebesar 45.219.620 ton dari target jumlah angkutan barang tahun 2025 adalah sebesar 68.022.903 ton dan target pada Triwulan III Tahun 2025 sebesar 50.877.407 ton.
4) Capaian kinerja IKK 11 Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat LLAKA dengan kinerja Triwulan III Tahun 2025 adalah sebesar 224,88% dan capaian kinerja triwulan sebesar 321,25% dan capaian kinerja tahunan sebesar 270,94%. Total penerimaan PNBP hingga Triwulan III Tahun 2025 adalah Rp1.611.208.273.668 dari target triwulan sebesar Rp716.479.717.100 dengan rincian berikut:
   a) PNBP TAC Tahun 2024 dari PT KAI sebesar Rp1.363.779.626.461;
   b) PNBP TAC Tahun 2024 dari PT KCI sebesar Rp157.054.656.029 dan Tahun 2025 sebesar Rp80.526.515.291;
   c) PNBP TAC Tahun 2024 dari PT Railink sebesar Rp4.799.757.620 dan Tahun 2025 sebesar Rp2.859.623.263;
   d) PNBP Perizinan Tahun 2025 sebesar Rp1.171.000.000;
   e) Pendapatan Lain-lain sebesar 1.117.095.004.
5) Masih banyak data capaian yang menggunakan data sementara progres Agustus 2025.
6) Untuk IKK PNBP karena presentase sudah melebihi target dan tidak bisa Revisi PK pada TW III 2025 maka capaian terpaksa menjadi anomali namun dalam arti hal yang bagus.
7) Capaian Kinerja indikator RPJMN sebagai berikut:

Indikator	Satuan	Target					Capaian	Persentase Capaian
		2025	2026	2027	2028	2029	Triwulan III 2025	
PP1. Jumlah Penumpang Angkutan Kereta Api	Juta penumpang	519	538	558	578	601	*358	68,98%
PP2. Jumlah Penumpang Angkutan Perkotaan di 10 Kota Metropolitan Berbasis Rel dan Darat	Juta penumpang	850 KA : 460	870 KA : 476	895 KA : 493	925 KA : 511	950 KA : 529	*308	36,24%
PP.3 Jumlah Perjalanan Kereta Api	Juta perjalanan	0,92	0,95	0,99	1,01	1,03	*0,71	77,17%
KP1. Ketersediaan Angkutan Umum Massal Perkotaan	Juta pnp/hari	2.825	2.828	2.836	2.836	2.836	*2.890	102,30%

PP1. Jumlah Penumpang, realisasi jumlah penumpang kereta api antarkota dan perkotaan sampai bulan Agustus 2025 sebesar **358.712.713 orang**

PP2. Angkutan Perkotaan di 10 Kota Metropolitan yang meliputi Jakarta, Medan, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, Denpasar, Manado, Palembang dan Banjarmasin. Realisasi angkutan perkotaan berbasis rel yang terdiri dari 7 Kota yaitu Jakarta, Medan, Bandung, Surabaya, Palembang, Semarang dan Makassar sampai bulan Agustus 2025 sebesar **308.865.306 orang**

PP.3 Jumlah Perjalanan KA, realisasi jumlah perjalanan kereta api antarkota dan perkotaan (penumpang dan barang) yang meliputi PT KAI, PT KCI, PT Railink, PT CRI, PT KCIC, PT MRT Jakarta, dan PT LRT Jakarta sampai bulan Agustus 2025 sebesar **712.772 KA**

KP1. Ketersediaan Angkutan Umum Massal Perkotaan, merupakan jumlah kapasitas layanan harian dari angkutan umum massal perkotaan yang dituliskan dalam satuan penumpang/hari. Dihitung dari variable kapasitas sarana yang beroperasi dikalikan dengan total perjalanan harian kereta api. Realisasi sampai bulan Agustus 2025 sebesar **2.890.396 pnp/hari**

Pada Capaian Kinerja Indikator RPJMN untuk angkutan umum massal perkotaan disarankan untuk kota Makasar di*takedown* karena sesuai ijon operasi sehingga cukup 6 kota.

8) Pada IKK Nilai AKIP dan IKK MR nilainya masih sementara.

b. Direktorat Keselamatan

1) Capaian Kinerja Direktorat Keselamatan Triwulan III 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan		
				Target Tw. III	Realisasi Tw. III	Capaian Tw. III
Meningkatnya keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi perkeretaapian	**IKK.1** Persentase hasil audit sIstem manajemen keselamatan (SMKP) yang ditindaklanjuti/ dimanfaatkan	%	**16,66** (3)	5,56	16,66	299,64
	IKK.2 Persentase rekomendasi peningkatan keselamatan penyelenggaraan dan pengoperasian Kereta Api yang ditindaklanjuti/ dimanfaatkan	%	**15,78** (15)	8,42	14,74	175,05
	IKK.3 Persentase penindakan atau penegakan hukum berdasarkan hasil pengawasan keselamatan perkeretaapian	%	**5,00** (1)	-	5,00	100
	IKK.4 Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator dan Operator Perkeretaapian	%	**19,44** (7.000)	17,76	15,81	89,02
	IKK.5 Persentase pemenuhan NSPK bidang keselamatan Perkeretaapian	%	**88,89** (48)	88,89	88,89	100,00
Meningkatnya kinerja pelayanan publik terhadap	**IKK.6** Persentase rekomendasi teknis peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang yang ditindaklanjuti	%	**15,00** (3)	10,00	5,00	50,00

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan		
				Target Tw. III	Realisasi Tw. III	Capaian Tw. III
keselamatan perkeretaapian	**IKK.7** Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang Diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	**3,86**	3,86	3,34	86,53
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	**IKK.8** Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	**83,67**	-	80,50	96,21
	IKK.9 Tingkat penerapan manajemen risiko Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	**15,00**	-	-	-
	IKK.10 Nilai kinerja anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian (Nilai)	Nilai	**85,61**	50,00	47,98	95,96
	IKK.11 Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) DKP	%	**100,00**	85,54	73,17	84,54
	IKK.12 Nilai pengawasan kearsipan internal Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	**66,00**	-	-	-

2) Pada IKK SMKP sudah terpenuhi melebihi target dengan rincian:
   a) Sampai dengan bulan September 2025 terdapat 3 hasil Audit SMKP yang telah ditindajlanjuti/dimanfaatkan diantaranya adalah:
      - Tindaklanjut hasil audit khusus SMKP oleh PT. KAI (Persero) Manajer Unit Makassar – Parepare;
      - Tindaklanjut hasil audit khusus SMKP oleh Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan;
      - Tindaklanjut hasil Audit SMKP oleh PT. Celebes Railway Indonesia (CRI);
   b) Dengan ditindaklanjutinya 2 Hasil audit khusus SMKP tahun 2024 dan 1 hasil Audit SMKP pada tahun 2025 maka realisasi pada Triwulan Iii tahun 2025 sebesar 16,66 % dan capaian kinerja Triwulan III sebesar 299,64 % serta capaian kinerja tahunan sebesar 100%.
3) Pada IKK Rekomendasi peningkatan keselamatan

   Sampai dengan Triwulan Iii tahun 2025 terdapat 14 Rekomendasi peningkatan keselamatan yang ditindaklanjuti oleh penyelenggara perkeretaapian sehingga realisasi pada Triwulan III sebesar 14,74 % dari

target yang di tetapkan 8,42 % dan capaian kinerja Triwulan III sebesar 175,05%.

4) Pada IKK Sertifikasi SDM dari bulan Januari s.d September 2025 telah tercapai 5.691 sertifikasi SDM Regulator dan Operator Perkeretaapian, target pada Triwulan III adalah 17,76 dengan realisasi sebesar 15,81 sehingga target belum tercapai. Target pada Triwulan III belum tercapai dikarenakan penyelenggara perkeretaapan (operator dan dinas perhubungan) belum seluruhnya mengajukan permohonan sertifikat baik baru maupun perpanjangan. Untuk IKK Sertifikasi SDM diperkirakan tidak tercapai pada Triwulan III sehingga dibutuhkan percepatan. Diharapkan bisa dibuatkan proyeksi hingga akhir Tahun dan harapannya dapat tercapai di akhir tahun. Akan dilakukan koordinasi dan percepatan pencetakan setifikat SDM Operator PT. KAI (persero) dan PT. KCIC.
5) Pada IKK Persentase rekomendasi teknis peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang dari pemoohon belum menyampaikan tindak lanjutnya dan dengan adanya penghematan anggaran berdampak pada rekomendasi yang dikeluarkan.
6) Untuk capaian yang anomali disarankan agar dimasukan ke dalam rekomendasi Revisi PK.
7) Pada IKK IKM diharapkan untuk responden dapat ditingkatkan dengan cara-cara kreatif, misalkan meningkatkan *awareness* dengan menambahkan pengisian link ke dalam SOP. Pada bulan Agustus 2025 tidak ada yang melakukan pengisian karena kendala akses internet.
8) Kejadian Kecelakaan Perkeretaapian Tahun 2025 telah terjadi 7 kecelakaan dengan kejadian kecelakaan Triwulan III sebanyak 5 kecelakaan, berikut rinciannya:

No	Jenis Kecelakaan	Waktu Kecelakaan	Faktor yang kontribusi terjadinya kecelakaan ka	Keterangan
1	Anjlok	15 Maret 2015 Jam 22.30 WIB	Sarana	KA 3100 (Barapati) anjlok 1 As di KM 381+9/0 emplasemen Ujan Mas Divre III Palembang
2	Anjlok	23 Juni 2025 Jam 11:13 WIB		KA 3335F anjlok 4 As di KM 407+7/8 di emplasemen Banjarsari Divre III Palembang
3	Anjlok	27 Juli 2025 Jam 23:10 WIB		KA 3992 (Linggapati) Anjlok 5 As di KM 389+426 Jalur Hulu Muaraenim (Me) - Muaragula (Mrl). Divre III Palembang
4	Anjlok	29 Juli 2025 Jam 03:40 WIB		KA 3106 (Barapati/Isian) Anjlok 2 As di KM 377+821 Jalur Hulu Ujanmas (Ujm) - Penanggiran (Png). Divre III Palembang
5	Anjlok	1 Agustus 2025 Jam 15:47 WIB	Sarana	KA 1 Argo Bromo Anggrek anjlok 5 kereta di Emplasement Stasiun Pegaden Baru daop 3 Cirebon.
6	Anjlok	5 Agustus 2025 Jam 07:17 WIB	Prasarana	KA 1189 Commuter Line anjlok 3 As di Emplasement Stasiun Jakarta Kota Daop 1 jakart
7	Anjlok	5 Agustus 2025 Jam 16:29 WIB	Prasarana	KA 55 Kuala Stabas anjlok 2 As di KM 141+2 Jalur hilir Negeriagung - Tulungbuyut, Divre IV tanjungkarang

Realisasi perjalanan kereta api pada bulan Januari – Agustus Tahun 2025 dengan jumlah keberangkatan sebanyak 712.772 Kereta Api, sehingga Tingkat Keselamatan yang diperoleh pada Triwulan III tahun 2025 sebesar 99,02%;

9) Sasaran, indikator kinerja kegiatan dan target kinerja kegiatan



c. Direktorat Sarana

1) Capaian Kinerja Direktorat Sarana Triwulan III 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target PK 2025	Target Revisi PK 2025	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian Kinerja TW I	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian Kinerja TW II	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian Kinerja TW III
SK 1	Meningkatnya Konektivitas Sarana Perkeretaapian	IKK 1	Presentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian	%	66,67	30	66,67	66,67	100	30	-	-	30	-	-
SK 2	Meningkatnya Pelayanan Bidang Sarana Perkeretaapian	IKK 2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	3,7	3,7	3,4	3,78	102,16	3,7	3,82	103,24	3,7	3,79	102,43
SK 3	Meningkatnya Kehandalan Sarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKK 3	Presentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian	%	73,84	61,39	3,85	4,74	123,11	28,39	28,31	99,71	44,88	55,50	123,66
		IKK 4	Presentase Pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian	%	45,120	37,03	45,120	0	-	-	-	-	-	-	-

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target PK 2025	Target Revisi PK 2025	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian Kinerja TW I	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian Kinerja TW II	Target TW II	Realisasi TW III	Capaian Kinerja TW III
		IKK 5	Presentase Pemenuhan sarana perkeretaapian milik negara	%	18,000	71,01	3,60	1,80	50	71,01	28,2	39,71	71,01	106,73	150,30
		IKK 6	Presentase sarana perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti sesuai hasil Rampcheck	%	91,000	100	91,000	100	109,89	100	100	100	100	100	100
SK 5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Sarana Perkeretaapian	IKK 7	Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	81,25	81,25	81,25	0	0	-	-	-	-	-	-
		IKK 8	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Sarana perkeretaapian	Nilai	15,00	15,00	15,00		-	-	-	-	-	-	-
		IKK 9	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	86,70	86,70	20,08	50	592,23	25,64	45,49	177,41	68,51	45,56	66,50
		IKK 10	Presentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Sarana Perkeretaapian	%	100	100	25	73,43	293,72	77,43	82,87	107,025	88,71	112,74	127,08
		IKK 11	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	79,57	79,57	79,57	0	0	-	-	-	-	-	-

2) Dibutuhkan untuk rekomendasi Revisi PK pada IKK 3 Presentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian, IKK 5 Presentase Pemenuhan sarana perkeretaapian milik negara dan IKK 10 PNBP karena capaian kinerjanya tinggi (anomali).
3) Pada IKK Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana penggunaan angka jumlah 3 perencanaan teknis yang belum disahkan. Perhitungannya perlu dicek ulang kembali. Apabila tidak ada capaian diharapkan antara target dan realisasi = *based line* dikarenakan memang adanya efisiensi anggaran.
4) Untuk *based line* IKK NSPK disarankan untuk dicari tahu lebih lanjut karena seharusnya SOP juga bisa. Diharapkan untuk memikirkan proyeksi LKIP kedepannya.
5) Terkait IKK Pemenuhan Sarana, pengadaan sarana kemungkinan sampai dengan akhir tahun tidak terlaksana sehingga perlu diuraikan tindak lanjutnya bagaimana.

   Realisasi capaian kinerja sampai dengan Bulan September 2025 pada IKK ini adalah 106,73%, persentase sudah melebihi target capaian kinerja sehingga perlu diusulkan untuk revisi target capaian kinerja. Kegiatan pengoperasian Sarana Perkeretaapian Milik Negara yang masuk dalam perhitungan capaian kinerja IKK ini yaitu Pengoperasian SMN yang biayanya dibebankan ke anggaran pengoperasian SMN yaitu sebanyak 24 unit, namun terdapat pelaksanaan kegiatan pengoperasian sarana milik negara tanpa menggunakan anggaran pengoperasian SMN yang terbagi menjadi pengoperasian SMN komersial dan non komersial, dalam hal ini pengoperasian SMN yang dilakukan oleh Balai Teknik, PT KAI atau STTP.

6) Terkait dengan IKK *Rampcheck* diharapkan dapat disiapkan untuk pelaksanaan Natalru karena perhitungan kumulatif dari Angleb hingga Natalru.

d. Direktorat Prasarana

1) Capaian Kinerja Direktorat Prasarana Triwulan III 2025

Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian Kinerja TW III
IKK 1	Presentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas prasarana	%	64,54	63,57	63,57	100,00
IKK 2	Persentase Pengoperasian Jalur KA yang sesuai dengan TQI Kategori I dan II	%	95,02	95,02	93,71	98,62
IKK 3	Persentase Fasilitas Operasi Kereta Api Dengan Teknologi Handal	%	65,27	64,43	64,43	100,00
IKK 4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	3,89	3,87	3,87	100,00
IKK 5	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	%	50,34	47,69	48,57	101,89
IKK 6	Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian	%	90,48	86,90	87,06	100,18
IKK 7	Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	_	_	83,20	-
IKK 8	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	_	_	_	_
IKK 9	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	85,76	48,00	43,55	90,73
IKK 10	Presentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian	%	100,00	74,77	79,45	106,26
IKK 11	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	79,00	_		

2) Rincian Efisiensi Sumber Daya Manusia dan Anggaran

RO (1)	Capaian RO per RO (2)	Alokasi Anggaran (AARO) (3)	Realisasi Anggaran (RARO) (4)	AARO x CRO (5)	(AARO x CRO) - RARO (6)
Jabodetabek Railway Capacity Enhancement Phase I	9%	IDR 93.279.586.000,00	IDR 0,00	IDR 8.395.160.940,00	IDR 8.395.160.940,00
Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	28%	IDR 2.450.411.000,00	IDR 0,00	IDR 631.906.880,00	IDR 631.906.880,00
Rancangan Rinci (Detailed Design/Engineering Design)	2%	IDR 16.679.031.000,00	IDR 0,00	IDR 535.580.620,00	IDR 535.580.620,00
Jalur Kereta Api	2%	IDR 246.293.515.000,00	IDR 0,00	IDR 4.925.870.300,00	IDR 4.925.870.300,00
Infrastruktur Perkeretaapian	98,89%	IDR 1.473.175.000,00	IDR 1.456.860.000,00	IDR 1.456.822.757,50	(IDR 37.242,50)
Engineering Services For Jakarta Mass Rapid Transit East-West Line Project Phase I Stage I	12%	IDR 100.000.000,00	IDR 0,00	IDR 12.000.000,00	IDR 12.000.000,00
Surabaya Regional Railway Line (Phase I)	9%	IDR 60.376.841.000,00	IDR 0,00	IDR 5.433.915.690,00	IDR 5.433.915.690,00
Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	74,97%	IDR 12.405.200.000,00	IDR 759.253.221,00	IDR 9.300.178.440,00	IDR 8.540.925.219,00
Layanan Perkantoran	74,97%	IDR 16.725.733.000,00	IDR 7.118.044.467,00	IDR 12.539.282.000,10	IDR 5.421.237.563,10
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	35%	IDR 2.705.814.000,00	IDR 0,00	IDR 947.034.900,00	IDR 947.034.900,00
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	55%	IDR 5.349.095.000,00	IDR 631.387.769,00	IDR 1.872.183.250,00	IDR 1.240.795.481,00
Layanan Manajemen Keuangan	24%	IDR 917.392.000,00	IDR 15.895.380,00	IDR 220.174.080,00	IDR 204.278.700,00
Jumlah		IDR 458.735.775.000,00	IDR 9.981.440.837,00	IDR 48.068.109.867,60	IDR 38.086.669.030,60
Efisiensi				7,867%	

SDM Tersedia	Kebutuhan SDM Sesuai ABK	Output Aktual	Target Output
243	355	100	100

Efisiensi SDM = 68,45%

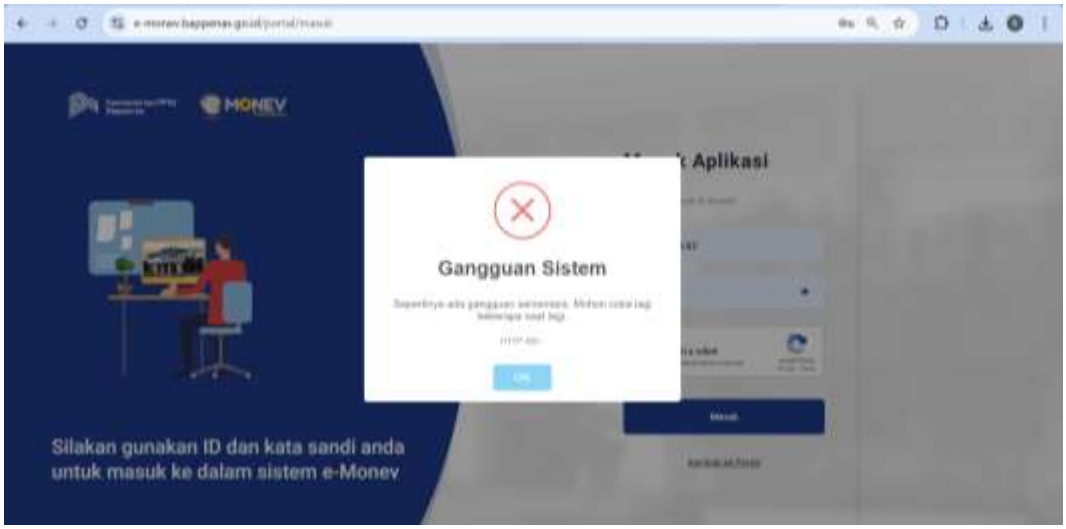
3) Adapun progres rencana tindaklanjut rekomendasi evaluasi AKIP Tahun 2025 sebagai berikut:

Rekomendasi	Rencana Tindaklanjut/ Kegiatan	Out Put Kegiatan dan Realisasi	Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Realisasi	Status			Data Dukung
						Tuntas	Proses	Belum	
Target kinerja yang ditetapkan dimonitoring, dievaluasi secara berkala dan melakukan langkah langkah perbaikan yang diperlukan sehingga sesuai kriteria **on the right track** yaitu **realisasi capaian IKU/IKK antara 90% s.d. 110%**	1. Pembahasan Monitoring Rencana Aksi Periode Bulanan 2. Pembahasan Monitoring Kinerja Triwulanan 3. Tindaklanjut/Rekomendasi/Upaya Peningkatan Kinerja	1. Laporan Kegiatan dan Monitoring Rencana Aksi 2. Laporan Kegiatan dan Laporan Monitoring Kinerja Periode Triwulanan 3. Tindaklanjut/Rekomendasi Peningkatan	1. Periode Bulanan tahun 2025 2. Periode III – IV tahun 2025 3. Periode Bulanan dan III-IV tahun 2025	Tim SAKIP & Para Penanggunggawab IKK Direktorat Prasarana Perkeretaapian	1. Sesuai dengan Nota Dinas Direktur Prasarana Perkeretaapian Nomor : 0080/K3/I/2025 perihal Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Periode Bulanan Direktorat Prasarana Perkeretaapian, sampai dengan bulan September 2025 telah dilakukan Pembahasan Capaian Kinerja Periode Bulanan/Monitoring Rencana Aksi 2. Sesuai dengan SOP Monitoring dan Evaluasi Serta Pelaporan Capaian Kinerja Periode Triwulanan telah dilaksanakan pembahasan Monitoring Kinerja Periode Triwulanan di tahun 2025 3. Penyempurnaan/Perbaikan berdasarkan rencana tindaklanjut/upaya/rekomendasi peningkatan kinerja sebagaimana tertuang dilaporan monitoring rencana aksi dan LMCK/LAKIN		√		

Rekomendasi	Rencana Tindaklanjut/ Kegiatan	Out Put Kegiatan dan Realisasi	Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Realisasi	Status			Data Dukung
						Tuntas	Proses	Belum	
Memanfaatkan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional dan diinformasikan dalam LMCK/LKIP termasuk tindak lanjut yang tertuang didalamnya agar ditindaklanjuti	1. Monitoring Pengukuran Kinerja Individu 2. Penyusunan LMCK/LAKIN per periode 3. Usulan Penempatan Jabatan fungsional	1. Laporan hasil monitoring pengukuran kinerja individu 2. Laporan LMCK/LAKIN 3. Usulan Penempatan Jabatan Fungsional	1. Periode Triwulanan 2. Periode Triwulanan 3. Tahun 2025	Tim SAKIP & Pengelola Kepegawaian	1. Penyusunan LMCK yang menginformasikan pengukuran kinerja sebagai dasar penempatan jabatan fungsional				
Mencantumkan informasi perubahan budaya kinerja pada LKIP (semula-menjadi)	1. Pembahasan dan penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Triwulanan 2. Pembahasan dan Penyusunan Laporan Monitoring LAKIN	1. Laporan LMCK 2. Laporan LAKIN	1. Periode Triwulan III – IV tahun 2025 2. Januari 2026	Tim SAKIP	Akan diakomodir pada laporan Triwulan III kondisi semula dan perubahan budaya kinerja secara berkala di pelaporan kinerja diantaranya perubahan budaya kinerja yang telah dilaksanakan adalah : 1. telah dilaksanakan pembahasan evaluasi pengukuran jalur KA menggunakan kereta ukur dengan pihak PT. KAI pada periode I dan periode II tahun 2025 2. Monitoring dan Evaluasi capaian Kinerja Periode Bulanan di Lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian setiap bulan		√		

Rekomendasi	Rencana Tindaklanjut/ Kegiatan	Out Put Kegiatan dan Realisasi	Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Realisasi	Status			Data Dukung
						Tuntas	Proses	Belum	
Melakukan monitoring secara terus menerus dan memastikan bahwa kriteria dalam keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 74 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi AKIP telah tercantum dalam LMCK/LKIP satuan kerja di lingkungan DJKA yang tidak termasuk dalam sampel evaluasi AKIP Tahun 2025	Evaluasi AKIP Unit Non Sampel	LKE dan LHE	Triwulan IV 2025	Tim Evaluator	Proses evaluasi AKIP untuk unit kerja non sampel diantaranya adalah sebagai berikut : 1. Direktorat Sarana Perkeretaapian 2. Balai Teknis Perkeretaapian Kelas I Jakarta 3. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang Sampai dengan Triwulan III unit kerja evaluatan masih dalam proses melengkapi catatan evaluator		√		

4) Adapaun Dit. Prasarana telah melakukan pengisian aplikasi Aplikasi E-Performance posisi Agustus 2025, untuk September masih dalam tahap pengisian;
5) Pada pengisian e-Sakip Reviu sudah dilakukan upload dokumen rencana aksi progres Agustus 2025;
6) Pada pengisain e-Monev Bappenas ketika akan dilakukan pengisian terdapat error;



7) Terdapat perbedaan data perhitungan fasop handal pada meta perhitungan RPJMN dimana tim Sub Perencanaan menggunakan perhitungan menggunakan data aplikasi Krisna. Akan dilakukan konfirmasi lanjutan apakah perhitungan fasop tersebut bisa disesuaikan atau top-down, seharusnya perhitungan Tim Perencanaan bisa mengikuti perhitungan dari Dit. Prasarana. Perbedaan ini berdampak pada perhitungan target;
8) Usulan revisi pembayaran IMO Tahun 2023 setelah dikoordinasi ke Bagkeu Setditjen Perkeretaapian pada Surat 3 Oktober tidak termasuk Dit. Prasarana. Perlu dilakukan pengecekan ulang apakah untuk revisinya sudah diakomodir atau belum karena berdampak pada NKA. Info Bagian

Keuangan Dit. Prasarna masih dalam perhitungan usulan pembayaran *backlog* IMO. Akan dilakukan konfirmasi lebih lanjut dengan Bagkeu Setditjen;

9) Pada IKK NKA untuk mencapai target tidak mungkinkan karena perencanaan berdasarkan penetapan target kinerja tahun 2025 sebesar 85,76 dengan pagu Rp458.735.773.000,00 sampai dengan akhir desember tahun 2025 penyerapan dan capaian RO serta deviasi hal III DIPA tidak sesuai dengan target dikarenakan TA 2025 terdapat efisiensi sebesar Rp. 347.890.429.000,00 dan belum terdapat kebijakan pelepasan pagu atau tidak ada perubahan pagu sehingga nilai perencanaan anggaran dan nilai pelaksanaan anggaran akan mengalami anomali.

   Tindak lanjut yang akan dilakukan diantaranya:

   a) Akan dilakukan revisi halaman III DIPA dan revisi DIPA buka blokir untuk kegiatan SRRL;
   b) Inventarisasi anggaran yang tidak terserap dan koordinasi dengan setditjen untuk usulan buka blokir pembayaran backlog IMO 2023;
   c) Penarikan Uang muka untuk kontraktual kegiatan jasa konsultan manajemen IMO dan uang muka RDC.

10) Untuk IKK NKA masih ada CRO-CRO yang tidak terlaksana karena blokir anggaran. Akan dilaksanakan diskusi dengan Narasumber DJA pada rapat berikutnya untuk mengetahui apakah ada kebijakan terbaru. Ditunggu sampai dengan tanggal 15 Oktober 2025 apakah sudah ada update dari aplikasi atau belum terkait pengisian yang telah dilakukan di SAKTI dan aplikasi dari Monev Kemenkeu;

11) Untuk sistem persinyalan sertifikasinya per sistem persinyalan (*interlocking*). Biasanya ada *interlocking* yang lebih dari satu stasiun sehingga memiliki 2 sertifikat persinyalan sehingga sertifikasi per *interlocking;*

12) Untuk rekomendasi tindak lanjut evaluasi AKIP poin merupakan tugasnya Setditjen dan Tim Evaluator SAKIP karena yang melakukan monitoring. Apabila akan disampaikan mungkin bisa diberikan keterangan bahwa Dit. Prasarana sebagai Evaluator tingkat Eselon I;

13) Pada IKK TQI sudah ada peningkatan, harapannya dapat dipenuhi pada Triwulan IV;

14) Pada IKK Fasop akan bersurat kepada BTP Palembang untuk penugasan monitoring perawatan Fasilitas Operasi pada lintas Prabumulih – Simpang sehingga kemungkinan apabila kajian sudah selesai pada Oktober-November maka izin pembangunannya bisa terbit;

15) Pada IKK IKM telah dilakukan penyelesaian layanan perizinan dan sertifikasi dari Juli sampai dengan September sebagai berikut:

a) Subdit 1 : 4 Pemohon *Crossing;*
b) Subdit 2 : Proses penyelesaian;
c) Subdit 3 : 0 Pemohon Crossing;
d) Subdit 4 : 12 Pemohon Crossing, 3 Pemohon Sertifikasi;
e) Subdit 5 : 2 Pemohon Crossing, 8 Pemohon Sertifikasi;

Kedepannya akan menggunakan sistem (*launching*), agar dibuat *inline* terkait rencana penanganan dan identifikasi risiko yang dilakukan;

16) Pada IKK Manajemen Risiko menggunakan progres Triwulan IV menunggu surat terbaru dari Itjen.

e. Balai Teknik Kelas I Surabaya

1) Capaian Kinerja Balai Teknik Kelas I Surabaya Triwulan III 2025

No	IKK	Target TW III 2025	Realisasi TW III 2025	Capaian Kinerja TW III
1	Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	0,375	0,375	100%
2	Persentase Pengoperasian Jalur Kereta Api Yang Sesuai Dengan TQI kategori I dan II diwilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	98,10	97,16	99,04%
3	Persentase Fasilitas Operasi Dengan Teknologi Handal di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	37,90	37,90	100%
4	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	14,41	15,95	110%
5	Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang	10,00	525,42	110%

No	IKK	Target TW III 2025	Realisasi TW III 2025	Capaian Kinerja TW III
6	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	100,00	100,00	100%
7	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	-	83,50	100,12%
8	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	-	-	-
9	Nilai Kinerja Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	60,75	47,01	77,38%
10	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	-	9.521.738.500	100%
11	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	-	-	-

2) Dari 11 IKK yang ada, terdapat 2 IKK yang tidak tercapai yaitu IKK 2 TQI dan IKK 9 NKA.
3) Pada IKK 2 Presentase TQI masih belum bisa terpenuhi karena blokir efisiensi anggaran pada kegiatan Peningkatan Jembatan 2 Unit Jembatan BH 291 Km 196+828 antara Stasiun Mangli-Stasiun Jember dan BH 262 Km 61+883 antara Stasiun Kalisetail-Stasiun Temuguruh dan juga pada kegiatan Penyusunan RKL/RPL Wonokromo – Sepanjang.
4) Pada IKK 9 NKA, untuk kontrak IMO tidak bisa terlaksana karena belum berkontrak. Pencapaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya mengacu pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 dengan perhitungannya merupakan penjumlahan dari 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran, yang nilainya dapat diperoleh pada Dashboard Aplikasi Monev Kemenkeu. NK Perencanaan Anggaran 5,77, NK Pelaksanaan Anggaran 88,25. Capaian dalam 9 bulan 77,38 % dan Penyerapan per 30 September sebesar 18,18% Rp 89.744.947.315.

5) Dengan penyusunan RKA 2026 yang sedang berproses, diharapkan penggunaan SBKK maupun SBKU bisa lebih dioptimalkan.
6) Pada IKK MR memang masih belum ada nilai, oleh karenanya akan segera dimintakan surat hasil penilaian kepada Itjen.
7) Pada IKK Arsip masih berproses dengan nilai sementara, namun diharapkan bisa dioptimalkan.
8) Terkait IKK Rasio Konektivitas dan sebagainya akan dibahas pada rapat pembahasan penyempurnaan Renstra sehingga nantinya menjadi acuan Revisi PK.
9) Pada IKK Rasio Konektivitas sudah dilakukan perubahan rumus Rasio Konektivitas sesuai dengan Surat Sesditjen Perkeretapian Nomor PR.205/3/12/K1/DJKA/2025 tanggal 18 September 2025 perlu dilakukan penyesuaian IKK 1 sebagaimana rumus disamping serta dengan menambahkan Rasio Konektivitas yang ada diwilayah BPKASS sehingga perhitunganya sebagai berikut:

RK_{AW} = RK_{AW} BTP SBY + RK_{AW} BPKASS
= 12 + 4 / 33+17
= 16/50
= 0,320

RK_{PKA} = RK_{PKA} BTP SBY + RK_{PKA} BPKASS
= 84.228 +1.632 / 99.645 +2.172
= 85.860/101.817
= 0,843

Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian $(RK_{KA}) = \left(\frac{RK_{AW} + RK_{PKA}}{2}\right)$

Keterangan:
- RK_{AW} = Rasio simpul antar wilayah yang terhubung jaringan kereta api (sama dengan rumusan saat ini);
- RK_{PKA} = Rasio realisasi perjalanan kereta api baik penumpang maupun barang terhadap program perjalanan kereta api yang ditetapkan pada Grafik Perjalanan Kereta.

Sehingga simulasi Rasio Konektivitas BTP Surabaya = (RKAW + RKPKA)/2 = (0,320 + 0,843)/2 = 0,581.

10) Perhitungan Rasio Konektivitas ini akan menjadi acuan dalam penyempurnaan Renstra, sehingga akan diusulkan terlebih dahulu terkait dengan Penetapan Renstra dan revisi PK Selanjutnya. Posisi saat ini Renstra Kemenhub sudah tidak bisa berubah, namun apabila memungkinkan akan tetap diusulkan pada Renstra Ditjen Perkeretaapian ke bawah (Eselon I dan Balai) dan didiskusikan dengan tim Renstra.

f. Balai Pengujian Perkeretaapian
1) Capaian Kinerja Balai Pengujian Perkeretaapian Triwulan III 2025

No	IKK	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian	14,685	15,232	104,34
2.	Persentase Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian	14,244	15,433	108,35
3.	Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	12,573	19,839	157,79
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian	3,860	3,840	99,48
5.	Nilai AKIP Balai Pengujian Perkeretaapian	-	82,150	-
6.	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Pengujian Perkeretaapian	-	-	-
7.	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian	76,700	51,240	66,81
8.	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Pengujian Perkeretaapian	70,750	76,827	108,59
9.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Pengujian Perkeretaapian	-	-	-

2) Terkait IKK NKA, nilai CRO masih rendah dan realisasi anggaran masih 0 hal ini agar dikomunikasikan kembali dengan satker.
3) Persentase kelulusan pengujian SDM pengujian SDM cukup tinggi sehingga seharusnya capaian sertifikasi SDM pada Direktorat Keselamatan juga cukup tinggi.
4) Mengingat masih rendahnya pengisian kuesioner IKM di Direktorat Keselamatan, jika dimungkinkan pada saat pengujian bisa disampaikan link untuk pengisian kuesioner Balai Pengujian dan Direktorat Keselamatan.
5) Rekomendasi revisi target PK agar disampaikan pada laporan kinerja.

g. Balai Teknik Perkerkeretaapian Kelas I Medan

1) Capaian Kinerja BTP Medan Triwulan III 2025

No	IKK	Target	Realisasi	Capaian
1.	Rasio konektivitas wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	0,5	0,5	100%
2.	Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	95,3	94,48	99,12%
3.	Persentase Fasilitas Operasi dengan Teknologi Handal di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	55,35	55,35	100%
4.	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	14,4	Belum diperoleh capaian	
5.	Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api Perintis di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	100	100	100%

No	IKK	Target	Realisasi	Capaian
6.	Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang	10	-	-
7.	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	100	100	100
8.	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian	80,4	-	-
9.	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Teknik Perkeretaapian	15	-	-
10.	Nilai Kinerja Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian	60,75	-	-
11.	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian	100	100	100
12.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Teknik Perkeretaapian	-	-	-

2) Terdapat penambahan PNBP sebesar 1,9 M yang bersumber dari pengembalian perintis sehingga capaian pada triwulan III sebesar 400% terkait hal ini agar diperiksa capaian tahunan dari IKK PNBP jika sudah melampaui target tahunan agar dilakukan revisi PK.
3) Terkait kendala hukum dalam pembangunan Stasiun Sunggal sudah clear dan saat ini sedang dalam proses pembentukan tim terpadu dengan Pemerintah Kabupaten Deliserdang.
4) Kendala Pembangunan Stasiun Helvetia yaitu penertiban lahan, belum sinkronnya pembangunan dengan rencana pembangunan tata ruang Pemda setempat, permasalahan hukum masih menunggu surat dari pengadilan yang menjelaskan bahwa pekerjaan ini tidak terlibat kasus hukum.
5) Terkait nilai evaluasi SAKIP sudah final tapi akan dikoordinasikan kembali jika ada nilai yang dapat ditingkatkan.
6) Hasil Evaluasi triwulanan agar diperiksa dan dijadikan acuan terhadap penyusunan LMCK Triwulan III 2025.
7) Terkait dengan IKK Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional agar disesuaikan pada sasaran pelayanan.

h. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang

1) Capaian Kinerja BTP Palembang Triwulan III 2025

No	IKK	Target	Realisasi	Capaian
1.	Rasio konektivitas wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	0,71	0,71	100%
2.	Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan	93,03%	93,73%	100,75%

No	IKK	Target	Realisasi	Capaian
	II di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian			
3.	Persentase Fasilitas Operasi dengan Teknologi Handal di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	27,71%	28,91%	104,33%
4.	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	13,61 %	14,01 %	102,96 %
5.	Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api Perintis di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian			
6.	Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang	10%	-	-
7.	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	100	86,476	86,476
8.	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian	-	-	-
9.	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Teknik Perkeretaapian	-	-	-
10.	Nilai Kinerja Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian	60	45,91	56,679%
11.	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian	100	100	100
12.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Teknik Perkeretaapian	-	-	-

2) Terkait perhitungan rasio konektivitas masih menggunakan perhitungan lama dan perhitungan terbaru masih menunggu konfirmasi oleh tim Renstra apakah dapat digunakan. Tindak lanjut terhadap rekomendasi Inspektorat Jenderal berupa pembahasan dengan Setditjen Perkeretaapian.
3) Terkait dengan rasio konektivitas, Inspketorat Jenderal pernah menanyakan KA Kertalaya yang saat ini tidak beroperasi dikarenakan permasalahan sarana namun masih dihitung sebagai capaian konektivitas walaupun tidak terhubung secara layanan. Terkait hal ini, BTP Palembang agar dapat menyampaikan tindak lanjut
4) Pada tahun 2025 terdapat target penambahan Fasop Elektrik di Stasiun Lahat yang merupakan pengembangan dari PT KAI. Saat ini belum dihitung dikarenakan belum dikeluarkan sertifikasi.
5) Upaya peningkatan TQI, pada saat rapat kontrak bahwa peningkatan difokuskan pada kategori III dan IV.

6) Terkait dengan kejadian di Way Kanan, dikategorikan sebagai kejadian kecelakaan KA dikarenakan kejadian anjlokan tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal dan terjadi di tengah hutan.
7) Upaya peningkatan agar dapat didetailkan kembali seperti upaya mendorong peningkatan kinerja, misal rapat koordinasi dan lain-lain.

i. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang

1) Capaian Kinerja BTP Semarang Triwulan III 2025

No	IKK	Target	Realisasi	Capaian
1.	Rasio konektivitas wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	0,750	0,750	100,00%
2.	Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	99,073	98,993	99,92%
3.	Persentase Fasilitas Operasi dengan Teknologi Handal di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	87,500	87,500	100,00%
4.	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	13,757	14,451	105,04%
5.	Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api Perintis di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	74,795	74,795	100,00%
6.	Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang	-	-	-
7.	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	100,000	100,000	100,00%
8.	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian	-	82,000	100,00%
9.	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Teknik Perkeretaapian	-	10,000	66,67%
10.	Nilai Kinerja Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian	50,000	43,086	86,17%
11.	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian	99,409	98,924	99,51%
12.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Teknik Perkeretaapian	-	-	-

2) Terkait dengan nilai MR perlu dipastikan apakah Inspektorat Jenderal mengeluarkan nilai evaluasi pada awal tahun atau pada dua nilai yang dilaksanakan pada pertengahan tahun;
3) Terdapat beberapa catatan pada hasil evaluasi penerapan Manajemen Risiko, yaitu:
   - Dalam penyusunan risiko masih mengacu berdasarkan KRO/RO sehingga belum sesuai dengan PM 69 Tahun 2023;
   - Implementasi Penanganan Risiko belum disertai dokumentasi;

- Waktu penanganan risiko tidak detail;
- Tidak ada tusi MR pada SKP Pegawai;

Rekomendasi di atas seharusnya sudah bisa dipenuhi dengan peneraparan MR tahun 2025.

4) Penggantian SKP dapat dilakukan pada saat adanya perubahan pimpinan baik Kabalai, Kasie maupun KTU. Bisa dilakukan secara parsial ke pegawai yang terdapat perubahan pimpinan;
5) Terkait dengan data realisasi TQI mengikuti kebijakan dari Direktorat Prasarana agar dikonfirmasi paling lambat 10 Oktober 2025.

j. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang

1) Capaian Kinerja BTP Padang Triwulan III 2025

No	IKK	Target	Realisasi	Capaian
1.	Rasio konektivitas wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	0,50	0,50	100,00
2.	Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	84,42	84,34	99,91
3.	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	13,46	13,24	98,36
4.	Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api Perintis di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	74,79	74,79	100,00
5.	Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang	-	-	-
6.	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	100	100	100,00
7.	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian	-	-	-
8.	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Teknik Perkeretaapian	-	-	-
9.	Nilai Kinerja Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian	50,00	50,80	101,60
10.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Teknik Perkeretaapian	-	-	-
11.	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian	100	198	198

2) Terdapat penambahan realisasi PNBP yang bersumber dari penambahan hasil lelang;
3) Titik konektivitas pada Sawah Lunto diharapkan agar tetap dipantau terkait pemenuhan sertifikasinya;
4) Analisis/ pembahasan yang sudah dituangkan dalam IKK Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada

Perlintasan Sebidang tidak perlu dibahas pada IKK Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian;

5) Tidak ada kejadian kecelakaan pada tahun 2025;
6) Nilai SAKIP agar bisa difinalisasi dengan evaluator pada minggu depan ;
7) Penambahan indikator Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang salah satunya untuk memenuhi amanah pada RPJMN agar dimasukkan sebagai indikator kinerja. Saat ini gangguan operasional secara keseluruhan belum terakomodir pada pelaporan kinerja dan jika melihat pelaporan tugas dan fungsi balai data OTP dapat terpenuhi sehingga diwacanakan untuk penambahan OTP sebagai IKK BTP/ BPKA.

k. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung

1) Capaian Kinerja BTP Bandung Triwulan III 2025

No	IKK	Target	Realisasi	Capaian
1.	Rasio konektivitas wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	0,55	0,55	100%
2.	Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	88,38	83,501	94%
3.	Persentase Fasilitas Operasi dengan Teknologi Handal di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	70,65	70,65	100%
4.	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	7,48	7,112	95%
5.	Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang			
6.	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	100	100	100%
7.	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian			
8.	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Teknik Perkeretaapian			
9.	Nilai Kinerja Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian	44,775	38,76	87%
10.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Teknik Perkeretaapian			

2) Terdapat penurunan realisasi angkutan penumpang terkait hal ini akan dikoordinasikan pada Seksi terkait;
3) Perbedaan batas wilayah kerja BTP Bandung ada pada Km 220-287;
4) Terkait dengan NKA dapat dilakukan update target output (revisi) pada aplikasi SAKTI sehingga realisasinya juga meningkat.

l. Balai Perawatan KA

1) Capaian Kinerja Balai Perawatan KA Triwulan III 2025

No	IKK	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Sarana Perkeretaapian Milik Negara Siap Operasi	100	98,53	98,53
2.	Presentase Pemanfaatan Aset Perkeretaapian Milik Negara	85	85,16	100,19
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Perawatan Perkeretaapian	-	-	-
4.	Nilai AKIP Balai Perawatan Perkeretaapian	-	-	-
5.	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Perawatan Perkeretaapian	-	-	-
6.	Nilai Kinerja Anggaran Balai Perawatan Perkeretaapian	69,860	53,52	99,94
7.	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Perawatan Perkeretaapian	99,712	101,47	111,86
8.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Perawatan Perkeretaapian	-	80	-

2) Terkait pelaksanaan survey dari tim humas sudah menyusun konsep kuesioner namun saat ini belum diimplementasikan. Penyusunan dapat dilakukan benchmarking dengan BPKA Sulawesi Selatan ataupun BPKAR Sumatera Selatan.

m. BPKAR Sumatera Selatan

1) Capaian Kinerja BPKAR Sumatera Selatan Triwulan III 2025

No	IKK	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	14,01	14,59	106,71
2.	Persentase Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Kereta Api Ringan Sumatera Selatan Tepat Waktu	99	99,85	100,86
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	3,58	3,58	100
4.	Tingkat Keselamatan Transportasi Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	100	100	100
5.	Nilai AKIP Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	-	-	-
6.	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	-	-	-
7.	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	60,75	67,36	110,86
8.	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	65,39	75,33	115,20

No	IKK	Target	Realisasi	Capaian
9.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	-	-	-

2) Terkait dengan analisis terhadap tingkat keselamatan agar dapat dipilah kembali untuk hal-hal yang secara langsung berdampak pada keselamatan.

n. BPKA Sulawesi Selatan

1) Capaian Kinerja BPKA Sulawesi Selatan Triwulan III 2025

No	IKK	Target	Realisasi	Capaian
1.	Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	0,24	0,24	100%
2.	Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II di Wilayah Balai Kereta Api Sulawesi Selatan	99	99	100%
3.	Persentase Fasilitas Operasi dengan Teknologi Handal di Wilayah Balai Kereta Api Sulawesi Selatan	100	100	100%
4.	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	12	12	100%
5.	Persentase Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api di Wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan Tepat Waktu	96,45	96.13	99.67%
6.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	3,23	3,36	104%
7.	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	100	100	100%
8.	Nilai AKIP Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	-	(80,35) nilai sementara	-
9.	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan	-	-	-
10.	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan	52	46.22	89%
11.	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan	75	93	124%
12.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan	-	72,14 (Nilai sementara)	-

2) Survey IKM masih dilakukan secara swakelola dengan pengisian google form pada barcode yang ditempel di stasiun;

3) Reservasi tiket saat ini dilakukan menggunakan googleform.

o. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta

1) Capaian Kinerja BTP Jakarta Triwulan III 2025

No	IKK	Target	Realisasi	Capaian
1.	Rasio konektivitas wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	0,55	0,55	100%
2.	Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	88,38	83,501	94%
3.	Persentase Fasilitas Operasi dengan Teknologi Handal di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	70,65	70,65	100%
4.	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	7,48	7,112	95%
5.	Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang			
6.	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	100	100	100%
7.	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian			
8.	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Teknik Perkeretaapian			
9.	Nilai Kinerja Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian	44,775	38,76	87%
10.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Teknik Perkeretaapian			

2) Terkait dengan angkutan tidak tercapai karena rendahnya realisasi angkutan barang, hal ini diharapkan dapat dikoordinasikan dengan antar btob. Terkait dengan angkutan barang memang masih menjadi kendala dikarenakan sistemnya btob dan terkadang kontrak berhenti ditengah jalan;

3) Kegiatan Peningkatan Stasiun Tanah Abang saat ini sudah selesai 100% dan Kegiatan Rangkasbitung pada akhir tahun 100%. Elektrifikasi ada kemungkinan penambahan pekerjaan LAA Bogor dengan justifikasi adanya sisa anggaran;

4) Terkait dengan Evaluasi SAKIP agar dapat diselesaikan pada minggu depan;

5) Pada pelaporan periodik BTP Jakarta perlu ditambahkan kejadian/ peristiwa penting pada badan laporan tidak hanya pada lampiran.

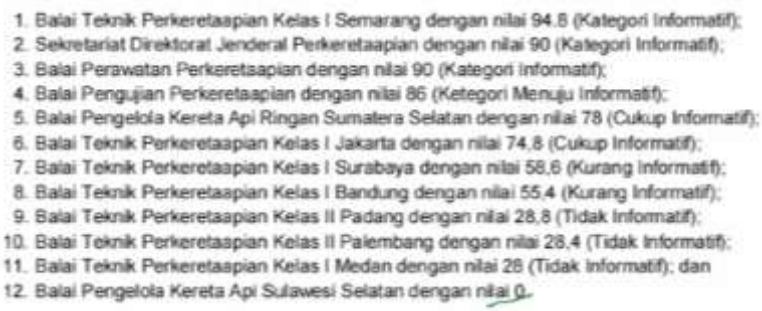
p. Setditjen Perkeretaapian

1) Capaian Kinerja Setditjen Perkeretaapian Triwulan III 2025

No	IKK	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase pencapaian target regulasi/legislasi (Jumlah rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian	40	0	0
2.	Indeks Profesional ASN	-	-	-
3.	Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	-	-	-
4.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perkeretaapian	-	-	-
5.	Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian	-	-	-
6.	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian	-	-	-
7.	Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	80,610	Akan disampaikan	-
8.	Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	50,000	47,27	94,54
9.	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian	20,000	5,42	27,10
10.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian	-	-	-
11.	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	3,890	Proses Survey	-

2) Nilai IPASN saat ini yaitu 85,18 dan nilai akan difinalisasi pada akhir tahun 2025;
3) Beberapa hal yang sudah dilakukan guna meningkatkan nilai IPASN yaitu
   - Penyampaian surat kepada seluruh unit kerja.
   - Sinkronisasi data diklat dengan data di SIK.
   - Mendorong pegawai untuk mengikuti Diklat.
4) Kendala yang dihadapi dalam peningkatan nilai IPASN yaitu:
   - Data pegawai yang sudah tidak aktif namun masih masuk dalam daftar pegawai sehingga nilainya 0;
   - Kendala yang ada saat ini yaitu saat dicoba sinkronisasi SIK ada beberapa error yang sudah disampaikan ke Pusdatin namun belum ada tindaklanjut. Error pada sisi BKN. Solusi terakhir admin menginput secara manual pada aplikasi SIK;
   - Untuk pegawai JFT Data Diklat yang dilaksanakan pada tahun 2022-2024 masih bisa dihitung namun jika sudah naik jenjang diperlukan Diklat kembali.
5) BKN akan menyampaikan nilai IPASN Kementerian Perhubungan dan untuk nilai Eselon I akan diolah oleh Biro SDMO;

6) Direkomendasikan penyusunan surat himbauan/teguran kepada pegawai-pegawai yang belum melakukan penerimaan penilaian;
7) Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian, sudah dilakukan koordinasi dengan Pusdatin dan digunakan penilaian tahun 2024. Jika ada surat penyampaian dari Pusdatin/Kemen PANRB agar dapat disampaikan;
8) Perlu dipastikan kepada Pusdatin terkait indikator yang digunakan pada Renstra Sekjend. Disarankan menggunakan indikator minimalis dengan 4 skala;
9) Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perkeretaapian masih terdapat kendala yaitu surat yang menyatakan permohonan informasi *case closed* dari KIP namun untuk surat tersebut belum disampaikan;
10) Penilaian KIP dan penyampaian surat dilakukan oleh Biro KIP. Penilaian dilaksanakan pada Oktober – November 2025;
11) Nilai Keterbukaan Informasi Publik pada Tahun 2024


1. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang dengan nilai 94,8 (Kategori Informatif);
2. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan nilai 90 (Kategori Informatif);
3. Balai Perawatan Perkeretaapian dengan nilai 90 (Kategori Informatif);
4. Balai Pengujian Perkeretaapian dengan nilai 86 (Ketegori Menuju Informatif);
5. Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan dengan nilai 78 (Cukup Informatif);
6. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta dengan nilai 74,8 (Cukup Informatif);
7. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya dengan nilai 58,6 (Kurang Informatif);
8. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung dengan nilai 55,4 (Kurang Informatif);
9. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang dengan nilai 28,8 (Tidak Informatif);
10. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang dengan nilai 28,4 (Tidak Informatif);
11. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan dengan nilai 28 (Tidak Informatif); dan
12. Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan dengan nilai 0.

12) Pada IKK Persentase pencapaian target regulasi/legislasi (Jumlah rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian terkait Revisi PM 121 Tahun 2017 tentang Lalu Lintas Kereta Api sudah dilaksanakan harmonisasi namun dari Menteri dikembalikan ke Dirjen Perkeretaapian untuk dijelaskan langsung kepada Menteri Perhubungan. Masih terdapat beberapa regulasi yang prosesnya masih di internal Ditjen Perkeretaapian. Pada tahun 2025 terdapat 8 regulasi yang masih menunggu pengundangan;
13) IKK Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor (audit kinerja dan ADTT) realisasi per agustus sebesar 85,32%. Untuk nilai per September hari senin akan disampaikan dari Inspektorat Jenderal;

14) Kendala pada IKK Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor yaitu data dukung yang disampaikan oleh audite belum sesuai dan tindak lanjut memerlukan waktu yang lama (sertifikasi tanah, revisi regulasi);
15) IKK Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian saat ini masih terdapat 21 permohonan yang telah diajukan dan masih terdapat 12 pemohonan yang berproses di KPKNL yang jumlah PNBPnya belum diketahui dikarenakan penilaian dilakukan oleh KPKNL;
16) Proses di KPKNL lama dikarenakan banyaknya antrian, tidak kendala dari Ditjen Perkeretaapian. Realisasi PNBP paling lama 1,5 bulan dari tiket diterbitkan oleh KPKNL. Minggu depan direncana penilaian dari PT Vopak dengan nilai sekitar 1,5M;
17) Rencana PNBP dari PT Asianet terdapat kendala dikarenakan adanya kesalahan pada penulisan lokasi km;
18) PNBP sewa menjadi capaian Setditjen Perkeretaapian sedangkan untuk perizinan PNBP ada di Direktorat Prasarana;
19) IKK Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian sudah ada beberapa balai yang mendapatkan nilai sementara. Pada bulan November laporan LAKI untuk tingkat balai, untuk eselon II belum mendapatkan hasil. Bisa disampaikan terkait sosialisasi SRIKANDI;
20) Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran, realisasi di triwulan III berupa kegiatan rutin. Peningkatan kinerja IKK masih menunggu arahan pimpinan;
21) Pada Triwulan III dilakukan pengadaan kendaraan listrik, renovasi ruang rapat di lantai 14, pelaksanaan Diklat P3K dan pelaksanaan sidak P4GN. Pada Triwulan IV direncanakan pengadaan laptop;
22) IKK Nilai Kinerja Anggaran saat ini sebesar 47,27;
23) Terkait dengan IKK NKA bisa ditambahkan hasil rapat pimpinan.

9. Bahan paparan masing-masing unit kerja dapat diakses pada tautan https://l1nk.dev/o3pyP

D. KESIMPULAN

1. Pada evaluasi sakip target yang diharapkan bisa mendapatkan Nilai A, disarankan apabila tidak bisa tercapai maka nilainya bisa lebih tinggi dari tahun lalu. Namun tetap nilai akhir yang digunakan mengacu dari penilaian Itjen.
2. Pada proses penialaian evaluasi AKIP, terdapat *error system* yang ditemukenali yaitu ketika nama file terdapat spasi menyebabkan beberapa file secara sistem ditolak. Beberapa data masih ada kendala karena file data dukungnya tidak bisa dibuka akibat error spasi pada penamaan file. Saat ini dalam proses perbaikan sistem. Batas waktu penilaian evaluasi AKIP diharapkan bisa terpenuhi paling lambat akhir Oktober 2025.
3. Pemenuhan rencana aksi dan tindak lanjut rekomendasi ini paling lambat diajukan pada 17 October 2025. Link Tindaklanjut Rekomendasi Evaluasi AKIP Tahun 2025 dapat diakses pada link berikut https://drive.google.com/drive/folders/1fQbBlotzl1RxPj_gqKYA3XxA6librxCz?usp=sharing
4. Masing-masing unit kerja non-sample agar segera berkoordinasi dan menindaklanjuti catatan hasil evaluator agar nilai dapat segera difinalisasi.
5. Masing-masing unit kerja agar melakukan pengisian aplikasi kinerja (e-performance, e-sakip reviu, e-monev bappenas dan SILAKI).
6. Telah dilakukan pembahasan capaian kinerja masing-masing unit kerja Ditjen Perkeretaapian periode Triwulan III 2025.
7. Masing-masing unit kerja agar menyusun laporan monitoring capaian kinerja memperhatikan hasil Evaluasi Kinerja Berdasarkan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan II Tahun 2025.

E. PENUTUP

Demikian laporan ini buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 9 Oktober 2025
Notulensi



(Tim Notulensi)



